



# **PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

## **PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 26 TAHUN 2017**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD) TAHUN 2018**

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2.Dasar Hukum Penyusunan .....	7
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	8
1.3.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan .....	8
1.4 Sistematika Dokumen RKPD .....	9
1.5 Maksud dan Tujuan .....	10
<b>BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b> .....	<b>11</b>
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	11
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	11
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi .....	11
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis .....	14
2.1.1.2.1 Posisi Astronomis .....	14
2.1.1.2.2 Posisi Geogstrategis.....	14
2.1.1.2.3 Kondisi Kawasan .....	15
2.1.1.2.4 Topografi.....	15
2.1.1.2.5 Geologi.....	17
2.1.1.2.6 Hidrologi .....	18
2.1.1.2.7 Daerah Aliran Sungai .....	18
2.1.1.2.8 Sungai,Danau,dan rawa .....	19
2.1.1.2.9 Debit Air.....	19
2.1.1.3. Klimatologi.....	19
2.1.1.4. Penggunaan Lahan.....	20
2.1.1.4.1. Penggunaan Lahan Sektor Pertanian.....	21
2.1.1.3.1. Penggunaan Lahan Sektor Kehutanan .....	24
2.1.1.3.2. Penggunaan Lahan Sektor Pertambangan .....	25
2.1.1.3.3. Penggunaan Lahan Sektor Pariwisata .....	25
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.....	25
2.1.3. Kawasan Rawan Bencana.....	26
2.1.4. Demografi.....	26
2.1.4.1. Jumlah Penduduk .....	26
2.1.4.2. Struktur Penduduk .....	27
2.1.4.3. Distribusi Penduduk .....	29
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	31
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	31

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	36
2.2.2.1. Pendidikan .....	36
2.2.2.2. Kesehatan .....	41
2.2.2.3. Pertanahan .....	44
2.2.3. Fokus Seni,Budaya dan Olahraga .....	44
2.3. Aspek Pelayanan Umum .....	45
2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....	45
2.3.1.1. Pendidikan .....	45
2.3.1.2. Kesehatan .....	48
2.3.1.3. Pekerjaan Umum .....	51
2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman .....	54
2.3.1.5. Ketentraman,Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat .....	55
2.3.1.6. Sosial .....	56
2.3.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar .....	57
2.3.2.1. Tenaga Kerja .....	57
2.3.2.2. Pendidikan .....	59
2.3.2.3. Pangan .....	61
2.3.2.4. Pertanahan .....	63
2.3.2.5. Lingkungan Hidup .....	63
2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil .....	64
2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	65
2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	65
2.3.2.9. Perhubungan .....	67
2.3.2.10. komunikasi Dan Informasi .....	67
2.3.2.11. Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah .....	68
2.3.2.12. Penanaman Modal .....	68
2.3.2.13. Kepemudaan Dan Olah Raga .....	69
2.3.2.14. Statistik .....	70
2.3.2.15. Kebudayaan .....	70
2.3.2.16. Perpustakaan .....	70
2.3.3. Urusan Pilihan .....	71
2.3.3.1. Pariwisata .....	71
2.3.3.2. Pertanian .....	72
2.3.3.3. Kehutanan .....	80
2.3.3.4. Perdagangan .....	80
2.3.3.5. Perindustrian .....	81
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	82
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	82
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	83
2.4.2.1. Perhubungan.....	83

2.4.2.2. Penataan Ruang .....	86
2.4.2.3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian .....	86
2.4.2.4 Lingkungan Hidup .....	88
2.4.2.5 Komunikasi dan Informatika .....	90
2.4.2. Fokus Iklim Investasi .....	90
2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia .....	92
2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....	100
2.5.1. Urusan Pendidikan .....	114
2.5.2. Urusan Kesehatan .....	114
2.5.3. Urusan Pekerjaan Umum .....	114
2.5.4. Urusan Perumahan .....	115
2.5.5. Urusan Penataan Ruang .....	115
2.5.6. Urusan Perencanaan Pembangunan .....	115
2.5.7. Urusan Perhubungan .....	115
2.5.8. Urusan Lingkungan Hidup .....	115
2.5.9. Urusan Pertanahan .....	116
2.5.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil .....	116
2.5.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .....	116
2.5.13. Urusan Sosial .....	116
2.5.14. Urusan Tenaga Kerja .....	116
2.5.15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .....	117
2.5.16. Urusan Penanaman Modal .....	117
2.5.17. Urusan Kebudayaan .....	117
2.5.18. Urusan Pemuda dan Olah Raga .....	117
2.5.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .....	117
2.5.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian .....	118
2.5.21. Urusan Ketahanan Pangan .....	118
2.5.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa .....	118
2.5.23. Urusan Statistik .....	118
2.5.24. Kearsipan .....	118
2.5.25. Urusan Komunikasi dan Informatika .....	119
2.5.26. Urusan Perpustakaan .....	119
2.5.27. Urusan Pertanian .....	119
2.5.28. Urusan Kehutanan .....	119
2.5.29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral .....	119
2.5.30. Urusan Pariwisata .....	120
2.5.31. Urusan Perdagangan .....	120
2.5.32. Urusan Kelautan dan Perikanan .....	120

2.5.33. Urusan Perindustrian .....	120
2.5.34. Urusan Transmigrasi .....	120
2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah .....	121
2.6.1. Permasalahan Pembangunan Daerah .....	121
2.6.2. Penelaahan Terhadap RKP,dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.....	132
<b>BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	<b>134</b>
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH .....	134
3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro .....	135
3.1.1.1 Pertumbuhan Penduduk .....	144
3.1.1 2. Kondisi Ekonomi Makro .....	144
3.1.2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2018 .....	145
3.1.2.1. Produk Domestik Regional Bruto .....	145
3.1.2.2. Pertumbuhant Ekonomi .....	146
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	147
3.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	148
3.2.1.1. Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016 .....	148
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	151
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	157
3.2.4. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah .....	164
<b>BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>169</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	169
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	169
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah .....	184
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.....</b>	<b>305</b>
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>307</b>

## Lampiran

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005–2025 Kabupaten Paser, selain itu juga berdasarkan RPJMD 2016–2021. Memasuki RPJMD tahun ke-2 dari RPJPD 2005–2025, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Salah satunya pembangunan sarana dan prasarana jalan yang masih belum maksimal dan memadai. Selain itu juga masih besarnya ketergantungan masyarakat terhadap eksplorasi Sumber Daya Alam khususnya bidang kehutanan dan pertambangan yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan sektor lain seperti pertanian dan perkebunan yang sebenarnya berpotensi besar untuk menambah Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang Kabupaten Paser dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Paser berkewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan. Secara umum Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Paser. Pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan. Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Praktek umum perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menempuh beberapa tahap berikut ini : 1) Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah sebelumnya; 2) Menentukan perkiraan-perkiraan potensi-potensi daerah dan prospek-prospek perkembangan terkait keadaan daerah dan masyarakat baik di lingkungan internal dan eksternal; 3) Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan arahan perencanaan pada tahap di atasnya dan 4) Menyusun konsep strategi pemecahan masalah melalui penentuan program dan kegiatan pembangunan.

Perencanaan yang dilaksanakan untuk dasar pembangunan tahunan dituangkan dalam dokumen yang telah diamanatkan oleh tata aturan yang berlaku secara nasional yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1

(satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Secara umum dalam proses pembangunan, RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran. Sementara (PPAS) KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Lebih lanjut RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pemerintah Kabupaten Paser memberikan perhatian dan daya upaya optimal sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini berarti dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan serta memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Karakter RKPD yang berkualitas dimaknai dengan RKPD yang memenuhi kriteria antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sementara itu RKPD disusun melalui proses panjang selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

- a. Perumusan rancangan awal RKPD.

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengolahan data dan informasi.
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Paser
- 7) Perumusan Permasalahan pembangunan Kabupaten Paser.
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan Keuangan Daerah.
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
- 10) Perumusan program prioritas peserta pagu indikatif.
- 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
- 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

- b. Penyajian rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan
- 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.



- 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- 4) Prioritas dan sasaran pembangunan.
- 5) Rencana program prioritas daerah.

### 3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja PD. Verifikasi Renja SKPD sebagaimana dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja PD Kabupaten Paser sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Paser.

### 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya dilakukan penggabungan antara pelaksanaan musrenbang dengan pelaksanaan Forum PD. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama antara Perangkat Daerah, Bappeda Kabupaten Paser. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup :

- a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Paser dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.
- b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Paser pada musrenbang RKPD kecamatan dan atau sebelum musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan.
- c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Paser.
- d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
- e. Sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi.

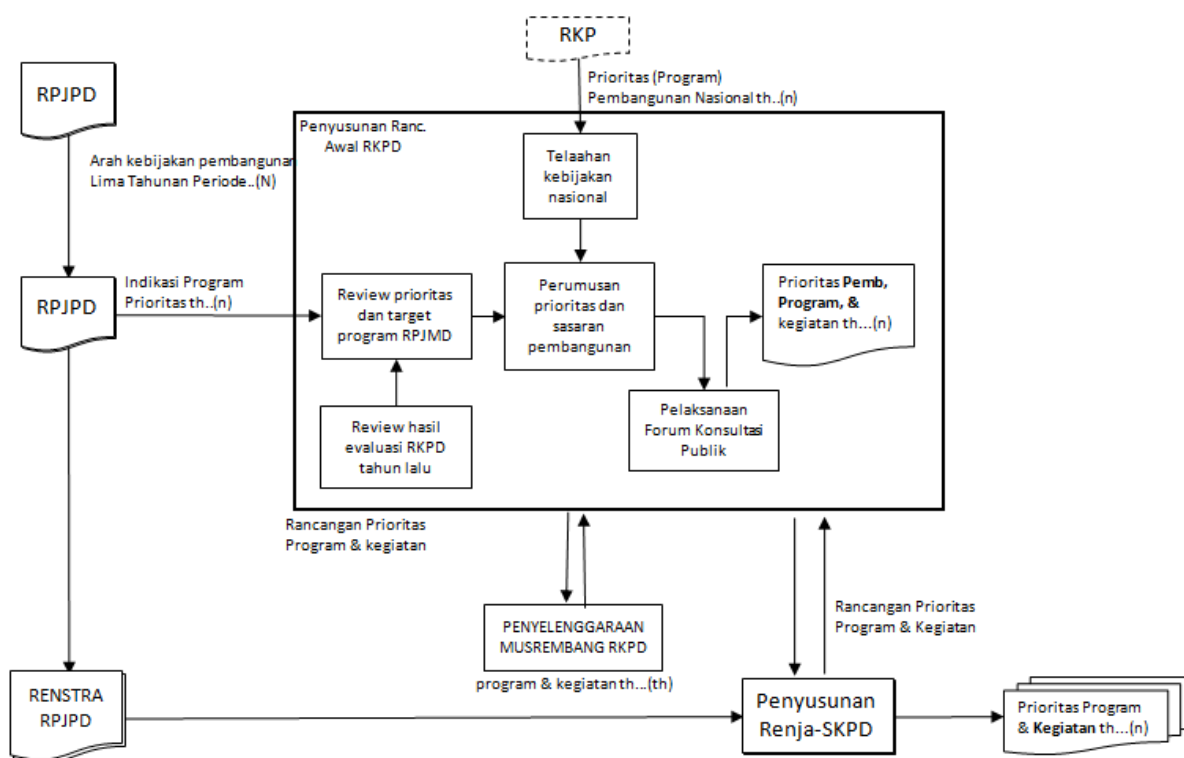
### 5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

### 6. Penetapan RKPD

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah.

Secara umum, tata urutan dalam penyusunan RKPD disajikan dalam diagram alir di gambar berikut ini :



Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

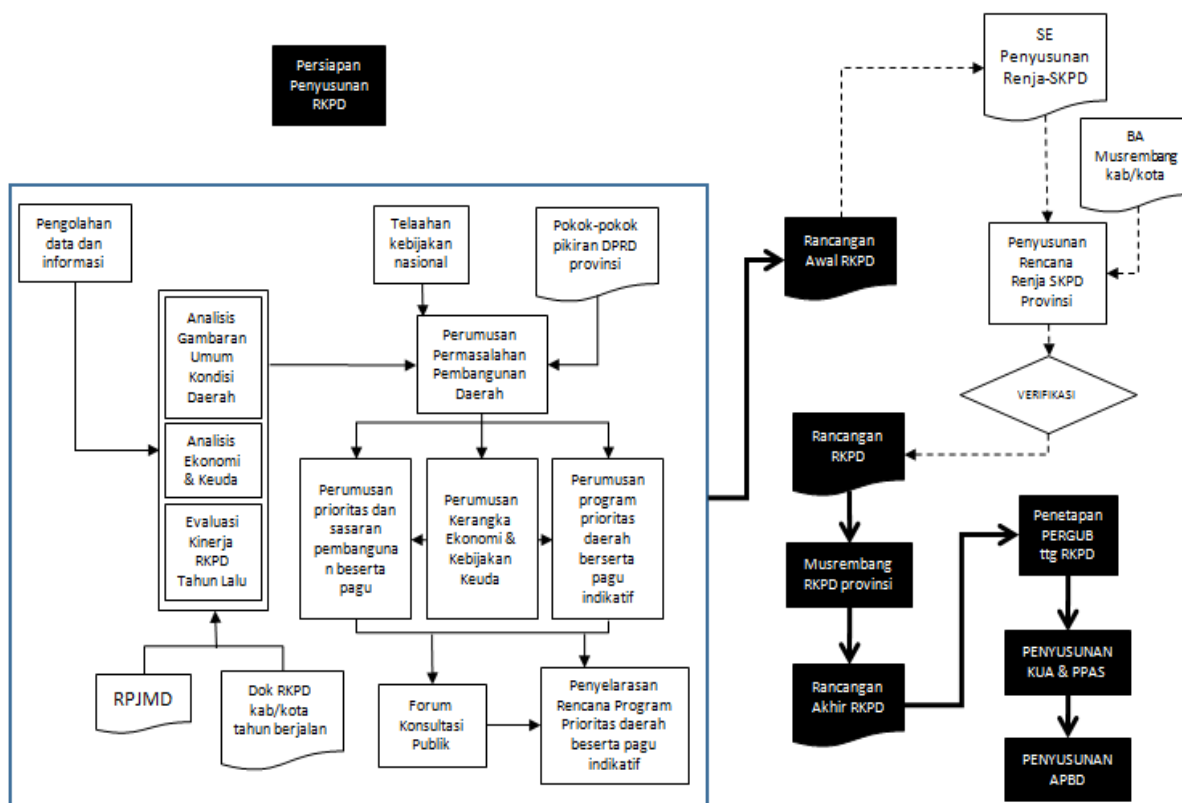
Gambar 1.1 Bagan Alir Perumusan Awal Prioritas dan Program Pembangunan Daerah pada Tahap Penyusunan RKPD

RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengaju pada RPJMN. Berpedoman pada RPJMD dilakukan melalui penyelarasan :

1. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah Kabupaten Paser dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Paser.
2. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah Kabupaten Paser dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Paser.

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah ditingkat kabupaten dengan prioritas pembangunan daerah ditingkat provinsi dan prioritas pembangunan daerah ditingkat nasional dilakukan dengan pengacuan RKP pada RPJMN sesuai dengan tahapan yang terkait. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Diagram alir proses penyusunan RKPD sampai dengan penyusunan APBD disajikan dalam Gambar berikut ini :



Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Gambar : 1.2 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Kabupaten Paser sampai dengan Penyusunan APBD

### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2018 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

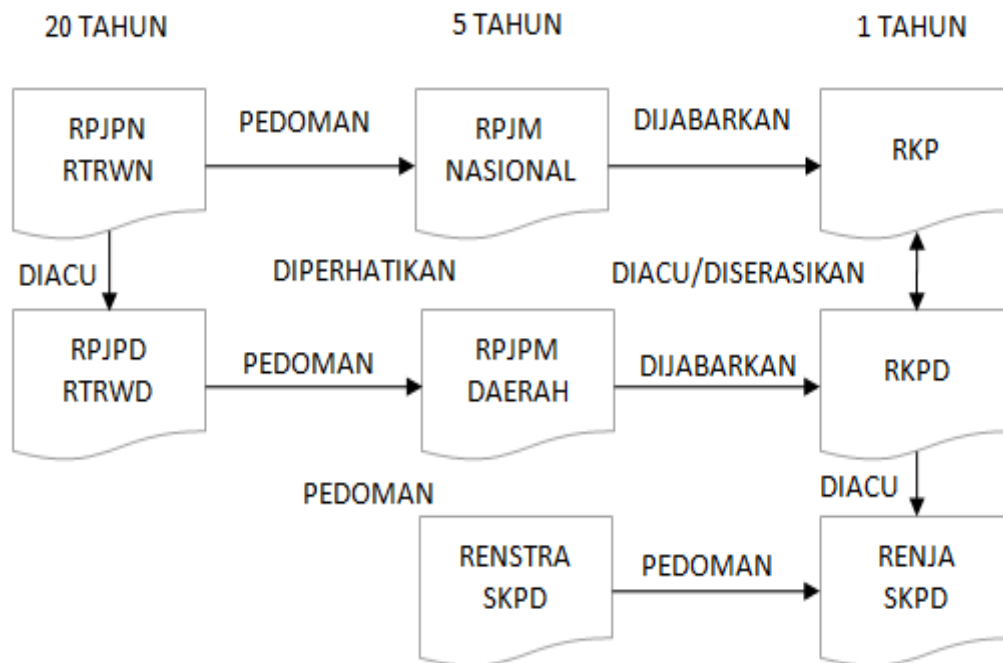
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005 – 2025;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2017.
  20. Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  21. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri Nomor 0008/M.PPN/01/2007; 050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2010;

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

#### **1.3.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD . Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Skema hubungan antara dokumen di tiap tingkat pemerintahan disajikan pada Gambar berikut ini.



Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Gambar 1.3 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan PD

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

### 1.4 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I. Pendahuluan  
Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
2. Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.  
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan Daerah
3. Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

4. Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Memuat Tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2018

5. Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Memuat: rencana program dan kegiatan prioritas instansi pelaksana (PD), indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

6. Bab VI. Penutup

Memuat kesimpulan dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2018.

## 1.5 Maksud dan Tujuan

RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Adapun tujuannya adalah sebagai acuan bagi seluruh Instansi/Kantor/Badan/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Kabupaten Paser dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2018.

## BAB II

# EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran daerah yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah Kabupaten Paser.

#### 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Paser terletak di ujung paling selatan dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur berada pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Kalimantan ini memiliki luas wilayah  $\pm 11.603,94$  Km<sup>2</sup> yang meliputi 10 Kecamatan, 139 Desa dan 5 Kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara
Sebelah Timur Laut	Berbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat)
Sebelah Tenggara	Berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan)
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan)
Sebelah Barat Daya	Berbatasan dengan Kabupaten Balangan (Provinsi Kalimantan Selatan)
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan)
Sebelah Barat Laut	Berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah)

Secara Administratif Kabupaten Paser terdiri dari 10 Kecamatan yang dibagi menjadi 139 Desa dan 5 Kelurahan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel II.1 berikut :



**Tabel II.1.**  
**Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Paser**

<b>Kecamatan</b>	<b>Daratan Km<sup>2</sup></b>	<b>Perairan Km<sup>2</sup></b>	<b>Jumlah Km<sup>2</sup></b>	<b>Persentase %</b>
Pasir Belengkong	836.62	153.49	990,11	8,53
Tanah Grogot	326.95	8.63	335,58	2,89
Batu Engau	1501.61	5.65	1507,26	12,99
Tanjung Harapan	480.40	233.65	714,05	6,15
Muara Samu	855.25	0,00	855.25	7,37
Kuaro	596.76	150.54	747.30	6,44
Batu Sopang	1111.38	0,00	1111.38	9,58
Muara Komam	1753.40	0,00	1753.40	15,11
Long Ikis	1138,37	65.85	1204.22	10,38
Long Kali	2250,44	134.95	2385.39	20,56
<b>Jumlah</b>	<b>10851,18</b>	<b>752.76</b>	<b>11603,94</b>	<b>100,00</b>

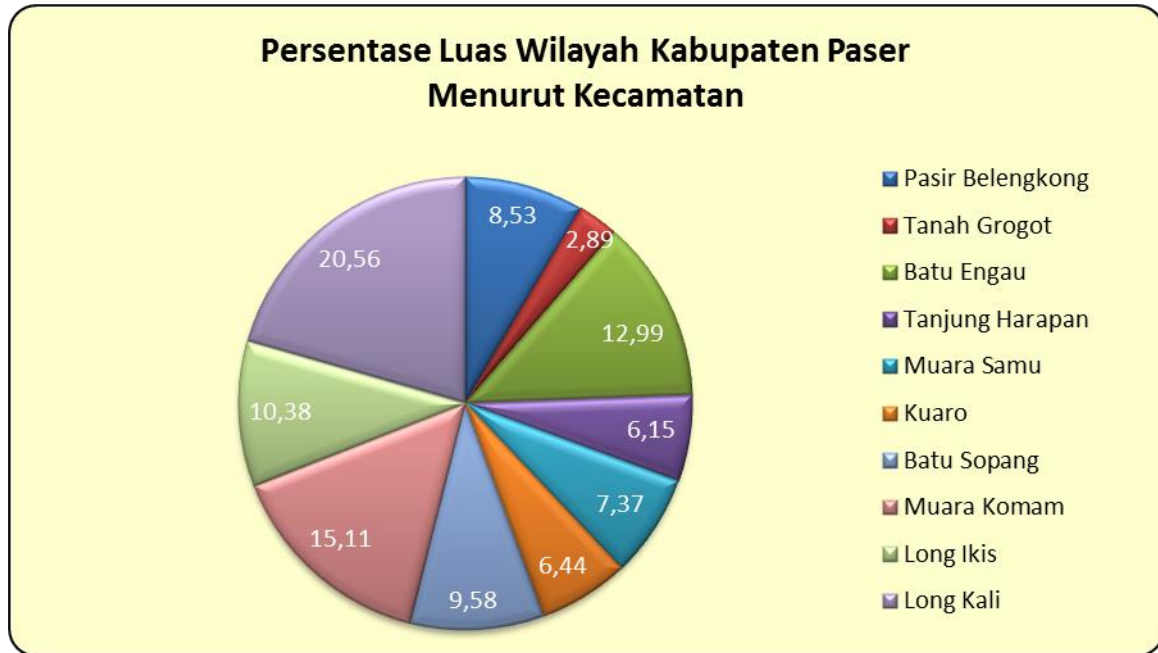
Sumber : Pembangunan Dalam Angka Kabupaten Paser 2016

Berdasarkan data di atas kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah kecamatan Long Kali, yakni sekitar 2.385,39 Km<sup>2</sup> atau 20,56% dari luas Kabupaten Paser, sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot, yaitu sekitar 335,58 Km<sup>2</sup> atau 2,89% dari luas total Kabupaten Paser. Hampir sepertiga lebih lautan berada di Tanjung Harapan, kecamatan yang terletak paling selatan Kabupaten Paser. Secara geografis, Kabupaten Paser sangat diuntungkan karena memiliki karakteristik wilayah daratan dan lautan. Luas wilayah laut sekitar 6.5 % dari daratan, tetapi terhubung langsung dengan selat makassar yang strategis untuk perhubungan kawasan timur Indonesia.



**Diagram II.1**

Persentase Luas Wilayah Kabupaten Paser Menurut Kecamatan



Sumber : Pembangunan Dalam Angka Kabupaten Paser 2016

## 2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

### 2.1.1.2.1. Posisi Astronomis

Posisi astronomis Kabupaten Paser adalah  $0^{\circ}45'18,37''$  –  $2^{\circ}27'20,82''$  Lintang Selatan (LS) dan  $115^{\circ}36'14,5''$  –  $166^{\circ}57'35,03''$  Bujur Timur (BT).

### 2.1.1.2.2. Posisi Geostrategis

Kabupaten Paser secara geostrategic dilintasi oleh jalan arteri primer (jalan negara/nasional) yang menghubungkan Propinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Jarak terjauh antar ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten yakni sejauh 86 km yang kurang lebih dapat memakan waktu empat atau lima jam. Lihat Tabel II.2 berikut ini :

**Tabel II.2.**  
Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Paser

No	Ibu Kota Kabupaten ke Kota Kecamatan	Jarak (km)	Sarana yang dilalui
1	Tanah Grogot – Tanah Grogot	0	-
2	Tanah Grogot – Muser (Kec. Muara Samu)	60	Darat
3	Tanah Grogot – Batu Engau	55	Darat
4	Tanah Grogot – Tanjung Aru (Kec. Tanjung Harapan)	66/57	Laut/Darat
5	Tanah Grogot – Pasir Belengkong	5	Darat
6	Tanah Grogot – Kuaro	28	Darat
7	Tanah Grogot – Batu Sopang	58	Darat
8	Tanah Grogot – Long Ikis	60	Darat
9	Tanah Grogot – Muara Komam	86	Darat
10	Tanah Grogot – Long Kali	77	Darat

Sumber : *Pembangunan Dalam Angka Kabupaten Paser 2016*

Dari sisi jalur laut, Selat Makassar di bagian timur kawasan memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran nasional maupun internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser dipusatkan di Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 Km ke arah utara ibukota Kabupaten (Kota Tana Paser), sedangkan Kota Tana Paser berjarak lebih kurang 145 Km dari Kota Balikpapan, atau 260 Km dari Ibukota Propinsi Kalimantan Timur (Kota Samarinda).

#### 2.1.1.2.3. Kondisi Kawasan

Kondisi umum daerah Paser adalah dataran rendah berbukit dan kawasan pesisir di beberapa kecamatan. Lebih detail, kawasan Kabupaten Paser akan digambarkan dalam sub bab berikut yang meliputi kondisi topografi, geologi, hidrologi dan klimatologi.

#### 2.1.1.2.4. Topografi

Dengan kontur wilayah pantai dan pegunungan, secara garis besar topografi Kabupaten Paser dibagi dalam dua wilayah :

- Wilayah **Timur** merupakan dataran rendah, landai hingga bergelombang dengan ketinggian berkisar 0-1.000 m diatas permukaan laut yang membentang dari utara sampai selatan yang terdiri dari rawa-rawa dan

daerah aliran sungai dengan luas 967.100 Ha (69,52% dari Luas daratan). Dengan jalan negara Penajam-Kuaro dan Kerang Dayu sebagian batas topografi;

- Wilayah **Barat** merupakan daerah dataran tinggi dan bergelombang, berbukit dan bergunung berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan luas 424.100 Ha (30,48% dari luas daratan). Di wilayah ini terdapat beberapa puncakpegunungan seperti Gunung Serumpaka dengan ketinggian 1.380 m, Gunung Lumut 1.233 m, Gunung Narujan atau Gunung Rambutan dan Gunung Halat.

Kondisi wilayah Kabupaten Paser memiliki variasi topografis. Wilayah dataran rendah berada di sebelah timur, berlokasi di wilayah pesisir. Terdapat beberapa lokasi yang memiliki dataran tinggi walaupun dari segi luasan kurang signifikan, yaitu di kawasan Muara Samu dan Batu Sopang. Pada bagian barat wilayah kabupaten, terdapat deretan pebukitan, dengan ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, yang menjadi bagian dari Pegunungan Meratus, salah satu dari empat pegunungan utama di Kalimantan.

Keberagaman tersebut terefleksikan pada keragaman kelas kemiringan lereng. Pada wilayah pantai (Kecamatan Tanjung Harapan, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro) dan pada sebagian dataran tinggi di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang, dominasi kelas kemiringan lereng datar sangat jelas. Cakupan wilayah seperti ini memungkinkan dikembangkan pertanian pangan (semusim) tanpa pengeluaran modal yang signifikan. Kecamatan Muara Komam, Batu Sopang dan Muara Samu merupakan wilayah yang memiliki dominasi kemiringan lereng terjal sehingga membatasi kegiatan perekonomian berbasis pertanian semusim, Dataran rendah pada kawasan timur Kabupaten Paser memiliki bentang lahan yang relatif berbeda. Dengan demikian, klasifikasi lereng di Kabupaten Paser dibagi menjadi 4 (empat) kategori kemiringan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel II.3. di bawah ini :

**Tabel. II.3.**  
Daerah Berdasarkan Kondisi Kemiringan Kabupaten Paser

No	Kemiringan lereng (%)	Kawasan
1	Lereng 0-2 %	Kecamatan Long Kali, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Kuaro yang terletak pada bagian pantai menghadap Selat Makasar
2	Lereng 2-15 %	Kecamatan Kuaro, Kecamatan Pasir Belengkong dan Kecamatan Tanah Grogot
3	Lereng < 40 %	Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Long Ikis
4	Lereng > 40 %	Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Long Kali dan Kecamatan Muara Komam

Sumber : Pembangunan Dalam Angka Kabupaten Paser 2016

Wilayah Kecamatan Batu Engau juga didominasi oleh dataran aluvial, diikuti oleh dataran bergelombang dan hogback. Dataran aluvial juga ditemukan di Kecamatan Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis dan Long Kali, walaupun dalam luasan yang terbatas. Bentang lahan lain yang penting diperhatikan adalah dataran banjir. Kalimantan, termasuk di dalamnya Kabupaten Paser, memiliki curah hujan yang tinggi. Kombinasi tersebut penting diperhatikan dalam perencanaan wilayah, terutama pemanfaatan lahan untuk permukiman. Mengingat Long Kali merupakan salah satu sistem sungai yang terbesar di Kabupaten Paser, dataran banjir dijumpai mendominasi lingkungan sekitar Sungai Long Kali. Dataran banjir juga dijumpai di perbatasan Kecamatan Tanah Grogot dan Pasir Belengkong. Bagian barat Kabupaten Paser didominasi oleh sistem pegunungan atau pegunungan struktural terutama di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang.

#### 2.1.1.2.5. Geologi

Secara eksploratif Kabupaten Paser terdiri dari beberapa jenis tanah:

- Tanah Aluvial/Gambut, Jenis tanah ini ditemukan di bagian timur, menyebar di daerah dataran rendah, landai dan bergelombang pada lembah-lembah aliran sungai dan pantai dengan luas  $\pm 182.250$  Ha;
- Tanah Podzolik Merah Kuning, jenis tanah ini terdapat dibagian barat, pada daerah-daerah bergelombang dan berbukit pada kiri dan kanan

jalan poros Long Kali, Kuaro, menyebar ke Selatan di bagian Barat Kecamatan Pasir Belengkong dan Selatan Kecamatan Tanjung Harapan dengan Luas  $\pm 517.850$  ha;

- Tanah Campuran/Kompleks, yaitu Jenis tanah yang terdiri dari tanah Podzolik Coklat/Andosol  $\pm 32.750$ ha, Podzolik/Litosol  $\pm 74.000$ ha dan Organosol/Gambut  $\pm 56.000$  ha, Podsolik  $\pm 422.000$  ha dan Regosol/Gleysol/Mediteran 108.400 Ha yang menyebar di bagian barat dan Utara Kabupaten Paser.

#### 2.1.1.2.6. Hidrologi

Kawasan rawa banyak dijumpai pada Kecamatan Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis, Long Kali dan Pasir Belengkong. Hampir keseluruhan wilayah Kecamatan Tanjung Harapan didominasi oleh dataran aluvial yang dipengaruhi sedimen jaringan sungai.

#### 2.1.1.2.7. Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Paser memiliki banyak sungai yang tersebar di seluruh kawasan. Berdasarkan data yang dihimpun, Kondisi hidrologi di Kabupaten Paser dipengaruhi oleh keberadaan beberapa sungai besar yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. II.4.**

Jumlah Sungai berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Paser

No	Kecamatan	Jumlah Sungai
1	Batu Sopang	29
2	Muara Samu	37
3	Batu Engau	72
4	Tanjung Harapan	20
5	Pasir Belengkong	26
6	Tanah Grogot	18
7	Kuaro	50
8	Long Ikis	33
9	Muara Komam	30
10	Long Kali	52
	<b>Jumlah</b>	<b>367</b>

Sumber : Pembangunan Dalam Angka Kabupaten Paser 2016

Adapun beberapa sungai yang cukup besar dan panjang tersebut antara lain Sungai Telake (430 Km) dan Sungai Kandilo (615 Km), Sungai Apar Besar (95 Km) dan Sungai Kerang (190 Km), yang semuanya bermuara ke Selat Makasar (LKPJ 2014). Sungai-sungai tersebut selain berfungsi sebagai tempat menangkap ikan dan sumber pengairan juga berfungsi sebagai sarana perhubungan dari dan menuju daerah pedalaman.

#### 2.1.1.2.8. Sungai, Danau dan Rawa

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Paser memiliki beberapa sungai yang cukup besar dan panjang, antara lain Sungai Telake (430 Km) dan Sungai Kandilo (615 Km), Sungai Apar Besar (95 Km) dan Sungai Kerang (190 Km), yang semuanya bermuara ke Selat Makasar. Sungai-sungai tersebut selain berfungsi sebagai sumber irigasi juga digunakan oleh masyarakat untuk tempat menangkap ikan, dan sarana perhubungan dari dan menuju daerah pedalaman.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kondisi sungai, danau dan rawa data ini penting untuk diketahui sebagai bahan untuk mempertimbangkan potensi pengembangan pertanian dan perkebunan.

#### 2.1.1.2.9. Debit Air

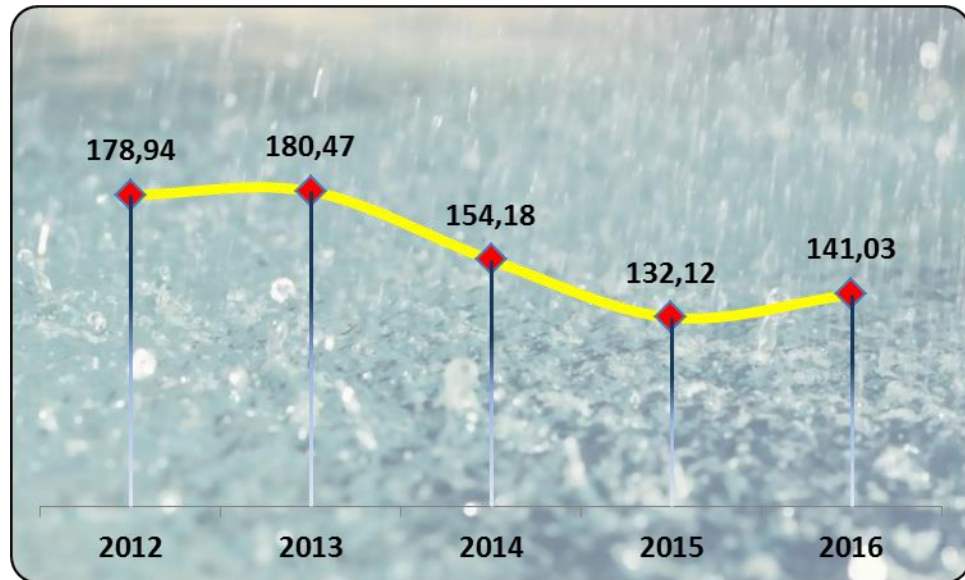
Data debit air sungai berguna untuk mengetahui potensi sekaligus kemungkinan adanya ancaman dari sungai. Potensi itu antara lain, penggunaan debit air sungai untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Sekaligus di sisi lain, kemungkinan adanya ancaman antara lain berupa bencana banjir jika terdapat debit air sungai yang berlebihan dan tidak terkelola dengan baik.

#### 2.1.1.3. Klimatologi

Kabupaten Paser beriklim tropis basah dengan suhu rata-rata sepanjang tahun adalah sekitar 26°C, sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 160 mm per tahun. Didukung kondisi topografi yang beragam kondisi curah hujan berbeda disetiap daerah. Pada Tahun 2016, rata-rata curah hujan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rata-rata curah hujan tahun 2015 yakni 141.03 mm. Adapun pola curah hujan dalam lima tahun terakhir, rata-rata curah hujan cenderung belum mengalami peningkatan.



**Grafik II.1.**  
Rata-rata Curah Hujan per Tahun (mm)



Sumber : Data sektoral Dinas Pertanian Kab. Paser, 2017

Selain dapat menggambarkan karakter cuaca, curah hujan menentukan kekuatan sumber daya fisik daerah terutama kemampuan untuk mengelola sektor pertanian. Di kecamatan yang memiliki rata-rata curah hujan yang kurang, misalnya di Kecamatan Pasir Belengkong dapat dicarikan alternatif saluran irigasi yang mampu menyuplai kebutuhan lahan pertanian.

#### 2.1.1.4. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Paser terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan non budidaya dan kawasan budidaya. Untuk kawasan non budidaya meliputi:

- Kawasan Lindung, kawasan ini seluas 116.952 ha terdapat di Kecamatan Muara Komam bagian Barat, Timur dan Selatan, Long Kali bagian Timur, Batu Sopang bagian Barat dan Selatan, dan Long Ikis bagian Barat ;
- Kawasan Sempadan Pantai, kawasan ini sepanjang  $\pm$  191,93 km, ditetapkan di sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Batas Sempadan dihitung  $\pm$  100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan;
- Kawasan Sempadan Sungai, kawasan ini ditetapkan di sepanjang sungai  $\pm$  100 meter di kiri kanan sungai besar dan  $\pm$  50 meter dari kiri kanan anak sungai.

Sedangkan kawasan budidaya adalah areal penggunaan lahan yang dimanfaatkan secara produktif misalnya kawasan produksi hutan, kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.

#### 2.1.1.4.1. Penggunaan Lahan Sektor Pertanian

Lahan pertanian khususnya tanaman pangan tersebar di kecamatan-kecamatan Kabupaten Paser. Jenis tanaman yang cukup ditanam di Kabupaten Paser adalah ubi jalar dan ubi kayu. Selain itu berbagai macam tanaman sayuran juga banyak ditanam di daerah ini karena terutama didukung oleh iklim yang cocok. Penggunaan lahan untuk budidaya pertanian terbagi dalam tiga kategori sesuai potensi daerah yakni:

- 1) Kawasan Sawah, ladang dan palawija. Keberadaan sawah irigasi tersebar di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Pasir Belengkong dan Tanah Grogot. Sedangkan tanaman padi ladang banyak ditemukan di Kecamatan Batu Engau, Muara Komam, Muara Samu, Long kali dan Batu Sopang. Tanaman pangan di Kabupaten Paser lebih didominasi komoditi padi, baik padi sawah maupun padi ladang dengan areal pengembangan mencapai kurang lebih 10.276 hektar. Disamping itu beberapa kecamatan juga mengembangkan tanaman palawija lainnya seperti, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau.

**Tabel II.5.**

Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija di Kabupaten Paser 2015-2016

No	Jenis Tanaman	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	Padi Sawah	6.090	26.428	4,34	6.785	31.556	4.65
2	Padi Ladang	3.283	9.862	3,00	3.491	9.230	2.64
3	Jagung	334	1.058	3,17	357	1.170	3.28
4	Ubi Kayu	104	1.645	15,80	55	855	15.55
5	Ubi Jalar	43	411	9,50	22	212	9.64
6	Kacang Tanah	33	45	1,36	55	75	1.36
7	Kacang Kedele	87	137	1,58	171	252	1.47
8	Kacang Hijau	12	14	1,17	16	18	1.13

Sumber : Statistik Dinas Pertanian Kabupaten Paser, 2017

Secara umum, luas produksi padi sawah dan padi ladang mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2012 luas panen hasil produksi padi mencapai 10.213 Ha, namun pada tahun 2016 luas budidaya pertanian tanaman padi ini telah bertambah menjadi 10.276 Ha.

**Tabel II.6.**

Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Paser 2012 – 2016

Tahun	Padi sawah		Padi Ladang	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
2016	6.785	31.556	3.491	9.230
2015	6.090	26.428	3.280	9.860
2014	6.428	29.488	2.595	7.355
2013	7.240	32.587	3.064	8.512
2012	6.814	27.959	3.399	9.086

Sumber : Statistik Dinas Pertanian Kabupaten Paser, 2016

- 2) Kawasan Perikanan. Kawasan perikanan tambak tersebar di sekitar kawasan sempadan pantai, tepatnya di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Tanah Grogot, Pasir Belengkong dan Tanjung Harapan. Kaitanya dengan penggunaan lahan perikanan adalah budidaya tambak dan kolam air.

**Tabel II.7.**

Luas Budidaya dan Produksi Tambak dan Kolam 2012-2016

Tahun	Tambak		Kolam	
	Luas Budidaya (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Budidaya (Ha)	Produksi (Ton)
2016	15.325	12.357,00	120	67,10
2015	21.411	11.176,80	706	125,00
2014	20.973	10.429,50	120	43,90
2013	13.932	9.463,70	80	36,10
2012	19.034	9.472,70	147	37,30

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Paser 2016

Berdasarkan data diatas terdapat fluktuasi luas budidaya tambak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 luas budidaya tambak sebesar 15.325 Ha, angka ini lebih kecil daripada luas budidaya tambak pada tahun 2015, yaitu sebesar 21.411 Ha. Walaupun luas lahan budidaya tambak tersebut mengalami penurunan, tetapi produksi tambak tahun 2016 justru mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan produksi tahun 2015, yaitu dengan angka produksi sebesar 12.357 Ton. Sedangkan luas kolam, secara umum terjadi fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan mencapai 67,10 ton dibanding dengan tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 125 ton. Penurunan produksi budidaya kolam

disebabkan adanya penurunan luas budidaya kolam dari 706 ha menjadi 120 ha pada tahun 2016.

- 3) Kawasan Perkebunan seluas  $\pm$  198.500,27 ha tersebar di Kecamatan Long Ikis, Long Kali, Tanjung Harapan, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Sopang dan Muara Komam.

**Tabel II.8.**  
Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Kab. Paser  
Tahun 2015-2016

Jenis Tanaman	Luas Areal (Ha)	
	2015	2016
Kelapa sawit	182.144,78	180.328,72
Karet	14.168,50	14.124,00
Kelapa dalam	2.840,00	2.639,50
Kopi	1.150,30	982,30
Lada	98,25	88,75
Kakao	198,00	145,00
Lainnya	203,25	192,00

Sumber : Statistik Dinas Pertanian Kabupaten Paser, 2017

Sampai sekarang kelapa sawit masih menjadi Komoditi perkebunan favorit di Kabupaten Paser bahkan mencapai 91 persen dari total area perkebunan. Kawasan perkebunan ini sebagian peruntukan dan pengelolaannya telah dilimpahkan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan.

**Tabel II.9.**  
Luas Areal Perkebunan Rakyat 2016

Jenis Tanaman	Luas Areal (Ha)	
	Tahun 2015	Tahun 2016
Kelapa sawit	71,366.00	79.213,00
Karet	13,709.50	13.665,00
Kelapa dalam	2,840.00	2.639,50
Kopi	1,150.30	982,30
Lada	98.25	88,75
Kakao	198	145,00
Lainnya	203.25	192,00

Sumber : Statistik Dinas Pertanian Kabupaten Paser 2016

Total area perkebunan yang dikelola masyarakat sebanyak 96.925,55 Ha, 81,73 persen diantaranya merupakan perkebunan kelapa sawit. Karena perawatan yang relatif mudah dan nilai ekonomi yang tinggi, kelapa sawit marak dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat.

#### 2.1.1.4.2 Penggunaan Lahan Sektor Kehutanan

Hutan sebagai paru-paru lingkungan menjadi wilayah suaka yang dilindungi sekaligus juga sebagian dimanfaatkan sebagai sumber produksi. Kawasan hutan lindung tersebar di daerah Gunung Beratus, Gunung Lumut, Sungai kendilo-Ketam, Hilir Sungai Rawang dan Sungai Samu.

**Tabel II.10.**  
Luas kawasan hutan Menurut Fungsi

Fungsi Hutan	Luas Kawasan (Ha)
<b>Hutan Konservasi</b>	
i. Cagar Alam	102.361
ii. Taman Hutan Raya	3.995
<b>Kawasan Budidaya Kehutanan</b>	
i. Hutan Lindung	118.957
ii. Hutan Produksi Tetap	240.256
iii. Hutan Produksi Terbatas	180.036
iv. Hutan Produksi Yang dapat dikonversi (HPK)	9.698
<b>Kawasan Budidaya Non Kehutanan</b>	
i. Areal Penggunaan Lain	481.175

Sumber : Perda Kab. Paser No.9 Tahun 2015 tentang RTRW Kab. Paser tahun 2015-2035

- Kawasan Hutan Produksi Tetap tersebar di Kecamatan Batu Sopang bagian Tengah, Muara Komam bagian Utara, Long Ikis bagian Utara dengan luas 240.256 ha;
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai daerah penyangga. Alokasi pemanfaatannya dipertahankan sesuai dengan fungsinya dimana eksploitasinya dapat dilakukan dengan tebang pilih dan tanam, kawasan memiliki luas 180.036 ha;
- Kawasan Areal Penggunaan Lain, yaitu kawasan yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan bagi pengembangan budidaya pertanian pada

umumnya. Kawasan ini tersebar di 8 (delapan) kecamatan dengan luas 481.175 ha.

#### 2.1.1.4.3 Penggunaan Lahan Sektor Pertambangan

Kawasan pertambangan di Kabupaten Paser seluas 71.000,00 Ha, tersebar di Kecamatan Batu Sopang, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Kuaro, Long Ikis dan Batu Engau. Selain untuk kawasan pertambangan batu bara juga telah ditetapkan wilayah pertambangan rakyat untuk bahan galian emas dengan luas sekitar 4.958,57 ha, tersebar di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Sopang. Dari total luas kawasan pertambangan tersebut, sebagian yakni 50,399 ha merupakan kawasan pertambangan milik PT. Kideco Jaya Agung.

#### 2.1.1.4.4 Penggunaan Lahan Sektor Pariwisata

Kawasan ini merupakan kawasan yang dianggap mempunyai daya tarik tinggi untuk dijadikan objek wisata. Kawasan ini bersifat fleksibel, maksudnya tidak terkait pada batas-batas administrasi ataupun batas lainnya, sehingga kawasan pengembangannya tidak harus didelineasi secara jelas seperti kawasan-kawasan tersebut di atas.

### 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah ditujukan untuk memacu perkembangan sosial ekonomi serta mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Setidaknya pengembangan wilayah di Kabupaten Paser dapat mengakomodasi tiga komponen yakni terkait dengan aktivitas manusia, ruang beradaptasi serta sarana komunikasi dan transportasi.

Aktivitas manusia dikaitkan dengan kondisi demografis, barang material, energi. Dari segi konstelasi regional, Kabupaten Paser berada di sebelah Selatan Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Kota Tanah Grogot berjarak lebih kurang dari 145 km dari Balikpapan atau 260 km dari Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Sarana penghubung dua provinsi tersebut adalah jalan nasional yang selalu dilewati sarana transportasi darat yang menghubungkan antara wilayah di Kalimantan.

Pada bagian timur Kabupaten Paser berhadapan langsung dengan selat Makasar, yang akan datang memiliki prospek dan fungsi penting

sebagai jalur alternatif pelayaran internasional apalagi dukungan prioritas kebijakan nasional terkait dengan peningkatan fungsi laut sebagai perwujudan semangat maritim.

### 2.1.3 Kawasan Rawan Bencana

Perlindungan terhadap resiko bencana ditujukan untuk melindungi warga dan lingkungannya dari kerusakan yang ditimbulkan oleh fenomena alam atau aktivitas manusia. Di wilayah Kabupaten Paser, terdapat beberapa identifikasi terkait dengan rawan bencana yakni bencana banjir, tanah longsor, gelombang pasang, angin topan, kebakaran, gempa dan kekeringan.

**Tabel II.11.**  
Jenis dan daerah Rawan Bencana di Kabupaten Paser

No	Rawan Bencana	Kecamatan Rawan Bencana
1	Banjir	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Engau, dan Tanjung Harapan
2	Tanah Longsor (gerakan tanah kerentanan tinggi)	Batu Sopang, Long Ikis, Long Kali, Muara komam, Pasir Belengkong dan Tanjung harapan
3	Gelombang Pasang	Kawasan yang berhadapan dengan laut
4	Kebakaran	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Batu Sopang, Pasir Belengkong dan Batu Engau

Sumber : RTRW Kabupaten Paser 2012

### 2.1.4 Demografi

Selain sebagai subjek dalam proses pembangunan, penduduk merupakan tujuan bagi pembangunan itu sendiri. Itu sebabnya analisis kependudukan menentukan berbagai keputusan selama perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### 2.1.4.4 Jumlah Penduduk

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur, juga terjadi di Kabupaten Paser yang tampak dalam berbagai fenomena kependudukan termasuk meningkatnya jumlah penduduk, laju pertumbuhan, kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di beberapa titik strategis di

Kabupaten Paser. Secara gradual, jumlah penduduk di Kabupaten Paser mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir sebanyak 2,44 persen. Hal tersebut memberi dasar dan gambaran yang semakin jelas, tentang meningkatnya kepadatan penduduk tiap tahunnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 262.301 jiwa dan bertambah menjadi 268.261 jiwa pada tahun 2016. Selama lima tahun terakhir dijelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (RJK) pada tahun 2016 adalah 113.10 artinya bahwa setiap 100 orang perempuan terdapat 113 orang penduduk laki-laki. Lebih lanjutnya dijelaskan pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.12**  
Jumlah Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2012-2016

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)	RJK (%)
2012	129.680	114.431	244.111	2,66	113.33
2013	132.722	117.269	249.991	2,41	113.18
2014	135.925	120.250	256.175	2,47	113.04
2015	139.219	123.082	262.301	2,39	113.11
2016	142,377	125,884	268,261	2.27	113.10

Sumber : Pembangunan Dalam Angka Kabupaten Paser 2017

Penduduk Kabupaten Paser masih mengelompok pada wilayah – wilayah yang jaraknya cukup dekat dengan ibu kota kabupaten. Lebih dari 25 persen penduduk Kabupaten Paser bertempat tinggal di kecamatan yang terletak di ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Tanah Grogot. Sedang sisanya tidak merata tersebar di 9 kecamatan.

#### 2.1.4.5 Struktur Penduduk

Sampai saat ini Kabupaten Paser memiliki karakteristik piramida penduduk melebar (Piramida muda) yang berarti kelompok balita dan remaja masih sangat besar. Gambaran dari karakteristik penduduk ini satu sisi



menyimpan potensi usia produktif yang tinggi, disisi lain menanggung rasio ketergantungan (*dependency ratio*) usia tidak produktif yang tinggi pula.

**Tabel.II.13.**  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur  
dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Paser Tahun 2012-2016

Tahun	Umur (Tahun)			Jumlah	RBK
	0 - 14	15 - 64	65+		
2012	77,334	160,625	6,152	244,111	51.98
2013	79,522	164,369	6,100	249,991	52.09
2014	78,569	171,227	6,379	256,175	49.61
2015	78,717	177,552	6,033	262,301	47.74
2016	81,310	179,896	7,055	268,261	49.13

Sumber : *Pembangunan Dalam Angka Kabupaten Paser 2017*

Struktur penduduk penting untuk diketahui sebagai bahan untuk menentukan prioritas program dalam memaksimalkan penyediaan layanan dasar dan ketenagakerjaan. Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Paser memiliki penduduk usia sekolah dan usia produktif yang tinggi. Dengan demikian, terdapat implikasi terhadap kebijakan penyediaan layanan pendidikan yang memadai sekaligus didukung penyediaan lapangan kerja di semua sektor.

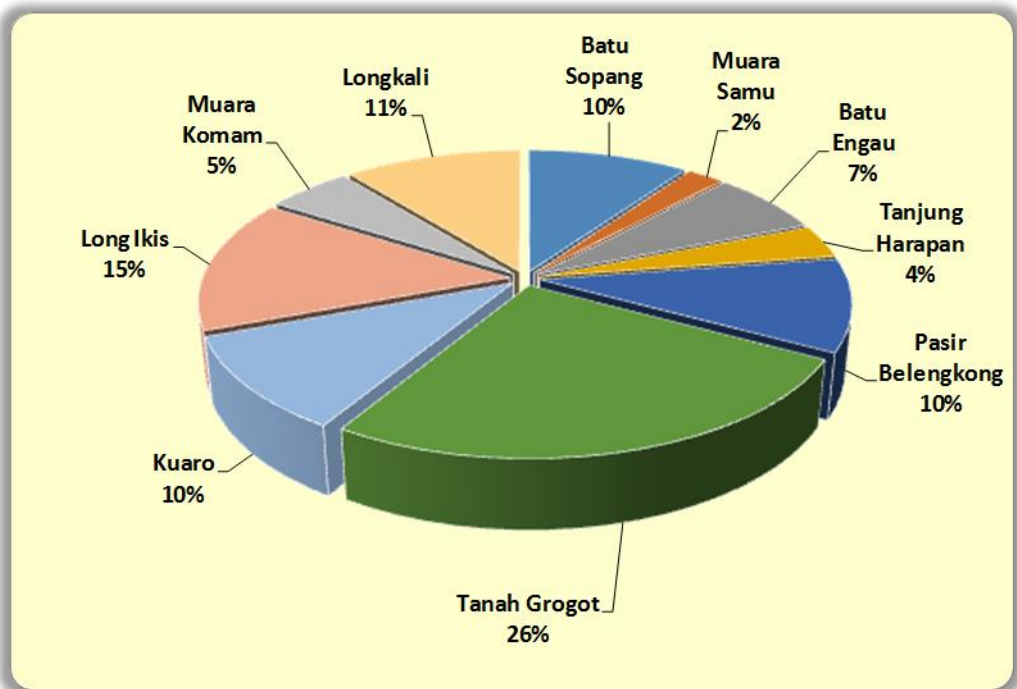
Dari sisi rasio ketergantungan (*dependency ratio*) pada tahun 2015, 100 kelompok umur produktif (15-64 tahun) Kabupaten Paser menanggung kurang lebih 47.74 penduduk tidak produktif (0-14 dan 65+ Tahun). Sedangkan pada tahun 2016 terlihat bahwa angka ketergantungan penduduk mengalami peningkatan menjadi 49.13. Namun keseluruhan angka ketergantungan penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir tersebut tetap wajib diperhatikan untuk memproyeksikan kemampuan penduduk produktif. Kabupaten Paser sebagai salah satu daerah dengan percepatan jumlah penduduk yang tinggi harus diimbangi persiapan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan kemudian diikuti penyiapan lapangan kerja yang memadai.

2.1.4.6 Distribusi Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Saat ini, distribusi penduduk di Kabupaten Paser masih belum merata. Hal tersebut dibuktikan dengan konsentrasi penduduk yang terpusat di Kecamatan Tanah Grogot sebanyak 26 Persen dari total jumlah penduduk. Padahal dilihat dari luas wilayah, Tanah Grogot merupakan daerah dengan luas daerah terkecil, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

**Diagram.II.1.**

Distribusi Penduduk di Kabupaten Paser Menurut Kecamatan, 2016



Sumber : Pembangunan Dalam Angka Kabupaten Paser 2017

Seperti halnya pola pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, secara otomatis berpengaruh pada naiknya kepadatan penduduk di Kabupaten Paser secara umum. Setidaknya dalam lima tahun terakhir, kepadatan secara gradual bertambah 0.52 penduduk tiap Km<sup>2</sup>. Paradoks ekstrim pada distribusi penduduk tersebut terlihat dengan padatnya penduduk di kawasan Ibu Kota Kabupaten Paser, yaitu Kecamatan Tanah Grogot yang mencapai 207.12 penduduk/Km<sup>2</sup> dibandingkan dengan Kecamatan Muara Samu yang hanya memiliki kepadatan 6,09 penduduk/Km<sup>2</sup>.

**Tabel.II.14.**

Kepadatan Penduduk Kabupaten Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Banyaknya Penduduk	Rata-Rata Penduduk tiap Km <sup>2</sup>
1	Batu Sopang	1.111,38	26,320	23.68
2	Muara Samu	855,25	6,096	7.13
3	Batu Engau	714,05	18,639	12.37
4	Tanjung Harapan	1.507,26	9,778	13.69
5	Pasir Belengkong	990,11	27,287	27.56
6	Tanah Grogot	335,58	69,505	207.12
7	Kuaro	747,30	28,217	37.76
8	Long Ikis	1.204,22	39,445	32.76
9	Muara Komam	1.753,39	13,919	7.94
10	Longkali	2.385,39	29,055	12.18
<b>2016</b>		<b>11.603,94</b>	<b>268,261</b>	<b>23.12</b>
<b>2015</b>		<b>11.603,94</b>	<b>262,301</b>	<b>22.60</b>
<b>2014</b>		<b>11.603,94</b>	<b>256,175</b>	<b>22.08</b>
<b>2013</b>		<b>11.603,94</b>	<b>249,991</b>	<b>21.54</b>

Sumber : Pembangunan Dalam Angka Kabupaten Paser 2017

Persebaran penduduk yang tidak merata disebabkan beberapa faktor, di antaranya adalah ketersediaan fasilitas publik, atau potensi wilayah yang dimiliki. Kondisi penyebaran ini tidak menguntungkan bagi pemerataan pembangunan daerah. Dengan adanya perbedaan kepadatan, maka pola penyebaran penduduk yang terjadi juga mengikuti pola penduduk yang mengelompok pada tempat-tempat tertentu. Penduduk banyak dijumpai pada daerah-daerah yang mempunyai aktivitas ekonomi yang tinggi, tersediannya sarana dan prasarana yang memadai, dan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya kepadatan penduduk yang rendah pada umumnya terdapat daerah-daerah yang mempunyai aktifitas ekonomi yang relatif masih rendah dan keadaan sarana transportasi yang masih terbatas.

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita. Jumlah penduduk miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan. Sementara itu pendekatan perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita, dapat dikatakan semakin makmur penduduk wilayah tersebut. Namun demikian indikator-indikator tersebut perlu dikonfirmasi dengan penilaian sejauh mana kegiatan perekonomian daerah dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk. Untuk melihat perkembangan pemerataan pembangunan digunakan indikator ketimpangan pendapatan antar penduduk dan ketimpangan antar wilayah.

Secara sederhana, PDRB menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Penghitungannya berasal dari jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Oleh karena itu, PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto Daerah. PDRB merupakan jumlah nilai produksi barang dan jasa akhir suatu daerah yang dihasilkan dalam periode tertentu. Sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan pertumbuhan dari nilai produksi barang-barang dan jasa yang dihasilkan dari satu tahun ketahun berikutnya, yang mengindikasikan kinerja perekonomian daerah dalam menciptakan output atau nilai tambah suatu barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan memperhitungkan pertumbuhan PDRB. Untuk mengukur pertumbuhan output riil, maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk menyesuaikan efek perubahan harga (inflasi). Secara umum Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) masyarakat di Kabupaten Paser mengalami peningkatan. Nilai nominal PDRB Kabupaten Paser atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2016 mencapai 38,57 triliun, naik sekitar 0.36 triliun dibanding tahun sebelumnya. Lebih lanjut dijelaskan pada tabel dibawah ini.

**Tabel. II. 15.**

PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2012-2016 (Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK 2010	
	Dengan Pertambangan Batubara	Tanpa Pertambangan Batubara	Dengan Pertambangan Batubara	Tanpa Pertambangan Batubara
2012	35.093.421,58	9.147.545,64	31.160.226,26	8.290.395,84
2013	36.916.266,99	9.757.892,17	33.281.215,38	8.686.387,78
2014	39.249.886,15	11.140.598,30	34.783.336,43	9.357.759,26
2015	38.274.547,11	11.886.173,93	34.446.789,62	9.794.353,40
2016	38,572,343.57	12,757,185.99	35,186,347.29	10,309,771.11

Sumber : *Pembangunan Dalam Angka Kabupaten Paser 2017*

Namun seperti kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Paser terdapat pertambangan non migas (batubara) yang memiliki kontribusi sangat besar dalam pembentukan nilai PDRB, sehingga perlu kita lihat angka PDRB jika dihitung tanpa subsektor pertambangan non migas. Pada tahun 2016 angka PDRB ADHB tanpa pertambangan non migas sebesar 12.76 triliun rupiah sedangkan untuk PDRB ADHK memiliki nominal lebih kecil 10.31 triliun rupiah.

Perlu diingat bahwa secara riil pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan non migas tidak dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu juga dilihat angka PDRB per kapita Kabupaten Paser jika dihitung tanpa memasukkan sub sektor pertambangan non migas. Pada tahun 2016 angka PDRB per kapita Kabupaten Paser jika dihitung tanpa memasukkan komponen sub sektor pertambangan non migas hanya sebesar 47.55 juta rupiah.

Perekonomian Kabupaten Paser pada tahun 2015 mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser yang mencapai -0.97 persen, lebih lambat dibandingkan kondisi tahun 2014 yang sebesar 4.51 persen, sedangkan pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 2.15 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh situasi eksternal, dimana terjadinya gejolak ekonomi global seiring melemahnya beberapa harga energi seperti harga minyak bumi dan batubara, sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas komoditi tersebut.

Disamping itu situasi internal juga cenderung melemah seiring dengan menurunnya daya beli masyarakat dan pelemahan ekonomi di beberapa lini usaha. Ditinjau menurut Lapangan Usaha, melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada tahun 2016 masih dipengaruhi oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, meskipun tumbuh positif sebesar 0.91 persen namun belum mampu menopang perekonomian Kabupaten Paser seperti pada tahun 2013 dan 2014, tetapi masih lebih baik dari pada tahun 2015, dimana lapangan usaha pertambangan dan penggalian tumbuh negatif sebesar 3.04 persen sebagai akibat melemahnya usaha pertambangan batubara.

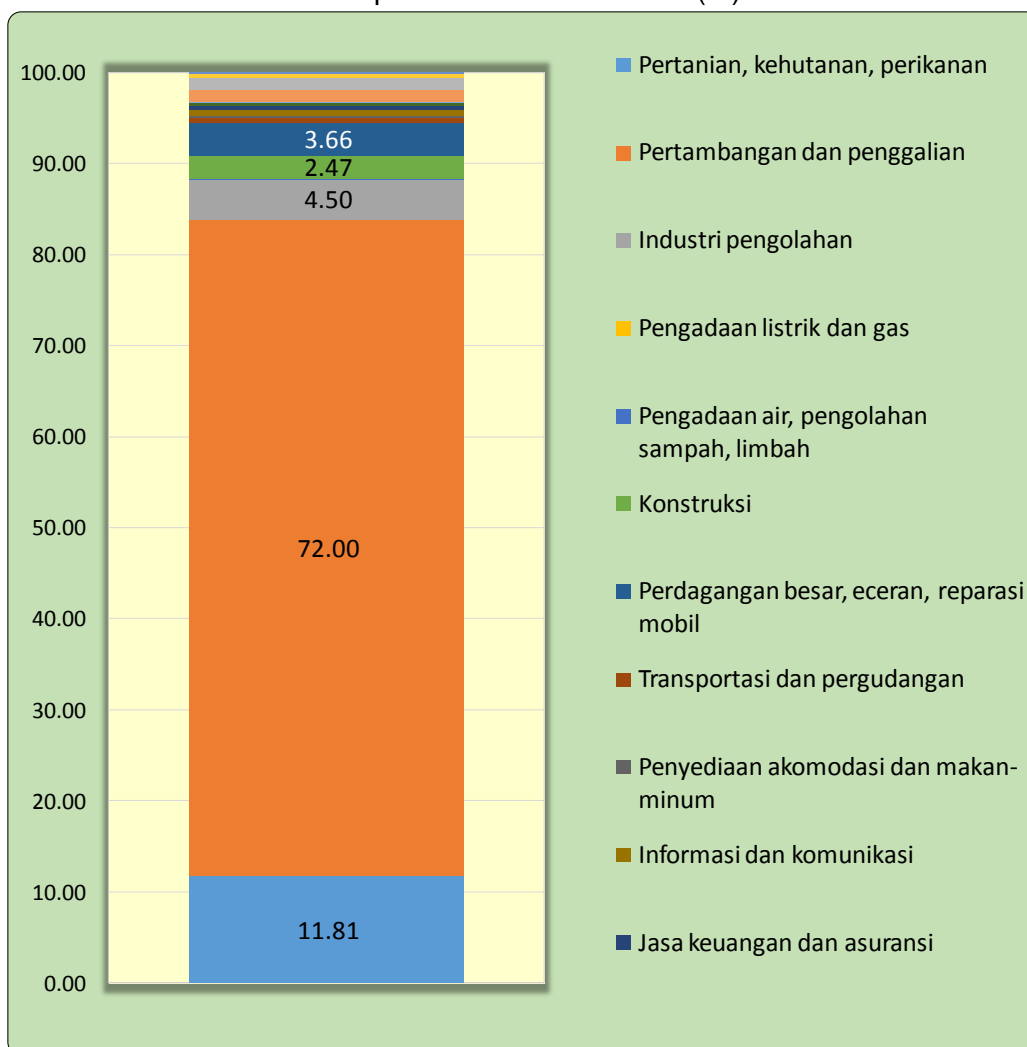
Sebagaimana diketahui lapangan usaha pertambangan dan penggalian memberi kontribusi paling dominan dalam perekonomian kabupaten Paser, sehingga pengaruhnya sangat dominan terhadap kinerja ekonomi kabupaten Paser secara keseluruhan. Ditelaah lebih lanjut, kinerja ekonomi kabupaten Paser tahun 2016 dari sisi lapangan usaha ternyata Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding lapangan usaha lainnya. Diikuti Lapangan Usaha Jasa Pendidikan dan Jasa Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, serta Jasa Keuangan dan Asuransi.

Berdasarkan nilai tambah yang tercipta pada masing-masing sektor dan subsektor ekonomi, dapat ditentukan struktur perekonomian suatu wilayah. Struktur ini menunjukkan sektor-sektor unggulan dan sektor-sektor yang kurang berkembang dalam wilayah tersebut. Dalam jangka waktu yang tidak panjang dan dalam kondisi normal, biasanya struktur perekonomian suatu wilayah tidak mengalami pergeseran yang signifikan. Hasil telaah terhadap perkembangan nilai tambah bruto setiap sektor di Kabupaten Paser, memperlihatkan bahwa sejak tahun 2010 tidak ada perubahan urutan sektor dalam struktur perekonomian Kabupaten Paser hingga tahun 2016. Struktur perekonomian Kabupaten Paser masih didominasi Lapangan Usaha berbasis sumber daya alam.

Dalam struktur ekonomi Kabupaten Paser tahun 2016, peranan tertinggi masih dipegang oleh sektor Pertambangan dan Penggalian walaupun peranannya sedikit menurun dari 75.66 persen tahun 2015 menjadi 74.92 persen tahun 2016. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya peranan pertambangan migas dan tambang batubara. Penurunan produksi dan harga pada komoditi tambang batubara dan tambang migas, sangat berpengaruh terhadap menurunnya share sektor Pertambangan dan Penggalian.

Selanjutnya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berada pada urutan kedua dalam memberikan andil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser tahun 2016, yakni sebesar 10.62 persen, nilai ini mengalami peningkatan dari tahun 2015 dengan peranan sebesar 10.41 persen. Industri Pengolahan menempati peringkat ketiga dengan kontribusi sebesar 4,33 persen di tahun 2016. Untuk lapangan usaha yang lain hanya memberikan kontribusi di bawah 3 persen.

**Grafik II.16.**  
Kontribusi Nilai Tambah Bruto Sektoral ADHB terhadap PDRB Kabupaten Paser tahun 2016 (%)



Sumber : Pembangunan Dalam Angka Kabupaten Paser 2017

Diagram di atas menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan masih jauh di atas sektor lainnya termasuk pertanian yang justru menyerap banyak tenaga kerja. Secara lebih detail, tingkat kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel II.17.**  
Kontribusi Masing-masing Sektor terhadap PDRB

Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
Pertanian, kehutanan, perikanan	9,48	9,65	9,30	9,34	10,51	9,86	11,31	11,31	11,81	10,62
Pertambangan dan penggalian	77,94	77,43	77,70	77,85	75,79	77,02	73,59	73,59	72,00	74,92
Industri pengolahan	3,84	3,89	3,80	3,73	3,99	3,78	4,28	4,28	4,50	4,33
Pengadaan listrik dan gas	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	2,07	2,12	2,19	2,09	2,25	2,09	2,40	2,40	2,47	2,10
Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil	2,80	2,90	2,87	2,95	2,98	2,92	3,36	3,36	3,66	3,23
Transportasi dan pergudangan	0,37	0,39	0,39	0,39	0,41	0,39	0,46	0,46	0,50	0,42
Penyediaan akomodasi dan makan-minum	0,22	0,21	0,23	0,22	0,24	0,22	0,26	0,26	0,28	0,24
Informasi dan komunikasi	0,52	0,57	0,53	0,58	0,55	0,58	0,61	0,61	0,66	0,69
Jasa keuangan dan asuransi	0,33	0,30	0,35	0,32	0,35	0,31	0,39	0,39	0,43	0,34
Real estat	0,27	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,32	0,32	0,34	0,31
Jasa perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,04	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,04
Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial	0,88	0,89	0,92	0,91	1,07	0,98	1,23	1,23	1,36	1,10
Jasa pendidikan	0,79	0,79	0,90	0,87	0,99	0,97	1,14	1,14	1,29	1,09
Jasa kesehatan dan kegiatan social	0,28	0,28	0,30	0,29	0,33	0,31	0,37	0,37	0,41	0,35
Jasa lainnya	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,15	0,18	0,18	0,19	0,16



## 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

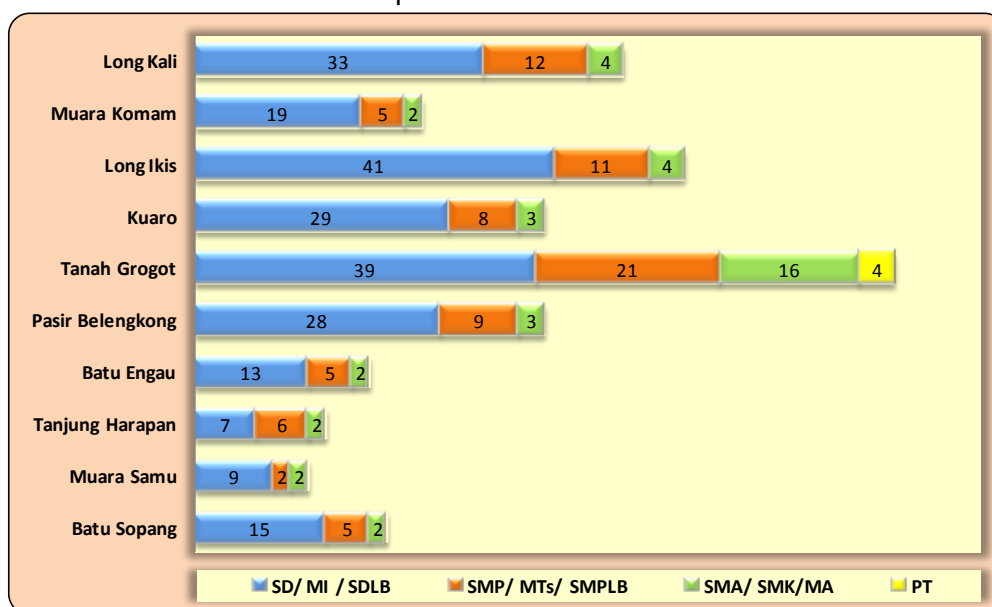
### 2.2.2.1. Pendidikan

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, pendidikan merupakan elemen penting perencanaan agar individu atau masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasannya. Dengan dasar pendidikan yang kuat, individu atau masyarakat diharapkan mampu meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan dan mampu memberdayakan diri dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dapat hidup sejahtera.

Pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Paser terkait dengan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari beberapa indikator pada angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka kelulusan, angka kematian bayi, angka usia harapan hidup, dan rasio penduduk yang bekerja.

Kemajuan dunia pendidikan pada suatu wilayah tidak lepas dari campur tangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu wujud peran serta pemerintah dalam kemajuan dunia pendidikan adalah peningkatan jumlah sekolah dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2016, jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Paser berdasarkan tingkat pendidikan adalah sekolah dasar 233 unit, SLTP 84 unit, SLTA 40 unit, dan Perguruan Tinggi 4 unit.

**Grafik II.17.**  
Keberadaan Fasilitas Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser Tahun 2016

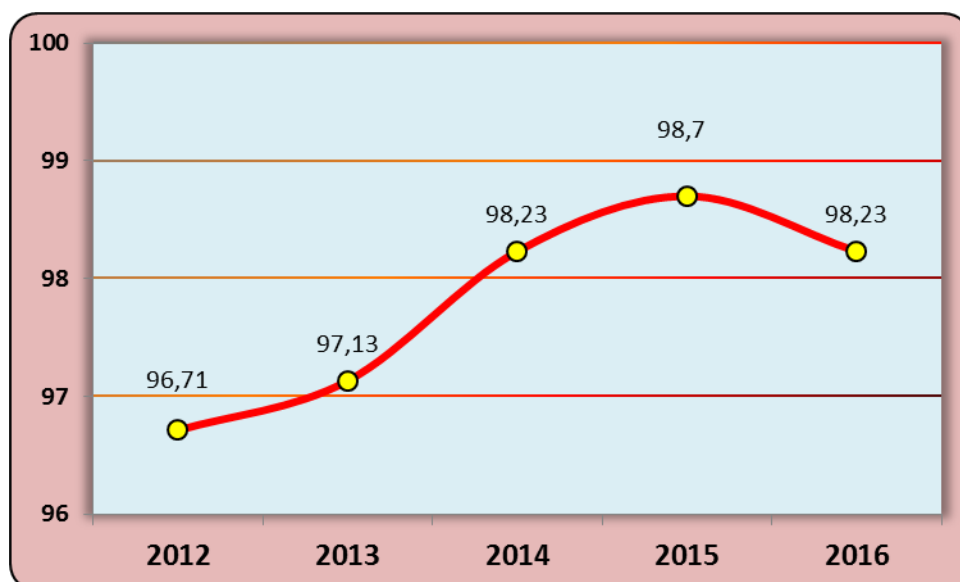


a. Angka Melek Huruf

Spesifik pada elemen pengetahuan, tingkat melek huruf menjadi indikator kunci dasar. Selain menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan, indikator angka melek huruf juga menjadi dasar bagi seseorang dalam meningkatkan kualitas hidupnya terkait pengembangan pembelajaran berkelanjutan dalam hal mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi, serta penggalian potensi.

Angka melek huruf di Kabupaten Paser selama kurun waktu 2012–2016 menunjukkan angka yang fluktuatif. Tahun 2012 capaian angka melek huruf Kabupaten Paser tercatat sebesar 96,71% kemudian berturut-turut meningkat menjadi 97,13% di tahun 2013, 98,23% di tahun 2014, 98,70% di tahun 2015 dan turun menjadi 98,23% di tahun 2016. Berikut adalah perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Paser Tahun 2012-2016 :

**Grafik II.18.**  
Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke Atas  
Di Kabupaten Paser Tahun 2012-2016



b. Angka rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Paser, selama 2012-2016 terjadi peningkatan kualitas pendidikan

yaitu dari 7,78 di tahun 2012 menjadi 8,12 di tahun 2016. Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Paser ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kabupaten Paser semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Berikut adalah perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Paser Tahun 2012-2016.

**Tabel II.19.**  
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Paser  
Tahun 2012 - 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Rata-rata Lama sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas</b>	7,78	7,96	7,99	8,12	8.12

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, 2017

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK Kabupaten Paser tahun 2011-2015 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel II.20.**  
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Paser Tahun 2012 - 2016

No.	Angka Partisipasi Kasar	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	SD/MI	117,99	117,8	117,78	114,53	120.11
2.	SMP/MTSn	97,53	97,53	97,53	98,00	96.13
3.	SMA/SMK/MA	79,55	79,07	79,07	82,00	76.02
	Rata-rata APK	98,28	98,13	98,13	98,18	97.42

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser 2017

Dari tabel di atas, Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI pada tahun tahun 2015 yakni 114,53% mengalami kenaikan menjadi 120.11% pada tahun 2016 hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 5.58%. Nilai APK masih

lebih dari 100% hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan. APK tingkat SMP/MTSn pada tahun 2015 adalah 98.00% sedangkan pada tahun 2016 adalah 96.13% hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 1.87%. APK tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2015 adalah 82% turun menjadi 76.02% pada tahun 2016. Sedangkan rata-rata APK selama 5 tahun terakhir (tahun 2012 sampai dengan tahun 2016) turun dari 98.28 menjadi 97.42% atau turun sebesar 0.86%, hal ini ini berarti adanya penurunan partisipasi penduduk terhadap pendidikan.

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah presentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan sekolah tersebut. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Paser tingkat SD, SLTP dan SLTA

**Tabel.II.21.**

Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Paser Tahun 2012 - 2016

No.	Angka Partisipasi Murni	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	SD/MI	96,40	97, 97	97,79	95,90	104.86
2.	SMP/MTSn	73,74	74, 25	66,02	69,00	77.01
3.	SMA/SMK/MA	52,18	53,79	43,65	52,50	58.81
	Rata-rata APM	71,37	69,15	69,15	72,47	80.27

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser 2017

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI pada tahun 2016 mengalami kenaikan hingga 8.96% dibandingkan pada tahun 2015 hingga mencapai angka 104.86%. Sedangkan angka APM tingkat SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sebesar 8,01 % hingga mencapai angka 77.01%. APM tingkat SMA/SMK/MA juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2015 sebesar 52.50% naik menjadi 58.81% pada tahun 2016. Nilai APM paling tinggi terletak pada jenjang pendidikan SD/MI sedangkan nilai APM paling rendah ada pada jenjang SMA/SMK/MA. Dan

secara umum dapat dilihat dari tabel di atas bahwa APM di Kabupaten Paser masih belum mencapai 100%.

e. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Paser selama kurun waktu 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.22.**  
Angka Kelulusan Menurut Jenjang  
di Kabupaten Paser Tahun 2012 – 2016

No.	Angka Kelulusan Sekolah	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	SD/MI	96,55	88	93,20	99,26	99,26
2.	SMP/MTs	91,63	82	90,17	97,18	97,18
3.	SMA/SMK/MA	97,63	99	98,07	98,16	99,20
	Rata-rata	95,27	90	93,81	98,20	98,55

Sumber : Dinas pendidikan Kabupaten Paser, 2017

Tabel di atas menggambarkan tingkat kelulusan berdasarkan jenjang pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir, persentase kelulusan rata-rata di semua jenjang pendidikan mengalami kenaikan yaitu dari 98,20% pada tahun 2015 menjadi 98,55% pada tahun 2016, atau naik sebesar 0,35%.

f. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Paser selama kurun waktu 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.23.**  
Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang  
di Kabupaten Paser Tahun 2012-2016

No	Jenjang Sekolah	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI	0,4	0,4	0,14	0,2	0.01
2	SMP/MTs	0,45	0,45	0,45	0,07	0.072
3	SMA/SMK/MA	1,43	1,43	1,43	1,42	0.072
	Rata-rata	0,76	0,76	0,67	0,56	0.051

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, 2017

Ditinjau dari keberlanjutan sekolah, rata-rata angka putus sekolah dalam lima tahun terakhir (dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016) menunjukkan penurunan, yaitu dari 0,76 menjadi 0,051. Penurunan terbesar angka putus sekolah ada pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA yaitu dari 1,42 menjadi 0.072 pada tahun 2016.

#### 2.2.2.2.Kesehatan

##### a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2012-2016), capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Paser memperlihatkan tren penurunan. Angka kematian bayi pada tahun 2012 sebesar 78 bayi, pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 56 bayi, pada tahun 2014 terjadi peningkatan kasus kematian bayi sebesar 76 bayi sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan lagi menjadi 80 bayi dan pada tahun 2016 angka kematian bayi turun menjadi 66 bayi. Adapun penyebab kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Paser rata-rata disebabkan oleh gangguan perinatal, saluran napas, diare, gangguan sistem syaraf, tetanus dan infeksi lainnya.

**Tabell.24.**

Jumlah Angka Kematian Bayi

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kasus Kematian Bayi	78	56	76	80	66

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2017*

##### b. Angka Kematian Balita (AKB)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2012-2016), capaian Angka Kematian Balita (AKB) Kabupaten Paser memperlihatkan tren penurunan. Angka kematian balita pada tahun 2012 sebesar 78 balita, pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 60 balita, pada tahun 2014 terjadi peningkatan kasus kematian balita sebesar 88 balita, pada tahun 2015 mengalami penurunan kasus kematian balita menjadi 11 balita sedangkan pada tahun 2016 angka kematian bayi sama dengan tahun 2015 yaitu sebanyak 11 balita. Adapun penyebab utama kematian balita yang terjadi di Kabupaten Paser adalah ISPA dan Diare.

**Tabel II.25.**  
Jumlah Angka Kematian Balita

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kasus Kematian Balita	78	60	88	11	11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2017

c. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat derajat kesehatan ibu. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Paser dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi dari 10 orang pada tahun 2012, naik menjadi 13 orang pada tahun 2013, kemudian turun menjadi 8 orang pada tahun 2014 dan 2015, sedangkan pada tahun 2016 naik lagi menjadi 9 orang. Namun demikian angka ini dibawah standar yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI sebanyak 150 orang per 100.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa program Pemerintah Kabupaten Paser dalam menurunkan angka kematian Ibu sudah cukup berhasil.

**Tabel II.26.**  
Jumlah Angka Kematian Ibu

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kasus Kematian Ibu	10	13	8	8	9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2017

Persoalan kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Paser selama kurun waktu 2012-2016 umumnya disebabkan oleh karena tingkat pengetahuan dari masyarakat yang masih rendah mengenai masalah kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan semasa kehamilan, pendarahan, eklapsi, lambat dirujuk, dan persalinan belum sepenuhnya ditangani oleh bidan atau tenaga kesehatan. Selain itu kondisi geografis yang sangat luas dan sulit serta topografi pegunungan menyebabkan kurang atau sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.

d. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama disektor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan angka usia

harapan hidup dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam hal ini faktor kesehatan lebih berperan penting selain faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang baik.

Perkembangan Angka usia Harapan Hidup di Kabupaten Paser dalam kurun waktu 2012-2016 menunjukkan tren yang relatif konstan. Dari 71,85 di tahun 2012 meningkat menjadi 73 di tahun 2016.

**Tabel II.27.**  
Perkembangan Angka Harapan Hidup Penduduk  
Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2016

Indikator Derajat Kesehatan	Persentase Angka Harapan Hidup				
	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup	71,85	71,86	71,88	71,98	73

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2017

e. Status Gizi Balita

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status gizi. Untuk kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Perkembangan prevalensi balita gizi buruk dalam kurun waktu 2012-2016 mengalami fluktuasi.

**Tabel II.28.**  
Perkembangan Status Gizi Balita di Kabupaten Paser Tahun 2011-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase balita dengan gizi buruk	2,26%	2,5%	5,6%	5,6%	4,1%
2	Persentase balita dengan gizi kurang	10,40%	12,2%	12,8%	12%	17,5%
3	Persentase kecamatan bebas rawan gizi	70%	40%	50%	40%	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupate Paser, 2017

Status gizi di Kabupaten Paser masih perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan, ini dapat dilihat dengan presentase balita dengan gizi buruk berada pada angka di atas yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI sebesar 1,5%. Pada tahun 2012 balita dengan gizi buruk sebesar 2,26%,



meningkat menjadi 4,1% pada tahun 2016. Balita dengan gizi kurang juga mengalami peningkatan selama tahun 2012-2016, dari 10,40% pada tahun 2012 menjadi 17,5% pada tahun 2016.

### 2.2.2.3. Pertanahan

Bidang pertanahan merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah dan secara khusus berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena pertanahan terkait dengan aset masyarakat maupun pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk berbagai hal dalam memenuhi kebutuhan hidup, yaitu antara lain sebagai tempat pemukiman, sebagai sarana produktivitas masyarakat, hingga sarana bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan dan melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Pada bagian ini menyajikan data mengenai berbagai hal terkait pertanahan, sebagaimana dapat dilihat dalam dibawah ini :

**Tabel II.29.**  
Banyaknya Permohonan dan Penyelesaian Tentang Pertanahan  
di Kabupaten Paser Tahun 2016

Uraian	Permohonan	Diselesaikan	Sisa
Pengukuran	320	314	6
Peta bidang	202	156	46
Kutipan	0	0	0
SKPT	58	47	11
Sertifikat pemberian hak atas tanah	195	54	141
Sertifikat peralihan hak atas tanah	511	507	4
Sertifikat tanggungan kredit verban dan hipotik	569	565	4

Sumber : Kabupaten Paser dalam Angka Tahun 2017

### 2.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Pada bagian ini dijelaskan mengenai analisis kinerja terhadap Perkembangan Obyek wisata di Kabupaten Paser.

Potensi pariwisata di Kabupaten Paser cukup layak untuk dikembangkan sebagai penopang perekonomian daerah, baik objek wisata alam maupun wisata sejarahnya. Berikut beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Paser

**Tabel II.30.**  
Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Paser Tahun 2014-2016

Nama Tempat Rekreasi	Jumlah Pengunjung		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Museum Sadurengas	2590	2800	4540
Tahura Lati Petangis	3163	3079	3300
Doyam Turu/Liang Batulis	1200	451	600
Kemilau Laut Pondong	2400	3500	5500
Danum Layong	2700	2892	1700
Goa Layong/Goa Tengkorak	1600	2100	2700
Goa Losan	760	800	600
Liang Mangku Langit	481	950	1092
Doyam Seriam	450	419	540
Kapal Susur Kandilo	280	0	0
<b>Jumlah Pengunjung</b>	<b>15,624</b>	<b>16,891</b>	<b>20,572</b>

Sumber : Data Sektoral Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa pertumbuhan jumlah pengunjung objek wisata di kabupaten Paser mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang hanya sebesar 16,891 orang pengunjung meningkat menjadi 20,572 Orang pengunjung pada tahun 2016. Peningkatan jumlah pengunjung sebanyak 3.681 orang pengunjung pada tahun 2016.

**Tabel II.31.**  
Jumlah Perkumpulan Kesenian, Jumlah Perkumpulan Olahraga Dan Jumlah Sarana Olahraga Di Kabupaten Paser Tahun 2016

NO	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Perkumpulan Kesenian	63	Kelompok Seni
2	Jumlah Klub Olahraga	200	Termasuk Cabang Olahraga
3	Jumlah Sarana Olahraga	56	Termasuk Gedung Olahraga

Sumber : Data Sektoral Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, 2017

## 2.3. Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

#### 2.3.1.1. Pendidikan

Jumlah dan laju penduduk yang besar merupakan aset bagi pembangunan apabila diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik.

Penduduk yang besar dengan tingkat SDM yang rendah hanya akan menjadi beban bagi pembangunan di suatu wilayah. Oleh sebab itu, penanganan masalah penduduk sebaiknya tidak hanya diarahkan pada upaya penekanan laju pertumbuhannya akan tetapi lebih dititikberatkan pada peningkatan sumber daya manusianya. Usaha peningkatan sumber daya manusia secara sistemik dapat diwujudkan salah satunya melalui pendidikan.

a. Angka Partisipasi Sekolah

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) atau menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar atau menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar atau menengah. Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Akan tetapi, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang perlu diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah.

Pada tahun 2015, APS penduduk usia 7-12 tahun sebesar 98.98%, sedangkan pada tahun 2016 APS usia 7 -12 sebesar 102%, terjadi kenaikan sebesar 3.02%. Sementara itu pada tahun 2015 APS penduduk usia 13-15 tahun sebesar 96.52% mengalami penurunan menjadi 77.75% pada tahun 2016 atau terjadi penurunan sebesar 18.77%, sedangkan untuk APS penduduk usia 16-18 tahun di tahun 2015 sebesar 82.23 menjadi 56.65 pada tahun 2016 atau terjadi penurunan sebesar 25.58%

**Tabel II.32.**  
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah  
di Kabupaten Paser Tahun 2012 – 2016

No	Usia Sekolah	2012	2013	2014	2015	2016
1	7-12 Tahun	98,09	99,73	99,49	98,98	102
2	13-15 Tahun	98,75	97,12	99,40	96,52	77.75
3	16-18 Tahun	65,09	69,62	73,97	82,23	56.65

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser 2017

## b. Rasio jumlah Sekolah, Murid dan Guru

Dalam upaya peningkatan tingkat pendidikan penduduk, ketersediaan sarana dan tenaga pengajar yang memadai sesuai dengan potensi jumlah penduduk usia sekolah yang ada merupakan hal pokok yang harus menjadi perhatian. Selanjutnya data Jumlah sekolah, murid dan guru dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel II.33.**  
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Kabupaten Paser  
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012 – 2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>SD/MI/SDLB</b>					
	Jumlah SD	225	227	230	232	233
	Murid	34,033	33,242	34,607	34,738	34,810
	Guru	3,115	2,338	3,061	2,976	2,394
	Rasio Murid Guru	10,93	14,22	14,22	11,67	14,54
	Rasio Murid Sekolah	151,26	146,44	150,47	149,73	149,40
<b>2</b>	<b>SLTP/MTS/SMP LB</b>					
	Jumlah SLTP	75	77	83	85	84
	Murid	11,439	12,354	13,312	13,199	14,252
	Guru	985	1,015	995	1,285	1,073
	Rasio Murid Guru	11,61	12,17	13,38	10,27	13,28
	Rasio Murid Sekolah	152,52	160,44	160,39	255,282	169,67
<b>3</b>	<b>SLTA/SMK/MA</b>					
	Jumlah SLTA	36	38	41	42	40
	Murid	8,040	9,051	9,309	9,137	10,502
	Guru	916	866	735	964	886
	Rasio Murid Guru	8,78	10,45	12,67	9,47	11,85
	Rasio Murid Sekolah	223,33	238,18	227,05	217,55	262,55

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser 2017

Pada semua jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA jumlah murid mengalami kenaikan yang signifikan terutama sejak diprioritaskan program wajib belajar 9 tahun, yaitu dari tahun 2015 masing-masing sebanyak 34.738, 13.199, dan 9.137 murid menjadi 34.810, 14.252 dan 10.502 murid pada tahun 2016. Sebaliknya jumlah guru mengalami penurunan di semua jenjang pendidikan, hal ini menyebabkan tingkat rasio guru dan murid menjadi agak tinggi pada tahun 2016.

2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

a. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Posyandu sebagai garda terdepan pembangunan kesehatan memiliki fungsi dalam memberikan informasi dan pelayanan kesehatan dasar khususnya untuk ibu, bayi, dan balita. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi.

Selama kurun waktu 2012 sampai dengan 2016, jumlah posyandu di Kabupaten Paser menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah posyandu di Kabupaten Paser tercatat sebanyak 356 posyandu. Dari 356 posyandu tersebut melayani 34,874 balita dengan rasio posyandu per satuan balita adalah 10.21.

**Tabel II.34.**

Jumlah Posyandu, Jumlah Balita, dan Rasio Posyandu per Satuan Balita Di Kabupaten Paser Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Posyandu	336	369	346	346	356
Jumlah Balita	21.595	24.154	32.477	33,989	34.874
Rasio Posyandu per satuan balita	16	15	11	11	10,21

Sumber : Dinas kesehatan Kabupaten Paser 2017

b. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Paser dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan akses dan fasilitas sarana kesehatan kepada masyarakat.

Pada tahun 2016 jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Paser sebanyak 125 unit dengan rasio sebesar 0,46. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melayani 2,146 penduduk.

**Tabel II.35.**  
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk  
Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk	295.023	298.486	329.985	262,301	268.261
Jumlah Puskesmas	17	17	17	17	17
Jumlah Puskesmas Pembantu	95	100	108	108	108
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	112	117	125	125	125
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	0,4	0,4	0,4	0,4	0,46

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser 2017

c. Rasio Dokter per satuan Penduduk

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Tentunya kondisi tersebut memerlukan dukungan faktor lainnya misalkan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2016, jumlah dokter umum yang ada di Kabupaten Paser sebanyak 49 orang atau mengalami kenaikan dari tahun 2015 yang sebanyak 46 dokter. Rasio dokter umum per 100.000 penduduk di Kabupaten Paser sebesar 18. Dengan kata lain 1 orang dokter umum di Kabupaten Paser melayani 5,475 penduduk.

Sedangkan untuk ketersediaan tenaga dokter spesialis di Kabupaten Paser tahun 2016 adalah sebanyak 16 orang menurun dari tahun 2015 sebanyak 17 orang. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di Kabupaten Paser tahun 2015 adalah sebesar 6. Hal ini berarti 1 orang dokter spesialis di Kabupaten Paser melayani 16,766 penduduk.

Jumlah dokter gigi di Kabupaten Paser tahun 2016 sebanyak 19 orang meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 15 orang. Rasio dokter gigi di Kabupaten Paser per 100.000 penduduk sebesar 7.

**Tabel II.36.**

Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 penduduk Kabupaten Paser Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk	295.023	298.486	329.985	262.301	268.261
Dokter Umum	42	50	46	46	49
Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk	14	17	14	15	18
Dokter Spesialis	12	15	17	17	16
Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk	4	5	5	5	6
Dokter Gigi	12	12	15	15	19
Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	4	4	5	5	7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser 2017

d. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi. Jumlah puskesmas di Kabupaten Paser pada tahun 2016 sebanyak 17 puskesmas yang tersebar di 10 kecamatan. Angka kunjungan puskesmas sebesar 367,712. Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu di Kabupaten Paser sebanyak 108 puskesmas pembantu yang tersebar di 144 desa/kelurahan.

**Tabel II.37.**

Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Paser Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Puskesmas	17	17	17	17	17
Jumlah Kecamatan	10	10	10	10	10
Jumlah Kunjungan Puskesmas	200.402	304.735	355.202	261.706	367.712
Jumlah Puskesmas Pembantu	95	100	108	108	108
Jumlah Desa/Kelurahan	141	144	144	144	144

Sumber : Dinas kesehatan Kabupaten Paser 2017

## e. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Paser tahun 2016 mencapai 90.70%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di Kabupaten Paser ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain akses terhadap sarana dan pelayanan kesehatan khususnya pertolongan persalinan semakin mudah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan.

**Tabel II.38.**

Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Ibu yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan	6.084	5.044	5.189	5.381	5.365
Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	8.883	6.046	5.053	6.936	6.197
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	68,5	83,4	102,7	77,6	90,7

Sumber : Dinas kesehatan Kabupaten Paser 2017

## 2.3.1.3. Pekerjaan Umum

Jalan dan jembatan merupakan prasarana yang sangat penting bagi masyarakat. Sesuai dengan fungsinya, kondisi jalan sangat mempengaruhi kelancaran hubungan dari satu wilayah ke wilayah lain. Kondisi jalan yang kurang baik/rusak dapat mengakibatkan suatu wilayah menjadi terisolir dan perkembangannya menjadi tertinggal dari daerah lain. Pada tahun 2016 secara umum jalan di Kabupaten Paser sangat memprihatinkan dimana 38.7 % (389,96 km) jalan masih dalam kondisi rusak dan rusak berat. Lebih lengkapnya dijelaskan dalam tabel II.38.berikut :



**Tabel II.39.**

Panjang Jalan Menurut Status Jalan dan Kondisi (km)  
di Kabupaten Paser Tahun 2016

Kondisi Jalan	Status Jalan			
	Desa	Kabupaten	Provinsi	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Baik	128,19	263,78	43,72	130,38
Sedang	75,81	351,44	75,30	75,00
Rusak	87,94	238,10	90,23	19,33
Rusak Berat	87,81	151,86	33,19	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser 2017

**Tabel II.40.**

Panjang Jalan (km) dari tahun 2012-2016 di Kabupaten Paser

Tahun	Status Jalan			
	Desa	Kabupaten	Provinsi	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	316,46	631,75	276,33	224,71
2013	379,75	694,85	276,33	224,71
2014	379,75	625,44	242,34	224,71
2015	379,75	625,44	242,34	224,71
2016	379,75	625,44	242,34	224,71

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser 2017

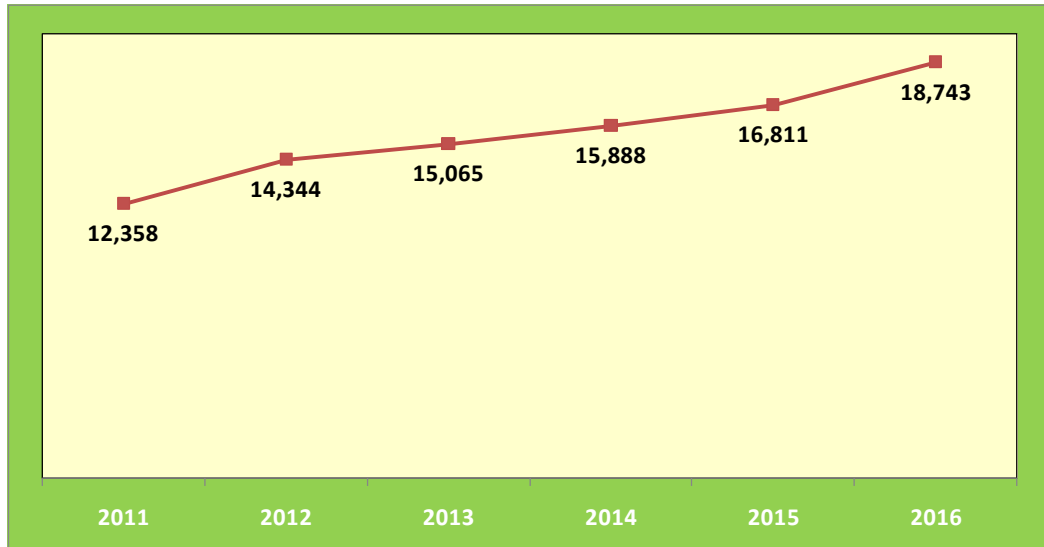
Pemeliharaan jalan yang ada perlu direncanakan dengan lebih cermat, sehingga terjadi keseimbangan antara perluasan jaringan jalan dan mempertahankan/ meningkatkan kualitas jalan. Upaya mempertahankan kualitas jalan tersebut sangat relevan dengan dua faktor penting yaitu: (a) tingginya curah hujan yang secara umum cukup merata di seluruh wilayah Kabupaten Paser; serta (b) minim atau kurang berfungsinya jaringan drainase yang menampung air limpasan (*run-off*) dari jalan raya walaupun di wilayah perkotaan.

Selanjutnya dalam hal penyediaan air bersih, masyarakat Kabupaten Paser sangat bergantung kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal ini terjadi karena kondisi air tanah di Kabupaten Paser kurang bagus untuk konsumsi air minum.

Jumlah pelanggan PDAM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan penambahan penduduk. Seiring dengan tingkat kebutuhan masyarakat akan air bersih.

**Grafik II.8.**

Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Paser tahun 2011-2016

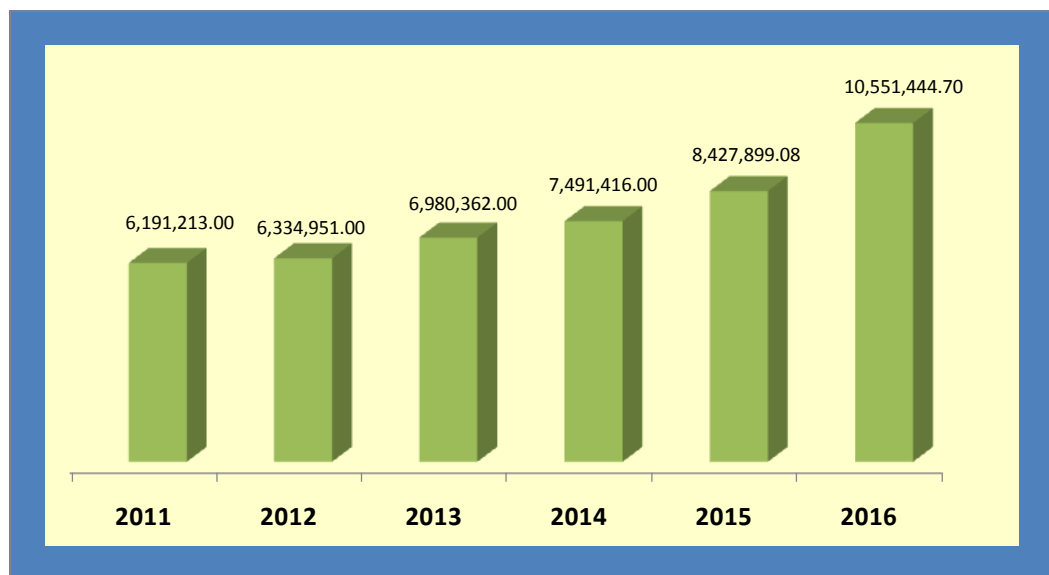


Sumber : Data PDAM Tirta Kandilo, 2017

PDAM terus berupaya menaikkan produksi air minum. Dibanding tahun 2015 sebesar 8.427.899,08 M<sup>3</sup>, produksi PDAM pada tahun 2016 meningkat menjadi 10.551.444,70 M<sup>3</sup>.

**Grafik II.9.**

Produksi Air Minum PDAM (M<sup>3</sup>) di Kabupaten Paser Tahun 2011 -2016



Sumber : Data PDAM Tirta Kandilo, 2017

## 2.3.1.4. Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman

Analisis kinerja atas layanan urusan perumahan untuk Kabupaten Paser mengacu pada tingkat ketersediaan pasokan listrik kepada rumah tangga. Hal tersebut digunakan sebagai tolak ukur seberapa besar kebutuhan pasokan listrik yang akan ditargetkan pemenuhannya dalam jangka lima tahun dalam RPJMD ini. Sehingga data yang dibutuhkan adalah rasio rumah tangga pengguna listrik atau jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Paser.

**Tabel II. 41.**

Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Kabupaten Paser 2012 - 2016

Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	2012	2013	2014	2015	2016
Milik sendiri	74,73	78,99	78,50	86,15	86,15
Kontrak	1,50	1,29	1,58	8,56	8,56
Sewa	11,56	9,18	6,12	0,00	0,00
Bebas sewa	3,71	1,88	2,77	3,75	3,75
Dinas	5,67	4,08	5,89	1,54	1,54
Milik orang tua/ sanak /saudara	2,65	4,58	5,14	0,00	0,00
Lainnya	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Inkesra Kabupaten Paser 2016

Selama lima tahun terakhir, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah sendiri tidak ada perubahan, sebagaimana terlihat dalam tabel di atas. Begitu juga, untuk kepemilikan tempat tinggal yang berstatus menyewa atau kontrak tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 8.56%. Dari aspek kepemilikan tempat tinggal, terdapat perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan semakin tingginya kepemilikan tempat tinggal dengan status milik sendiri.

**Tabel II. 42.**

Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Sendiri</b>	81,80	82,62	82,43	91,32	91,32
<b>Bersama</b>	3,46	5,19	4,85	3,21	3,21
<b>Umum</b>	0,82	1,46	0,76	2,01	2,01
<b>Tidak ada</b>	14,32	10,73	11,96	3,46	3,46

Sumber : Inkesra Kabupaten Paser 2016

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Paser sudah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri (91,32 persen). Untuk rumah tangga yang fasilitas tempat buang air besarnya secara bersama-sama dan umum persentasenya masing-masing sebesar 3,21 dan 2,01 persen. Sementara itu masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar dimana persentasenya di tahun 2016 mencapai 3,46 persen. Dari penjelasan data tersebut di atas, ternyata masih terdapat rumah tangga yang tidak ada fasilitas tempat buang air besarnya. Hal ini diperkirakan terdapat di wilayah pedesaan dan pesisir pantai, yang disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kemampuan untuk membuat tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan. Kondisi perumahan yang tidak memiliki fasilitas buang besar perlu mendapat perhatian pemerintah agar perumahan warga memenuhi standar kesehatan dasar.

#### 2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2016 jumlah gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Paser mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Tahun 2015 jumlah pelanggaran kamtibmas yang terjadi di wilayah Kabupaten Paser ada sebanyak 431 kejadian dan tahun 2016 naik menjadi 438 kejadian.

**Tabel II.43.**  
Banyaknya Gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum  
Polres Paser 2016

Tahun	Kejadian	Diselesaikan
2016	438	285
2015	431	244
2014	313	189
2013	425	221
2012	522	306
2011	484	358
2010	465	255

Sumber : Data Polres Paser 2017

Pelanggaran Kamtibmas yang banyak terjadi adalah kasus pencurian. Sementara untuk angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Paser masih cukup tinggi.

Jumlah anggota Linmas terlatih di Kabupaten Paser mengalami penurunan dari tahun 2012 ke tahun 2013 dari 2.078 menjadi 464 orang. Pada tahun 2014, jumlah anggota Linmas terlatih di Kabupaten Paser kembali mengalami peningkatan menjadi 2.038 orang, sedangkan pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak ada penambahan dan pengurangan jumlah anggota Linmas.

**Tabel II.44.**

Jumlah Anggota Linmas Terlatih di Kabupaten Paser 2016

No	Kecamatan	Jumlah
1	Batu Sopang	142
2	Muara Samu	88
3	Tanjung Harapan	94
4	Batu Engau	144
5	Pasir Belengkong	206
6	Tanah Grogot	365
7	Kuaro	198
8	Long Ikis	343
9	Muara Komam	142
10	Long Kali	266
	Cadangan Kabupaten	50
	2016	2.038
	2015	2.038
	2014	2.038
	2013	464
	2012	2.078

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2017

#### 2.3.1.6. Sosial

Layanan urusan wajib sosial terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sehingga, sebagai tolak ukur untuk menentukan strategi dalam hal memenuhi kewajiban tersebut, seharusnya diketahui data mengenai jumlah sarana sosial seperti panti asuan, panti jompo dan panti rehabilitasi, serta jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial. Kategori PMKS di Kabupaten Paser terdiri dari Balita terlantar, anak terlantar, Lansia terlantar, penyandang cacat, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Korban bencana alam.

Tabel II.45.

Jumlah PMKS yang tersedia

Kategori PMKS	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1. Anak balita terlantar	Jiwa	33	63	172	269	210
2. Anak terlantar	Jiwa	39	379	618	379	1,392
3. Lansia terlantar	Jiwa	4.905	4.084	2.282	4.084	4,293
4. Penyandang cacat (disabilitas)	Jiwa	977	477	275	477	477
5. Komunitas Adat Terpencil (KAT)	KK	475	475	475	475	475
6. Korban bencana alam	Jiwa	62	860	860	860	1.573

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Paser 2015

Berdasarkan data di atas, kategori PMKS yang paling meningkat adalah kasus anak terlantar, yaitu meningkat dari 39 pada tahun 2011 menjadi 1.392 pada tahun 2015. Peningkatan ini dapat juga disebabkan karena giatnya pendataan yang dilaksanakan perangkat daerah terkait.

### 2.3.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### 2.3.2.1. Tenaga Kerja

Dalam perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, perlu mempertemukan beberapa bidang perencanaan pembangunan yang saling beririsan selain bidang ketenagakerjaan yaitu demografi, ekonomi dan pendidikan. Ketiga bidang tersebut menjadi pilar dalam program pembangunan yang berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja dan berusaha, produktivitas dan distribusi tenaga kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia angkatan kerja. Tantangan kajian ketenagakerjaan bagi pembangunan adalah mempertemukan ketersediaan angkatan kerja dengan lapangan kerja yang sesuai dan produktif secara ekonomi sehingga mampu menciptakan kemandirian warga.

Dilihat dari struktur penduduk produktif, komposisi penduduk angkatan kerja pada tahun 2016 sebanyak 121.524 orang (65,18 persen) dan bukan angkatan kerja sebanyak 64,936 orang (34,82 persen). Sebagian besar penduduk 90,94 persen dari penduduk angkatan kerja kegiatan utamanya adalah bekerja, tetapi masih ada 9,06 persen yang mencari pekerjaan.

**Tabel II.46.**

Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) menurut kegiatan utama tahun 2016

Kegiatan Utama	Jumlah	Persentase
<b>Angkatan Kerja</b>		
• Bekerja	110.511	59,27
• Pengangguran	11.013	5,91
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>		
• Sekolah	18.784	10,07
• Mengurus Rumah Tangga	40.775	21,87
• Lainnya	5.377	2,88
<b>Jumlah</b>	<b>186.460</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Sektoral Disnakertrans Kabupaten Paser 2017

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Paser mencapai 65,18% pada tahun 2016, sedangkan tingkat pengangguran penduduk usia kerja mencapai 9,06%, hal ini dapat dilihat dari TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) pada tahun 2016.

**Tabel II.47.**

Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan TKK Kabupaten Paser 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Angkatan Kerja (Jiwa)	124.425	110.147	117.188	121.524	121.524
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja / TPAK (%)	72,01	62,03	64,11	65,17	65,18
Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%)	10,18	9,25	6,69	9,06	9,06
Tingkat Kesempatan Kerja / TKK (%)	89,82	90,75	93,31	90,94	90,94

Sumber : Data Sektoral Disnakertrans Kabupaten Paser 2017

Walaupun sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang cukup besar memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser, bukan berarti sektor tersebut juga berkontribusi secara dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan tabel di bawah ini, sektor pertanian masih

menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Lapangan usaha pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 44,63% pada tahun 2016. Pada sisi yang lain, persentase sektor pertambangan dan penggalian hanya menunjukkan angka 9,66% pada tahun 2016, dimana sektor pertambangan dan penggalian ini penyerapan tenaga kerjanya masih di bawah sektor perdagangan dan sektor jasa, masing-masing yaitu sebesar 19,55% dan 16,11%.

**Tabel II.48.**  
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja  
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Paser

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian	37,05	39,81	44,12	44,63	44,63
Pertambangan dan Penggalian	13,48	13,88	14,02	9,66	9,66
Industri	7,14	8,68	4,65	2,14	2,14
Konstruksi	2,95	3,59	2,05	3,61	3,61
Perdagangan	15,73	14,65	17,41	19,55	19,55
Transportasi dan Komunikasi	1,44	2,11	2,13	2,47	2,47
Jasa	20,58	15,70	13,56	16,11	16,11
Lainnya	1,65	1,58	1,87	1,83	1,83
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data Sektoral Disnakertrans Kabupaten Paser 2017

Dengan demikian, pertanian masih menjadi sektor terbesar yang mampu menyerap tenaga kerja di Kabupaten Paser walaupun sumbangannya terhadap PDRB masih rendah. Di samping pertanian, sektor jasa dan perdagangan juga cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Menurunnya daya serap sektor pertambangan dan penggalian dan meningkatnya daya serap sektor lainnya mengindikasikan bahwa sektor lain diluar pertambangan dan penggalian secara perlahan-lahan mengalami penguatan daya serap tenaga kerja.

#### 2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk menunjukkan aspek pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari kualifikasi sumberdaya manusianya atau dari tingkat pendidikan. Pada tingkat SD, APM perempuan/laki-laki di tahun 2011 sejumlah 103.3. Namun di tahun 2012



dan 2013, meskipun tidak terlalu significant APM perempuan pada tingkat SD justru menurun secara berurutan-turut menjadi 99.19 dan 99.10. Demikian halnya pada tingkat SMP, APM perempuan/laki-laki di tahun 2011 sejumlah 100.35, dimana pada tahun 2012 menurun menjadi 83.42. Namun pada tahun 2013, angkanya naik menjadi 103.75. Untuk tingkat SMP, jumlah partisipasi sekolahnya cenderung lebih besar dibandingkan dengan tingkat SD. Trend yang sama juga terjadi pada tingkat SMA. Di tahun 2011, APM perempuan/laki-laki pada tingkat SMA sejumlah 120.06 lalu menurun pada tahun 2012 menjadi 82.13 dan kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 143.48.

Berdasarkan laporan di sector pekerjaan non pertanian juga mengalami peningkatan. Dari tahun 2011-2013 berturut partisipasi perempuan di sector non pertanian adalah 6.2%, 6.9% dan 7.5%. Namun proposi ini sebetulnya tidak serta merta naik dalam arti sebenarnya sebab di tahun 2013, jumlah pekerja perempuan secara abosut angkanya menurun sehingga ketika dihitung jumlah presentase perempuan yang bekerja di sektor non-pertanian seolah-olah meningkat.

Angka partisipasi perempuan baik dalam kategori pendidikan sekolah SD-SMA maupun melek huruf ternyata tidak diikuti dengan jumlah partisipasi perempuan di ranah politik. Padahal ukuran kesetaraan sebetulnya tidak hanya selesai dilihat dari angka partisipasi sekolahnya namun juga kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan yang salah satunya direpresentasikan dalam partisipasi di ranah politik. Berdasarkan tabel tersebut, angka partisipasi perempuan di ranah politik justru sangat rendah. Di periode tahun 2010 hingga 2013 perbandingan perempuan dan laki-laki hanya 12%. Angka ini tidak mengalami lonjakan yang cukup berarti sebab pada pemilu legislatif yang terakhir yakni tahun 2014 perbandingannya hanya 16%.

Sedangkan upaya untuk perlindungan anak masih sangat perlu perhatian lebih intensif. Hingga saat ini masih terdapat balita dan anak terlantar yang membutuhkan pertolongan, untuk balita terlantar mengalami kenaikan dari tahun 2012 sebanyak 172 balita menjadi 269 balita yang perlu ditangani. Sampai saat ini, Kabupaten Paser belum menyediakan Panti Asuhan anak yang dapat merehabilitasi kasus-kasus anak dan balita terlantar.

## 2.3.2.3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu bagian dari cita-cita nasional yang harus terdukung juga dengan cita-cita daerah. Produksi tanaman pangan setempat diharapkan mampu menyuplai kebutuhan pangan masyarakat. Sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan dominan dapat dimaksimalkan produksinya agar memenuhi kebutuhan warga masyarakat Kabupaten Paser secara mandiri.

Tabel II.49.

Produksi Padi dan Palawija (Ton) di Kabupaten Paser Tahun 2011 - 2016

Jenis Produksi	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Padi Sawah	26.336	27.959	32.587	29.490	26.429	31.566
Padi Ladang	8.109	9.086	8.512	7.355	9.862	9.230
Jagung	529	1.060	764	849	1.058	1.170
Ubi Kayu	2.633	1.875	1.502	1.344	1.645	855
Ubi Jalar	1.446	767	1.134	635	411	212
Kacang Tanah	111	111	98	70	45	75
Kacang Kedelai	155	86	174	86	137	252
Kacang Hijau	54	14	19	25	14	18

Sumber : Statistik Dinas Pertanian Kab. Paser 2017

Dilihat dari distribusi hasil panen, kecamatan yang memberikan kontribusi terbesar untuk produksi padi (sawah maupun ladang) adalah Kecamatan Long Kali dengan jumlah produksi 14.321 ton kemudian Kecamatan Pasir Belengkong dengan jumlah 9.123 ton, disusul Kecamatan Tanah Grogot dengan jumlah produksi padi 4.954 ton. Khusus untuk padi ladang yang biasa tersebar di daerah lahan kering, kecamatan yang memberikan kontribusi produksi padi ladang terbesar adalah Kecamatan Muara Komam dengan jumlah 2.046 ton, Kecamatan Batu Engau dengan jumlah 1.621 ton dan disusul Kecamatan Muara Samu dengan jumlah 1.394 ton. Sehingga sampai saat ini Kecamatan Longkali merupakan wilayah pertanian hasil pangan yang menyumbang produksi padi paling besar untuk di Kabupaten Paser.

**Tabel II.50.**

Luas Panen, Produksi Padi dan Ladang Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Paser Tahun 2016

No.	Kecamatan	Padi Sawah		Padi Ladang	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Batu Sopang	0.00	0.00	374.00	920.00
2	Muara Samu	22.00	100.00	581.00	1,394.00
3	Tanjung Harapan	24.90	112.00	62.00	16.10
4	Batu Engau	0.00	0.00	568.00	1,621.00
5	Pasir Belengkong	1,947.20	8,982.00	54.00	141.00
6	Tanah Grogot	1,463.50	4,866.00	33.00	88.00
7	Kuaro	170.60	786.00	365.00	949.00
8	Long Ikis	786.60	3,658.00	255.00	651.00
9	Muara Komam	0.00	0.00	751.00	2,046.00
10	Longkali	2,370.00	13,062.00	448.00	1,259.00
	<b>Jumlah</b>	<b>6,784.80</b>	<b>31,566.00</b>	<b>3,491.00</b>	<b>9,230.00</b>

Sumber : Statistik Dinas Pertanian Kab. Paser, 2017

**Tabel II.51.**

Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Per Hektar  
di Kabupaten Paser 2012-2016

Tahun	Produktivitas Padi Sawah Per Hektar	Produktivitas Padi Ladang Per Hektar
2012	4,01	2,73
2013	4,50	2,78
2014	4,59	2,83
2015	4,34	3,00
2016	4,65	2,64

Sumber : Statistik Sektoral Dinas Pertanian, Kabupaten Paser Tahun 2017

Produktivitas padi sawah per hektar menunjukkan kondisi fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,25 ton per hektar, sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,31 ton per hektar. Kondisi fluktuatif ini juga terjadi pada produktivitas padi ladang, dimana pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,17 ton per hektar, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan

sebesar 0,36 ton per hektar. Tabel di atas menunjukkan bahwa produktivitas padi cenderung berfluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi produktivitas padi masih bisa ditingkatkan agar sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk.

#### 2.3.2.4. Pertanian

Aglomerasi penduduk dan peningkatan infrastruktur jasa membutuhkan pengelolaan lahan yang semakin rapi. Salah satu wujud usaha untuk mengendalikan dan mengatur pengelolaan bangunan adalah adanya IMB. IMB merupakan perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Dengan adanya penetapan IMB di Kabupaten Paser, diusahakan akan terwujudnya ketertiban masyarakat serta kepastian hukum. Individu atau persekutuan (badan) yang akan mendirikan bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan sesuai Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.

**Tabel II.52.**

Jumlah Bangunan ber-IMB Tahun 2013 – 2016

Tahun	Jumlah Bangunan ber-IMB
2013	2.758
2014	3.403
2015	4.930
2016	5.201

Sumber : Data DPMPTSP Kabupaten Paser 2017

Walaupun pengurusan IMB oleh warga belum maksimal, terjadi peningkatan IMB dari tahun 2014 ke tahun 2015, yakni sejumlah 3.403 menjadi 4.930 dan terus meningkat sampai ke tahun 2016 yaitu mencapai 5.201. Dengan adanya pengaturan dalam pendirian bangunan diharapkan rencana konstruksi bangunan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan bersama.

#### 2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Secara garis besar, jenis pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Paser pada 2016 diprioritaskan pada pencegahan pencemaran air, dan udara, serta penyediaan informasi status kerusakan lahan. Guna melihat kondisi pencemaran air dan udara dapat dilihat dari pengelolaan sampah

khususnya mengenai jumlah aglomerasi sampah dan pengelolaan sampah. Saat ini timbunan sampah dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yang menyumbang produksi sampah secara signifikan.

**Tabel II.53.**

Aglomerasi Sampah di Kabupaten Paser 2016

No.	Kecamatan	Timbunan Sampah (m3/hari)
1	Batu Sopang	38.25
2	Muara Samu	7.15
3	Tanjung Harapan	13.09
4	Batu Engau	19.77
5	Pasir Belengkong	39.93
6	Tanah Grogot	107.42
7	Kuaro	40.60
8	Long Ikis	62.29
9	Muara Komam	21.14
10	Long Kali	41.11

Sumber : DLH Kabupaten Paser 2017

Sesuai dengan tabel di atas, timbunan sampah terbanyak berada di Tanah Grogot yakni 107.42 m3/hari. Selain kondisi demografis yang padat, Tanah Grogot merupakan pusat jasa dan perdagangan sehingga menimbulkan produksi sampah yang berlipat ganda. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan aglomerasi sampah adalah penetapan izin pembuangan sampah B3 (bahan beracun dan berbahaya) yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem hayati. Saat ini hanya sembilan perusahaan yang mendapatkan izin pembuangan air limbah yakni PT. Kideco Jaya Agung, PTPN Longkali, PT Borneo Indah, PT Agro Inti Kencanamas, PTPN Semuntai, PTPN Long Pinang, PT Muara Toyu, PT Harapan Sawit dan PT Fajar Surya Swadaya. Perlu adanya aturan yang lebih tegas terkait dengan pemberian izin pembuangan limbah B3. Apalagi sebagian besar limbah tersebut mencemari sumber daya lingkungan yang berpengaruh bagi masyarakat banyak misalnya, sungai, hutan, tanah bahkan udara.

#### 2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Layanan dasar kependudukan dan catatan sipil meliputi jumlah penduduk ber-KTP, jumlah penduduk ber-akte kelahiran serta jumlah pasangan berakte nikah. Selain merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi,

ketersediaan dokumen-dokumen tersebut juga sangat mempengaruhi kualitas pendataan daerah terkait jumlah penduduk. Ataupun juga untuk menentukan target group dari program tertentu seperti program keluarga bencana dengan targetnya adalah pasangan sudah menikah yang akan diketahui jumlahnya jika terdaftar/pernah memiliki akte nikah.

#### 2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk konteks Kabupaten Paser, bagian ini memaparkan data mengenai jumlah program pemberdayaan masyarakat. Data tersebut berdampak pada penentuan prioritas program pemberdayaan masyarakat di tahun berikutnya.

#### 2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gerakan Keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga sejahtera diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga diupayakan agar makin membudaya dan makin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan Keluarga Berencana (KB), disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etika dan sosial budaya masyarakat, sehingga norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dihayati dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Lahirnya program keluarga berencana antara lain bertujuan untuk menekan tingginya angka kelahiran. Program seperti ini masih sangat diperlukan karena jika jumlah penduduk tidak dapat dikendalikan, maka upaya yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat bisa menjadi tidak bermakna, karena setiap peningkatan hasil pembangunan akan terserap oleh pertumbuhan penduduk. Usia antara 15-49 tahun merupakan usia subur bagi perempuan karena pada selang usia tersebut kemungkinan perempuan melahirkan anak cukup besar. Perempuan yang usianya berada pada periode ini disebut Wanita Usia Subur ( WUS ) dan Pasangan Usia Subur ( PUS ) bagi yang berstatus kawin. Semakin banyak jumlah PUS, maka semakin banyak pula jumlah anak yang dilahirkan. Semakin banyak jumlah anak maka semakin besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangga. Dengan demikian pembatasan jumlah anak perlu diperhatikan demi tercapainya keluarga yang sejahtera.

**Tabel II.54.**

Presentase Penduduk Perempuan Umur 10 – 49 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan di Kab Paser Tahun 2015

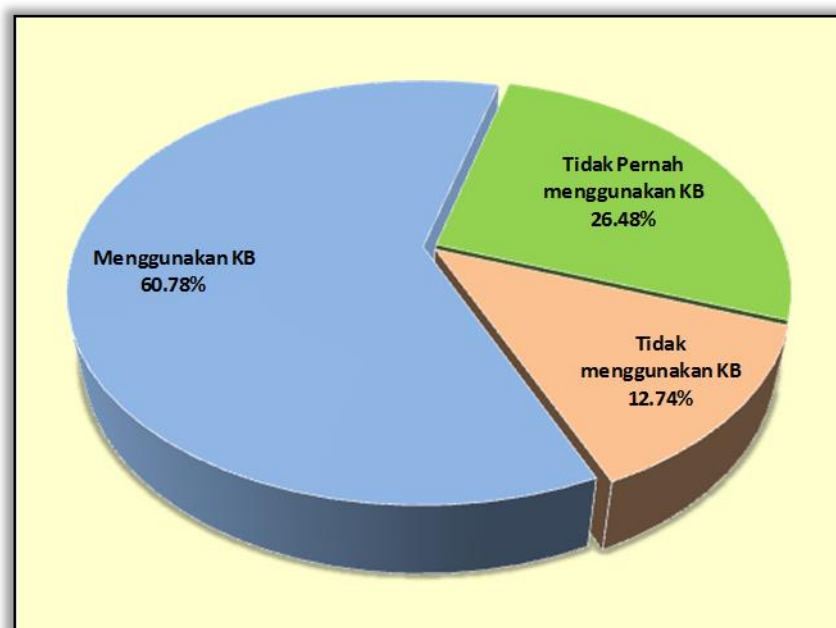
Kelompok Umur	Status Perkawinan			
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10-14	53,06	0,00	0,00	0,00
15-19	24,78	1,79	0,00	0,00
20-24	14,37	10,61	0,00	0,00
25 -29	5,48	19,57	32,73	0,00
30-34	1,07	20,10	19,51	16,90
35-39	0,11	17,27	40,28	19,76
40-44	1,13	17,38	1,80	45,59
45-49	0,00	13,28	5,58	17,75
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data Sektoral DPPKBP3A Kabupaten Paser, 2017

Apabila diperhatikan menurut kelompok umurnya, dapat dikatakan bahwa pada umumnya penduduk perempuan Kabupaten Paser umur 10-49 tahun kawin pada umur dewasa, sedangkan perempuan yang kawin di bawah usia 20 tahun persentasenya tidak lebih dari 5 persen. Gambaran tersebut menunjukkan upaya pendewasaan umur perkawinan di Kabupaten Paser sudah cukup berhasil.

**Grafik II.11.**

Persentase Penduduk Perempuan Umur 15-49 tahun berstatus pernah kawin menurut sedang/tidaknya menggunakan alat KB di Kabupaten Paser 2016



Sumber : Data Sektoral DPPKBP3A Kabupaten Paser, 2017

2.3.2.9. Perhubungan

Aspek lain terkait pelayanan publik dasar adalah tersedianya infrastruktur transportasi yang menjadi sarana mobilitas warganegara. Keberadaan infrastruktur transportasi mempengaruhi kemudahan dalam menjangkau akses pasar maupun akses terhadap pelayanan publik yang lain. Kondisi infrastruktur dalam hal ini akses yang digunakan untuk mencapai tempat pelayanan publik telah tersedia.

**Tabel II.55.**  
Panjang Jalan Menurut Status Jalan (Km)  
di Kabupaten Paser 2010 – 2015

Tahun	Status Jalan			
	Desa	Kabupaten	Propinsi	Nasional
2012	316,46	631,75	276,33	224,71
2013	379,75	694,85	276,33	224,71
2014	379,75	694,85	276,33	224,71
2015	379,75	694,85	276,33	224,71
2016	379.75	625.44	242.34	224,71

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2017

2.3.2.10. Komunikasi dan Informasi

Implikasi bagi terbukanya teknologi informasi, juga berpengaruh terhadap meningkatnya media publik termasuk surat kabar, TV lokal dan radio di Kabupaten Paser. Media lokal berfungsi sebagai sumber informasi sekaligus media politik yang menyuarakan aspirasi warga masyarakat. Meningkatnya media publik dapat dilihat dari semakin meningkatnya jenis surat kabar local dalam lima tahun terakhir.

**Tabel II.56**  
Jenis Surat Kabar Yang Beredar Di kabupaten Paser  
Tahun 2012 – 2016

Jenis Surat Kabar	2012	2013	2014	2015	2016
Nasional	3	3	3	3	3
Lokal	4	4	5	6	6

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser 2017



Pada tahun 2016, surat kabar regional sejumlah 6 buah diantaranya Tribun, Kaltim Pos. Selain surat kabar, muncul juga televisi lokal dan radio lokal yang mengudara di kawasan Kabupaten Paser misalnya Paser TV.

Tidak hanya media cetak dan elektronik, sumber informasi juga berasal dari media internet. Salah satu akses warga terhadap internet dapat melalui warnet yang dapat dikunjungi oleh masyarakat. Pada tahun 2016, rasio jumlah warnet terhadap 1000 penduduk sebanyak 0,21 atau total jumlah absolutnya, 55 unit. Dari total jumlah tersebut, 10 warnet merupakan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) program MENKOMINFO yang menetapkan satu kecamatan 1 warnet.

#### 2.3.2.11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan bagian dari wujud ekonomi riil masyarakat Paser. Oleh sebab itu, guna menentukan strategi pengembangan yang tepat, perlu diketahui mengenai jumlah Koperasi dan UKM di Kabupaten Paser. Kinerja bidang koperasi dapat dilihat dari penambahan jumlah koperasi dan jumlah anggotanya. Dalam kurun waktu 2012-2016 jumlah koperasi di kabupaten Paser terus mengalami peningkatan, tetapi tingkat keaktifan koperasi mengalami penurunan dari 77,3 persen pada tahun 2015 menjadi 72,0 persen pada tahun 2016.

Selain itu, sebagai bagian dari pemberdayaan, perlu juga dilihat sejauh mana Koperasi dan UKM mendapat kemudahan modal. Iklim usaha yang semakin membaik tampak dengan semakin banyaknya jumlah UKM.

**Tabel II.57.**  
Persentase Koperasi Aktif, Jumlah UKM dan UMKM  
di Kabupaten Paser 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Koperasi Aktif	40,1	77,6	78,7	77,3	72,0
2	Jumlah UKM	1.232	1.445	5.625	5.666	13.434
3	Jumlah UMKM	1.970	5.575	5.575	5.556	13.736

Sumber : Data Sektoral Dinas Perindagkop 2017

#### 2.3.2.12. Penanaman Modal

Potensi perekonomian di Kabupaten Paser tidak hanya terfokus pada pertambangan (batu bara) tetapi juga perkebunan sawit. Kedua sector usaha

tersebut padat modal dan menarik banyak investor baik yang berskala nasional maupun asing. Oleh sebab itu, tolok kukur dalam pengembangan investasi daerah dapat dilihat melalui jumlah investor berskala nasional PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) serta jumlah investasi di Kabupaten Paser.

**Tabel II.58.**  
Jumlah Investor 2012 - 2016

Tahun	Jumlah Investor
2012	28
2013	24
2014	19
2015	21
2016	16

Sumber : DPMPTSP, 2017

Iklm investasi yang membaik menyebabkan jumlah investor yang semakin banyak. Industri galian tambang non migas menyerap banyak investor baik dalam negeri maupun luar negeri, apalagi dengan dukungan kemudahan investasi yang diterapkan di Kabupaten Paser.

**Tabel II.59.**  
Jumlah Nilai Investasi 2012 - 2016

Tahun	Jumlah Nilai investasi berskala nasional dan asing (PMDN/PMA)
2012	254.626.866.554
2013	1.221.679.068.111
2014	822.244.787.646
2015	526.348.057.365
2016	528.512.696.470

Sumber : DPMPTSP, 2017

### 2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Sebagai ujung tombak pembangunan sekaligus masa depan daerah, pemuda memerlukan berbagai dukungan layanan dasar. Sampai tahun 2014, jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 32 unityang banyak melakukan aktivitas olahraga.

Selain bidang kepemudaan, dukungan terhadap organisasi olahraga yang berjumlah 350 unit juga ditingkatkan tiap tahunnya. Olahraga merupakan sarana pemersatu masyarakat karena sifatnya yang mampu menggugah kebersamaan. Wujud dukungan pemerintah terhadap layanan dasar kepemudaan dan olahraga salah satunya dengan program mercusuar pembangunan Gedung Olahraga (GOR) yang dibangun tidak jauh dari kompleks kantor pemerintahan. Sampai tahun 2015, jumlah total lapangan olahraga yang dikelola oleh Disbudparpora Kabupaten Paser sebanyak 49 unit tersebar di beberapa desa di pelosok kabupaten.

#### 2.3.2.14. Statistik

Ketersediaan data merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan dalam merencanakan pembangunan. Analisis Kinerja untuk urusan wajib statistik didasarkan pada ketersediaan data mengenai PDRB Kabupaten dan Kabupaten Dalam Angka yang sampai saat ini terlaporkan terbit tahun 2016 namun data masih berisi tahun 2015. Ketersediaan data merupakan langkah maju bagi perencanaan tetapi masih perlu dilengkapi dan diperbaharui datanya.

#### 2.3.2.15. Kebudayaan

Untuk dukungan terhadap layanan dasar kebudayaan, pemerintah daerah Kabupaten Paser menyelenggarakan festival seni dan keolahragaan. Pemerintah mengadakan festival kebudayaan minimal setahun dua kali pada momentum peringatan 17 Agustus dan hari jadi Kabupaten Paser. Festival tersebut menampilkan atraksi kebudayaan lokal Kabupaten dan menggelar pasar rakyat.

#### 2.3.2.16. Perpustakaan

Data yang dibutuhkan pada bagian ini adalah mengenai jumlah perpustakaan, jumlah koleksi buku di perpustakaan serta jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya. Data-data tersebut penting untuk diketahui karena jumlah pengunjung perpustakaan menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan pendidikan di masyarakat. Saat ini, jumlah perpustakaan sejumlah 296 unit termasuk perpustakaan desa yang dikelola daerah.

**Tabel II.60.**

Jumlah Perpustakaan, Jumlah Pengunjung dan Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Kabupaten Paser Tahun 2012 -2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Perpustakaan	183	219	274	288	296
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	3.575	8.044	66.807	8.325	13.344
3	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	32.685	40.945	49.345	98.690	49.545

Sumber : Statistik Sektor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser 2017

Terdapat kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2016, dari 8.325 pengunjung pada tahun 2015 menjadi 13.344 pengunjung pada tahun 2016. kenaikan tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya fasilitas internet yang dapat menarik masyarakat mengunjungi perpustakaan. Dilihat dari koleksi buku yang tersedia, terlihat sedikit penambahan dari tahun ke tahun walaupun variasi buku perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan pembaca. Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah tidak adanya pustakawan yang dapat mengelola katalog buku maupun kualitas variasi koleksinya.

### 2.3.3. Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Dalam RPJMD, pembahasan tentang urusan pemerintahan pilihan ini berguna untuk menggambarkan pencapaian pembangunan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Gambaran pencapaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 2.3.3.1. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang sedang dikembangkan oleh Kabupaten Paser. Menurut data sektor ini selalu menunjukkan tren perkembangan yang baik dalam empat tahun terakhir. Guna mengidentifikasi tren perkembangan, potensi dan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten

Paser ke depan, berikut adalah data tentang jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusinya terhadap PDRB :

**Tabel II.61.**  
Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2012 – 2016

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan
2012	15.235
2013	15.624
2014	19.512
2015	16.891
2016	20.572

Sumber : Data Sektoral Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, 2017

Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Paser mengalami kenaikan sebesar 3.681 wisatawan dibandingkan tahun 2015. Jumlah kunjungan wisatawan ini masih potensial untuk ditingkatkan, tetapi permasalahan utama dalam sektor pariwisata adalah kurang memadainya infrastruktur, salah satunya adalah akses jalan menuju lokasi.

#### 2.3.3.2. Pertanian

Pertanian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar kedua di Kabupaten Paser. Sektor ini dikembangkan untuk mendukung perekonomian masyarakat dari sektor non-tambang. Guna mendukung hal itu maka diperlukan data yang berguna untuk menentukan target dan indikator keberhasilan pengembangan pertanian pada masa mendatang, berikut adalah data tentang produktivitas padi di Kabupaten Paser :

**Tabel II.62.**  
Produktivitas Padi Per Hektar di Kabupaten Paser 2012 – 2016

Tahun	Produktivitas Padi Per Hektar
2012	36,27
2013	39,89
2014	40,83
2015	38,72
2016	39,70

Sumber : Statistik Sektoral Dinas Pertanian, Kabupaten Paser Tahun 2017

Produktivitas padi per hektar di Kabupaten Paser mengalami penurunan sebesar 2,11 per hektar pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,98 per hektar hal ini dikarenakan kondisi cuaca yang mendukung. Kenaikan atau penurunan produktivitas padi per hektar masih bersifat dinamis, hal ini mengindikasikan bahwa potensi produktivitas padi masih bisa ditingkatkan sesuai standar produktivitas lahan di wilayah Kabupaten Paser.

Dalam melaksanakan pembangunan sub sektor perkebunan yang merupakan bagian integral dari sektor pertanian dan lanjutan dari pembangunan sebelumnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani perkebunan dengan cara meningkatkan produksi komoditas perkebunan sehingga secara tidak langsung berdampak pada terbukanya kesempatan kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui usaha peremajaan (*replanting*), intensifikasi, ekstensifikasi, maupun diversifikasi dengan pola pengembangan seperti pola swadaya/parsial, perkebunan inti rakyat dan perkebunan besar swasta atau milik negara.

Kebun kelapa sawit masih mendominasi perkebunan di Kabupaten Paser. Pada tahun 2015 luas kebun kelapa sawit di Kabupaten Paser mencapai 182.144,78 Ha. Disamping kelapa sawit masih banyak lagi jenis perkebunan, antara lain karet, kelapa, kopi, kakao, lada dan lain-lain. Adapun luas masing-masing perkebunan di Kabupaten Paser pada tahun 2015 adalah karet 14.168,5 Ha, kakao 198 Ha, kelapa 2.840 Ha, kopi 1.160,30 Ha, lada 98,25 Ha, dan tanaman lainnya 203,25 Ha.

**Tabel II.63.**

Luas Areal Perkebunan Kabupaten Paser Menurut Status,  
Tahun 2011 - 2016 ( Ha )

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kelapa Sawit</b>	<b>124,455.70</b>	<b>157,116.00</b>	<b>181,945.78</b>	<b>182,155.78</b>	<b>182,144.78</b>	<b>180,328.72</b>
Perkebunan rakyat	50,310.20	71,140.00	71,167.00	71,377.00	71,366.00	79,213.00
Perkebunan besar Negara	17,216.00	17,212.00	22,342.00	22,342.00	22,342.00	14,401.72
Perkebunan Besar swasta	56,929.00	68,746.00	88,436.78	88,436.78	88,436.78	86,714.00
<b>Karet</b>	<b>10,927.21</b>	<b>12,693.50</b>	<b>13,986.00</b>	<b>14,107.00</b>	<b>14,168.50</b>	<b>14,583.00</b>
Perkebunan Rakyat	10,318.21	12,084.50	13,527.00	13,648.00	13,709.50	14,124.00
Perkebunan Besar Negara	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00
Perkebunan Besar Swasta	210.00	210.00	210.00	60.00	60.00	60.00
<b>Kakao</b>	<b>724.20</b>	<b>591.90</b>	<b>380.50</b>	<b>268.00</b>	<b>198.00</b>	<b>145.00</b>
Perkebunan Rakyat	724.20	591.90	380.50	268.00	198.00	145.00
Perkebunan Besar Negara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perkebunan Besar Swasta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Kelapa</b>	<b>3,926.04</b>	<b>3,725.50</b>	<b>3,354.00</b>	<b>2,912.00</b>	<b>2,840.00</b>	<b>2,639.50</b>
<b>Kopi</b>	<b>2,563.74</b>	<b>2,284.30</b>	<b>1,701.80</b>	<b>1,368.00</b>	<b>1,150.30</b>	<b>982.30</b>
<b>Lada</b>	<b>166.05</b>	<b>148.44</b>	<b>112.75</b>	<b>108.25</b>	<b>98.25</b>	<b>88.75</b>
<b>Lainnya</b>	<b>364.00</b>	<b>364.50</b>	<b>281.00</b>	<b>230.00</b>	<b>203.25</b>	<b>192.00</b>

Sumber : Data Statistik Dinas Pertanian Kabupaten Paser 2017

Pengembangan komoditi sawit terbesar pada tahun 2016 dikembangkan oleh perkebunan perkebunan rakyat. Hal ini ditandai dengan capaian luas pengembangan areal perkebunan rakyat yang mencapai 79.213 Ha. Sedangkan luas perkebunan Negara dan perkebunan swasta mengalami penurunan, karena tanaman tua/rusak. Meskipun dilihat dari luas areal yang ada cukup luas, tidak semua perkebunan yang ada di Kabupaten Paser berada dalam kondisi produktif. Dari luas 180,328.72 Ha kebun kelapa sawit yang ada, seluas 33,786.00 Ha belum menghasilkan, dan 614,00 Ha sudah rusak/tua, sedangkan sisanya seluas 145,928.72 Ha merupakan tanaman menghasilkan (produktif).

**Tabel II.64**

Luas Areal Perkebunan Kabupaten Paser Menurut Kondisi,  
Tahun 2011 - 2016 ( Ha )

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kelapa Sawit</b>						
Tanaman Belum Menghasilkan	58.125,30	88.792,00	110.132,78	90.370,87	89.817,87	33.786,00
Tanaman Menghasilkan	65.383,40	67.087,00	70.364,00	89.977,91	90.410,91	145.928,72
Tanaman Rusak	947,00	1.237,00	190,00	1.807,00	1.916,00	614,00
<b>Karet</b>						
Tanaman Belum Menghasilkan	4.528,50	6.521,00	7.356,50	7.381,00	7.391,00	7.462,00
Tanaman Menghasilkan	6.121,71	6.037,00	6.505,50	6.471,00	6.216,50	6.126,00
Tanaman Rusak	277,00	135,00	124,00	254,5	561,00	536,00
<b>Kakao</b>						
Tanaman Belum Menghasilkan	55,90	52,90	29,50	18,5	7,50	5,50
Tanaman Menghasilkan	501,30	430,50	301,50	181	180,00	138,00
Tanaman Rusak	167,00	108,50	49,50	68,5	10,50	1,50
<b>Kelapa</b>						
Tanaman Belum Menghasilkan	103,85	107,50	97,00	96	97,00	99,00
Tanaman Menghasilkan	3.511,19	3.340,50	2.996,00	2.587,50	2.457,50	2.312,50
Tanaman Rusak	311,00	277,50	261,00	228,50	285,50	228,00
<b>Kopi</b>						
Tanaman Belum Menghasilkan	23,30	67,30	67,30	50,30	60,30	60,30
Tanaman Menghasilkan	2.189,00	1.977,00	1.350,00	1.157,00	944,00	850,00
Tanaman Rusak	351,44	240,00	273,50	161	156,00	72,00
<b>Lada</b>						
Tanaman Belum Menghasilkan	17,00	17,75	17,75	21,75	18,75	16,25
Tanaman Menghasilkan	115,05	100,69	88,50	81,00	77,00	69,00
Tanaman Rusak	34,00	30,00	6,50	5,50	2,50	3,50

Sumber : Data Statistik Dinas Pertanian Kabupaten Paser 2017

Sampai dengan tahun 2016, produk unggulan sektor perkebunan di Kabupaten Paser masih dikuasai oleh tanaman kelapa sawit. Produksi kelapa sawit Kabupaten Paser tahun 2016 mencapai 2,127,990.34 Ton. Jumlah produksi ini jika dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatan. Tahun 2015, jumlah produksi kelapa sawit 1.364.429,39 Ton. Tanaman perkebunan lain yang juga merupakan tanaman unggulan di Kabupaten Paser adalah tanaman karet, produksi tanaman perkebunan karet di Kabupaten Paser tahun 2016 mengalami penurunan. Produksi karet tahun 2015 mencapai 10.529,54 Ton namun pada tahun 2016 produksinya menurun mencapai 10,082.77 Ton.



**Tabel II.65.**  
Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Paser,  
Tahun 2012-2016 (Ton)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Kelapa Sawit	1.004.545,56	1.043.317,80	1.359.491,14	1.364.429,39	2,127,990.34
Karet	10.268,36	10.585,50	10.783,70	10.529,54	10,082.77
Kelapa	6.647,33	6.054,77	5.621,33	5.109,26	4,567.85
Kopi	418,26	287,69	244,67	206,32	228.11
Kakao	130,88	107,05	74,85	64,7	38.57
Lada	49,09	41,75	33,14	29,6	17.67
Lainnya	828,22	706,81	469,92	355,39	239.47

Sumber : Data Statistik Dinas Pertanian Kabupaten Paser, 2017

Pembangunan sub sektor peternakan tidak hanya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan peternak. Usaha peternakan di Kabupaten Paser pada umumnya merupakan usaha rakyat bersifat sambilan dan berskala kecil (sapi, kerbau, kambing dan unggas), namun cukup memberikan harapan dalam hal pengembangannya. Meskipun demikian ada juga usaha peternakan dalam skala besar, khususnya bagi petani yang mempunyai modal besar. Adapun permasalahan dalam hal pembangunan sub sektor peternakan adalah relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum berkembangnya pembibitan hewan ternak, usaha peternakan rakyat masih belum dikelola secara profesional dan minimnya sarana dan prasarana penunjang usaha peternakan rakyat.

Pada umumnya peternakan di Kabupaten Paser masih bersifat tradisional, meskipun di beberapa daerah telah mendapatkan penyuluhan dari Petugas Lapangan yang didatangkan dari Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan serta Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Paser dalam upaya peningkatan produksi ternak serta imunisasi ternak terhadap berbagai kemungkinan terserang penyakit.

Secara umum, jumlah ternak di Kabupaten Paser tahun 2016 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015. Dari berbagai jenis populasi hewan ternak besar yang ada di Kabupaten Paser, ternak sapi mempunyai jumlah populasi yang paling banyak, yaitu 21.154 ekor, diikuti populasi kambing sebanyak 7.724 ekor, kerbau sebanyak 756 ekor, dan domba sebanyak 74 ekor. Selain ternak besar, di Kabupaten Paser juga terdapat beberapa jenis ternak kecil seperti ayam ras, ayam buras, itik, angsa, dan ayam petelur. Dari beberapa jenis ternak kecil tersebut, ayam buras atau ayam kampung memiliki populasi terbanyak dibanding jenis ternak yang lain, yaitu sebanyak 1.353.061 ekor.

**Tabel II.66.**  
Produksi Ternak Kabupaten Paser, Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
<b>Ternak Besar</b>					
Sapi	15,398	14,136	17,058	20,502	21,154
Kerbau	560	489	528	683	756
Kambing	5,760	5,994	6,468	7,201	7,724
Domba	130	125	157	48	74
<b>Ternak Kecil/ Unggas</b>					
Ayam Ras	1,993,350	1,831,500	0	2,500	3,641
Ayam Buras	872,933	925,756	678,878	1,314,528	1,353,061
Itik	16,602	18,117	37,198	38,896	37,282
Ayam Petelur	210	3319	1265	2,201	-

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Paser 2017

Berbicara masalah populasi ternak kecil terutama unggas tidak terlepas dari jumlah produksi yang dihasilkan, karena kebanyakan peternak menjual telur ternaknya untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari. Jumlah produksi telur tergantung kepada kondisi ternak itu sendiri. Ternak yang berkembang dengan baik atau dalam keadaan sehat akan besar jumlah produksinya, namun sebaliknya apabila perkembangan ternak tidak normal atau sakit akan mengurangi jumlah daging ternak itu sendiri. Untuk itu suplai makanan kepada ternak menjadi modal utama bagi perkembangan ternak itu sendiri. Pada tahun 2016, produksi telur ayam buras mencapai 6,423,521 butir, itik 270,088 butir, sedangkan produksi ayam petelur tidak ada, karena jumlah ayam petelur pada tahun 2016 kosong.

**Tabel II.67.**

Produksi Telur Kabupaten Paser, Tahun 2012-2016 (butir)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Ayam Petelur	1.503.780	0	870	1,245	-
Ayam Buras	1.098.700	5.705.491	5.369.926	6,235,290	6,423,521
Itik	1.125.085	132.288	159.594	281,781	270,088

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Paser 2017

Untuk memenuhi kebutuhan akan daging di Kabupaten Paser, pemerintah terus berupaya untuk melakukan pengembangan dan peningkatan produksi ternak. Selain upaya tersebut, pada titik waktu tertentu pemerintah bahkan mendatangkan ternak-ternak tersebut dari luar wilayah Kabupaten Paser.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Paser, selama tahun 2016, frekuensi pemotongan ternak mengalami kenaikan dibanding tahun 2015. Secara berurutan jumlah pemotongan sapi, kerbau, kambing yang dipotong selama tahun 2016 adalah 2.531 ekor, 9 ekor, 134 ekor. Sedangkan untuk ternak kecil / unggas, pada tahun 2015 secara berurutan jumlah pemotongan ayam ras, ayam buras, dan itik yang dipotong adalah 1.911.694 ekor, 1.227.201 ekor, dan 11.577 ekor.

**Tabel II.68.**Produksi Ternak Yang Dipotong Kabupaten Paser,  
Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
<b>Ternak Besar</b>					
Sapi	3.406	2371	2.575	2,868	2,531
Kerbau	5	2	5	5	9
Kambing	2.471	2.546	499	499	134
Domba	107	5	32	27	9
<b>Ternak Kecil/Unggas</b>					
Ayam Ras	1.794.015	1.831.500	1.967.589	1,973,636	1,911,694
Ayam Buras	1.029.081	970.832	457.000	345,788	1,227,201
Itik	8.301	9.059	10.476	12.332	11,577

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Paser 2017

Dari tahun ke tahun produksi perikanan Kabupaten Paser menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama produksi perikanan laut. Sedangkan untuk produksi perikanan umum cenderung sangat fluktuatif. Hal ini disebabkan karena produksi perikanan laut sangat dipengaruhi oleh musim tangkap ikan. Sedangkan untuk perikanan tambak tidak dipengaruhi oleh musim tangkap ikan dan lebih cenderung dipengaruhi oleh system pengelolaan budidaya tambak tersebut.

Tahun 2015 produksi perikanan tangkap laut Kabupaten Paser sebanyak 10.417,7 ton dan tahun 2016 naik hingga 10.684,9 ton. Sedang produksi perikanan tangkap umum juga mengalami peningkatan dari 109 Ton pada 2015 menjadi 112.3 Ton pada 2016.

**Tabel II.69.**  
Produksi Perikanan Kabupaten Paser Menurut Jenis Produksi,  
Tahun 2012-2016 (Ton)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Perikanan Laut	10.073,70	10.123,00	10,223.1	10,417.7	10.684,9
Perikanan Umum	201,50	180,00	114.1	109.0	112,3
Tambak	9.472,70	9.463,70	10,429.5	12,466.4	12,357
Kolam	37,30	36,10	43.9	51.2	67,1
Keramba	10,86	6,50	7.1	7.5	6,6
Rumput Laut	9.014,50	412,90	945.7	1,148.4	1.096,2

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Paser 2017

**Tabel II.70.**  
Luas Budidaya Tambak, Kolam, Keramba, Rumput Laut  
Kabupaten Paser Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Tambak</b>					
Potensi	32.750,00	13.932,00	32,750	32,750	32,750
Manfaat	19.034,00	27.864,00	15,325	15,325	15,325
<b>Kolam</b>					
Potensi	706,00	80,00	706.00	706.00	706.00
Manfaat	147,00	160,00	96.00	120.00	120.00
<b>Keramba</b>	<b>42,00</b>	<b>603,00</b>	54.00	23.00	23.00
<b>Rumput Laut</b>	<b>80,00</b>	<b>12,00</b>	46.00	29.00	29.00

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Paser 2015

### 2.3.3.3. Kehutanan

Kerusakan hutan merupakan persoalan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Paser. Dalam rangka menentukan strategi serta prioritas program rehabilitasi hutan pada masa mendatang, diperlukanlah data tentang kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Paser. Berikut merupakan sajian datanya:

**Tabel II.71.**  
Luas Kebakaran Hutan, Rehabilitasi Lahan dan Kebun bibit (Ha)  
di Kabupaten Paser Tahun 2013 – 2015

URAIAN	2013	2014	2015
Kebakaran Hutan (CA)	-	227.2	105.3
Rehabilitasi Lahan Luar Kawasan	-	1,101	-
Rehabilitasi Lahan Dalam Kawasan	-	-	-
Reklamasi Kawasan Hutan	143,293.00	-	-
Kebun Bibit	795	-	-

Sumber : Data Dinas Kehutanan Prop. Kaltim

Isu kerusakan hutan di Kabupaten Paser selalu dihubungkan dengan perluasan area perkebunan sawit sebagai salah satu penyumbang PDRB terbesar. Apabila dibandingkan dengan wilayah perkebunan sawit di Indonesia, kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Paser tergolong kecil. Namun sekecil apapun kerusakan hutan adalah sebuah permasalahan yang besar bagi lingkungan.

### 2.3.3.4. Perdagangan

Bagian ini menggambarkan kinerja sektor perdagangan di Kabupaten Paser. Sehingga, jumlah pedagang dan jumlah kelompok pedagang merupakan hal dasar yang harus diketahui. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas program pengembangan di sektor perdagangan, berikut adalah data tentang jumlah pedagang di Kabupaten Paser:

**Tabel II.72.**

Jumlah Pedagang dan Kelompok Pedagang  
di Kabupaten Paser Pada Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Pedagang	Jumlah Kelompok Pedagang
2012	7.644	1
2013	8.785	1
2014	10.282	2
2015	9.593	2
2016	9.013	2

Sumber : Data Sektoral Dinas Perindagkop 2017

Jumlah pedagang di Kabupaten Paser dalam 3 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan dari tahun 2014 hingga 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi di Kabupaten Paser mengalami kelesuan sehingga pedagang di dalamnya mengalami penurunan, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi nasional yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir sebagai dampak kondisi perekonomian global saat ini yang cenderung bias ke bawah, lambat dan tidak merata.

Dibandingkan dengan jumlah pedagang yang semakin menurun, jumlah kelompok pedagang di Kabupaten Paser menunjukkan tren yang stabil. Dalam kurun waktu 3 tahun, dari 2014 hingga 2016 tidak ada penambahan jumlah kelompok pedagang. Pada tahun 2014 dan 2016 kelompok pedagang hanya ada 2 kelompok, yaitu kelompok pedagang pasar tradisional dan kelompok pedagang pasar modern.

#### 2.3.3.5. Perindustrian

Perindustrian merupakan bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi. Data mendasar yang diperlukan untuk menentukan strategi pengembangan industri di Kabupaten Paser adalah data mengenai pertumbuhan industri. Berikut adalah data uraian data tentang pertumbuhan industri di Kabupaten Paser selama 2012-2016:

**Tabel II.73.**

Pertumbuhan Industri di Kabupaten Paser Tahun 2012-2016

Tahun	Pertumbuhan Industri
2012	8,29%
2013	2,64%
2014	5,79%
2015	7,05%
2016	4,28%

Sumber : Data Sektoral Dinas Perindagkop 2017

Industri rumah tangga di Kabupaten Paser terus menunjukkan tren kenaikan. Walaupun jumlahnya tidak begitu besar jika dibandingkan dengan industri pertambangan. Hasil temuan lapangan mengindikasikan bahwa lesunya perekonomian nasional turut serta berpengaruh terhadap lambatnya pertumbuhan industri di Kabupaten Paser.

## **2.4. Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Pada level tersebut, optimalisasi potensi daerah secara optimal merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapaitingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010, maka kondisi daerah Kabupaten Paser terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia (SDM).

### **2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Pada level tersebut, optimalisasi potensi daerah secara optimal merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010, maka kondisi daerah Kabupaten Paser terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari beberapa variabel berikut:

Beberapa indikator yang digunakan dalam kerangka analisis kinerja atas kemampuan ekonomi daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita. Dalam skema daya saing daerah, kedua indikator tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana potensi maupun hambatan bagi daerah dari segi ekonomi untuk mencapai visi pembangunan. Berikut adalah tabel yang memuat data tentang konsumsi rumah tangga per kapita dan konsumsi rumah tangga non-pangan per kapita di Kabupaten Paser :

**Tabel II.74.**  
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (%)  
Tahun 2012 - 2016

Tahun	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Sub Sektor Pangan Per Kapita	Konsumsi Rumah Tangga Sub Sektor Non-Pangan Per Kapita
2012	48,93	51,07
2013	50,71	49,29
2014	50,34	49,66
2015	47,78	52,22
2016	51,87	48,12

Sumber : Data BPS Kabupaten Paser 2017

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, indikator tersebut masuk ke dalam fokus kemampuan ekonomi daerah yang menentukan daya saing Kabupaten Paser. Berdasarkan data tahun 2012 hingga 2016, terdapat peningkatan konsumsi rumah tangga sub sektor pangan per kapita sebesar 2.94%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Paser di bidang ekonomi cukup meningkat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga sub sektor pangan per kapita ini masih fluktuatif dan belum stabil, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja perekonomian di Paser masih perlu ditingkatkan.

Berbeda halnya dengan konsumsi rumah tangga sub-sektor pangan per kapita, konsumsi rumah tangga non-pangan per kapita mengalami penurunan sebesar 2.95% pada tahun 2012 sampai 2016. Pengeluaran konsumsi rumah tangga sub sektor non-pangan per kapita ini juga masih fluktuatif dan belum stabil.

## 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

### 2.4.2.1. Perhubungan

Kondisi layanan dasar perhubungan sangat penting dalam aspek daya saing daerah. Hal tersebut terjadi karena urusan perhubungan berkaitan erat dengan mobilisasi masyarakat serta barang dan jasa. Dua hal tersebut sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi, khususnya di Kabupaten Paser. Guna memetakan mendeskripsikan aspek layanan dasar, berikut merupakan data tentang panjang jalan dan jumlah kendaraan di Kabupaten Paser:



**Tabel II.75.**

Panjang Jalan (Km) di Kabupaten Paser Tahun 2012 - 2016

Jenis Jalan	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten	631.75	694.85	625.44	625.44	625.44
Desa	316,46	379,75	379.75	379,75	379,75

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kab. Paser 2017

Dari tabel tersebut diketahui bahwa panjang jalan Kabupaten, dari tahun 2014 hingga 2016 adalah 625.44 km. Hal ini juga sama dengan panjang jalan desa yaitu 379.75 km. Walaupun kurang dari 50% yang kondisinya masuk ke dalam kategori baik, hal ini mengindikasikan bahwa jalan adalah salah satu persoalan utama yang harus diperhatikan apabila Pemerintah Kabupaten Paser ingin meningkatkan aspek daya saing dalam pembangunan.

Selayaknya jalan, kendaraan juga merupakan salah satu persoalan transportasi di Kabupaten Paser. Berikut adalah data tentang jumlah kendaraan di Kabupaten dari tahun 2012 hingga 2016:

**Tabel II.76.**

Jumlah Kendaraan di Kabupaten Paser Tahun 2012 - 2016

Tahun	Jumlah Kendaraan
2012	142.656
2013	113.683
2014	109.667
2015	152.672
2016	158.247

Sumber : Data Polres Paser Tahun 2017

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan di Kabupaten Paser mengalami peningkatan sebanyak 5.575 unit pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan jumlah kendaraan yang cukup tinggi ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan kondisi ekonomi masyarakat dan adanya pergeseran pola pikir masyarakat bahwa saat ini

kendaraan sudah bukan lagi kebutuhan tersier, tetapi sudah merupakan kebutuhan sekunder bahkan kebutuhan primer. Sehingga pemerintah perlu memperbaiki kondisi infrastruktur, khususnya prasarana jalan yang rusak agar pengendara terhindar dari kecelakaan lalu lintas.

**Tabel II.77.**  
Jumlah Barang dan Orang yang Terangkut Angkutan Umum  
di Kabupaten Paser Tahun 2011 - 2015

Tahun	Jumlah Barang (Ton)	Jumlah Orang
2011	631.322	336.081
2012	609.322	359.223
2013	889.416	326.225
2014	647.416	233.863
2015	-	249.991

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Kabupaten Paser

Jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum menunjukkan angka yang masih fluktuatif. Dari tahun 2011 hingga 2012 terjadi penurunan jumlah barang sebesar 22.010 ton. Sedangkan pada tahun 2013, jumlah barang yang terangkut naik sebesar 280.094 ton. Jumlah tersebut kembali mengalami penurunan sebesar 242.000 ton pada tahun 2014. Ada indikasi bahwa naik dan turunnya jumlah barang tersebut terjadi karena kondisi jalan dan kendaraan yang kurang memadai di Kabupaten Paser.

Sama halnya dengan jumlah barang yang terangkut, jumlah orang yang terangkut juga masih fluktuatif. Artinya bahwa angka tersebut belum menunjukkan kenaikan atau penurunan yang stabil. Walaupun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2011 hingga 2012, jumlah orang yang terangkut kembali menunjukkan penurunan pada tahun 2012 hingga 2014. Ada indikasi bahwa penurunan tersebut terjadi karena sarana transportasi di Kabupaten Paser belum tersedia dengan baik.

#### 2.4.2.2. Penataan Ruang

Bagian ini memaparkan mengenai kondisi tata ruang di Kabupaten Paser. Secara khusus indikator yang dianalisa adalah data mengenai luas wilayah produktif. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui potensi dan hambatan dalam pengembangan produktivitas dari segi tata ruang di Kabupaten Paser.

**Tabel II.78.**

Luas Wilayah Produktif (Ha) di Kabupaten Paser Tahun 2014-2015

Tahun	Luas Wilayah Produktif
2014	872.488,86
2015	-

Sumber: Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang

Menurut data dari Dinas Bina Marga pada tahun 2014 di Kabupaten Paser terdapat 872.488,86 hektar luas wilayah produktif. Luas wilayah ini berpotensi untuk dikembangkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan merata.

#### 2.4.2.3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Bagian ini secara khusus menganalisa sumber daya internal instansi pemerintah Kabupaten Paser. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui potensi dan hambatan dalam hal pengembangan kapasitas pemerintah daerah. Adapun data-data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

##### a. Perbankan

Bank merupakan salah satu lembaga yang memberikan berbagai macam layanan dibidang keuangan, seperti tabungan, deposito, kredit, transper, belanja pra bayar dan lain-lain.

Perkembangan perbankan dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah. Perkembangan perbankan Kabupaten Paser menunjukkan arah positif. Tahun 2016 jumlah Bank yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Paser sebanyak 9 bank yaitu BRI, BRI SYARIAH, Bank Kaltim, Bank Kaltim SYARIAH, BNI'46, BANK Danamon, BANK Mandiri, BANK Muamalat dan BANK Mega. Jenis layanan yang disediakan oleh bank-bank tersebut meliputi ; layanantabungan, setoran ONH, Deposito, danlayanan Giro. Sedang jenis

pinjaman yang diberikan meliputi Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit KUPPEDES, dan Kredit Konsumsi.

**Tabel II.79.**

Jumlah Bank di Kabupaten Paser Tahun 2012 - 2016

Tahun	Jumlah Bank
2012	7
2013	8
2014	9
2015	9
2016	9

Sumber : Pembangunan Daerah Paser Dalam Angka 2016

b. Kepegawaian

Jika dilihat dari jenis kelamin, maka Pegawai Negeri Sipil dengan jenis kelamin laki-laki dari tahun 2012 – 2016 lebih banyak bila dibandingkan jumlah pegawai perempuan, terlihat dari tabel berikut ini

**Tabel II.80.**

Jumlah Pegawai Daerah Kabupaten Paser  
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2016

Tahun	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
2012	3.140	2.237	5.377
2013	3.094	2.455	5.342
2014	3.127	2.455	5.582
2015	3.030	2.305	5.335
2016	2.956	2.399	5.355

Sumber : Data Sektoral BKD Kabupaten Paser 2017

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada (PNS) pada tahun 2016 mencapai 5.355 orang terbagi menjadi empat golongan mulai dari golongan I sampai dengan golongan IV. Jumlah PNS yang dirinci berdasarkan golongan dijelaskan dalam tabel berikut ini :

**Tabel II.81.**  
**Jumlah Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Paser**  
**Menurut Golongan dan Jabatan tahun 2016**

Golongan	Eselon					Staf	Jumlah
	I	II	III	IV	V		
Golongan IV							
IV/E						1	1
IV/D		2					2
IV/C		29				1	30
IV/B		5	55			97	157
IV/A		2	86	53	1	910	1052
Golongan III							
III/D			16	271		520	807
III/C				188	1	390	579
III/B				39	7	784	830
III/A					2	811	813
Golongan II							
III/D				1	2	190	193
III/C						390	390
III/B						259	259
III/A						164	164
Golongan I							
III/D						24	24
III/C						42	42
III/B						9	9
III/A						3	3
CPNS							
<b>Jumlah</b>	0	38	157	552	13	4595	5355

Sumber : Database Pembangunan Kabupaten Paser 2017

Dari tabel diatas mayoritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah golongan III, hal ini dikarenakan kebutuhan daerah terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tingkatan Strata satu (S1) sangat tinggi.

#### 2.4.2.4. Lingkungan Hidup

Secara khusus analisis kinerja atas lingkungan hidup ditujukan pada data mengenai persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih. Hal tersebut dilakukan sebaai bahan pertimbangan terkait dengan potensi dan hambatan dalam hal menentukan program strategis menuju Paser yang bersih dan sehat. Berkaitan dengan air bersih, Kabupaten Paser telah memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bernama Tirta Kandilo. Perusahaan tersebut memiliki kantor pusat di Kota Tanah Grogot, dengan beberapa unit pengolahan yang terdistribusi cukup baik ke ibukota kecamatan dan sekitarnya. Mengingat lokasi ibukota kecamatan yang tersebar cukup jauh dari ibukota

kabupaten, PDAM menggunakan unit-unit yang independen dengan jaringan layanan lokal.

Berkaitan dengan itu, berdasarkan data Inkesra Paser 2015 disebutkan bahwa untuk keperluan air minum pada tahun 2015, hanya 79,14% rumah tangga yang menggunakannya secara pribadi. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II.82.**

Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Fasilitas Air Minum

Fasilitas Air Minum	2011	2012	2013	2014	2015
Sendiri	56,42	55,86	56,60	54,96	79,14
Bersama	28,19	16,79	13,92	21,12	14,91
Umum	6,45	11,68	7,32	6,79	5,02
Tidak ada	8,94	15,67	22,16	17,14	9,3

Sumber : Inkesra Paser 2016

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penduduk yang masih menggunakan fasilitas air bersih milik bersama dan milik umum masih tinggi, walaupun sudah menunjukkan kondisi yang sangat fluktuatif selama lima tahun terakhir. Temuan lapangan menyebutkan bahwa ada sebagian warga yang belum memiliki fasilitas sendiri. Sehingga warga menggunakan fasilitas milik bersama dan umum. Angka penggunaan fasilitas air minum bersama selalu menunjukkan penurunan selama 2011 hingga 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan fasilitas air minum di Kabupaten Paser masih perlu ditingkatkan.

Di beberapa desa, seperti di Desa Muara Paser, belum menggunakan fasilitas layanan air minum bersih dari PDAM. Penduduk Desa tersebut memilih menggunakan air kemasan dan air sumur bor. Akibatnya, sebagian penduduk terserang penyakit muntaber karena sanitasi dan air minum yang digunakan kurang bersih. Sedangkan di Desa Sungai Tuak, penduduk justru menggunakan air sungai dan air kemasan untuk konsumsi rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan PDAM belum mampu menjangkau wilayah-wilayah tersebut.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian kaitannya dengan ketersediaan air baku adalah menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai sumber air baku.

#### 2.4.2.5. Komunikasi dan Informatika

Sub-bab khusus mengenai analisis kinerja dalam urusan komunikasi dan informatika pada aspek daya saing daerah diperlukan untuk mengetahui sejauh mana potensi dan hambatan daerah dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini perlu dilakukan karena hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sebagai penentu keberhasilan daerah dalam banyak hal. Adapun data-data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

**Tabel II.83.**  
Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik 2012 – 2016

Tahun	Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	
	Listrik PLN	Listrik Non-PLN
2012	70,85	19,92
2013	79,92	16,35
2014	76,45	17,56
2015	75,71	22,99
2016	86,01	13,99

Sumber : BPS Paser 2017

Kekurangan sumber energi listrik merupakan salah satu persoalan utama bagi sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Paser. Hingga tahun 2016 hanya ada 86.01% rumah tangga yang menggunakan listrik. Presentase ini naik 10.3% dari tahun sebelumnya. Ada indikasi bahwa pasokan daya listrik dan infrastruktur pendukung cukup memadai untuk penambahan pelanggan baru.

#### 2.4.3. Fokus Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan, karena investasi berpengaruh pada kuantitas permodalan di suatu daerah, pembukaan lapangan kerja, permintaan dan penawaran, serta pengaruh lain yang berhubungan dengan kegiatan sosio-ekonomi masyarakat. Dalam rangka mengetahui potensi dan hambatan yang dalam berinvestasi di Kabupaten

Paser, maka dilakukanlah analisis terhadap beberapa indikator dalam tabel berikut:

**Tabel II.84.**  
Angka Kriminalitas di Kabupaten Paser Tahun 2013 - 2016

Tahun	Angka Kriminalitas
2013	425 Kasus
2014	292 Kasus
2015	289 Kasus
2016	438 Kasus

Sumber : Data Polres Paser, 2017

Angka kriminalitas di Kabupaten Paser mengalami peningkatan sebesar 52% pada tahun 2016. Beberapa kasus kriminalitas yang terjadi seperti kasus pelecehan seksual anak, kasus pengeroyokan, kasus pembunuhan dan kasus pencurian. Hal ini mengindikasikan perlunya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing, serta perlunya tindak pencegahan yang lebih intensif.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Daerah, DPMPTSP, Kabupaten Paser, pada tahun 2013 rata-rata Kabupaten Paser memiliki lama waktu perijinan selama 5 jam. Hal ini berlaku untuk 6 jenis perijinan, seperti SIUP, TDP, IUI, TDI, IMB dan HO. Lima jam adalah waktu tergolong cepat jika berpijak kepada Standar Operasional Prosedur DPMPTSP. Cepatnya proses perijinan ini mengindikasikan bahwa proses perijinan semakin baik dan mampu mendukung peningkatan jumlah investasi di Kabupaten Paser.

**Tabel II.85.**  
Jumlah dan Macam Retribusi Daerah Tahun 2012 - 2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Retribusi Jasa Umum	14	14	14	14	14
Retribusi Jasa Usaha	11	11	11	11	11
Retribusi Perijinan Tertentu	5	5	5	5	5
Jumlah Retribusi	30	30	30	30	30

Sumber: SIPD, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser tahun 2017

Dari tahun 2012 hingga 2016 Kabupaten Paser memiliki 30 jenis retribusi. Retribusi tersebut berhubungan dengan iklim investasi. Tiga puluh retribusi



tersebut terdiri dari 14 retribusi jasa umum, 11 retribusi jasa usaha dan 5 retribusi perijinan tertentu yang ditangani oleh DPMPTSP, Kabupaten Paser. Belum ada indikasi bahwa jenis-jenis retribusi tersebut berpengaruh kurang baik terhadap iklim investasi di Kabupaten Paser selama lima tahun terakhir.

**Tabel II.86.**

Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha  
Di Kabupaten Paser Tahun 2012 – 2016

Jenis Perda	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Perda yang terkait perijinan	12	12	12	12	12

Sumber : DPMPTSP, 2017

Dari tahun 2012 hingga 2016, jumlah perda yang terkait perijinan di Kabupaten Paser berjumlah tetap. Tidak ada kenaikan atau penurunan sama sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya penyesuaian jumlah Perda tentang perijinan dengan isu-isu strategis di bidang perijinan, sehingga Perda mampu mendukung aspek daya saing Kabupaten Paser dengan baik.

#### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

SDM merupakan faktor terpenting dalam rangka mewujudkan visi pembangunan, karena SDM secara teknis menentukan kualitas kerja pemerintah mulai dari aspek perencanaan hingga implementasi. Selain itu, kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap perwujudan visi pemerintah daerah karena bersentuhan langsung dengan aspek strategis maupun teknis. Sehingga, analisis kinerja pada fokus SDM dimaksudkan untuk mengetahui potensi serta kelemahan yang dialami. Adapun data yang dibutuhkan dalam analisis kinerja adalah yang berkaitan dengan fokus SDM yaitu rasio ketergantungan (Jumlah Penduduk Usia 015 s/d >64 dibagi dengan Jumlah Penduduk Usia 16 s/d 64 tahun).

**Tabel II.87.**

Rasio Ketergantungan di Kabupaten Paser Tahun 2012 - 2016

Tahun	Rasio Ketergantungan		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2012	50,46	53,76	51,98
2013	52,08	52,10	52,09
2014	46,43	53,37	49,61
2015	44,94	51,03	47,74
2016	44,69	54,48	49,13

Sumber : BPS, 2017

Jumlah rasio ketergantungan di Kabupaten Paser selalu menunjukkan angka yang dinamis. Dari tahun 2010 hingga 2011, terjadi kenaikan jumlah sebesar 0,07%. Tahun berikutnya naik sebesar 1,00%. Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2013, yaitu sebesar 0,11%. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa serapan tenaga kerja di Kabupaten Paser belum optimal.

Berdasarkan data kinerja pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas dan data kinerja daerah lainnya yang diolah dalam kertas kerja sesuai dengan amanat pada lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka secara keseluruhan indikator pembangunan Kabupaten Paser selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel II.88.**  
Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Paser Tahun 2012-2016

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>								
<b>1</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi</b>							
1.1	Jumlah Penduduk	Jiwa	244.111	249.991	256,175	262,301	268,261	
1.2	Pertumbuhan Ekonomi	%	6.05	6.81	4.51	-0.97	2.15	
1.3	Laju Inflasi	%	6,41	8,56	7,43	6,26		
1.4	Pendapatan Perkapita	Juta (Rp)/ tahun	72,06	75,30	79,52	73,28		
1.5	Indeks Gini		0,3588	0,2755	0,3070	0,3070		
1.6	Pemerataan Pendapatan Versi World Bank							
	- 40% Rendah	%	18,66	22,50	20,45	20,45		
	- 40% Sedang	%	36,40	39,93	36,59	36,59		
	- 20% Tinggi	%	44,94	37,58	39,60	39,60		
1.7	Indeks Ketimpangan Kemakmuran		-	-				
1.8	Persentase penduduk miskin	%	7,65	7,94	7,87	8,76	8,55	
1.9	Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan	Kasus	272	297	286	289		
<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>								
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>							
1.1	Angka melek Huruf	%	96,71	97,13	98,23	98,70	98.23	
1.2	Angka Rata – Rata lama Sekolah	Tahun	8,1	8,35	7,99	8,51	8.12	
1.3	APK SD/MI	%	117,99	117,8	117,78	114,53	120.11	
1.4	APK SMP/MTs	%	97,53	97,53	97,53	98	96.13	

1.5	APK SMA/ SMK/MA	%	79,55	79,07	79,07	82	76.02	
1.6	APM SD/MI	%	97,98	97,79	97,79	95,9	104.86	
1.7	APM SMP/MTs	%	68,11	66,02	66,02	69	77.01	
1.8	APM SMA/SMK/MA	%	48,01	43,65	43,65	52,5	58.81	
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>							
2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,79	73,99	74,04	74	73	
2.2	Jumlah kasus kematian ibu	Kasus	10	13	8	8	9	
2.3	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Kasus	78	56	76	80	66	
2.4	Persentase Balita Gizi Buruk	%	2,2	2,5	5,6	5,6	4.1	
<b>3</b>	<b>Pertanahan</b>							
	Persentase Penduduk yang memiliki lahan	%	-	-	-	-		
<b>Fokus Budaya dan Olahraga</b>								
<b>1</b>	<b>Kebudayaan</b>							
1.1	Jumlah Grup Kesenian	Unit	14	14	14	14	14	
1.2	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	-	-	-	-	-	
<b>2</b>	<b>Pemuda dan Olahraga</b>							
2.1	Jumlah Klub Olahraga	Unit	52	52	52	52	52	
2.2	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	8	8	8	8	8	
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>UrusanWajib Pelayanan Dasar</b>								
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>							
1.1	Pendidikan Dasar							
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah 7 – 12 tahun	%	98,09	99,73	98,20	98,31	102	
1.1.2	Rasio Murid terhadap Sekolah							
	- SD Negeri	%	114,46	114,47	-	145,80	143.23	
	- SD Swasta	%	117,80	117,80	-	183,88	89.23	
	- MI	%	117,64	117,64	-	203,18	201.92	
1.1.3	Rasio Murid terhadap guru							
	- SD Negeri& SD Swasta /MI Negeri dan Swasta	%	10,93	14,22	14,22	13,75	14.54	
1.1.4	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah		-	-	56,57	56,84	56.92	
1.2	Pendidikan Menengah							
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah							
	- 13 – 15 Tahun	%	98,75	97,12	99,40	91,33	77.75	
	- 16 – 18 tahun	%	65,09	69,62	73,97	70,16	56.65	
1.2.2	Rasio Murid Terhadap Sekolah							
	- SMP Negeri	%	178,00	184,00	174,37	177,86	181.90	
	- SMP Swasta	%	77,42	88,53	72,67	82,78	87.78	
	- MTs	%	14,61	14,61	-	16,94	171.29	
	- SMA Negeri	%	454,08	442,6	404,25	269,00	350.69	
	- SMA Swasta	%	92,92	104,87	108,08	76,00	78.00	

	- MA	%	9,51	9,51	-	110,00	113.92	
	- SMK	%	30,69	30,69	-	43,70	387.64	
1.2.3	Rasio Murid terhadap guru							
	- SMP Negeri	%	13,01	13,90	13,08	13,59	14.31	
	- SMP Swasta	%	6,72	6,81	6,61	7,37	10.53	
	- MTs	%	-	-	-	10,83	14.49	
	- SMA Negeri	%	11,35	15,12	10,25	13,12	14.11	
	- SMA Swasta	%	5,38	5,65	5,60	8,12	11.14	
	- MA	%	-	6,46	-	8,11	9.24	
	- SMK	%	-	10,58	-	15,65	13.32	
1.2.4	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah							
	- Menengah Pertama	%	-	-	45,50	46,17	39.12	
	- Menengah Atas	%	-	-	24,10	25,00	9.41	
1.3	Angka Putus Sekolah							
	- SD/MI	%	0,4	0,4	0,4	0,2	0.01	
	- SMP/MTs	%	0,45	0,45	0,45	0,072	0.072	
	- SMA/SMK/M A	%	1,43	1,43	1,43	1,42	0.072	
1.4	Angka Kelulusan							
	- SD/MI	%	96,55	88	93,20	99,26	99.26	
	- SMP/MTs	%	91,63	82	90,17	97,18	97.18	
	- SMA/SMK/M A	%	97,63	99	98,07	98,62	99.20	
1.5	Guru yang memenuhi Kualifikasi min. S1/D-IV	Orang	-	1511	-	3.139	3,375	
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>							
2.1	Rasio penduduk terhadap jumlah dokter	Orang	7.376	7.107	6.600	6.600	3.194	
2.2	Rasio penduduk terhadap jumlah puskesmas + Puskesmas Pembantu	Orang	2.634	2.551	2.640	2.640	2.146	
2.3	Rasio Posyandu persatuan balita	Balita	13	16	15	15	10,21	
2.4	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	Penduduk	0,2	0,3	0,2	0,2	2,95	
2.5	Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	Kelahiran	4.505	5.181	5.113	5.381	5.365	
2.6	Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan	%	16,5	15,16	-	15,7	-	
2.7	Morbilitas (Angka Kesakitan)	%	8,38	8,01	-	8,20	-	
2.8	Cakupan Puskesmas	%	170	170	170	170	170	
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
3.1	Pajang Jalan	Km	1.449,17	1.575,64	1.472,34	1.472,34	1.472,34	DBMPTR
	Proporsi kondisi jalan baik	%	63,66	66,58	29,47	29,47	29,47	DBMPTR

	Irigasi dalam kondisi baik	M	407,193	419,228	436,900	114,50		DBMPTR
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	24,88	25,98	26,98	28,08		DCK
	Lingkungan Pemukiman (Kumuh)	%	186,83	181,39	176,11	170,98		DCK
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>							
4.1	Persentase rumah tangga dengan sumber air bersih	%	57,74	49,18	51,61	52,84		DCK
4.2	Persentase rumah tangga dengan air minum layak	%	57,74	49,18	51,61	52,84		DCK
4.3	Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak	%	65,65	66,22	66,79	67,36		DCK
4.4	Persentase rumah tangga dengan penerangan listrik	%	70,85	74,92	76,45	78,32		
4.5	Persentase rumah layak huni	%	83,05	86,15	89,25	92,15		DCK
<b>5</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Rakyat</b>							
5.1	Banyaknya Gangguan Kamtibmas	Kejadian	117	562	102	109		
5.2	Jumlah Anggota Linmas	Orang	-	-	890	890		
<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>								
<b>6</b>	<b>Tenaga Kerja</b>							
6.1	Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke atas) Menurut Jenis kelamin	Orang	L : 2.932 P : 79.866	L : 95.325 P : 81.939	L : 98.267 P : 84.521	L : 100.228 P : 86.232	L : 100.228 P : 86.232	
6.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang bekerja Menurut Lapangan Usaha	%	-	-	-	-	-	
	- Pertanian	%	37,05	40,38	44,12	44,63	44,63	
	- Pertambangan dan Penggalian	%	13,46	13,33	14,20	9,66	9,66	
	- Industri	%	7,14	8,49	4,65	2,14	2,14	
	- Kontruksi	%	2,95	3,55	2,05	3,61	3,61	
	- Listrik, gas dan air	%	0,35	0,29	-	-	-	
	- Perdagangan	%	15,73	15,02	17,41	19,55	19,55	
	- Transportasi dan Komunikasi	%	1,44	2,12	2,13	2,47	2,47	
	- Jasa	%	1,30	1,27	1,87	1,83	1,83	
	- Lainnya	%	20,58	15,56	13,56	16,11	16,11	
<b>7</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
7.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (PNS Kab. Paser)	%	41,60	45,96	43,98	40,39	42,44	
7.2	Jumlah Tenaga kerja perempuan	orang	33,302	22,236	26,798	26,798	29.856	
7.3	Banyaknya anak terlantar (0-21 tahun)	Anak	-	172	618	-	---	
7.4	Pekerja Anak	%	-	-	-	-	---	
<b>8.</b>	<b>Pangan</b>							

8.1	Produksi Padi dan Palawija	Ton	40.958	44.790	29.852	39.299		
<b>9</b>	<b>Pertanahan</b>							
9.1	Jumlah Bangunan Ber IMB	Unit	-	2.758	3.403	4.930	5.201	
<b>10</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>							
10.1	Persentase Penduduk berakses air minum	%	5.87/24	6.03/24	6.22/25	6.52/25		Data Pelanggan PDAM
10.2	Indeks kualitas air sungai	Titik Kualitas/Parameter	19 Titik Buruk	19 Titik Buruk	32 Titik Buruk	32 Titik Buruk		
10.3	Penegakan hukum lingkungan	Kasus	6 Kasus 1 Sanksi Adm 1 Penutupan Lahan 3 Verifikasi 1 Uji Lab	5 Kasus 3 Surat Tindak lanjut 2 Uji Lab	5 Kasus 4 Surat Tindak Lanjut 1 Uji Lab	4 Kasus 1 Surat Tindak Lanjut 3 Surat Tindak Lanjut dan Uji Lab		BLH
10.4	Persentase sampah terangkut per hari	%	2	2	3	3		DKP
<b>11</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>							
11.1	Kepemilikan KTP	Orang	36.831	17.329	25.069	167.310		
	Kepemilikan Akta Kelahiran	Orang	4.307	10.378	10.573	92.593		
<b>12</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>							
12.1	Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang Aktif	Unit	-	-	10	10	10	
12.2	Jumlah LSM dan Ormas	Unit	215	222	235	264		
<b>13</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
13.1	Persentase akseptor KB terhadap PUS	%	67,64	69,99	69,69	70.14	61.06	
13.2	Banyaknya Peserta baru KB	Orang	7.277	10.209	6.429	6,022	5,908	
13.3	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	Orang	30.039	36.023	39.430	-	18,254	
<b>14</b>	<b>Perhubungan</b>							
14.1	Status Jalan di Kabupaten Paser							
	- Desa	Km	316,46	379,75	379,75	379,75	379,75	
	- Kabupaten	Km	631,37	694,85	625,44	625,44	625,44	
	- Propinsi	Km	276,33	276,33	242,34	242,34	242,34	
	- Nasional	Km	224,71	224,71	224,71	224,71	224,71	
<b>15</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
15.1	Jenis Surat Kabar							
	- Nasional	Jenis	1	1	2	2	2	
	- Lokal	Jenis	2	2	3	3	3	
<b>16.</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>							
16.1	Jumlah Koperasi	Unit	404	420	274	288	301	
16.2	Jumlah Usaha Mikro	Unit	3.202	7.020	11.200	11.514	13.726	

	dan Kecil							
<b>17</b>	<b>Penanaman Modal</b>							
17.1	Realisasi proyek PMDN	Juta (Rp)	244.172	3.324.458	469.577	419.296	197.816	
17.2	Realisasi proyek PMA	000 (US\$)	2.026	557.923	352.667	107.025	13.128	
<b>18</b>	<b>Kepemudaan dan Olah raga</b>							
18.1	Jumlah Karang Taruna	Unit	-	-	26	26	26	
18.2	Jumlah GOR/ Sarana Olah raga	Unit	-	-	1	1	1	
<b>19</b>	<b>Statistik</b>							
19.1	Publikasi “ Kabupaten/Kota Dalam Angka”	-	Ada	Ada	Ada	Ada		
19.2	Publikasi “PDRB Kabupaten/Kota”	-	Ada	Ada	Ada	Ada		
<b>20</b>	<b>Kebudayaan</b>							
20.1	Jumlah event budaya	Event	6	6	3	1	2	
20.2	Jumlah peninggalan sejarah dan purbakala	Unit	10	10	10	10	10	
20.3	Jumlah Museum	Unit	1	1	1	1	1	
20.4	Jumlah tanaman budaya	Unit	1	1	1	1	1	
<b>21</b>	<b>Perpustakaan</b>							
21.1	Jumlah Perpustakaan	Unit	183	219	274	288	296	
21.2	Jumlah Pengunjung	Orang	3.575	8.044	66.807	8.325	13.344	
21.3	Jumlah Koleksi Buku	Buku	32.685	40.945	49.345	98.690	49.545	
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>								
<b>1</b>	<b>Pariwisata</b>							
1.1	Jumlah Wisata Nusantara dan Mancanegara	Orang	15.235	15.624	19.512	19.512	20.572	
1.2	Kontribusi Subsektor Jasa/ Pariwisata terhadap PDRB	%	2,77	3,00	-	-		
<b>2</b>	<b>Pertanian</b>							
2.1	Produksi Padi	Ton	37.044	41.098	36.844	36,290		
2.2	Produksi padi atau bahan utama lainnya per Ha	Kw	3,63	3,99	4,08	3,87		
2.3	Kontribusi Sektor peternakan, pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	%	11,74	12,05	11,29	11,56		
2.4	Kontribusi Subsektor tanaman pangan terhadap PDRB	%	1,2	1,3	1,4	1,5		
<b>3</b>	<b>Kehutanan</b>							
3.1	Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,27	1,21	1,1	0,7		Dishut
<b>4</b>	<b>Perdagangan</b>							
	Kontribusi Subsektor perdagangan terhadap PDRB	%	3,25	3,54	-	3,54		
	Nilai Eksport	000 US	-	-	-	-		

	Nilai Import	000 US	-	-	-	-		
	Neraca Perdagangan Luar Negeri	000 US	-	-	-	-		
<b>5</b>	<b>Perindustrian</b>							
5.1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	3,84	3,80	3,99	4,28	4,50	
5.2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas terhadap PDRB	%	3,84	3,80	3,99	4,28	4,50	
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>								
<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>								
<b>1</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian</b>							
1.1	Rata – rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/Bulan	759.624	836.872	860.035	-		
	Rata – rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	371.656	424.344	432.967,60	-		
	Rata – rata pengeluaran konsumsi Non makanan per kapita	Rp/Bulan	387.968	412.528	427.067,13	-		
	PDRB Per Kapita	Juta/Rp	-	-	-	-		
	Pendapatan regional per kapita	Juta/Rp	-	-	-	-		
	Jumlah Koperasi	Unit	404	420	274	278		
<b>2</b>	<b>Pertanian</b>							
2.1	Nilai tukar petani	%	-	-	97,68	97,87		
<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>								
<b>1</b>	<b>Perhubungan</b>							
1.1	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	M	-	-	-	-		
<b>2</b>	<b>Penataan Ruang</b>							
2.1	Ketaataan terhadap RTRW		-	-	-	-		
2.2	Luas wilayah industri		-	-	-	-		
2.3	Luas wilayah perkotaan		-	-	-	-		
<b>3.</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian</b>							
3.1	Jumlah Kantor Perbankan	Unit	7	9	9	9	9	
3.2	Jumlah Akomodasi (hotel/penginapan)	Unit	22	25	27	27	27	
3.3	Jumlah rumah makan/restoran	Unit	37	37	41	41	41	
<b>4</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>							
4.1	Persentase rumah tangga dengan sumber air bersih	%	58,14	59,31	62,095	64,88		DCK
<b>5</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
5.1	Daya listrik yang diproduksi	MWh	-	-	-	107,579,674	111,598,372	
5.2	Jumlah Pelanggan Listrik	pelanggan	-	-	-	32,847	36,220	
<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>								
<b>1</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian</b>							
1.1	Jumlah Nilai	Juta Rp	-	-	-	-		



	Investasi(PMDN/PMA)							
	<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>							
<b>1</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian</b>							
1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		68,18	69,61	69,87	70,30	71,17	
1.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		54,51	52,85	58,90	58,90		
1.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		62,21	62,94	68,58	68,58		
1.4	Rasio Ketergantungan	%	51,98	52,09	49,61	51,89		

## 2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD

Pengendalian dan Evaluasi dilaksanakan untuk lebih memperjelas dan mempermudah arah serta pelaksanaan program-program pembangunan sehingga tepat sasaran dan mempermudah dalam melakukan pengawasan sehingga memperkecil kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan meliputi :

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD)
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD)
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD)

Evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lingkup Kabupaten Paser. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan Bupati dalam mewujudkan :

1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah
2. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan di Kabupaten Paser dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan

Evaluasi pembangunan daerah pada periode sebelumnya yang menjadi dasar perumusan perencanaan pembangunan tahunan adalah evaluasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan melalui indikator kerjanya (*outcome*). Indikator kinerja yang dimaksud adalah variabel untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan

pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021. Indikator kinerja inilah yang menjadi ujung tombak dalam evaluasi pembangunan daerah sekaligus penentu apakah pencapaian tujuan pembangunan daerah berhasil atau tidak.

Pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 ini, evaluasi pembangunan menggunakan evaluasi RPJMD tahun pertama yaitu tahun 2016. Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Kabupaten Paser hingga tahun 2016 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi terutama dalam kaitannya dengan pemerataan hasil pembangunan dan perekonomian makro pembangunan daerah.

Evaluasi tersebut akan memberi masukan dalam perencanaan ke depannya apakah akan terus dilanjutkan, disempurnakan, atau akan diganti sepenuhnya dengan kebijakan serta program kegiatan yang baru untuk memberikan optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan seutuhnya. Berikut hasil evaluasi setiap misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021.

**Misi I, “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih Dan Pemukiman “**, diharapkan menjadi motor penggerak bagi ketercapaian misi-misi yang lain sekaligus modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Prioritas dari Misi pertama ini adalah pemerataan pembangunan dari sisi akses dan kualitas infrastruktur transportasi, energi, air bersih dan pemukiman yang layak. Selain peningkatan yang sudah ada, beberapa titik kritis di Kabupaten Paser masih membutuhkan ketersediaan sejumlah infrastruktur tersebut.

Berdasarkan analisis capaian program kegiatan pembangunan pada evaluasi misi pembangunan pertama (evaluasi RKPD 2016), dari 44 Program Prioritas, terdapat 12 (dua belas) program prioritas yang masih jauh dari harapan target pembangunan (27,27%), serta 14 (empat belas) Program prioritas yang mendekati target pembangunan (*on progress*) meskipun belum maksimal (31,82%). Sementara 14 Program prioritas lainnya telah menunjukkan pencapaian target (31,82%) dan 4 Program prioritas (9,09%) tidak dianggarkan program kegiatannya.

Mengingat pentingnya ketersediaan infrastruktur dasar dalam mendukung program pembangunan lainnya ditengah kendala geografis wilayah dan warga masyarakat yang tersebar hingga ke pedalaman, maka perlu untuk lebih selektif dan realistis dalam penetapan program, disamping kepentingan untuk membangun koordinasi yang lebih baik antar tingkat pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.

**Misi II, “Meningkatkan Pelayanan Dasar Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan”**, pendidikan dan kesehatan merupakan dasar bagi pembangunan sosial masyarakat, dua bidang ini merupakan basis pembangunan yang menjadi hak warga masyarakat Paser agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Misi kedua ini memiliki 42 Program Prioritas yang harus dijalankan.

Hasil evaluasi RKPD 2016 menunjukkan bahwa 7 Program Prioritas diantaranya (16,67%) sudah menunjukkan pencapaian target, 17 Program Prioritas (40,48%) menuju target, dan sisanya 17 Program Prioritas (40,48%) belum mencapai target, sedangkan 1 Program prioritas (2,38%) tidak dianggarkan program kegiatannya.

Strategi dan arah kebijakan pada misi dua tersebut diarahkan pada upaya peningkatan ketersediaan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan, kemudian distribusi yang lebih merata terhadap guru dan tenaga kesehatan. Di samping itu, strategi dan kebijakan ini menekankan perlunya penguatan daya saing daerah khususnya bidang pendidikan dan kesehatan dengan memperkuat standardisasi kelembagaan dan standardisasi pelayanan. Dengan demikian, untuk mewujudkan masing-masing sasaran, strategi dan arah kebijakan ini juga menjadi petunjuk bagi program-program dan kegiatan dalam menunjang peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

**Misi III, “Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan”**. Misi ini tidak hanya berhubungan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga berhubungan dengan isu pemerataan, keberlanjutan, mitigasi bencana dan responsif gender. Penerapan konsep pemerataan menjadi penting, karena persoalan disparitas di Paser masih besar. Sedangkan penerapan konsep tentang keberlanjutan, mitigasi bencana dan responsif gender menjadi penting untuk dijalankan, agar pembangunan perekonomian di Kabupaten Paser menjadi semakin baik di masa depan

Evaluasi RKPD 2016 terhadap program-program pembangunan pada misi ketiga menunjukkan bahwa dari 113 Program Prioritas yang harus dijalankan, bahwa 39 Program Prioritas diantaranya (34,51%) sudah menunjukkan pencapaian target, 40 Program Prioritas (35,40%) menuju target, dan 29 Program Prioritas (25,66%) belum mencapai target, sedangkan 5 Program prioritas (4,42%) tidak dianggarkan program kegiatannya.

Strategi dan arah kebijakan pada misi tiga ini diarahkan pada upaya mewujudkan sasaran meningkatnya produksi, produktivitas, dan kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan disusun beberapa strategi dan arah kebijakan yang fokus pada penggunaan teknologi terbaru dan pengembangan strategi budidaya. Dalam rangka peningkatan kualitas produk, strategi dan arah kebijakan diarahkan pada penguatan sentra-sentra produk pengolahan.

Dalam hal peningkatan pariwisata, strategi diarahkan pada upaya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata. Selain itu, pengembangan wisata diharapkan mampu mendasarkan diri pada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan yang mampu menghasilkan kebermanfaatn sosial dan ekonomi serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pada tahap yang lebih lanjut, sektor pariwisata ini juga diarahkan untuk mampu meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Paser.

Strategi dan arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja pasar tradisional, UMKM, koperasi, dan industri kecil menengah disusun berdasarkan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas manajemen baik UMKM, koperasi, maupun pasar tradisional. Kebijakan untuk sasaran tersebut juga diharapkan mampu mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat lokal. Upaya ini juga didorong dengan strategi dan arah kebijakan peningkatan investasi yang tidak lagi menggantungkan diri pada sektor tambang. Hal ini juga sejalan dengan semangat dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan menggandalkan perekonomian non tambang.

**Misi IV, “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan “**, merupakan misi yang sangat disorot oleh publik, mengingat tata kelola pemerintahan memegang peran penting dalam proses pembangunan daerah. Isu tata kelola berkaitan dengan kapasitas aparatur pemerintah sekaligus seperangkat kelembagaan beserta prinsip yang menjamin kelancaran proses perencanaan pembangunan beserta pelaksanaan pembangunan atau penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil analisis pada evaluasi RKPD 2016 khususnya misi keempat menunjukkan bahwa dari 67 Program Prioritas yang harus dijalankan, bahwa 22 Program Prioritas diantaranya (32,84%) sudah menunjukan pencapaian target, 26 Program Prioritas (38,81%) menuju target, dan 18 Program Prioritas (26,87%) belum mencapai target, sedangkan 1 Program prioritas (1,49%) tidak dianggarkan program kegiatannya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, maka akan dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan berbagai strategi penguatan kapasitas sumber daya aparatur. Hal itu diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam berbagai bidang. Kombinasi peningkatan kualitas sumber daya akan menjadi pintu masuk dalam rangka peningkatan kapasitas birokrasi secara umum. Di samping itu, perbaikan tatakelola pemerintahan juga mendorong adanya partisipasi publik yang mampu memberikan masukan yang konstruktif terhadap pembangunan Paser secara umum.

**Misi V, “Kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat lokal”**, memiliki arti penting sebagai basis pembangunan sektor lain sekaligus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Misi ini mengandung beberapa nilai utama berupa pengakuan terhadap

masyarakat lokal (rekognisi), pemerataan hasil-hasil pembangunan (*equity dan equality*), pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan (partisipatif), dan pemberian perhatian terhadap kelompok-kelompok marjinal, seperti perempuan, lansia, anak, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Hasil analisis pada evaluasi RKPD 2016 khususnya misi kelima menunjukkan bahwa dari 41 Program Prioritas yang harus dijalankan, bahwa 18 Program Prioritas diantaranya (43,90%) sudah menunjukkan pencapaian target, 20 Program Prioritas (48,78%) menuju target, dan 2 Program Prioritas (4,88%) belum mencapai target, sedangkan 1 Program prioritas (2,44%) tidak dianggarkan program kegiatannya.

Pengarusutamaan nilai-nilai sosial budaya dalam proses pembangunan diharapkan akan dapat menciptakan stabilitas sosial yang merupakan prasyarat sekaligus tujuan pembangunan daerah. Nilai-nilai tersebut menjiwai perwujudan misi kelima Kabupaten Paser yang diterjemahkan dalam berbagai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Paser.

Dalam pengejawantahan misi pembangunan daerah, pembangunan jangka menengah Kabupaten Paser tahun 2016-2021 memiliki 52 sasaran pembangunan daerah yang secara hierarki akan memberikan kontribusi dalam keberhasilan pencapaian misi pembangunan.

Evaluasi sasaran pembangunan tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi tahun 2016 (atau data terakhir) dengan target kinerja 2016 dalam dokumen perencanaan pembangunan. Evaluasi ini dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan data dan informasi yang valid dan *up-date* sebagai bagian dari optimalisasi evaluasi pembangunan daerah.

Hasil kajian dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2016, indikator kinerja sasaran pembangunan yang memuaskan dimana capaian target cukup memberikan hasil positif. Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa berbagai arah kebijakan serta program dan kegiatan yang dirumuskan dan diimplementasikan memiliki capaian yang cukup sesuai dengan target sasaran sebesar 73,80 persen.

Capaian pembangunan jangka menengah pada periode ini memiliki beberapa kendala yang dirasa cukup berdampak signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Permasalahan yang cukup rumit dan kompleks dalam pembangunan Kabupaten Paser adalah terkait kondisi perekonomian daerah yang bergejolak dikarenakan imbas dari isu global perekonomian internasional. Selain itu, permasalahan sosial kehidupan masyarakat serta permasalahan ketimpangan struktur perekonomian wilayah yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan perekonomian beberapa tahun terakhir menjadi

salah satu fokus utama. Hal ini terlihat dari masih minimnya capaian pembangunan, berupa: penurunan tingkat kemiskinan yang menjauh dari target, tingkat pengangguran yang belum optimal penanganannya, serta pertumbuhan ekonomi yang masih jauh dari harapan. Kedua permasalahan ini memerlukan perhatian serius untuk pertimbangan kebijakan pembangunan kedepannya. Berikut capaian kinerja sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016:

Tabel II.89

## Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2016

Sasaran		Indikator ( <i>Impact</i> )	Kondisi Awal 2015	Realisasi Kinerja 2016	% Capaian
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	IPM	70.3	71.17	1.24
2	Meningkatnya Angka Melek Huruf	Angka Melek Huruf (%)	98.7	98.23	-0.48
3	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar	Angka Partisipasi Kasar (%)	98.18	97.42	-0.77
4	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni	Angka Partisipasi Murni (%)	72.47	80.27	10.76
5	Meningkatnya Angka Kelulusan	Angka Kelulusan (%)	98.2	98.55	0.36
6	Menurunnya Angka Putus Sekolah	Angka Putus Sekolah (%)	0.56	0.051	-90.89
7	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8.51	8.12	-4.58
8	Meningkatnya angka harapan hidup	Angka harapan hidup (tahun)	74	73	-1.35
9	Menurunnya angka kematian bayi	Angka kematian bayi (kasus)	80	66	-17.50
10	Menurunnya angka kematian balita	Angka kematian balita (kasus)	11	11	0.00
11	Menurunnya angka kematian ibu	Angka kematian ibu (kasus)	8	9	12.50
12	Meningkatnya angka usia harapan hidup	Angka usia harapan hidup (tahun)	71.98	73	1.42
13	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	8.76	8.55	-2.40

Sasaran		Indikator ( <i>Impact</i> )	Kondisi Awal 2015	Realisasi Kinerja 2016	% Capaian
14	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran (%)	9.06	5.91	-34.77
15	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Sub Sektor Non-Pangan Per Kapita	52.22	48.12	-7.85
		Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Sub Sektor Pangan Per Kapita	47.78	51.87	8.56
16	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)	-0.97	2.15	221.65
		Pertumbuhan ekonomi tanpa batubara (%)	4.67	5.26	12.63
17	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas atas dasar harga konstan (%)	11.31	11.81	4.42
		Laju pertumbuhan ekonomi Sektor pertanian dalam arti luas	2.51	2.88	14.74

**1. Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi Dan Pemukiman :**

**Tabel II.89.**

Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Misi 1 Pembangunan Kabupaten Paser

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi (Program Prioritas)
1	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan transportasi publik	1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan 2. Meningkatkan pelayanan transportasi publik 3. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Pengguna Jalan 4. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Jalan	1. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan 1 2. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan 1 3. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 1 4. Program Peningkatan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan 1 5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Jalan 1 6. Program Pembangunan

			<p>Infrastruktur Permukiman 1</p> <p>7. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong -1</p> <p>8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1</p> <p>9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1</p> <p>10. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1</p> <p>11. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 1</p> <p>12. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1</p>
2	Mengembangkan Infrastruktur Permukiman Rakyat	<p>1. Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat</p>	<p>13. Program Pengembangan Perumahan 1</p> <p>14. Program Pengendalian Banjir 1</p> <p>15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1</p> <p>16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 1</p> <p>17. Program Peningkatan dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelistrikan 1</p> <p>18. Program Pengelolaan Areal Pemakaman -1</p> <p>19. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) -1</p>
3	Meningkatkan akses air bersih	<p>1. Meningkatnya akses air bersih</p>	<p>20. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku (PDAM) 1</p> <p>21. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1</p> <p>22. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (air minum) 1</p> <p>23. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku (Non PDAM) 1</p>

Sumber : Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Lima Tahunan (2016– 2021) Kabupaten Paser



## 2. Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Dasar Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan

**Tabel II.90.**

Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Misi 2 Pembangunan Kabupaten Paser

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi (Program Prioritas)
5	Meningkatkan akses pelayanan pendidikan	1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah 2. Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini 3. Meningkatnya Angka Melek Huruf	28. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun 1 29. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 30. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 31. Program Pendidikan Non Formal 1
6	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	32. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1
7	Memperkuat pelayanan pendidikan yang berdaya saing	1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing	33. Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Pendidikan 1
8	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer 2. Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat	34. Program Obat dan Perbekalan kesehatan 1 35. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 36. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1 37. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 1 38. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1 39. Program Pemerataan Tenaga Kesehatan 1 40. Program Pelayanan Kesehatan

			Penduduk Miskin 1
9	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya derajat kesehatan</li> <li>2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>41. Program Program Pengawasan Obat dan Makanan 1</li> <li>42. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1</li> <li>43. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1</li> <li>44. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1</li> <li>45. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1</li> <li>46. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1</li> <li>47. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1</li> <li>48. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1</li> <li>49. Program Keluarga Berencana 1</li> <li>50. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1</li> <li>51. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 1</li> <li>52. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 1</li> <li>53. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 1</li> </ol>
10	Memperkuat pelayanan kesehatan yang berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangnya Pelayanan Kesehatan yang berdaya saing</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>54. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1</li> <li>55. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1</li> </ol>

Sumber : Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Lima Tahunan (2016– 2021) Kabupaten Paser

### 3. Misi 3 : Memperkuat Fondasi Perekonomian Yang Berbasis Potensi Lokal Dan Berkelanjutan:

**Tabel II.91.**

Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Misi 3 Pembangunan Kabupaten Paser

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi (Program Prioritas)
11	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	<p>1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</p> <p>2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</p>	<p>56. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 1</p> <p>57. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1</p> <p>58. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Tanaman Pangan) 1</p> <p>59. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan (Pertanian dalam arti luas) -1</p> <p>60. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya (pengairan sawah) 1</p> <p>61. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (Khusus Perkebunan) 1</p> <p>62. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Khusus Perkebunan) 1</p> <p>63. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</p> <p>64. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1</p> <p>65. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1</p> <p>66. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan 1</p> <p>67. Program Pengembangan Budidaya Perikanan +1</p> <p>68. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1</p>

			<p>69. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 1</p> <p>70. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (kualitas produk pertanian) 1</p> <p>71. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan (sentra produksi pertanian) 1</p> <p>72. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (kualitas produk perkebunan) 1</p> <p>73. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1</p> <p>74. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan (sentra produksi perkebunan) 1</p> <p>75. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (kualitas produk) 1</p> <p>76. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (sentra produksi) 1</p> <p>77. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan (sentra produksi) 1</p> <p>78. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan (kualitas produk) 1</p>
12	Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan	1. Berkembangnya sektor pariwisata	<p>79. Program Pengembangan Kemitraan 1</p> <p>80. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1</p> <p>81. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1</p>

13	Meningkatkan kinerja Pasar Tradisional, Koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kinerja UMKM</li> <li>2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional</li> <li>3. Meningkatnya Koperasi aktif</li> <li>4. Meningkatnya kinerja Industri Kecil Menengah</li> <li>5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja</li> <li>6. Meningkatnya kinerja Bumdes</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>82. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 1</li> <li>83. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 1</li> <li>84. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 1</li> <li>85. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1</li> <li>86. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 1</li> <li>87. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1</li> <li>88. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1</li> <li>89. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 1</li> <li>90. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1</li> <li>91. Program Perluasan Kesempatan Kerja 1</li> <li>92. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan 1</li> <li>93. Program Penempatan Tenaga Kerja 1</li> <li>94. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 1</li> </ol>
14	Meningkatnya iklim investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya investasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>95. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1</li> <li>96. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1</li> <li>97. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah 1</li> </ol>
15	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup</li> <li>2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>98. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1</li> <li>99. Program Pengendalian 1Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1</li> <li>100. Program Perlindungan dan</li> </ol>

			<p>Konservasi Sumber Daya Alam 1</p> <p>101. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1</p> <p>102. Program Pengelolaan TAHURA 1</p>
--	--	--	--

*Sumber : Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Lima Tahunan (2016 – 2021) Kabupaten Paser*

Sedangkan realisasi keuangan RKPD tahun 2016 per urusan dapat diuraikan sebagai berikut:

### 2.5.1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan Kabupaten Paser pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.410.313.640.067,40, sampai akhir tahun anggaran dengan realisasi keuangan sebesar Rp.379.600.806.108,00 atau 92,51%. Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan Kecamatan.

### 2.5.3. Urusan Kesehatan

Secara keseluruhan Dinas Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.259.035.757.128,15 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.217.232.697.329,28 atau 83,86%. Anggaran tersebut merupakan belanja langsung dari Dinas Kesehatan, Kantor Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Sekretariat Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Dewan Pembina KORPRI, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan.

### 2.5.3. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum ini diselenggarakan oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang, Dinas Cipta Karya, Pemerintahan Kecamatan, serta Pemerintahan Kelurahan. Alokasi dana belanja langsung yang disediakan untuk urusan Pekerjaan umum di Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang sebesar Rp.208.187.886.769,00 terdiri dari 12 (dua belas) Program dan 32 (tiga puluh dua) Kegiatan, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.191.231.564.920,00 dengan persentase capaian sebesar 91,86%. Sedangkan alokasi dana belanja langsung yang disediakan untuk urusan Pekerjaan Umum di Dinas Cipta Karya sebesar Rp.23.301.423.217,50 terdiri dari 5 (lima) Program dan 7 (tujuh) Kegiatan, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.20.370.483.150,00 dengan persentase capaian sebesar 87,42%, Sedangkan alokasi anggaran yang di berikan kepada Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari 7 Kecamatan, yakni Kecamatan Batu Sopang, Kuaro, Long Kali, Muara Komam, Pasir Belengkong, Tanah Grogot dan Tanjung Harapan, serta 1 Kelurahan terdiri dari Kantor Lurah Tanah Grogot terdiri dari 5 (lima) Program dan 7 (tujuh) Kegiatan, sebesar Rp.6.998.276.200,00 dengan realisasi keuangan Rp.6.323.014.000,00 atau persentase capaian 90,35%

#### 2.5.4. Urusan Perumahan

Usuran Perumahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.47.904.675.022,65 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Cipta Karya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Daerah pada Bagian Pembangunan, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan, dari alokasi anggaran yang disediakan dapat direalisasikan sebesar Rp.43.672.663.135,00 atau 91,17%.

#### 2.5.5. Urusan Penataan Ruang

Usuran Penataan Ruang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.834.561.292,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang, dan Pemerintahan Kecamatan, dari alokasi anggaran yang disediakan dapat direalisasikan sebesar Rp.745.214.605,00 atau 89,29%,.

#### 2.5.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Usuran Perencanaan Pembangunan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.18.511.386.291,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut diselenggarakan oleh Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sekretariat Daerah, Sekretariat DP Korpri, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan, dari alokasi anggaran yang disediakan dapat direalisasikan sebesar Rp.15.397.686.004,00 atau 83,18%.

#### 2.5.7. Urusan Perhubungan

Usuran Perhubungan pada tahun 2016 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.31.071.119.226,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan. Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.322.494.559,00 atau 36,44%.

#### 2.5.8. Urusan Lingkungan Hidup

Usuran Lingkungan Hidup mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.57.146.757.805,78 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut dilaksanakan bersama oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kehutanan, serta 4 (empat) Kecamatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.25.874.767.580,50 atau 45,28%.



#### 2.5.9. Urusan Pertanahan

Usuran pertanahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.169.655.403,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2016. Urusan Pertanahan merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan dan Pemerintahan Kecamatan dengan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.92.359.778,00 atau 54,44%.

#### 2.5.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Usuran Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2016 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.8.969.193.401,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemerintahan Kecamatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.644.112.632,00 atau 85,23%.

#### 2.5.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.7.406.883.142,00. Urusan tersebut diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5.710.268.453,00 atau 79,13%.

#### 2.5.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Usuran Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.899.123.237,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan realisasi keuangan sebesar Rp.694.165.284,00 atau 77,20%.

#### 2.5.13. Urusan Sosial

Usuran Sosial mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.25.448.533.376,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan Sosial tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Sekretariat Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat DP Korpri, serta Pemerintahan Kecamatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.20.495.169.777,00 atau 80,54%.

#### 2.5.14. Urusan Tenaga Kerja

Usuran Tenaga Kerja mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.7.242.053.114,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016.

Urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dengan realisasi sebesar Rp.6.380.126.557,00 atau 88,10%.

#### 2.5.15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan UKM mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.9.201.070.589,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, dari alokasi anggaran yang disediakan dapat direalisasikan sebesar Rp.7.768.965.140,00 atau 84,44%.

#### 2.5.16. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.5.937.487.002,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Sekretariat Daerah pada Bagian Perekonomian, dari alokasi anggaran yang disediakan dapat direalisasikan sebesar Rp.5.334.551.874,00 atau 89,85%.

#### 2.5.17. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.5.994.689.727,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.649.851.185,00 atau 94,25%.

#### 2.5.18. Urusan Pemuda dan Olah Raga

Urusan Pemuda dan Olah Raga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.46.585.489.717,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sekretariat DP Korpri, Dinas Cipta Karya dan Pemerintahan Kecamatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.46.516.698.663,00 atau 99,85%.

#### 2.5.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.26.039.783.204,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan dan Sekretariat DP Korpri serta Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan, dari alokasi anggaran yang disediakan dapat direalisasikan sebesar Rp.24.222.013.664,00 atau 93,02%.

#### 2.5.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian

Usuran Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.416.084.297.703,92 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut diselenggarakan beberapa SKPD di Kabupaten Paser yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan. Dari alokasi yang disediakan dapat direalisasikan sebesar Rp.362.412.781.350,86 atau 87,10 %.

#### 2.5.21. Urusan Ketahanan Pangan

Usuran Ketahanan Pangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.22.360.428.752,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut diselenggarakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Sekretariat Daerah pada Bagian Perekonomian, dari alokasi anggaran yang disediakan dapat direalisasikan sebesar Rp.18.672.689.418,00 atau 83,51%.

#### 2.5.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Usuran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser tahun 2016 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.14.422.998.422,00. Urusan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Paser. Dari alokasi anggaran yang disediakan melalui Belanja Langsung dapat direalisasikan sebesar Rp.13.179.111.208,00 atau 91,38%.

#### 2.5.23. Urusan Statistik

Usuran Statistik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.419.205.500,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.222.826.700,00 atau 53,15%

#### 2.5.24. Urusan Kearsipan

Usuran Kearsipan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.234.320.510,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.147.181.700,00 atau 78,41%.

#### 2.5.25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Usuran Komunikasi dan Informatika mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.12.911.026.099,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pendidikan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Sekretariat Daerah pada Bagian Hubungan Masyarakat, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan Daerah dan Pemerintahan Kelurahan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.995.535.279,00 atau 85,16%.

#### 2.5.26. Urusan Perpustakaan

Usuran Perpustakaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.3.789.536.752,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Paser dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.351.260.154,00 atau 88,43%.

#### 2.5.27. Urusan Pertanian

Usuran Pilihan Pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.26.241.194.800,75 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan serta Pemerintahan Kecamatan, dari alokasi anggaran yang disediakan dapat direalisasikan sebesar Rp.22.564.189.884,00 atau 85,99%.

#### 2.5.28. Urusan Kehutanan

Usuran Kehutanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.103.480.194.610,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan, dari alokasi anggaran yang Disediakan dapat direalisasikan sebesar Rp.18.287.199.694,00 atau 17,67%.

#### 2.5.29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Usuran Energi dan Sumber Daya Mineral mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.5.318.155.046,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan, Dinas Perindustrian dan Energi, serta 5 (Lima) Pemerintahan Kecamatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.431.799.598,00 atau 83,33%.

### 2.5.30. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.182.686.250,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2016. Urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.176.306.043,00 atau 99,46%.

### 2.5.31. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.7.597.429.094,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta Sekretariat Daerah pada Bagian Perekonomian, dari alokasi yang disediakan dapat direalisasikan sebesar Rp.7.016.634.301,00 atau 92,36%.

### 2.5.32. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.8.919.638.017,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, dari alokasi anggaran yang disediakan dapat direalisasikan sebesar Rp.6.827.991.595,00 atau 76,55%.

### 2.5.33. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.5.545.310.359,50 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Energi dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.030.238.401,00 atau 90,71%.

### 2.5.34. Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.173.338.000,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016. Urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dengan realisasi keuangan Rp.155.517.650,00 atau 89,72%.

Disamping capaian kinerja pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan urusan-urusan pemerintahan sebagaimana tercantum diatas, pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Paser juga memperoleh beberapa penghargaan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur diantaranya :

- 1) Terbaik I Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Rangka HUT ke 60 Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Terbaik I Bidang Koperasi dalam Rangka HUT ke 60 Provinsi Kalimantan Timur

- 3) Terbaik I Bidang Perkebunan dalam Rangka HUT ke 60 Provinsi Kalimantan Timur.
- 4) Terbaik III Bidang Tanaman Pangan dalam Rangka HUT ke 60 Provinsi Kalimantan Timur.
- 5) Terbaik III Bidang Kebudayaan dalam Rangka HUT ke 60 Provinsi Kalimantan Timur.
- 6) Terbaik III Bidang Kebudayaan Kategori Kabupaten dalam Rangka HUT ke 60 Provinsi Kalimantan Timur
- 7) Terbaik III Bidang Pariwisata dalam Rangka HUT ke 60 Provinsi Kalimantan Timur.
- 8) Terbaik III Bidang Kehutanan dalam Rangka HUT ke 60 Provinsi Kalimantan Timur.
- 9) Anugerah Pesona Kaltim 2016 : “Museum dan Konservasi” dalam Rangka HUT ke 60 Provinsi Kalimantan Timur.

## **2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2016, pemerintah Kabupaten Paser mampu melaksanakan pembangunan dengan cukup baik. Keberhasilan tersebut dapat terlihat secara fisik melalui perkembangan kabupaten dan secara non fisik dari beberapa penghargaan yang diperoleh ditingkat provinsi maupun ditingkat nasional. Adanya perkembangan kabupaten yang cukup berhasil serta pengakuan dari berbagai pihak bukan berarti bahwa Kabupaten Paser dalam pembangunannya tidak mengalami permasalahan. Dari hasil evaluasi dan monitoring pembangunan yang dilakukan, pemerintah Kabupaten Paser mengalami permasalahan diberbagai bidang, yaitu :

#### **a. Pendidikan**

Berdasarkan data jumlah murid dan jumlah guru untuk tingkat pendidikan SD dan SMP, dapat dikatakan bahwa rasio murid terhadap guru untuk dua jenjang pendidikan ini di Kabupaten Paser sudah cukup baik. Namun, yang perlu disadari adalah disparitas terkait akses terhadap pendidikan antara masyarakat yang bermukim di kota dengan yang di desa atau di wilayah-wilayah pedalaman. Minimnya fasilitas pendidikan di wilayah pesisir dan pedalaman menjadi salah satu faktor penghambat terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

Kenyataan ini akan sangat berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah anak-anak di pesisir dan pedalaman. Selain berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah, kurangnya sarana pendidikan di wilayah pedalaman dan pesisir berpengaruh juga terhadap sebaran tenaga-tenaga guru yang lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Tidak heran bila rasio murid terhadap guru di Kabupaten Paser terlihat cukup proporsional, tetapi dalam kenyataannya justru sedang tercipta kesenjangan antara masyarakat kota dengan masyarakat di pesisir dan pedalaman terkait akses terhadap pendidikan ini.

Kesenjangan akses ini dapat terlihat dari semakin berkurangnya jumlah murid pada level pendidikan yang lebih tinggi. Artinya sebaran sarana dan prasarana pendidikan untuk level SMP masih belum merata untuk seluruh wilayah, sehingga jumlah murid pada level pendidikan lanjutan jauh menurun jika dibandingkan dengan jumlah murid SD yang mencapai jumlah di atas 30 ribu (Kabupaten Paser dalam Angka 2016). Kondisi ini bisa terbaca dengan jelas ketika lama waktu sekolah yang digalakkan negara, yaitu pendidikan dasar 9 tahun, namun Kabupaten Paser selama lima tahun terakhir hanya mampu mencapai titik 8,3. Jika dibandingkan dengan daerah lain, kondisi ini masih cukup baik, namun ketika lama waktu sekolah ini didetailkan pada level analisis perkotaan dan pedesaan, maka akan terlihat bahwa lama waktu sekolah anak-anak di daerah perkotaan dan sentra perekonomian lebih lama dibanding anak-anak yang tinggal di pesisir dan pedalaman yang belum memiliki akses dan kualitas pendidikan yang kompetitif. Hal ini berimplikasi pada pola pikir anak-anak usia sekolah yang lebih berorientasi untuk mencari pekerjaan daripada peningkatan kualitas dan kapasitas.

b. Kesehatan

Jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan di Kabupaten Paser dapat dikatakan cukup memadai untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam kenyataannya, angka kematian bayi, balita dan ibu hamil masih bersifat fluktuatif. Salah satu persoalan yang patut diperhatikan secara khusus adalah semakin meningkatnya angka kematian balita. Hal ini terkait dengan kualitas pelayanan imunisasi yang cenderung menurun. Padahal, imunisasi menjadi salah satu cara menekan angka kematian balita, sebab banyak penyakit yang dapat dicegah lewat pemberian vaksin saat imunisasi.

Persoalan utamanya kembali pada keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pesisir atau wilayah

pedalaman Kabupaten Paser. Realitas lain menunjukkan bahwa penyebab utama kematian balita ialah ispa dan diare. Hal ini berarti tenaga-tenaga kesehatan perlu disebar secara lebih merata untuk memberi pelayanan yang berkualitas terutama dalam mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Keterbatasan akses masyarakat terhadap sarana-sarana kesehatan perlu dicarikan solusi, salah satunya dengan menyebar tenaga-tenaga kesehatan ke wilayah pesisir dan pedalaman, serta mendorong mereka untuk memberi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tepat sasaran demi meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat. Dengan demikian, kebijakan kesehatan tidak saja dengan membangun fasilitas kesehatan dan menunggu masyarakat datang ke fasilitas tersebut, tetapi lebih menggunakan strategi “jemput bola”, yaitu tenaga-tenaga kesehatan yang diterjunkan hingga ke wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan akses untuk sampai ke fasilitas-fasilitas kesehatan.

c. **Infrastruktur Perhubungan**

Perhubungan berkaitan erat dengan mobilisasi dan konektivitas masyarakat baik dalam wilayah Kabupaten Paser maupun dengan wilayah lain di luar Kabupaten Paser. Kendala yang paling banyak dihadapi dalam bidang perhubungan adalah minimnya moda transportasi serta belum memadainya sarana dan prasarana perhubungan. Di Kabupaten Paser, panjang jalan dengan kondisi baik tidak mencapai 50% dari keseluruhan panjang jalan, sedangkan sisanya adalah jalan dengan kondisi sedang, rusak dan rusak berat.

d. **Lingkungan Hidup**

Aspek lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting yang perlu diperhatikan, mengingat Kabupaten Paser sebagai salah satu wilayah dengan persentase aktivitas pertambangan yang cukup tinggi. Pencemaran lingkungan hidup oleh sampah B3 (bahan beracun dan berbahaya) akan menjadi persoalan bagi pengembangan potensi daerah selain tambang. Indikator persoalan ini salah satunya direpresentasikan oleh data yang menunjukkan bahwa hanya 9 perusahaan yang memiliki izin pembuangan air limbah.

Oleh karena itu, perlu peningkatan pengawasan dan memperketat perizinan bagi pembuangan limbah-limbah perusahaan yang beresiko tinggi mencemari lingkungan hidup, terutama tanah, udara dan air. Untuk itu perlu menata strategi pelestarian lingkungan hidup dengan mendorong investasi di luar tambang terutama bidang pertanian dan perkebunan yang terkait erat dengan lingkungan



hidup. Selain mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada sektor tambang, pertanian dan perkebunan tidak saja memberi sumbangsih bagi PDRB tetapi secara tidak langsung membawa pengaruh positif bagi kelestarian lingkungan hidup.

e. Kependudukan dan Catatan Sipil

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan secara serius oleh SKPD kependudukan dan catatan sipil adalah manajemen administrasi bagi penduduk lokal dan penduduk yang bermigrasi masuk ke Kabupaten Paser. Tujuannya adalah menghindari duplikasi data dari mereka yang bermigrasi ke Kabupaten Paser. Masyarakat yang bermigrasi ke Kabupaten Paser secara administratif juga harus menjadi penduduk Paser. Dengan demikian, mereka masuk dalam hitungan sebagai wajib pajak Kabupaten Paser, sehingga kehadiran kelompok migran ini memberi sumbangsih bagi pendapatan Paser, bukan hanya meraup keuntungan dari Kabupaten Paser.

f. Tenaga Kerja

Komposisi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Paser masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kecenderungan yang terus menurun. Hal ini menandakan masih belum terbukanya bidang-bidang pekerjaan lain, terutama yang berhubungan dengan kewirausahaan. Mereka yang masuk dalam usia angkatan kerja di Kabupaten Paser masih memiliki kecenderungan untuk terjun ke bidang-bidang pekerjaan yang sudah ada, dan belum beralih ke upaya menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Di samping itu, kecenderungan ini dapat dilihat sebagai gambaran kualitas tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Paser.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut Kabupaten Paser akan melakukan pendampingan secara rutin untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas angkatan kerja yang ada di Kabupaten Paser. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat sektor-sektor yang menjanjikan penyerapan tenaga kerja, misalnya sektor kelautan dan perikanan, serta kewirausahaan. Tujuannya adalah tersedianya angkatan kerja yang kompeten dan mampu bersaing, serta memiliki daya untuk membuka bidang-bidang pekerjaan baru di luar yang sudah ada.

g. Koperasi dan UMKM

Meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM di Kabupaten Paser dalam kurun waktu antara 2011 hingga 2016 mengindikasikan kecenderungan masyarakat

Paser untuk secara mandiri menggerakkan ekonomi pada skala mikro. Namun, kecenderungan ini belum diimbangi oleh penanaman modal (investasi) karena para investor lebih memilih menanamkan modalnya pada sektor pertambangan.

Kenyataan ini perlu disikapi dengan seksama, terutama mengarahkan para investor agar bersedia terlibat dalam penanaman modal di luar sektor pertambangan, misalnya berinvestasi dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu, tidak kalah penting adalah keberadaan koperasi dan UMKM sebagai salah satu urusan yang mampu meningkatkan nilai tambah dari potensi-potensi non-tambang yang ada di Kabupaten Paser. Misalnya menjadikan koperasi dan UMKM sebagai unit pengelola hasil-hasil pertanian dan perkebunan sebelum dilepas ke pasar, sehingga hasil pertanian dan perkebunan tidak lagi berupa bahan mentah, tetapi sebagai bahan olahan yang telah ditingkatkan nilai jualnya lewat aktivitas di koperasi atau UMKM.

h. Kebudayaan

Persoalan yang perlu diselesaikan pemerintah dalam bidang kebudayaan adalah melakukan inventarisasi budaya-budaya lokal Kabupaten Paser. Hal ini perlu dilakukan demi mengenalkan secara tepat unsur-unsur kebudayaan lokal Kabupaten Paser sebelum ditampilkan dalam festival-festival atau pameran budaya. Identifikasi, inventarisasi dan pengembangan nilai dan pesona budaya ini berkorelasi positif terhadap kemampuan Kabupaten Paser dalam menemukan ruang-ruang kreatif baru baik dari segi sosial, politik, perekonomian dan lain sebagainya.

Pengenalan dan inventarisasi terhadap budaya asli masyarakat lokal Paser ini perlu dilakukan, mengingat Paser sebagai salah satu daerah yang didiami oleh banyak orang dari berbagai wilayah lain. Pengenalan atas budaya asli Paser serta nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya juga dapat dijadikan sebagai pegangan dalam menentukan semangat dan arah pembangunan Paser di masa yang akan datang.

i. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengembangan potensi serta pemberdayaan masyarakat desa yang didukung oleh alokasi dana yang lebih dari 1 miliar rupiah ditambah pengadaan satu unit mobil dan ragam fasilitas lain untuk masing-masing desa menunjukkan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Paser dalam melaksanakan dan mensukseskan penguatan perekonomian dari desa. Namun demikian, kucuran dana yang sedemikian besar untuk setiap desa ini perlu mendapat kontrol yang

ketat dari berbagai pemangku kepentingan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan dapat berkelanjutan dalam menggerakkan dan mewujudkan semangat desa membangun.

j. Komunikasi dan Informasi

Jaringan komunikasi yang ada di Kabupaten Paser meliputi jaringan telepon rumah dan telepon genggam, televisi, radio, internet serta surat kabar, baik nasional maupun lokal. Kehadiran jaringan komunikasi ini tentu saja mempermudah akses warga Kabupaten Paser terhadap beragam informasi atau berita yang berasal dari luar serta mempererat jalinan komunikasi antar warga. Ini juga menandakan keterbukaan wilayah Kabupaten Paser terhadap informasi-informasi yang berasal dari luar daerah.

Melihat pentingnya jaringan komunikasi dan informasi ini, maka pemerintah berkewajiban memperluas jangkauan jaringan komunikasi hingga ke wilayah-wilayah pedalaman agar masyarakat di wilayah tersebut juga bisa memperoleh akses bagi komunikasi dan memperoleh informasi dari dunia luar. Perluasan jaringan ini harus pula diimbangi dengan peningkatan kapasitas jaringan tidak saja GSM, tetapi juga 3G dan 4G sebagaimana yang terjadi dalam perkembangan jaringan komunikasi saat ini.

Selain kedua hal di atas, pemerintah harus menggunakan jaringan komunikasi dan informasi ini untuk mengembangkan keterbukaan dan kemudahan akses data informasi publik. Misalnya melalui website resmi milik pemerintah daerah yang datanya konsisten diperbaharui. Website pemerintah daerah diharapkan mampu menyajikan data-data yang dapat diakses bagi kepentingan publik, serta memanfaatkannya sebagai sarana untuk menerima masukan atau aspirasi masyarakat.

k. Ketahanan Pangan

Secara umum, tanaman padi, baik padi sawah maupun padi ladang masih menjadi komoditi pangan yang dominan di Kabupaten Paser. Hal ini terbukti dari besarnya lahan yang diperuntukkan bagi tanaman ini dibandingkan dengan lahan bagi tanaman pangan yang lain. Namun, persoalannya adalah ketika produksi tanaman padi meningkat, produksi tanaman pangan lain, misalnya jagung justru menurun. Hal ini tidak berimplikasi bagus untuk jangka panjang, sebab akan menimbulkan ketergantungan berlebihan terhadap beras sebagai bahan pangan pokok.

Untuk mengatasi persoalan ini, yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan diversifikasi tanaman pangan dan peningkatan produktivitas hasil panen secara berimbang. Artinya masyarakat disadarkan untuk melihat tanaman pangan lain di luar padi sebagai bahan pangan dan sumber makanan pokok. Keberhasilan meningkatkan produktivitas padi perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas tanaman lain misalnya jagung, singkong, dan ubi rambat. Kesemuanya adalah bahan pangan yang bila diupayakan peningkatan produktivitasnya secara berimbang akan membantu meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Paser.

#### I. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Kekurangan energi listrik telah menjadi salah satu persoalan besar bagi masyarakat Kabupaten Paser yang berpengaruh juga terhadap aspek lain, misalnya aspek komunikasi dan informatika. Selain itu, kekurangan pasokan energi listrik telah menyebabkan masih banyak rumah tangga yang belum menggunakan listrik.

Persoalan ini menjadikan sumber energi listrik alternatif perlu segera dioptimalkan. Dari hal tersebut perlu diupayakan pengembangan sarana pembangkit listrik dengan mengandalkan potensi yang tersedia di Kabupaten Paser, misalnya pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pengembangan pembangkit listrik baru dengan mengandalkan potensi alam ini diarahkan untuk memenuhi pasokan energi listrik ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh pasokan dari pembangkit listrik yang ada.

Selain masalah pasokan energi listrik, hal lain yang perlu dipikirkan terkait sumber daya mineral adalah exit strategy yang bisa diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap pertambangan yang kewenangan perizinannya telah diambil alih oleh pemerintah provinsi. Salah satu strategi yang memungkinkan adalah menggalakkan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, serta sektor kelautan dan perikanan. Selain mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan mineral, sektor-sektor ini juga akan memberi dampak positif bagi kelestarian lingkungan hidup.

Rasio elektrifikasi menjadi salah satu kunci penentuan arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur dalam spirit besar *green economy*. Hal tersebut juga harus bisa memiliki gaung bagi Kabupaten Paser. Hal ini harus disinergikan dengan

kegiatan, program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Paser, khususnya dalam pemerataan pembangunan fasilitas dan jaringan kelistrikan.

m. Pariwisata

Fakta bahwa Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten dengan kekayaan alam terutama bahan tambang yang melimpah tidak serta merta menutup kemungkinan bagi pengembangan sektor pariwisata. Karena itu yang harus segera dilakukan pemerintah adalah mengidentifikasi tempat-tempat yang berpotensi menjadi destinasi wisata dan mulai secara serius mengembangkannya.

Upaya ini tentu perlu diimbangi juga dengan perbaikan fasilitas di tempat-tempat pariwisata yang sudah ada saat ini. Peningkatan fasilitas penunjang pariwisata serta pembentukan kelompok-kelompok sadar wisata akan mempermudah upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Paser sebagaimana terjadi selama ini. Kehadiran kelompok-kelompok sadar wisata dengan dampingan dan fasilitas dari SKPD terkait akan meningkatkan minat masyarakat Paser sendiri terhadap pengembangan potensi wisata yang ada di daerahnya.

Selain itu, pihak swasta juga perlu dilibatkan untuk menjamin ketersediaan sarana penunjang pariwisata seperti hotel atau penginapan yang memudahkan akomodasi bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Paser.

n. Perdagangan

Tantangan bagi sektor perdagangan di Kabupaten Paser adalah upaya meningkatkan penjualan komoditas-komoditas andalan dari sektor pertanian ke luar Kabupaten Paser. Hal ini penting dilakukan untuk mengimbangi kecenderungan jasa layanan yang masih menjadi fokus perdagangan masyarakat Kabupaten Paser. Upaya ini juga menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan posisi tawar pedagang-pedagang tradisional berhadapan dengan pedagang-pedagang besar yang hadir dengan modal raksasa.

Pemerintah perlu fokus memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang tradisional di tengah gempuran pedagang-pedagang modern. Artinya, dibutuhkan kebijakan yang menguntungkan para pedagang tradisional dalam memasarkan berbagai komoditas andalan mereka, bukan hanya dalam wilayah Kabupaten Paser, tetapi sampai ke luar Kabupaten Paser.

## o. Industri

Problem utama terkait dengan sektor industri di Kabupaten Paser adalah belum terlalu kuatnya upaya peningkatan nilai tambah bagi bahan-bahan baku yang dihasilkan daerah ini. Hal tersebut menjadikan potensi lokal sebagai bahan baku industri memiliki nilai jual yang rendah. Realitas ini, tentu berbeda dengan bahan baku yang telah diolah sebelum dijual.

Kedepan, industri yang perlu digalakkan adalah industri pengolahan bahan baku yang tidak saja bermanfaat untuk meningkatkan nilai jual, tetapi membuka kesempatan bagi penyerapan tenaga kerja. Jika hal tersebut tidak dioptimalkan, maka daerah lain yang mengembangkan industri pengolahan bahan bakulah yang akan diuntungkan. Tidak menutup kemungkinan dengan memanfaatkan bahan baku berharga murah yang berasal dari Kabupaten Paser.

## p. Transmigrasi

Kabupaten Paser merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi pada masa lalu. Bahkan ada tiga gelombang transmigrasi yang masuk daerah ini, yaitu gelombang pertama pada era sebelum tahun 70-an, gelombang kedua pada kurun waktu tahun 70-an hingga tahun 80-an, dan terakhir pada kurun waktu setelahnya, yaitu sejak tahun 90-an.

Kehadiran kelompok-kelompok transmigran ini di satu sisi membawa perubahan berupa kemajuan dan perkembangan Kabupaten Paser. Namun isu kesenjangan antara warga transmigran dengan warga pribumi atau suku-suku asli masih menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Paser. Oleh karena itu diperlukan evaluasi komprehensif terhadap pola-pola kebijakan terkait transmigrasi yang selama ini dilaksanakan dan untuk memberi kesempatan lebih pada upaya mengurangi disparitas kesejahteraan antara kaum transmigran dengan warga asli.

## q. Pertanian

Tahun 2016, sektor pertanian menyumbang 11,81% bagi PDRB Kabupaten Paser. Kontribusi ini jauh di bawah sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai angka 72,00%. Kecilnya kontribusi sektor pertanian ini berbanding lurus dengan semakin berkurangnya lahan pertanian akibat dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Namun persentase tersebut, tetap menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas andalan sektor perkebunan. Selain berkurangnya lahan pertanian, minimnya kontribusi sektor pertanian terhadap

PDRB Kabupaten Paser juga disebabkan oleh semakin berkurangnya jumlah petani.

Ini menjadi sebuah permasalahan serius yang butuh untuk segera ditangani oleh pemerintah, sebab sektor pertanian lebih dominan bergantung pada produktivitas padi yang juga semakin menurun dari tahun ke tahun. Salah satu alternatif yang bisa diterapkan adalah dengan menggalakkan program diversifikasi pertanian, yaitu lahan pertanian yang tersedia tidak hanya ditanami padi, sekaligus ditanam tanaman pangan lainnya seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, dan kacang tanah. Dengan demikian petani tidak hanya bergantung pada produktivitas padi, terutama ketika harga padi anjlok setelah panen raya, para petani mengalami kerugian yang cukup besar. Diversifikasi memungkinkan petani untuk tetap bisa bertahan dengan mengandalkan hasil panen lain, selain padi.

Pada sisi lain, pemerintah juga perlu melakukan pemerataan dalam pembagian lahan pertanian bagi kaum transmigran dengan warga asli Kabupaten Paser, terutama yang berada di pedalaman dan bermatapencaharian sebagai petani. Kebijakan pemerintah memberi lahan seluas 2 hektar kepada para transmigran perlu ditinjau kembali untuk menjamin adanya kesetaraan akses dan kesamaan peluang mengusahakan lahan bagi warga lainnya.

r. Kehutanan

Meskipun kewenangan pengelolaan hutan telah dialihkan ke pemerintah provinsi, pola-pola perambahan hutan yang selama ini terjadi patut dijadikan perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Paser. Paling tidak ada tiga pola perambahan hutan yang terjadi yaitu; pertama, perambahan hutan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan bertani/berkebun, kedua, perambahan hutan untuk dijadikan pemukiman, dan ketiga, perambahan hutan oleh perusahaan pemegang izin HPH.

Fokus perhatian pemerintah adalah pada pola perambahan yang ketiga, yang dilakukan oleh perusahaan pemegang izin HPH. Ada kecenderungan pihak perusahaan melakukan kecurangan melalui perambahan hutan yang melampaui batas pada setiap tahunnya demi meningkatkan produktivitas. Akibatnya, sebelum masa kontrak berakhir, hutan yang ada telah habis dirambah dan ada kekhawatiran berupa kepergian perusahaan sebelum melakukan upaya pemulihan kembali.

Kecurangan yang dilakukan perusahaan yang mengantongi izin HPH ini berbanding terbalik dengan kondisi 26 desa yang berada dalam wilayah hutan lindung dan cagar alam. Mereka tidak memiliki kewenangan apapun dan kehilangan hak untuk memanfaatkan hasil hutan tempat mereka bermukim, padahal mereka sudah lebih dahulu ada di sana sebelum penetapan kawasan tersebut sebagai hutan lindung atau cagar alam. Karena itu, perlu diupayakan pengakuan atas hak-hak tenurial warga desa yang sudah mendiami sebuah kawasan secara turun temurun, sekaligus untuk memenuhi hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Jika tidak, hal ini menjadi bentuk ketidakadilan terhadap warga negara. Koordinasi, konsultasi dan negosiasi dengan level pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan pusat) menjadi sesuatu yang urgen, ketika pembangunan di Kabupaten Paser mulai menyasar hak-hak dasar warga negara yang secara empiris berada dalam situasi serba sulit, dan secara hukum prosedural terbayang oleh tuduhan pelanggaran dan penyerobotan hutan.

s. Kelautan dan Perikanan

Potensi yang paling mungkin untuk dikembangkan di Kabupaten Paser adalah perikanan air tawar, sebab kewenangan atas sektor kelautan sudah ditarik menjadi tanggung jawab provinsi. Permasalahan yang terjadi dan berhubungan dengan sektor perikanan air tawar ini adalah masih minimnya upaya pengembangan yang dilakukan pemerintah, termasuk dalam mendorong masyarakat untuk terjun menjadi pekerja pada sektor ini.

Kendala yang dihadapi terkait pengembangan sektor ini dan minimnya minat masyarakat adalah belum terbukanya jalur-jalur distribusi bagi pemasaran hasil perikanan air tawar. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab yang seharusnya dijalankan pemerintah adalah membuka jalur-jalur distribusi bagi pemasaran hasil usaha ikan air tawar ini. Jika jalur distribusi telah terbuka dan permintaan terhadap ikan air tawar meningkat maka masyarakat akan tertarik untuk terlibat dalam membudidayakan ikan air tawar dan menjadikan sektor ini sebagai salah satu sektor andalan yang bisa mendatangkan keuntungan dan menyerap tenaga kerja.



## 2.6.2 Penelaahan Terhadap RKP, dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Berkaitan dengan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat pada tahun 2018 adalah merupakan RKP Pemerintah Tahun 2018 yang merupakan pelaksanaan periode ke tiga RPJMN 2015-2019, dengan pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.

Prioritas Pembangunan Nasional setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dalam mewujudkan tercapainya Prioritas Pembangunan Nasional yang di cita-citakan Pemerintah Kabupaten / Kota harus mendukung guna tercapainya sasaran utama dengan menyesuaikan potensi dan kondisi di daerah yang mana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota perlu melakukan penelaahan atas kebijakan pemerintah Provinsi. Tahapan ini akan menjabarkan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi yang mana sudah tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD (Rancangan Awal) Provinsi Kalimantan Timur dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang direncanakan pada tahun 2018.

Dalam rangka sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi, maka pada tahun 2018 ini pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dituangkan 6 prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Timur sedangkan untuk prioritas pembangunan Kabupaten Paser dituangkan dalam 8 prioritas pembangunan Kabupaten Paser pada RKPD Tahun 2018. Pada 6 prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Timur tersebut Pemerintah Kabupaten Paser mengimplementasikannya pada prioritas pembangunan kabupaten paser yang dijelaskan pada tabel di bawah ini :

**Tabel II.94.**

Sinkronisasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Paser dengan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur dan Prioritas Nasional Tahun 2018

<b>PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PASER TAHUN 2018</b>
Pendidikan	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dan Pelestarian Budaya
Kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Perumahan & Permukiman	Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hunian Yang Layak
Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal
Ketahanan Energi	Pengembangan Agribisnis	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Energi Listrik
Ketahanan Pangan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Air Bersih
Penanggulangan Kemiskinan		Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas Perdesaan
Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman		Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik
Pembangunan Wilayah		
Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan		



## **BAB III**

### **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Konsep dasar pengembangan ekonomi wilayah adalah dengan memperkuat struktur ekonomi yang fundamental dengan partisipasi masyarakat yang seluas - luasnya. Salah satu upaya diperlukan adalah meningkatkan upaya pemerataan antar wilayah dan antar sektor perekonomian. Penataan dasar yang diperlukan adalah meningkatkan peran sektor pertanian secara luas, pengembangan komoditas yang memiliki peluang ekspor, melakukan promosi investasi dan perdagangan, melakukan pengembangan kawasan ekonomi terpadu ataupun kawasan ekonomi yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial. Selanjutnya secara proposional peran migas, pertambangan dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian dikurangi secara bertahap.

Di bidang ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan struktur ekonomi secara seimbang antara sektor – sektor ekonomi yang padat modal (capital intensive) dan sektor ekonomi yang padat tenaga kerja (labour intensive), dengan memacu sektor – sektor ekonomi yang potensial dan padat tenaga kerja seperti sektor pertanian, sehingga kesenjangan (gap) dalam struktur ekonomi semakin kecil. Mengembangkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang disesuaikan dengan keunggulan komparatif masing- masing daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser ke depan masih bertumpu pada sektor pertambangan/penggalan dan industri pengolahan yang kontribusinya masih sangat dominan. Pentingnya kedudukan sumberdaya alam dalam pengembangan wilayah menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, maka pengenalan akan potensinya menjadi sangat penting. Dengan mengetahui potensi tersebut, maka dapat memudahkan dalam pemanfaatan dan penataan, sehingga fungsi ekonomisnya dapat diperoleh secara maksimal

Sedangkan sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan dimasa depan, karena potensinya demikian besar dan merupakan sektor yang renewable dengan pertumbuhan yang relatif konstan, tetapi kontribusinya masih relatif kecil.

### 3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, historis pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah. Sejak tahun 2015, perhitungan pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan seiring dengan terjadinya perubahan tahun dasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Periode waktu sebelum tahun 2015, perhitungan pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan tahun dasar 2000, sedangkan untuk tahun 2015 ke depan dihitung dengan berdasarkan tahun dasar 2010.

Berdasarkan hasil perhitungan/perkiraan sementara yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser tahun 2016 telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 dengan nilai pertumbuhan ekonominya sebesar 2,15 persen. Secara umum, seluruh kategori mengalami pertumbuhan yang positif. Kategori Lapangan Usaha yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan meliputi kategori lapangan usaha pengadaan listrik dan gas serta kategori lapangan usaha jasa pendidikan.

Perhitungan PDRB sejak tahun 2015, selain terjadi pergantian pada penggunaan tahun dasar juga terjadi penambahan kategori lapangan usaha. Pada perhitungan PDRB sebelumnya, kategori lapangan usaha hanya dikelompokkan pada 9 sektor lapangan usaha, sedangkan sejak tahun 2015, perhitungan PDRB mengelompokkan sektor lapangan usaha menjadi 17 kategori. Penambahan jumlah kategori ini bertujuan untuk memperoleh perhitungan nilai PDRB yang lebih rinci sesuai dengan perkembangan kebutuhan data yang diharapkan oleh pengguna data serta disesuaikan dengan perkembangan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLU) tahun 2009.

Sesuai dengan kebijakan makro ekonomi daerah yang telah disebutkan pada uraian sebelumnya dan berdasarkan kondisi, potensi serta permasalahan yang

dihadapi dengan memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka pencapaian makro ekonomi tahun 2016 adalah sebagai berikut :

#### 1.) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser tahun 2016 telah mengalami pertumbuhan yang positif hampir disemua kategori. Nilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan diperkirakan mencapai 2,15 persen, atau meningkat sebesar 3.12 persen dibandingkan dengan tahun 2015.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan diperkirakan akan tercapai dari kategori lapangan usaha pengadaan listrik (19,87%), jasa pendidikan (8,84%) dan kategori lapangan usaha industri pengolahan (8.30%). Nilai pertumbuhan ini diharapkan akan mampu bertahan pada tahun-tahun berikutnya diiringi dengan pertumbuhan pada kategori lapangan usaha lainnya terutama kategori lapangan usaha yang mampu melakukan penyerapan cukup besar terhadap tenaga kerja lokal. Dengan kondisi tersebut, ketergantungan terhadap kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian sedikit demi sedikit diharapkan akan dapat diperkecil sehingga mampu memperkuat struktur ekonomi yang berbasis sumber daya alam menjadi sumber daya olahan (industri).

#### 2.) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam penyajiannya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara umum disajikan dalam dua dasar hitung yang meliputi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan tujuan untuk memperoleh angka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dihitung untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Gambaran selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut:

##### a. PDRB Harga Berlaku

Kemajuan ekonomi suatu daerah memang bisa kita lihat secara kasat mata, namun untuk melakukan perencanaan strategi pembangunan ke depan, hasil pencapaian pembangunan perlu dipotret secara kuantitatif. Kemajuan ekonomi suatu daerah secara kuantitatif bisa dipotret dengan menggunakan instrumen yang bernama PDRB. Meskipun instrumen ini tidak mutlak memberikan gambaran kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya secara nyata, namun paling tidak dapat dipakai untuk melihat struktur dan pergeseran ekonomi yang terjadi disuatu wilayah.

Tahun 2016, struktur perekonomian Kabupaten Paser masih didominasi oleh kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Nilai kontribusi kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian adalah sebesar 72% dari total PDRB kabupaten Paser.

Kategori lapangan usaha lainnya yang juga memiliki kontribusi cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser adalah kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perkebunan, kategori lapangan usaha industri pengolahan dan kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda. Kontribusi kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perkebunan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser adalah sebesar 11.81 %, kategori industri pengolahan sebesar 4.50 % dan kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 3.66 %.

Gambaran lebih jelas terkait kontribusi masing-masing kategori, dapat dilihat pada tabel III.1 di bawah ini :

**Tabel III.1**  
Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Paser  
Tahun 2012-2016

Sektor	2012	2013	2014	2015	2016 *)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,48	9,30	10,51	11,31	11,81
Pertambangan dan Penggalian	77,94	77,70	75,79	73,59	72,00
Industri Pengolahan	3,84	3,80	3,99	4,28	4,50
Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	2,07	2,19	2,25	2,40	2,47
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	2,80	2,87	2,98	3,36	3,66
Transportasi dan Pergudangan	0,37	0,39	0,41	0,46	0,50
Penyediaan akomodasi dan makan-minum	0,22	0,23	0,24	0,26	0,26
Informasi dan komunikasi	0,52	0,53	0,55	0,61	0,66

Jasa Keuangan dan asuransi	0,33	0,35	0,35	0,39	0,43
Real Estate	0,27	0,28	0,29	0,32	0,34
Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06
Adminstrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial	0,88	0,92	1,07	1,23	1,36
Jasa Pendidikan	0,79	0,90	0,99	1,14	1,29
Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	0,28	0,30	0,33	0,37	0,41
Jasa lainnya	0,15	0,15	0,16	0,18	0,19
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : \*) Perhitungan Sementara BPS Kabupaten Paser Tahun 2017

#### b. PDRB Harga Konstan

PDRB harga konstan menggambarkan tentang capaian pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam hal pertumbuhannya. Sejak tahun 2015, perhitungan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang tertuang dalam perhitungan PDRB dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2010, sedangkan perhitungan PDRB pada tahun-tahun sebelumnya dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2000. Sebelum tahun 2015, perhitungan pertumbuhan ekonomi disajikan dalam 9 (sembilan) kelompok sektor lapangan usaha, sedangkan perhitungan PDRB setelah periode tahun 2015 disajikan ke dalam 18 (delapan belas) kategori lapangan usaha yang secara tidak langsung dampak memberikan gambaran lebih detail dibandingkan dengan penyajian pada periode tahun sebelum tahun 2015.

Tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser berdasarkan hasil perhitungan sementara diperkirakan akan mencapai angka 2,15%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai pertumbuhan ini mengalami peningkatan sebesar 3.12%. Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser hanya sebesar -0,97%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan diperkirakan akan dihasilkan dari kategori lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, jasa pendidikan, dan industri pengolahan.

Nilai perhitungan sementara pertumbuhan ekonomi masing-masing kategori secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel III.2 di bawah ini :



**Tabel III.2**

Nilai Perhitungan Sementara Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser  
Per Kategori Tahun 2011-2016

LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014	2015	2016 *)
1	2	3	4	5	6	7
1. PERTANIAN	5.06	8.41	3.33	10.93	3.99	4.24
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	8.87	5.65	7.39	3.37	(2.70)	1.15
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	3.58	8.29	2.64	5.79	7.05	8.30
4. PENGADAAN LISTRIK, GAS	12.90	15.57	4.26	13.68	18.72	19.87
5. PENGADAAN AIR	(4.77)	(1.23)	5.73	1.09	3.42	4.44
6. KONTRUKSI	5.49	3.42	5.42	4.33	1.02	0.67
7. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	8.21	7.78	5.76	5.92	4.87	5.12
8. TRANSPORTASI & PERGUDANGAN	6.22	6.92	6.74	6.44	4.22	4.62
9. PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM	8.04	6.04	7.81	4.35	5.49	5.86
10. INFORMASI & KOMUNIKASI	9.88	7.29	7.51	10.01	7.01	7.79
11. JASA KEUANGAN	8.47	12.20	4.47	1.46	5.02	6.72
12. REAL ESTATE	11.73	3.80	6.13	6.74	5.55	5.73
13. JASA PERUSAHAAN	13.07	8.43	5.56	6.12	(2.68)	(2.23)
14. ADMINSTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN & JAMINAN SOSIAL WAJIB	14.92	2.85	8.76	13.03	6.90	6.30
15. JASA PENDIDIKAN	15.26	8.27	17.23	12.64	8.34	8.84
16. JASA KESEHATAN & KEGIATAN SOSIAL	14.15	3.45	10.92	10.45	7.42	7.90
17. JASA LAINNYA	6.04	6.86	4.91	5.41	5.14	5.94
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN BATU BARA</b>	<b>8.30</b>	<b>6.05</b>	<b>6.81</b>	<b>4.51</b>	<b>(0.97)</b>	<b>2.15</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA BATU BARA</b>	<b>6.30</b>	<b>7.27</b>	<b>4.78</b>	<b>7.73</b>	<b>4.67</b>	<b>5.26</b>

Sumber : \*)Perhitungan Sementara BPS Kabupaten Paser Tahun 2017

## 2) Besaran Nilai PDRB

Besaran nilai PDRB secara tidak langsung dapat menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi nilai PDRB yang dimiliki oleh suatu wilayah, maka semakin tinggi pula kemampuan suatu wilayah dalam mengelola dan menggali sumber daya ekonominya.

Tahun 2016, nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Paser dengan komponen batu bara mengalami peningkatan sebesar sebesar 0.3 trilyun di banding dengan PDRB tahun 2015. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku tanpa komponen batu bara mengalami peningkatan sebesar 0,87 trilyun.

Kategori lapangan usaha yang cukup besar kontribusinya bagi pembentukan PDRB Kabupaten Paser meliputi kategori pertambangan dan penggalian sebesar 72%, kategori pertanian, kehutanan dan perkebunan sebesar 11.81%, kategori industri pengolahan sebesar 1,50%.

Gambaran lebih jelas terkait dengan perkembangan nilai PDRB Kabupaten Paser per kategori dapat dilihat pada tabel III.3 dan III.4 di bawah ini:

**Tabel III.3**

Produk Domestik Regional Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku  
Tahun 2012 – 2016

LAPANGAN USAHA	2012	2013	2014	2015	2016 *)
1	2	3	4	5	6
1. PERTANIAN	3,326,194.42	3,433,173.35	4,124,821.13	4,329,655.16	4,555,485.16
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	27,352,804.18	28,685,151.34	29,748,466.76	28,165,732.78	27,771,734.29
3. .INDUSTRI PENGOLAHAN	1,349,222.77	1,402,993.08	1,567,921.25	1,639,265.55	1,734,347.01
4. PENGADAAN LISTRIK, GAS	4,267.00	4,256.17	4,619.47	6,775.25	10,015.00
5. PENGADAAN AIR	5,525.07	6,252.61	6,566.52	6,965.21	7,459.14
6. KONTRUKSI	726,464.68	810,095.93	881,383.91	918,595.16	954,162.35
7. PERDAGANGAN	981,528.64	1,059,969.55	1,170,706.57	1,284,804.32	1,413,234.12
8. TRANSPORTASI & PERGUDANGAN	131,221.88	143,749.19	162,364.02	177,031.11	193,731.27
9. PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM	75,867.36	85,520.64	93,354.13	100,319.21	108,180.15
10. INFORMASI & KOMUNIKASI	181,165.29	195,503.84	216,562.32	233,710.59	254,039.66
11. JASA KEUANGAN	115,308.32	128,869.83	136,917.52	149,182.07	165,081.31
12. REAL ESTATE	93,704.89	102,204.28	114,393.66	123,018.22	132,514.46
13. JASA PERUSAHAAN	17,073.05	19,209.50	21,870.18	22,090.18	22,411.80
14. ADMINSTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN & JAMINAN SOSIAL WAJIB	307,504.65	339,915.21	420,030.97	469,927.75	522,932.35
15. JASA PENDIDIKAN	276,081.04	331,963.89	387,854.49	438,106.97	497,060.96
16. JASA KESEHATAN & KEGIATAN SOSIAL	98,527.91	112,243.13	129,326.41	142,334.22	157,333.58
17. JASA LAINNYA	50,960.43	55,195.43	62,726.84	67,033.37	72,620.96
18. PRODUK DOMESTIKREGIONAL BRUTO DENGAN BATU BARA	35,093,421.58	36,916,266.99	39,249,886.15	38,274,547.11	38,572,343.57
19. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA BATU BARA	9,147,545.64	9,757,892.17	11,140,598.30	11,886,173.93	12,757,185.99

Sumber : \*)Perhitungan Sementara BPS Kabupaten Paser Tahun 2017 ( dalam jutaan )

**Tabel III.4.**

Produk Domestik Regional Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan  
Tahun 2012 – 2016

LAPANGAN USAHA	2012	2013	2014	2015	2016 *)
1	2	3	4	5	6
1. PERTANIAN	3,008,075.80	3,108,121.65	3,447,711.14	3,585,324.91	3,737,394.78
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	24,126,941.77	25,910,630.77	26,784,642.45	26,062,660.24	26,363,170.81
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1,210,884.62	1,242,907.10	1,314,905.04	1,407,550.60	1,524,318.17
4. PENGADAAN LISTRIK, GAS	4,721.55	4,922.68	5,596.04	6,643.45	7,963.31
5. PENGADAAN AIR	5,300.35	5,603.96	5,665.05	5,858.91	6,119.17
6. KONTRUKSI	659,525.69	695,258.79	725,394.09	732,809.87	737,736.63
7. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	919,536.27	972,503.20	1,030,115.03	1,080,241.02	1,135,506.78
8. TRANSPORTASI & PERGUDANGAN	120,361.49	128,471.81	136,749.20	142,520.59	149,105.64
9. PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM	66,579.28	71,778.62	74,900.34	79,010.51	83,642.51
10. INFORMASI & KOMUNIKASI	178,337.99	191,722.26	210,911.92	225,689.19	243,262.18
11. JASA KEUANGAN	100,255.02	104,738.05	106,263.28	111,592.44	119,085.92
12. REAL ESTATE	86,474.19	91,773.76	97,960.55	103,395.37	109,317.83
13. JASA PERUSAHAAN	14,177.86	14,966.69	15,882.67	15,456.92	15,112.13
14. ADMINSTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN & JAMINAN SOSIAL WAJIB	278,331.12	302,708.47	342,165.19	365,767.37	388,802.99
15. JASA PENDIDIKAN	247,266.43	289,866.21	326,512.22	353,756.33	385,042.46
16. JASA KESEHATAN & KEGIATAN SOSIAL	86,988.20	96,489.26	106,574.88	114,484.16	123,529.93
17. JASA LAINNYA	46,468.63	48,752.10	51,387.35	54,027.76	57,236.07
18. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA BATU BARA	31,160,226.26	33,281,215.38	34,783,336.43	34,446,789.62	35,186,347.29
19. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN BATU BARA	8,290,395.84	8,686,387.78	9,357,759.26	9,794,353.40	10,309,771.11

Sumber : \*) Perhitungan Sementara BPS Kabupaten Paser ( dalam jutaan )

### 3) PDRB Perkapita

PDRB perkapita atau pendapatan perkapita menggambarkan besaran nilai PDRB per jiwa atau per satu orang di suatu wilayah. Namun demikian, nilai PDRB tersebut tidak serta merta mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena nilai PDRB tersebut hanyalah merupakan nilai bagi bruto antara total perhitungan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun suatu wilayah dengan tanpa memperhatikan faktor-faktor lain yang ada dalam proses pembentukannya.

Tahun 2016, nilai PDRB perkapita Kabupaten Paser diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015. Tahun 2015, nilai PDRB perkapita

Kabupaten Paser sebesar 145,92 juta rupiah, sedangkan tahun 2016 hanya sebesar 143,79 juta rupiah atau turun sebesar 1,46%.

Perkembangan nilai PDRB perkapita Kabupaten Paser secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel III.5 di bawah ini :

**Tabel III.5.**  
PDRB Perkapita Kabupaten Paser  
Tahun 2012-2016  
(Milyar)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016 *)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.305,26	13.733,19	16.101,58	16.506,44	16.981,54
Pertambangan dan Penggalian	112.050,68	114.744,74	116.125,57	107.379,43	103.525,05
Industri Pengolahan	5.527,09	5.612,17	6.120,51	6.249,56	6.465,15
Pengadaan Listrik dan Gas	17,48	17,03	18,03	25,83	37,33
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	22,63	25,01	25,63	26,55	27,81
Konstruksi	2.975,96	3.240,50	3.440,55	3.502,07	3.556,84
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	4.020,83	4.240,03	4.569,95	4.898,21	5.268,13
Transportasi dan Pergudangan	537,55	575,02	633,80	674,92	722,17
Penyediaan akomodasi dan makan-minum	310,79	342,09	364,42	382,46	403,26
Informasi dan komunikasi	742,14	782,04	845,37	891,00	946,99
Jasa Keuangan dan asuransi	472,36	515,50	534,47	568,74	615,38
Real Estate	383,86	408,83	446,54	469,00	493,98
Jasa Perusahaan	69,94	76,84	85,37	84,22	83,54
Adminstrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial	1.259,69	1.359,71	1.639,63	1.791,56	1.949,34
Jasa Pendidikan	1.130,97	1.327,90	1.514,02	1.670,25	1.852,90
Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	403,62	448,99	504,84	542,64	586,49
Jasa lainnya	208,76	220,79	244,86	-	270,71
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN BATU BARA</b>	<b>143.439.61</b>	<b>147.670.38</b>	<b>153.215.13</b>	<b>145.662.86</b>	<b>143.786.62</b>

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA BATU BARA	37.472.89	39.032.97	43.488.23	45.315.02	47.555.13
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sumber: \*) Angka Sementara BPS Kabupaten Paser Tahun 2017

## 5.) Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pula dari kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup penduduk. Jika harga-harga secara umum meningkat maka bisa terjadi daya beli penduduk menurun.

Mengingat sampai dengan tahun 2016 Kabupaten Paser belum melaksanakan perhitungan inflasi, maka untuk kebutuhan penyusunan laporan ini, angka inflasi yang disajikan didekati dengan hasil perhitungan inflasi pada level Provinsi Kalimantan Timur. Tahun 2016, tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,39%. Tingkat inflasi ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,89%.

## 6.) Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakan indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun atas 3 (tiga) dimensi dasar yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pengetahuan diukur dengan indikator Angka Harapan Sekolah (AHS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) serta indikator standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Berdasarkan angka perkiraan sementara, IPM Kabupaten Paser tahun 2016 diperkirakan akan sebesar 71,17 poin, meningkat sebesar 0,87 point dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan nilai IPM seiring dengan peningkatan yang terjadi pada AHH, AHS dan RLS.

### 3.1.1.1 Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 262.301 jiwa dan pada tahun 2016 bertambah menjadi 268.261 jiwa. Secara

gradual jumlah penduduk di Kabupaten Paser mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir sebesar 2,27%. Gambaran pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya disajikan pada tabel dibawah ini :

**TABEL III.6.**

Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk	244.111	249.991	256.175	262.301	268.261
2	Komposisi menurut jenis kelamin :					
	Laki-laki	129.680	132.722	135.925	139.219	142.377
	Perempuan	114.431	117.269	120.250	123.082	125.884
3	Pertumbuhan (%)	2,66	2,41	2,47	2,39	2,27
4	Tingkat Kepadatan (km2)	21,04	21,54	22,08	22,60	23,12

Sumber: BPS Kabupaten Paser 2017

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk bersifat fluktuatif, sedangkan tingkat kepadatan penduduk selalu naik.

### 3.1.1.2. Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan salah satu indikator kunci yang mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Naik atau turunnya persentase angka kemiskinan sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah di segala bidang pembangunan. Menurut sebuah data, angka kemiskinan di Kabupaten Paser tidak menunjukkan pergerakan yang berarti. Dari tahun 2014 hingga 2015 terjadi kenaikan angka kemiskinan sebesar 6,11%. Hal ini diikuti dengan penurunan sebesar 1,11% pada tahun 2016. Kecilnya pergerakan angka kemiskinan ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu meningkatkan inovasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Jumlah dan Trend Penurunan/kenaikan penduduk miskin Kabupaten Paser dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel III.7.**

Presentasi Angka Kemiskinan di Kabupaten Paser

Tahun	Persentase angka kemiskinan
-------	-----------------------------

2012	7,65%
2013	7,94%
2014	7,87%
2015	8,76%
2016	8,55%

Sumber : BPS Kabupaten Paser ( Angka Estimasi )

### 3.1.2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2018

Laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi sektor ekonomi yang ada sangat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor :

- Pengaruh faktor eksternal adalah kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta perkembangan perekonomian daerah sekitar.
- Pengaruh faktor internal yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian melalui pembinaan UMKM dan Koperasi serta pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, perbaikan dan pemeliharaan pasar-pasar, penyediaan infrastruktur ekonomi dan lain-lain.

Selain itu faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi adalah kondisi sosial dan politik, dimana keadaan sosial dan politik yang stabil akan mendukung perkembangan perekonomian daerah.

Adapun target ekonomi makro Kabupaten Paser tahun 2018 direncanakan sebagai berikut :

#### 3.1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah. Nilai PDRB yang besar maupun yang kecil dapat menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar maupun kecil pula yang dapat dikelola oleh suatu daerah.

Untuk Capaian tahun 2018, diprediksikan PDRB Kabupaten Paser kembali akan mengalami peningkatan. Peningkatan nilai PDRB Kabupaten Paser ini seiring dengan peningkatan yang terjadi di beberapa kategori lapangan usaha.

Perkiraan capaian masing-masing kategori lapangan usaha pada nilai PDRB tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,05 %

- Pertambangan dan Penggalian sebesar 71,62 %
- Industri Pengolahan sebesar 4,85 %
- Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,03 %
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur sebesar 0,03 %
- Kontruksi sebesar 2,69 %
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 3,89 %
- Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,61 %
- Penyediaan akomodasi dan makan-minum sebesar 0,32 %
- Informasi dan komunikasi sebesar 0,68 %
- Jasa Keuangan dan asuransi sebesar 0,52 %
- Real Estet sebesar 0,35 %
- Jasa Perusahaan sebesar 0,06 %
- Adminstrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial sebesar 1,41 %
- Jasa Pendidikan sebesar 1,35 %
- Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,43 %
- Jasa lainnya sebesar 0,23 %.

### 3.1.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak dan kebijakan pembangunan yang telah diambil khususnya dalam bidang ekonomi. Bagi daerah indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan dan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan secara berkala, karena PDRB ADHK tidak dipengaruhi faktor harga (inflasi/deflasi). Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan.



### 3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah di Kabupaten Paser pada tahun 2018 secara umum diarahkan untuk :

- a. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah, melalui kebijakan pendapatan tahun 2018 yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
- b. Kebijakan belanja daerah pada APBD digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah, sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2018.

- c. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah.

### 3.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

#### 3.2.1.1. Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Paser.

Mengacu pada kinerja perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser selama kurun waktu tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel III, dimana analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah secara umum bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan -2,04% , mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya 1,99% pertahun, dengan realisasi pertumbuhan rata-rata pertahun untuk PAD disumbang melalui sektor pajak daerah sebesar 24,35% dan lain-lain pendapatan yang sah dengan tinggi pertumbuhan sebesar 25,42% pertahun. Indikasi ini disamping menggambarkan semakin efektifnya kinerja kebijakan sektor pendapatan, pada saat yang sama juga menunjukkan peningkatan kinerja sektor riil perekonomian Kabupaten Paser yang terus menunjukkan peningkatan.

**Tabel III.8.**

Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuh an (%)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.006.104.956.176,53</b>	<b>2.008.391.101.761,26</b>	<b>2.125.759.692.755,87</b>	<b>1.942.320.695.224,29</b>	<b>1.835.915.425.166,55</b>	<b>(2,04 )</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>111.504.056.786,09</b>	<b>97.601.467.545,26</b>	<b>111.052.683.653,86</b>	<b>104.953.830.748,79</b>	<b>117.705.897.428,28</b>	<b>1,99</b>
1.1	Pajak Daerah	14.683.831.994,14	35.674.176.249,72	43.452.036.191,20	24.773.780.639,39	18.734.271.474,21	<b>24,35</b>
1.2	Retribusi Daerah	15.930.385.792,25	15.469.144.088,18	8.361.371.479,04	8.361.371.479,04	7.455.744.729,00	<b>14,92</b>
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.919.808.190,00	8.232.520.711,84	7.331.754.134,42	6.380.602.789,10	5.411.420.451,09	<b>(5,03)</b>
1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	35.824.220.705,03	37.764.384.791,37	44.799.749.241,08	65.438.075.841,26	86.104.460.773,98	<b>25,42</b>
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.418.669.782.479,00</b>	<b>1.321.724.837.616,00</b>	<b>1.377.664.405.076,00</b>	<b>1.264.213.318.793,00</b>	<b>1.361.945.793.868,00</b>	<b>(0,78)</b>
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.130.305.272.479,00	1.008.429.559.616,00	1.063.633.947.076,00	996.909.336.793,00	885.867.705.272,00	<b>(5,68 )</b>

2.2	Dana Alokasi Umum	280.966.870.000,00	301.950.343.000,00	308.251.183.000,00	260.435.716.000,00	385.289.924.000,00	<b>10,50</b>
2.3	Dana Alokasi Khusus	7.397.640.000,00	11.344.935.000,00	5.779.275.000,00	6.868.266.000,00	90.788.164.596,00	<b>311,25</b>
<b>3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>516.524.820.290,79</b>	<b>589.064.796.600,00</b>	<b>637.042.604.026,01</b>	<b>573.153.545.682,50</b>	<b>356.263.733.870,27</b>	<b>(6,42 )</b>
3.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	-	-	3.500.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-
3.2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	71.540.000,00	61.886.001,01	-	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	194.853.514.000,00	252.701.418.600,00	250.752.830.025,00	266.338.321.125,00	138.089.883.000,00	<b>(3,26)</b>
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	36.500.837.000,00	77.895.338.000,00	74.765.388.000,00	122.071.012.000,00	130.830.312.046,00	<b>44,96</b>
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	285.170.469.290,79	258.396.500.000,00	307.962.500.000,00	182.011.250.000,00	83.954.715.000,00	<b>(21,24)</b>
3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	2.732.962.557,50	388.823.824,27	-

### 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan dan kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui : 1) perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasional alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; 2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah door to door, dan lain-lain.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
  - a) Pajak Daerah terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  - b) Retribusi Daerah terdiri dari : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
  - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari : Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
  - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari : Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa, Pendapatan BLUD, Hasil dari pengelolaan dana bergulir, Pendapatan Dana

Kapitasi JKN, Penerimaan dari lokasi promosi dagang dan listrik Plaza Kandilo dan Pasar Senaken, Penerimaan atas Pemanfaatan Tanah Perumahan serta Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN.

2. Dana Perimbangan, terdiri dari :

a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

- Bagi Hasil Pajak terdiri dari : bagi hasil dari pajak penghasilan orang pribadi dan Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari : Bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Dana Reboisasi, Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent), Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplorasi (Royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, dan Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi.

b) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari :

a) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri atas Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor, bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak

pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan bagi hasil dari pajak rokok.

- b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terdiri dari tunjangan profesi Guru PNSD, dana tambahan penghasilan Guru PNSD, Dana Insentif Daerah dan Alokasi Dana Desa.
- c) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Paser diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 50% hingga 73%. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2018 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan



penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk :

- a) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- b) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- c) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemanjapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
4. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
8. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-sebaiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada Pemerintah Pusat. Sumber Dana Alokasi (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil.

**Tabel III.9.**

Penetapan dan Target Pendapatan Kabupaten Paser Tahun 2017-2018

No	Uraian	Penetapan Tahun 2017	Rencana Tahun 2018
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.542.886.015.940,60</b>	<b>1.907.011.298.956,97</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>106.116.388.840,60</b>	<b>122.173.241.143,97</b>
	1.1.1 Pajak Daerah	24.042.797.472,00	27.680.799.595,76
	1.1.2 Retribusi Daerah	7.252.680.000,00	8.350.109.085,52
	1.1.3 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	4.616.000.000,00	5.314.463.556,06
	1.1.4 Lain-lain PAD yang sah	70.204.911.368.,00	80.827.868.906,64
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.099.984.895.100,00</b>	<b>1.408.443.401.291,00</b>
	1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	538.259.207.100,00	689.198.216.994,79
	1.2.2 Dana Alokasi Umum	387.407.879.000,00	496.045.057.724,26
	1.2.3 Dana Alokasi Khusus	174.317.809.000,00	223.200.126.571,95
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>336.784.732.000,00</b>	<b>376.394.656.522,00</b>
	1.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	152.088.988.000,00	169.976.477.434,37
	1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	117.545.744.000,00	131.370.533.562,38
	- Dana Intensif Daerah (DID)	-	-
	- Dana Desa	-	-
	1.3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	67.150.000.000,00	75.047.645.525,25-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.542.886.015.940,60</b>	<b>1.907.011.298.956,97</b>

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp. 1.907.011.298.956,97 mengalami peningkatan dibandingkan penetapan tahun

2017 sebesar Rp. 1.542.886.015.940,60. Peningkatan tersebut disebabkan oleh perkiraan penerimaan Dana Perimbangan, khususnya peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam. Peningkatan ini dikarenakan mulai naiknya harga mineral dan minyak mentah dunia dan asumsi-asumsi ekonomi makro lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2017. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp. 689.198.216.994,79, lebih tinggi kurang lebih 151 milyar dibandingkan penetapan tahun 2017 sebesar Rp. 538.259.207.100,00

Dalam proyeksi pendapatan daerah tahun 2018, sumber penerimaan pendapatan yang diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan penetapan tahun 2017 adalah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disumbang oleh peningkatan Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah serta hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan

### **3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpol.

Rencana belanja daerah tahun anggaran 2018 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dibagi atas kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja :

- a) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Besaran penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomo 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- b) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam pemenuhan pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kabupaten Paser tidak melakukan pinjaman sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
- c) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- d) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada

kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Pemberian bantuan sosial dan hibah tidak secara terus menerus/tidak terulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.

- e) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten atau pendapatan kota kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- f) Belanja Bantuan Keuangan
- Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
  - Bantuan Keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- g) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja :

- a) Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja kegiatan dimaksud.
- b) Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- c) Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut :

a) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b) Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan –kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

## c) Tolak Ukur dan Target Kinerja

Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## d) Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja Langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

## e) Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Tabel III.10.

## Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>728.199.551.738,65</b>	<b>838.563.089.236,71</b>	<b>858.343.875.229,93</b>	<b>1.006.340.847.137,40</b>	<b>808.630.186.309,16</b>	<b>3,78</b>
1.1	Belanja Pegawai	531.103.592.750,83	579.487.176.126,25	618.134.911.319,50	663.665.022.986,00	619.753.605.186,00	4,13
1.2	Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	-	-
1.3	Belanja Hibah	57.604.684.000,00	37.876.745.492,80	34.206.657.829,00	89.435.260.939,00	8.063.223.252,00	6,63
1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.317.000.000,00	20.315.450.000,00	13.166.235.000,00	27.500.000.000,00	-	-
1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	129.559.888.646,00	199.290.740.117,66	192.486.750.560,11	224.957.733.212,40	180.618.994.871,16	11,89
1.6	Belanja Tidak Terduga	4.114.386.341,82	1.092.977.500,00	349.320.521,32	782.830.000,00	194.363.000,00	(23,14)



<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.200.229.090.452,78</b>	<b>1.453.479.441.967,29</b>	<b>1.166.884.159.657,68</b>	<b>1.231.613.755.021,44</b>	<b>708.279.016.664,48</b>	<b>(8,89)</b>
	2.1 Belanja Pegawai	-	-	-	142.696.547.393,00	123.927.833.559,50	-
	2.2 Belanja Barang dan Jasa	228.804.292.014,23	332.173.769.853,00	310.800.982.478,00	286.154.531.461,23	258.828.899.048,98	5,32
	2.3 Belanja Modal	971.424.798.438,55	1.121.305.672.114,29	856.083.177.179,68	802.762.676.167,21	325.522.284.058,00	(18,480)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.928.428.642.191,43</b>	<b>2.292.042.531.204,00</b>	<b>2.025.228.034.887,61</b>	<b>2.237.954.602.158,84</b>		<b>(3,63)</b>

Tabel III.11.

## Rencana Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018

No		Uraian	Penetapan Tahun 2017	Rencana Tahun 2018
1		<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.542.886.015.940,60</b>	<b>1.907.011.298.956,97</b>
2		<b>BELANJA</b>	<b>1.709.223.094.476,44</b>	<b>1.950.511.298.956,98</b>
2.1		<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>839.604.075.201,85</b>	<b>1.071.798.786.138,72</b>
	2.1.1	Belanja Pegawai	610.237.715.182,65	799.073.939.556,79
	2.1.2	Belanja Hibah	22.006.427.135,00	20.525.304.972,00
	2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	-	251.199.541.609,93
	2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	206.359.932.884,20	250.581.609.082,93
		Bantuan kepada partai politik	-	617.932.527,00
	2.1.5	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.2		<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>869.619.019.274,59</b>	<b>878.712.512.818,26</b>
	2.2.1	Belanja Pegawai	108.054.098.492,54	<b>114.232.626.666,37</b>
	2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	356.232.269.389,57	<b>360.272.130.255,49</b>
	2.2.3	Belanja Modal	405.332.651.392,48	<b>404.207.755.896,40</b>
		<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(166.337.078.535,84)</b>	<b>(43.500.000.000,00)</b>

### 3.2.4. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

#### 1. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah sebagai satu kesatuan dalam struktur APBD, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pemberian dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kondisi penganggaran daerah apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah, atau surplus APBD, maka pembiayaan daerah diarahkan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja jaminan sosial. Sedangkan apabila terjadi pendapatan daerah lebih rendah dibanding dengan belanja daerah atau terjadi defisit APBD, sedapat mungkin dapat dicukupi dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun Lalu. Alternatif lain adalah dengan melakukan pinjaman daerah, menjual aset daerah atau dengan alternatif kebijakan lain. Dalam menutup defisit anggaran harus jelas, transparan dan penuh kehati-hatian, karena konsekuensinya sangat berhubungan erat dengan beban pembangunan di masa-masa mendatang.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut :

**Tabel III.12.**  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2015 – 2018

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	JUMLAH			
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Penetapan Tahun 2017	Proyeksi/Target Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>329.320.638.804,52</b>	<b>166.337.078.535,84</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>50.000.000.000,00</b>
	3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	329.309.180.471,19	166.337.078.535,84	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
	3.1.2 Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-	-	-	-
	3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	11.458.333,33	-	-	-
	3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6.380.000.000,00</b>	<b>10.330.000.000,00</b>	<b>6.300.000.000,00</b>	<b>6.500.000.000,00</b>
	3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan		-	-	--
	3.2.2 Penyertaan Modal (Investasii Daerah)	6.380.000.000,00	10.330.000.000,00	6.300.000.000,00	6.500.000.000,00
	3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang		-	-	-
	3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>322.940.638.804,52</b>	<b>156.007.078.535,84</b>	<b>43.700.000.000,00</b>	<b>43. 500.000.000,00</b>

## 2. Kebutuhan Investasi

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah dapat diukur dan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik akan menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang dicapai Kabupaten Paser sebesar 2,15% lebih rendah dari rata-rata Nasional sebesar 5,02% menunjukkan bahwa Perekonomian di Kabupaten Paser mengalami penurunan, diperkirakan tahun 2017 dan tahun 2018 tumbuh diatas 2,15%. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan meningkatkan potensi sumber penerimaan daerah baik dari sektor pajak, retribusi maupun sumber pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan, namun demikian peningkatan tersebut masih belum dapat mencukupi seluruh kebutuhan penyelenggaraan pembangunan di daerah. Untuk itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah dan optimalisasi kontribusi BUMD serta investasi diluar APBD melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Tabel : Perhitungan Kebutuhan Investasi melalui APBD Kabupaten dan Investasi Swasta (PMDN dan PMA) Tahun 2017

Uraian	Nilai (Rp)	Perhitungan
PDRB ADHB - Tahun 2015 - Tahun 2016	38.274.547.110.000,00 38.572.343.570.000,00	a = % APBD 2016 terhadap PDRB ADHB 2016 = 4,7% s = Saving Pemerintah Terhadap APBD 2016 = 9,7 %
PDRB ADHK (2010) - Tahun 2015 - Tahun 2016	34.446.789.620.000,00 35.186.347.290.000,00	g = % Pertumbuhan PDRB ADHK (2010) Tahun 2015 Terhadap PDRB ADHK (2010) Tahun 2016 = 2,15% z = $\frac{Z.g - s+a}{1-s}$ x PDRB ADHB 2016 = Rp. 2.196.730.679.792,30
APBD Tahun 2016	1.819.347.526.914,68	te = Z.g (%) = 8,59% (te =tax expected)
I C O R (Z) Tahun 2014	4	
Saving Pemerintah Tahun 2016	176.667.078.535,84	

Sumber : Data Sekunder Diolah (Bappeda Kabupaten Paser, 2017)

Sementara sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil yang ditransfer langsung ke daerah, serta Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan yang merupakan program/kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

Disamping mengandalkan sumber pendanaan melalui APBD Kabupaten Paser, APBD Provinsi, dan APBN, kebutuhan investasi dapat ditutupi dari investasi asing dan dalam negeri. Berdasarkan hasil perhitungan, kebutuhan investasi untuk pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2017 sebesar Rp.2.196.730.679.792,30 diperoleh investasi dari APBD sebesar Rp.1.907.011.298.956,97, sisanya Rp.289.719.380.835,33 diharapkan investasi yang masuk dari PMA dan PMDN. Adapun tarif pajak yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser sebesar 2,15% adalah dengan mengenakan tarif pajak sebesar 8,59%.

## BAB IV

### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

##### 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2018 yaitu *“Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar dan Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Mewujudkan Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”*. Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas pedesaan;
2. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dan pelestarian budaya;
3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih;
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan energi listrik.
7. Penguatan ekonomi masyarakat, berbasis potensi lokal
8. Peningkatan kinerja pelayanan publik.

Sebagaimana visi Kabupaten Paser yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”*. Untuk merealisasi visi tersebut, maka di dalam RPJMD telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Paser sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman.
2. Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
3. Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
5. Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya, dan Adat Istiadat Lokal

Berdasarkan dari misi pembangunan tersebut selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 dan hubungannya dalam merealisasikan ke lima misi tersebut matrik pembangunan :

**Tabel IV.1.**

**Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2018**

<b>Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target</b>
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan transportasi publik	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Jembatan yang sudah dibangun terhadap total kebutuhan	Persentase jembatan kondisi baik	75%
		Panjang jalan kabupaten	Panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten (Km)	162 Km
			Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	60%
			Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi darurat yang ditangani	100%
			Sistem Data Base Jalan dan Jembatan Kabupaten	100%
			Persentase Jalan yang mendapat lampu penerangan	57%
			Persentase jalan pedesaan dalam kondisi baik	70%
			Persentase jalan kabupaten dengan turap/talud/bronjong dalam kondisi baik	40%
	Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Persentase jumlah kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	60%
			Persentase halte angkutan dalam kondisi baik	40%
		Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan angkutan	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	70%
	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan	Tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya (%)	Persentase jalan kabupaten yang memiliki rambu lalu lintas	45%
			Persentase kendaraan layak operasi	60%
Meningkatkan akses jaringan komunikasi	Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi dan pengamanan informasi	Penduduk Pengguna Telepon Genggam	Jumlah jaringan komunikasi	84
			Publikasi informasi daerah di media masa cetak	2



	Meningkatnya jangkauan jaringan internet	Cakupan Desa yang bisa Mengakses Informasi	Persentase desa yang bisa mengakses informasi digital	54%	
	Meningkatnya Pengamanan informasi di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Publik	Tingkat Pengamanan Data dan Informasi Daerah	Persentase Data Informasi Daerah yang diamankan	40%	
Meningkatkan akses air bersih	Meningkatnya akses Air Bersih	Penampungan Air Bersih terhadap total desa	Persentase desa yang terjangkau jaringan air bersih PDAM	53%	
			Jumlah Desa yang memiliki sarana air baku	7 Desa	
			Persentase sarana penampungan air baku dalam kondisi baik	50%	
		Cakupan Instalasi Perpipaan terhadap Seluruh Kecamatan (Jumlah Kecamatan)	Persentase kecamatan yang terinstalasi jaringan air bersih	75%	
		Desa yang bisa mengakses Air Bersih	Cakupan desa yang telah memiliki sarana pengolahan air bersih	50%	
Jumlah teknologi pengolahan air minum dan air limbah yang dibangun	15 unit				
Mengembangkan infrastruktur pemukiman rakyat	Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana	Cakupan pemukiman yang berwawasan lingkungan dan aplikatif bencana	Jumlah rumah yang berwawasan mitigasi bencana	70 unit	
			Jumlah rumah layak huni bagi warga tdk mampu	3.444 unit	
			Persentase Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	74%	
	Meningkatnya kualitas pemukiman masyarakat	Rumah Tangga Bersanitasi Baik	Areal Pemakaman dan RTH yang berkondisi baik	Persentase luas areal genangan	1,5%
				Persentase Areal Pemakaman berkondisi baik	48%
				Persentase RTH yang berkondisi baik	21%
				Persentase Infrastruktur di Perdesaan dalam kondisi baik	70%

<b>Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target</b>
Meningkatkan akses pelayanan pendidikan	Meningkatnya angka partisipasi siswa usia sekolah	1).Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	Persentase unit pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	<b>12%</b>
		2).Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B		
		3).Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana (SNP)	<b>58% &amp; 62%</b>
		4).Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B		
		5).Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A		
		6).Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B	Persentase Pemenuhan Standar Isi (SNP)	<b>67% &amp; 72%</b>
		7).Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A		
		8).Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/Paket B	Persentase Pemenuhan Standar Kelulusan dan Penilaian (SNP)	<b>83% &amp; 78%</b>
		9).Angka Kelulusan SD/MI/Paket A		
		10).Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	<b>68%</b>
			Persentase unit pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	<b>21%</b>
Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini	Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini	APK PAUD	Persentase APK PAUD	50,45%
		Lembaga PAUD terakreditasi	Persentase Guru PAUD yang bersertifikat	28%
	Meningkatnya Angka Melek Huruf	Angka Melek Huruf	Persentase Angka Melek Huruf	98,23%
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persentase Guru SD dan SMP Bersertifikat	63%
		Persentase Guru yang tersertifikasi	Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan	40%
Memperkuat pelayanan pendidikan yang berdaya saing	Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing	Cakupan IKM Sekolah	Presentase Strandar Pelayanan Minimum (SPM) yang sudah dicapai	70%
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan primer	Rasio tenaga kesehatan (per 1000 penduduk)	Rasio Dokter (per 100.000 penduduk)	28
		Rasio Puskesmas memiliki Alat Kesehatan sesuai standar	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas pembantu per 1000 penduduk	1,6
		Persentase Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap	Persentase Cakupan Puskesmas pembantu (per jumlah desa)	85%

		Bed Occupancy rate (BOR)	Persentase jaringan utilitas kawasan rumah sakit	70%		
			Cakupan ketersediaan obat esensial generic di faskes	100%		
			Persentase masyarakat yang terlayani puskesmas	80%		
			Cakupan pelayanan rumah sakit	100%		
	Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat	Persentase Cakupan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan	Persentase peserta jaminan pemeliharaan kesehatan di unit layanan	92%		
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	Persentase rumah Tangga ber-PHBS	70%		
		AKI (1000)	Persentase persalinan di tolong tenaga kesehatan	83%		
		AKB (1000)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan balita	65%		
		AKABA	Rasio Posyandu per 1000 balita	365		
		Cakupan balita Gizi Buruk Yang mendapatkan perawatan	Balita berat badan dibawah garis merah ( BGM )	0		
		Angka kesakitan per satuan penduduk	Persentase pelayanan Ibu Nifas	83%		
		Tingkat kesehatan lansia			Persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	40%
					Persentase cakupan rumah tangga yang mendapatkan promosi kesehatan	74%
					Persentase balita mendapat kapsul Vit A	76%
					Persentase ibu hamil mendapat Fe 90	78%
					Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100
					Persentase cakupan Penanganan Penderita Penyakit BC	74%
					Angka Prevalensi Kusta (per 10.000 penduduk)	2
					Angka Penemuan Penderita Penyakit DBD	180 kasus
					Prevalensi hipertensi	19.000 kasus
					Cakupan desa/kelurahan UCI (persen)	80
Cakupan Pelayanan kesehatan usia lanjut	25%					
Persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat	65%					

	Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Cakupan peserta KB aktif	74,50%
		Keluarga sejahtera	Persentase ketersediaan sumber daya	80%
		Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase penurunan kehamilan tidak diinginkan dari WUS	6%
			Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS	2,5
			Cakupan remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi	50 orang
			Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)	20,40%
			Cakupan sekolah yang mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba dan PMS	10 sekolah
			Persentase remaja yang ikut dalam program GenRe (Generasi Berencana)	33
			Persentase Posyandu PADU	60%
			Persentase keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia yang ikut program BKB, BKR dan BKL	72,50%
Memperkuat pelayanan Kesehatan yang berdaya saing	Berkembangnya pelayanan kesehatan yang berdaya saing	Tingkat Komplain Terhadap Layanan Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	75%
			Cakupan masyarakat Paser yang memiliki jaminan kesehatan	100%
			Tipe Rumah Sakit	B
			Akreditasi Rumah Sakit	B
			Persentase Akreditasi Puskesmas	45%

Misi 3 : Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target
Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Produksi pertanian (Ton)	Persentase Cakupan pendampingan dan penyuluhan (pertanian dalam arti luas)	80%
			Persentase Kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian guna meningkatkan produksi	60%
		Persentase Indeks ketahanan pangan	Luas lahan yang menghasilkan produksi pertanian	Padi: 9.800 Ha, Jagung: 360Ha, Kedelai 100Ha, Bawang Merah 30Ha, Jeruk: 420Ha
		Produktivitas pertanian (Ha)	Persentase Ketersediaan pangan utama pertanian	85%
			Persentase Kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian guna meningkatkan produksi	60%
			Persentase kawasan pertanian yang memiliki jaringan irigasi sesuai standar	44%
		Produksi tanaman perkebunan	Persentase Kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan	45%
			Luas lahan yang menghasilkan produksi perkebunan	Kelapa Sawit: 92.000Ha, karet 6.400Ha
		Populasi peternakan	Persentase Kelompok peternak yang menerapkan teknologi peternakan	12%
			Persentase populasi ternak yang sehat terhadap jumlah ternak	72%
	Cakupan kelompok peternak yang diberdayakan		12%	
	Produksi Perikanan	Persentase Cakupan masyarakat Perikanan yang diberdayakan	15%	
		Jumlah produksi perikanan budidaya	15.552 ton	
		Jumlah produksi perikanan tangkap	11.305 ton	
		Luas kawasan budidaya perikanan	19.524,64 Ha	
	Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Pengembangan kualitas produk pertanian	Persentase Kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian guna meningkatkan produksi	55%
		Pengembangan sentra produksi pertanian	Persentase Persentase produk pertanian yang memiliki standarisasi mutu	40%

			Persentase Kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan	60%
		Pengembangan kualitas produk perkebunan	Persentase produk perkebunan yang memiliki standarisasi mutu	35%
		Pengembangan sentra produksi perkebunan	Persentase peningkatan pendapatan rata-rata petani	22%
		Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	Persentase produk perikanan yang memiliki standarisasi mutu	80%
			Jumlah produk olahan khas perikanan	2.464 ton
		Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	Persentase produk peternakan yang memiliki standarisasi mutu	14%
Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan	Berkembangnya sektor pariwisata	Pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata secara berkelanjutan	Persentase lembaga mitra yang aktif berkerjasama	100%
			Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	3 destinasi
		Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian lokal	Jumlah media informasi pemasaran pariwisata Pemerintah Daerah	5 Jenis
Meningkatkan kinerja pasar tradisional, koperasi dan UMKM	Meningkatnya kinerja UMKM	Pengembangan kapasitas manajemen UMKM secara menyeluruh dan berkelanjutan	Cakupan UMKM yang diberdayakan	50%
			Cakupan produk UMKM yang mendapatkan permodalan	75 Produk
			Media promosi bagi UMKM	2 Jaringan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional	Peningkatan akses masyarakat dan perlindungan pasar tradisional secara merata	Jumlah peningkatan jumlah pasar tradisional	83 Pasar
			Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15%
			Persentase pedagang yang menempati lokasi sesuai ijin	80%
			Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mendapatkan pembinaan	40%
			Jumlah alat UTTP yang diterapkan	900 UTTP
	Jumlah PAD Retribusi Jasa Kemetrolagian Legal	Rp. 120.000.000		
	Meningkatnya koperasi aktif	Revitalisasi koperasi secara merata dan berkelanjutan	Persentase koperasi yang aktif	85%
	Meningkatnya kinerja Industri Kecil Menengah	Pengembangan industri pengolahan secara merata dan berkelanjutan	Persentase tenaga kerja yang berkerja di sektor IKM	50%
			Jumlah produk IKM yang bersertifikasi	14 Produk
			Persentase Kontribusi industri kecil menengah terhadap PDRB	60%

	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Peningkatan kualitas, produktivitas dan serapan tenaga kerja secara merata	Jumlah wirausahawan baru	100 wirausahawan		
			Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	2,64%		
			Persentase Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30%		
			Persentase perusahaan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	10%		
	Meningkatnya kinerja BUMDes yang aktif	Fasilitasi pembenahan pengelolaan BUMDES	Persentase desa yang memiliki BUMDES	40%		
Meningkatnya Kualitas Jasa Kontruksi	Meningkatnya Pelayanan dan Pengawasan Jasa Kontruksi	Peningkatan kualitas Pengawasan dan Pelaksana Tenaga Kerja Jasa Kontruksi	Jumlah revisi Perda dan Database Informasi IUJK	1		
			Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja IUJK	2 kali		
			Jumlah IUJK yang terawasi	25 IUJK		
Meningkatkan iklim investasi	Meningkatnya investasi	Peningkatan nilai investasi dan kinerja pelayanan perijinan secara berkelanjutan	Persentase pertumbuhan kinerja investasi	40%		
			Tingkat kemudahan proses perijinan	85%		
			Persentase peningkatan investasi PMA	35%		
			Persentase peningkatan investasi PMDN	35%		
			Ketersediaan Sarana Prasarana untuk peningkatan Investasi	5 Paket		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	Penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan secara berkelanjutan	Persentase Nilai status lingkungan hidup daerah	70,50%		
			Laju deforestasi	16.800 Ha/Tahun		
			Persentase sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata	4,42%		
			Jumlah Emisi yang diturunkan dari Pemanfaatan Lahan di areal APL (juta ton CO2 eq)	2,29 juta ton CO2 eq		
				1) Cakupan ibukota kecamatan yang sudah memiliki fasilitas pengelolaan sampah	Kecamatan yang sudah terlayani pengelolaan pesampahan	1) 2 IKK
				2) Jumlah rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri		2) 7.200
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Konservasi	Peningkatan area konservasi DAS di Kabupaten Paser	Persentase luasan kawasan lindung terhadap luasan kabupaten	21,50%	
				Persentase Tingkat kelestarian TAHURA		
		Meningkatnya kualitas kawasan konservasi	Peningkatan area konservasi dan wilayah DAS di Kabupaten Paser	Persentase peningkatan luas area DAS yang terkonservasi	6,80%	
				Persentase luas HCV dalam kawasan izin pemanfaatan lahan	7%	
Tingkat kelestarian TAHURA	66%					

**Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target	
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Lkj tepat waktu	100%	
		Nilai LKj	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai standar	100%	
			Persentase Cakupan aset daerah yang dikelola secara baik	10%	
			Nilai LPPD	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LPPD tepat waktu	100%
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	100%
				Persentase desa yang telah menyusun APBDes sesuai ketentuan	61%
				Persentase desa yang melaporkan dokumen APBDes tepat waktu	61%
				Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	75%
				Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100%
				Persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan	7%
	Meningkatnya akses terhadap Informasi publik			Informasi statistik daerah yang valid	Sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi
		Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai data SIPD secara lengkap	40%		
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki media diseminasi informasi	30%		
		Tingkat kemudahan akses informasi publik	Persentase Perangkat Daerah yang telah membentuk dan menjalankan PPID Pembantu	Persentase Perangkat Daerah yang telah membentuk dan menjalankan PPID Pembantu	57,14%
				Persentase Sistem E-Government yang terbangun	50%
		Jumlah informasi publik/pembangunan daerah yang dimuat di media cetak dan online	Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah	Jumlah informasi publik/pembangunan daerah yang dimuat di media cetak dan online	22
Jumlah media cetak yang memuat informasi pembangunan daerah				2 media cetak	
Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah		Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran	Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Peringkat pangripta	100%
	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran			100%	
	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu			100%	
	Konsistensi antar dokumen perencanaan		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan	95%	
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan	100%	



			Persentase aparaturnya yang memiliki kompetensi perencanaan	60%
Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya	Ketaatan terhadap RTRW	Cakupan kawasan yang sudah memiliki perda RDTR	Cakupan kawasan yang sudah memiliki perda RDTR	6 Kawasan
			Cakupan penggunaan kawasan yang sesuai perda RTRW dan RDTR	2 Kawasan
			Cakupan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang sudah memiliki payung hukum	1 kawasan
			Persentase Capaian pembangunan sosial budaya	100%
			Persentase Capaian pembangunan bidang ekonomi	87%
			Persentase Capaian pembangunan bidang prasarana wilayah dan SDA	81%
			Cakupan pengembangan kota menengah dan besar	50%
			Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%
		Batas wilayah yang telah ditetapkan	Persentase batas wilayah kecamatan dan desa yang telah ditetapkan	10%
			Persentase ketersediaan syarat-syarat penataan wilayah	80%
Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah	Meningkatnya kapasitas aparaturnya pemerintah daerah	Cakupan PNS yang memiliki standar kompetensi yang disyaratkan	Persentase penetapan pejabat struktural berdasarkan hasil seleksi jabatan/assessment	100%
			Persentase PNS yang telah lulus diklat PIM	100%
			Persentase Cakupan jabatan struktural yang diisi berdasarkan seleksi terbuka	100%
			Persentase Cakupan pejabat fungsional yang telah mengikuti diklat fungsional	100%
			Jumlah tenaga pengawas yang bersertifikat	4
			Jumlah aparaturnya yang memenuhi kompetensi sesuai standar	100
		Cakupan jabatan yang terisi berdasarkan analisis jabatan	Cakupan penerapan seleksi ASN berbasis komputer	153
			Persentase Cakupan pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%
			Jumlah calon praja IPDN yang lulus seleksi penerimaan IPDN	3
			Persentase Penilaian kinerja pegawai berdasarkan sistem informasi	100%
		Penanganan kasus pengaduan/temuan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah	Persentase kasus pengaduan/temuan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	65%
			Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS	30%
			Persentase Perangkat Daerah yang terlayani	100%
			Persentase Perangkat Daerah yang tercukupi sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja aparaturnya	100%

		Jumlah sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	115
		Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	43
		Jumlah anggota KORPRI yang mendapat fasilitasi dan layanan yang disediakan KORPRI	1140
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peringkat pelayanan publik skala Kaltim menurut Ombudsman	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target SPM secara lengkap	73%
	Peringkat dan nilai EKPPD	Persentase Perangkat Daerah yang telah merumuskan dan melaksanakan standar pelayanan publik (SPP)	100%
	Indeks kepuasan Masyarakat	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan survey IKM	20 PD
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah sarana/prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai standar	1 Unit
		Jumlah sektor wilayah manajemen kebakaran	1
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	76 orang
		Jumlah linmas per 10.000 penduduk	890 orang
	Data kependudukan yang valid	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	69
		Rasio penduduk yang berkartu keluarga per satuan penduduk	32
		Kepemilikan akte lahir per 1000 penduduk	107.438
		Jumlah kebijakan bidang Kesra yang dirumuskan	25
		Jumlah kebijakan bidang administrasi umum dan pemerintahan yang dirumuskan	17
		Jumlah kebijakan bidang perekonomian dan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang dirumuskan	16
		Jumlah koordinasi bidang kesra yang dilaksanakan	12
		Jumlah Koordinasi bidang administrasi umum dan pemerintahan yang dilaksanakan	8
		Jumlah kebijakan bidang perekonomian dan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang dirumuskan	16
		Jumlah pelayanan administrasi bidang kesra yang dilaksanakan	12
Jumlah pelayanan administrasi bidang administrasi umum dan pemerintahan yang dilaksanakan	8		
Jumlah pelayanan administrasi bidang perekonomian dan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang dirumuskan	16		
Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasi dengan baik	71		

			Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkoordinasi dengan baik	43
			Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terkoordinasi dengan baik	18
			Jumlah kegiatan penerapan dan penegakkan perda dan perkara yang terkoordinasi dengan baik	20
			Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang terkoordinasi dengan baik	32
			Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya yang terkoordinasi dengan baik	28
			Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	75%
		Peningkatan Tata Kelola Sistem Pertanahan Kabupaten	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan (perda, perbup, instruksi, SK bupati)	642
			Jumlah Lokasi Tanah yang tercakup dalam sistem Pendaftaran Tanah	2 Lokasi
			Jumlah Kasus Pertanahan yang tertangani	6 Kasus
			Jumlah lokasi Tanah yang akan terbebaskan	6 Lokasi
	Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat	Indeks Persepsi Korupsi Daerah	Jumlah kasus korupsi yang telah diputus secara hukum	3
			Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan zona WBK/WBM	2
		Penghargaan inovasi	Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan inovasi pelayanan	30%
		Persentase arsip daerah yang tertata	Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku	10 PD
			Jumlah layanan informasi arsip	2 Program/ On Line
			Dokumen terselamatkan	200 ML
			Database arsip daerah	5000 berkas
Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan	Meningkatnya partisipasi publik	Masukan dalam Musrenbangdes/musrenbangcam yang diakomodir	Persentase Cakupan desa yang menjalankan musrenbang	100%
		Aspirasi masyarakat melalui DPRD yang sesuai dengan RPJMD yang ditindaklanjuti	Sistem penjangkaran aspirasi masyarakat efektif	90 kali
		Aspirasi/keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Sistem informasi pelayanan pengaduan masyarakat	3
		LSM, Ormas, OKP yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah	Cakupan lembaga kemasyarakatan dan organisasi yang mendapatkan pembinaan pembangunan	4

## Misi 5 : Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya dan Adat Istiadat Lokal

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target
Meningkatkan rekognisi dan promosi	Meningkatnya akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan	Komunitas adat terpencil (KAT) yang menjadi sasaran pembangunan	Persentase komunitas adat terpencil (KAT) yang dibina	100%
			Persentase lembaga adat yang berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah	50%
Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan	Indeks pembangunan gender	Rasio perempuan terhadap laki-laki pada lembaga legislatif	Rasio PNS perempuan terhadap PNS laki-laki	6 : 30
			Rasio PNS perempuan terhadap PNS laki-laki	2395 : 5582
			Rasio pejabat struktural perempuan terhadap pejabat struktural laki-laki	250 : 787
			Persentase lembaga pengarusutamaan gender yang mendapatkan pembinaan	100%
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun PPRG	45%
			Perda pengarusutamaan gender ditetapkan	1
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan olah raga	Rasio sarana dan prasarana olah raga (per 1000 pemuda)	Jumlah sarana prasarana olahraga yang sesuai standar (Unit)	54	
	Pemuda peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausahawan mandiri	Cakupan pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (Orang)	75	
	Jumlah pemuda yang sadar bahaya penyalahgunaan penggunaan narkoba	Cakupan pemuda yang mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba (Orang)	60	
Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan	Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah pelaku seni	81	
		Jumlah sarana penyelenggaraan dan festival seni dan budaya	1	
	Pengelolaan Keragaman Budaya	Frekwensi penyelenggaraan festival seni dan budaya ( Lokal dan Nasional )	4	
		Jumlah Cagar Budaya (situs,benda,bangunan, kawasan dan struktur ) yang dikelola,dipelihara dan dilestarikan	46	

Meningkatkan stabilitas sosial	Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah konflik berbau SARA	Jumlah forum adat atau agama dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	12 forum
		Angka kriminalitas	Jumlah satuan keamanan lingkungan di masyarakat (per RT)	Na
Meningkatnya akses bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana sosial	Korban bencana sosial skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		Persentase korban bencana sosial yang menerima bantuan sosial	100%
			Cakupan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana sosial	Na
Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam	Bencana yang ditangani		Persentase Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP dan SOP)	70%
Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat	Pemberian bantuan sosial bagi KK Miskin		Persentase KK miskin yang menerima bantuan sosial	88%
			Persentase KK miskin yang menerima pelatihan ketrampilan berusaha	4%
			Persentase KAT yang mendapatkan pembinaan	100%
	Pemberian bantuan penyandang disabilitas		Persentase penyandang disabilitas yang telah menerima jaminan sosial	88%
	Pemberian bantuan lanjut usia terlantar		Persentase warga panti jompo yang menerima pembinaan	100%
			Persentase lanjut usia terlantar yang telah menerima jaminan sosial	100%
			Persentase lanjut usia terlantar yang telah menerima pembinaan	100%
			Persentase lanjut usia yang menjalankan usaha ekonomi produktif	10%
Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	80%
Meningkatnya pemenuhan hak anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak		Persentase kasus kekerasan anak yang ditangani	80%
	Predikat kabupaten layak anak		Persentase capaian indikator Kabupaten Layak Anak	80%
	Jumlah anak dan balita terlantar		Persentase anak terlantar yang menerima pembinaan	100%
Meningkatkan pengelolaan kependudukan	Meningkatnya ketersediaan data kependudukan	Cakupan penduduk yang sudah terdaftar e- ktp	Persentase Cakupan penduduk yang sudah terdaftar dan mempunyai e-ktp	85,35%

	yang selalu diperbaharui		Rasio penduduk yang berkartu keluarga per satuan penduduk	32
			Kepemilikan akte lahir per 1000 penduduk	107,438
	Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi	Jumlah kawasan eks transmigrasi yang mandiri	Jumlah Kawasan Transmigrasi (unit)	6

## 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun yang direncanakan.

Memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016-2021, Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Paser maka dapat dijabarkan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Paser dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 sebagaimana berikut :

**Tabel IV.2.**  
Prioritas Pembangunan Daerah  
Kabupaten Paser Tahun 2018

No	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD Tahun 2018)	Urusan	Sasaran
1	Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas perdesaan	Infrastruktur Perhubungan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
			Meningkatnya pelayanan transportasi publik
			Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan
			Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi
			Meningkatnya jangkauan jaringan internet
2	Peningkatan akses dan mutu pendidikan dan pelestarian budaya	Pendidikan	Meningkatnya angka partisipasi siswa usia sekolah
			Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini
			Meningkatnya angka melek huruf
			Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

			Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing
		Budaya	Berkembangnya seni budaya yang mampu mempersatukan masyarakat, serta mempertahankan kelestarian nilai-nilai budaya sebagai karakter jati diri dan melestarikan cagar budaya
3	Peningkatan akses, sarana dan mutu layanan kesehatan	Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan primer
			Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat
			Berkembangnya pelayanan kesehatan yang berdaya saing
4	Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air bersih	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya akses Air Bersih
5	Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak huni	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana
			Meningkatnya kualitas pemukiman masyarakat
6	Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan energi listrik	Sekretariat Daerah ( Bina Ekonomi I )	Meningkatnya Akses layanan listrik
7	Penguatan ekonomi masyarakat, berbasis potensi lokal	Ketahanan Pangan/Pertanian	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
			Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		Pariwisata	Berkembangnya sektor pariwisata
		Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi Aktif
			Meningkatnya kinerja UMKM
		Perdagangan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional
		Perindustrian	Meningkatnya kinerja Industri Kecil Menengah
		Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya kinerja BUMDes
		Penanaman Modal	Meningkatnya investasi
		Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja
8	Peningkatan kinerja pelayanan publik	Otonomi Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
			Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik
			Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat
			Meningkatnya partisipasi publik
			Meningkatnya pengamanan informasi di lingkungan instansi pemerintah dan publik
			Meningkatnya pemamfaatan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 disusun dengan mengacu Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang merupakan revisi dari Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2018 tahapan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2108 memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Namun pada hakikatnya seluruh fokus pembangunan tersebut memiliki satu tujuan yang sama yakni pencapaian pembangunan yang adil dan merata. Pelaksanaan pembangunan periode tahun 2018 tema yang diusung adalah *“Pemantapan kualitas pelayanan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Paser yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan”*. Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas pedesaan;
2. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dan pelestarian budaya;
3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih;
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan energi listrik.
7. Penguatan ekonomi masyarakat, berbasis potensi lokal
8. Peningkatan kinerja pelayanan publik.

Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 dikelompokkan menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwajibkan melalui prestasi kerja dalam mencapai standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan dan perundangan.



Sedangkan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah (PD) terdiri dari semua program dan kegiatan yang berhubungan dengan kelancaran aktivitas pelayanan publik sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing PD. Tahun 2018, masing-masing PD dalam Kabupaten Paser akan memiliki program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan setiap PD.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun Saat ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Paser. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 disusun berdasarkan hasil analisa, merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Paser sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Pemerintah Daerah Wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. RKPD tahun 2018 ditetapkan berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan pada pembangunan infrastruktur, sumberdaya manusia, pertanian dalam arti luas, serta kegiatan penunjang lainnya, dijabarkan pada 42 urusan, yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 9 urusan pilihan dan 9 urusan penunjang

Matrik rencana program dan kegiatan yang diuraikan dalam lampiran dokumen ini merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Paser. Rencana program dan kegiatan tersebut dilengkapi dengan rincian rencana kebutuhan indikatif pendanaan program dan kegiatan oleh masing-masing PD di Kabupaten Paser tahun anggaran 2018.

## BAB VI

### PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang mengemban misi pelaksanaan pembangunan tahun kedua yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2016-2021. RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan KUA- APBD (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), dan PPAS-APBD (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Paser serta peran aktif masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama masyarakat, sektor swasta dan dunia pendidikan seyogyanya sungguh-sungguh dalam melaksanakannya dan bersama-sama mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2018 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait. Dokumen ini diharapkan pula dapat dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Tana Paser, Mei 2017

**BUPATI PASER**

  
**Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si**

## Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Kabupaten Paser

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).
	<b>Urusan Wajib</b>							
	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>							
	<b>Pendidikan</b>							
	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (A)</b>							
	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan</b>	<b>2.1.2. Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini</b>	<b>APK PAUD</b>	<b>57:07:00</b>			
	Pembangunan Gedung Sekolah (Unit Sekolah Baru)	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.2. Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.2. Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini					
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (TK)	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.2. Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini			Jumlah tenaga pendidik yang dilatih		150
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.2. Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini			Jumlah kelompok paud yang dibina		275
	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.2. Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini			Prosentase Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini		20
	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.2. Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini			Jumlah kecamatan sosialisasi PAUD		10
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PAUDNI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.2. Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini			Jumlah Dokumen Pelaporan PAUD		1
	Lomba Bina Bakat dan Prestasi Siswa Tingkat PAUD	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.2. Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini			Jumlah sekolah peserta Lomba PAUD		273
	Data Pokok Pendidikan PAUDNI-Dikmas	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.2. Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini			Jumlah dokumen dapodik paudni-Dikmas		1
	Fasilitasi Forum PAUD Kabupaten Paser	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.2. Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini			Jumlah sekolah peserta Forum PAUD		10
	<b>Program Wajib Belajar Sembilan Tahun</b>	<b>1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan</b>	<b>2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah</b>	<b>Persentase unit pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan</b>	<b>4</b>			
	Pembangunan Gedung Sekolah (SD/SMP)	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Persentase SD dan SMP yang memiliki Ruang UKS		47.21 dan 60.60
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (SD/SMP)	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Persentase Ruang Kelas yang dibangun SD		92.95
	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah (SD/SMP)	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Persentase Ruang Kelas yang direhab (SD)		39:36:00
	Pengadaan Meubelair Sekolah (SD/SMP)	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Persentase Pengadaan Meja Kursi Siswa (SD)		85:12:00
	Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Sekolah SD/SMP	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Persentase Ruang Perpustakaan yang dibangun/Rehab (SD)		59.28 & 85.42
	Pembinaan Kurikulum dan Manajemen Sekolah (SD/SMP)	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Prosentasi Sekolah SD yang dibina		212
	Pendataan, Pemberian dan Penyaluran Beasiswa SD/SMP	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah siswa penerima beasiswa SD		9000
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Persentase rumah dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah yang dibangun/direhabilitasi		50
	Pengadaan Media Pendidikan SD/SMP	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Prosentase sekolah yang memiliki Media Pendidikan SMP		20
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium IPA dan Ruang Praktikum Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Persentase Laboratorium yang direhab (SD)		83:33:00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium IPA dan Ruang Praktikum Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah					
	Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Persentase kelulusan siswa tingkat SD		84
	Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Persentase kelulusan siswa tingkat SMP		92:01:00
	Penyusunan Kalender Pendidikan SD/SMP	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah Kalender Pendidikan yang Tersusun SD (dokumen)		1
	Lomba Sains MIPA SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah sekolah peserta lomba sains MIPA SD/MI		230
	Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP/MTs	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah sekolah peserta OSN SMP/MTs		82
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah Sekolah Peserta O2SN SD		232
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah Sekolah Peserta O2SN SMP		82

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan Dasar	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan BOS SD/SMP	1	
	Database Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah dokumen data kelembagaan yang dibutuhkan	1	
	Penguatan Administrasi dan manajemen Kesiswaan	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1	
	Festival dan Lomba Seni Tingkat SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah sekolah peserta Festival Lomba Seni SD	232	
	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SMP	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah sekolah Peserta FL2SN SMP/MTs	82	
	Pembangunan Pagar, Siring, Urug dan Paving	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah Pembangunan Pagar, Siring dan Paving SD/SMP	5	
	Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Aula/UKS/Tempat Ibadah SD/SMP	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Persentase Ruang Aula/UKS/Tempat Ibadah yang direhab (SD/SMP)	1	
	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>2.1.3. Meningkatnya Angka Melek Huruf</b>		<b>Persentase Angka Putus Sekolah Masyarakat</b>	<b>0,4875</b>		
	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	2. Prioritas Pendukung I	2.1.3. Meningkatnya Angka Melek Huruf			Jumlah Peserta Pendidikan Keaksaraan	500	
	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	2. Prioritas Pendukung I	2.1.3. Meningkatnya Angka Melek Huruf			Jumlah Pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan	1	
	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal	2. Prioritas Pendukung I	2.1.3. Meningkatnya Angka Melek Huruf			Jumlah dokumen data dan informasi	1	
	Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B dan C	2. Prioritas Pendukung I	2.1.3. Meningkatnya Angka Melek Huruf			Jumlah WB yang mengikuti Program Paket A, B, C	10	
	Fasilitasi Lomba Pendidikan Nonformal dan Informal	2. Prioritas Pendukung I	2.1.3. Meningkatnya Angka Melek Huruf			Jumlah Lomba yang dilaksanakan PNF	20	
	Pembinaan Kegiatan PLS (Operasional Penilik PLS)	2. Prioritas Pendukung I	2.1.3. Meningkatnya Angka Melek Huruf			Jumlah lembaga PLS yang dibina	114	
	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan</b>	<b>2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</b>		<b>Persentase Guru SD dan SMP Bersertifikat</b>	<b>56.07 &amp; 54,90</b>		
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			Jumlah Guru yang disertifikasi	1458	
	Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			Jumlah guru peserta Uji kompetensi	4000	
	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			Jumlah Guru yang dilatih standar kompetensi	40	
	Pembinaan MGMP/KKG/MKKS/K3S	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			Jumlah KKG/MGMP/MKKS/K3S yang mendapatkan binaan (kecamatan)	10	
	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			Jumlah dokumen laporan pemetaan yang dihasilkan	1	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			Jumlah dokumen laporan yang tersedia	1	
	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			Jumlah guru dan pengawas serta penilik yang menetapkan PAK	2600	
	Seleksi Administrasi dan Akademik Calon Kepala Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			Jumlah peserta Seleksi calon Kepala Sekolah	100	
	Pelatihan CAKEP	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			Jumlah Peserta Pelatihan Calon Kepala Sekolah	65	
	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik Jenjang SD	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			Jumlah Guru peserta diklat Jenjang SD	500	
	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik Jenjang SMP	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			Jumlah Guru peserta diklat Jenjang SMP	350	
	Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			Jumlah Tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapatkan Honorer	2435	
	Penyediaan Dana Biaya Operasional Pengawas Satuan Pendidikan	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			Jumlah Pengawas yang mendapatkan Biaya operasional	50	
	Sosialisasi NUPTK/Verval GTK	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			Jumlah Sekolah peserta sosialisasi verval GTK	313	
	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			Jumlah Kepala Sekolah peserta Pelatihan Kompetensi	40	
	Fasilitasi Aneka Tunjangan	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			Jumlah aneka Tunjangan terlaksana	6	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Pendidikan	2. Prioritas Pendukung I	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing		Presentasi Strandar Pelayanan Minimum (SPM) yang sudah dicapai	70		
	Pembinaan Komite Sekolah	2. Prioritas Pendukung I	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing				Jumlah Komite sekolah yang dibina	20
	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Pendidikan	3. Prioritas Pendukung II	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing		Persentase Komite Sekolah Aktif	60 komite sekolah		
	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	3. Prioritas Pendukung II	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing				Jumlah Data Kepegawaian yang dihasilkan	1
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Pendidikan (SPM)	3. Prioritas Pendukung II	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing				Jumlah dokumen pelaporan SPM yang dihasilkan	1
	Pembinaan UKS	3. Prioritas Pendukung II	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing				Jumlah UKS sekolah yang di bina	50
	Inventarisasi Pemeriksaan Barang / Aset	3. Prioritas Pendukung II	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing				Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset Milik Daerah	1
	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan ( Dapodik )	3. Prioritas Pendukung II	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing				Jumlah dokumen Data Pokok Pendidikan	1
	Rakerda UKS	3. Prioritas Pendukung II	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing				Jumlah UKS sekolah peserta Rakor	240
	Akreditasi Sekolah	3. Prioritas Pendukung II	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing				Jumlah Sekolah yang diakreditasi	41
	Penyusunan Profil Pendidikan	3. Prioritas Pendukung II	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing				Jumlah dokumen Profil pendidikan	1
	Publikasi Informasi Pendidikan	3. Prioritas Pendukung II	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing				Jumlah jenis Informasi Pendidikan yang diterbitkan	2
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Pendidikan	3. Prioritas Pendukung II	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing				Jumlah dokumen Profil pendidikan	1
	Pengelolaan Ijin Operasional Sekolah	3. Prioritas Pendukung II	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing				Jumlah sekolah memiliki ijin operasional	250
	UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Pasir							
	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah		Persentase unit pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	4		
	Lomba Sains MIPA SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah Pemenang	18
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (TK & SD)	4 & 45
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah Pemenang O2SN	60
	Festival dan Lomba Seni Tingkat SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah Pemenang FLS2N	40
	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Pendidikan	3. Prioritas Pendukung II	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing		Persentase Komite Sekolah Aktif	60 komite sekolah		
	Lomba Sekolah Sehat	3. Prioritas Pendukung II	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing				Jumlah sekolah peserta Sekolah Sehat (sekolah)	49
	UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Kuaro							
	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah		Persentase unit pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	4		
	Lomba Sains MIPA SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah sekolah peserta lomba sains MIPA SD/MI	26
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (sekolah)	26 & 1
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah Sekolah Peserta O2SN SD	26
	Festival dan Lomba Seni Tingkat SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah sekolah peserta FLS2N (sekolah)	26

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Pendidikan	3. Prioritas Pendukung II	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing		Persentase Komite Sekolah Aktif	60 komite sekolah		
	Sosialisasi dan Supervisi Laporan Keuangan	3. Prioritas Pendukung II	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing				Jumlah sosialisasi dan supervisi laporan keuangan (sekolah SD dan SMP, dan UPTD, Dinas Pendidikan)	322
	Lomba Sekolah Sehat	3. Prioritas Pendukung II	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing				Jumlah sekolah peserta Sekolah Sehat (sekolah)	26
	<b>UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Long Ikis</b>							
	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah		Persentase unit pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	4		
	Lomba Sains MIPA SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah sekolah peserta lomba sains MIPA SD/MI	40 sekolah
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (sekolah)	40 sekolah
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				jumlah sekolah peserta O2SN	40 sekolah
	Festival dan Lomba Seni Tingkat SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				jumlah sekolah peserta FLS2N	40 sekolah
	Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam Tingkat SD/MI dan SMP/MTs	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				jumlah sekolah peserta Pekan Seni Agama Islam tingkat SD/MI dan SMP/MTsN (sekolah)	40 sekolah
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan		Persentase Guru SD dan SMP Bersertifikat	56.07 & 54,90		
	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan				Jumlah peserta pelatihan kompetensi guru (orang)	40
	Pemilihan Guru Berprestasi	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan				Jumlah Guru berprestasi yang terpilih (orang)	2
	<b>UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Long Kali</b>							
	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah		Persentase unit pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	4		
	Lomba Sains MIPA SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah Sekolah Peserta Olimpiade Sains Siswa Nasional SD/MI (sekolah)	33
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah Ketersediaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (sekolah)	31
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah peserta O2SN ke Tingkat Provinsi (siswa)	16 Siswa
	Festival dan Lomba Seni Tingkat SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah sekolah peserta FLS2N (sekolah)	33
	<b>UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Muara Komam</b>							
	Lomba Sains MIPA SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah sekolah peserta lomba sains MIPA SD/MI	19
	<b>UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Muara Komam</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (sekolah)	2 TK Negeri, 18 SD
	<b>UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Muara Komam</b>							
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah Sekolah Peserta O2SN SD	19
	<b>UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Muara Komam</b>							
	Festival dan Lomba Seni Tingkat SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah Sekolah Peserta FLS2N	19
	<b>UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Sangkuriman</b>							
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.2. Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini		APK PAUD	57:07:00		
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.2. Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini				Jumlah PAUD yang mendapat binaan	100
	Program Pendidikan Non Formal	2. Prioritas Pendukung I	2.1.3. Meningkatnya Angka Melek Huruf		Persentase Angka Putus Sekolah Masyarakat	0,4875		
	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	2. Prioritas Pendukung I	2.1.3. Meningkatnya Angka Melek Huruf				Jumlah Pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan	100
	Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B dan C	2. Prioritas Pendukung I	2.1.3. Meningkatnya Angka Melek Huruf				Jumlah kelompok program pembelajaran Paket A, B dan C yang terselenggara	100

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Tanah Grogot							
	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah		Persentase unit pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	4		
	Lomba Sains MIPA SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah sekolah peserta Olimpiade Sains Siswa Nasional SD/MI (sekolah)	34
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				umlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (sekolah)	100
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah Sekolah Peserta O2SN SD	34
	Festival dan Lomba Seni Tingkat SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah Sekolah Peserta O2SN SD	34
	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Pendidikan	3. Prioritas Pendukung II	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing		Persentase Komite Sekolah Aktif	60 komite sekolah		
	Lomba Sekolah Sehat	3. Prioritas Pendukung II	2.3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing				Jumlah sekolah peserta Sekolah Sehat (sekolah)	140
	UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Batu Sopang							
	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah		Persentase unit pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	4		
	Lomba Sains MIPA SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah Sekolah Peserta Olimpiade Sains Siswa Nasional SD/MI (Sekolah)	25
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah Ketersediaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (TK & SD)	1 & 22
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah Peserta O2SN ke Tingkat Propinsi (siswa)	250
	Festival dan Lomba Seni Tingkat SD/MI	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah Sekolah Peserta FLS2N (sekolah)	23
	<b>SMPN 1 Pasir Belengkong</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (sekolah)P	1
	<b>SMPN 2 Pasir Belengkong</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah Ketersediaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah	1
	<b>SMPN 3 Pasir Belengkong</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				1. Jumlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (sekolah)	1
	<b>SMPN 4 Pasir Belengkong</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah SMPN 4 Pasir Belengkong	12
	<b>SMPN 5 Pasir Belengkong</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (sekolah)	1
	<b>SMPN 6 Pasir Belengkong</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah Ketersediaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah	1
	<b>SMPN 7 Pasir Belengkong</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1
	<b>SMPN 1 Batu Sopang</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1
	<b>SMPN 2 Batu Sopang</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah				Biaya operasional SMP Negeri 2 Batu Sopang	1
	<b>SMPN 3 Batu Sopang</b>							

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah Ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 4 Batu Sopang</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 1 Batu Engau</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 2 Batu Engau</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar Operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 3 Batu Engau</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah persediaan pemenuhan kebutuhan dasar Operasional Sekolah	23.512.093,64	
	<b>SMPN 4 Batu Engau</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar Operasional Sekolah	34.445.154,99	
	<b>SMPN 5 Batu Engau</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (sekolah)	1	
	<b>SMPN 6 Batu Engau</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 1 Long Kali</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 2 Long Kali</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah Ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 3 Long Kali</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	50.152.756.64	
	<b>SMPN 4 Long Kali</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (sekolah)	1	
	<b>SMPN 5 Long Kali</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	50.152.756.64	
	<b>SMPN 6 Long Kali</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	50.152.756.64	
	<b>SMPN 7 Long Kali</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	50.152.756.64	
	<b>SMPN 1 Long Ikis</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (sekolah)	1	
	<b>SMPN 2 Long Ikis</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 3 Long Ikis</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1	



Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	<b>SMPN 4 Long Ikis</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Biaya Operasional	12 Bulan	
	<b>SMPN 5 Long Ikis</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan Pemenuhan Kebutuhan Dana Operasional	1	
	<b>SMPN 6 Long Ikis</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (sekolah)	1	
	<b>SMPN 7 Long Ikis</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 8 Long Ikis</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah Ketersediaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah	1	
	<b>SMPN 2 Kuaro</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah Ketersediaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah	1	
	<b>SMPN 3 Kuaro</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			jumlah keberhasilan pemenuhan kebutuhan keseluruhan dasar oprasional sekolah	1	
	<b>SMPN 4 Kuaro</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 5 Kuaro</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah Kesediaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah	1	
	<b>SMPN 6 Kuaro</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 1 Muara Komam</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah Ketersediaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (Sekolah)	1:01	
	<b>SMPN 2 Muara Komam</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 3 Muara Komam</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (sekolah)	1	
	<b>SMPN 4 Muara Komam</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (sekolah)	12 Bulan	
	<b>SMPN 1 Muara Samu</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah Ketersediaan Pemenuhan Kebutuhan dasar Operasional Sekolah	37.389.600	
	<b>SMPN 2 Muara Samu</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (sekolah)	1	
	<b>SMPN 1 Tanah Grogot</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (sekolah)	1	
	<b>SMPN 2 Tanah Grogot</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (sekolah)	1	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	<b>SMPN 3 Tanah Grogot</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah	53.812.813	
	<b>SMPN 4 Tanah Grogot</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 5 Tanah Grogot</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah Ketersediaan Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Sekolah	1	
	<b>SMPN 6 Tanah Grogot</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 7 Tanah Grogot</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah Ketersediaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah	1	
	<b>SMPN 8 Tanah Grogot</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 9 Tanah Grogot</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah Ketersediaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 11 Tanah Grogot</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah Ketersediaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah	1	
	<b>SMPN 1 Tanjung Harapan</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 2 Tanjung Harapan</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah Ketersediaan Pemenuhan Dasar Operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 3 Tanjung Harapan</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 4 Tanjung Harapan</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1	
	<b>SMPN 5 Tanjung Harapan</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	1;01	
	<b>SMPN 6 Tanjung Harapan</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (sekolah)	1	
	<b>SLBN Tanah Grogot</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah Ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah	1	
	<b>SMPN 8 Long Kali</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			jumlah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar operasional sekolah	4	
	<b>SMPN 8 Pasir Belengkong</b>							
	Biaya Operasional Sekolah	1.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			jumlah ketersediaan pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Sekolah (sekolah)	1	
	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (A)</b>							
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2. Prioritas Pendukung I	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah		Cakupan kunjungan perpustakaan daerah (orang)	67.500		

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Tumbuhnya Masyarakat Pembelajar	2. Prioritas Pendukung I	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah frekuensi layanan kunjungan perpustakaan keliling	90	
	Peningkatan Layanan Perpustakaan	2. Prioritas Pendukung I	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah Hari Layanan Perpustakaan	365	
	Pengembangan SDM Perpustakaan	2. Prioritas Pendukung I	2.1.1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah			Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan Desa Mendapat Bimbingan Teknis	20	
	<b>Kesehatan</b>							
	<b>Dinas Kesehatan (A)</b>							
	<b>Program Obat dan Perbekalan kesehatan</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>		<b>Cakupan Ketersediaan obat esensial generic di fasilitas kesehatan (pesen)</b>	<b>100</b>		
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase ketersediaan obat dan bahan pakai habis di fasyankes	80	
	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase Puskesmas dilaksanakan Penghitungan dan Distribusi obat dan perbekalan kesehatan	100	
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase Puskesmas Melaksanakan Pencatatan Pelaporan Obat Dengan LPLPO	85	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase puskesmas dilakukan monitoring supervisi program kefarmasian	100	
	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>		<b>Persentase masyarakat yang terlayani nuskemas</b>	<b>80</b>		
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Jumlah Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Khusus	19	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase Ketersediaan Biaya Lembur Jaga Rawat Inap dan UGD 24 jam di Puskesmas	92	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Jumlah Puskesmas Melaksanakan Sistem Informasi Puskesmas	18	
	Biaya Operasional Kesehatan (BOK)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase tersedianya anggaran operasional pelayanan kesehatan	30	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan	100	
	<b>Program Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>		<b>Persentase pengawasan obat dan makanan yang memenuhi syarat</b>	<b>65</b>		
	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	2. Prioritas Pendukung I	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Jajanan, Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga dan Toko Obat diperiksa	45	
	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>		<b>Cakupan rumah tangga yang mendapatkan promosi kesehatan (persen)</b>	<b>74</b>		
	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Ketersediaan Media Promosi dan Informasi Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	45	
	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Cakupan Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	54%	
	Pembinaan dan Pengembangan Desa Siaga	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri	30	
	Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Institusi	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	62%	
	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>		<b>Persentase bayi balita mendapat kapsul vitamin A</b>	<b>76</b>		
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Rumah Tangga Konsumsi Garam Beriodium	98	
	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>		<b>Rumah Tangga ber-PHBS (persen)</b>	<b>70</b>		
	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Desa Tersosialisasi STBM (sanitasi total berbasis masyarakat)	35	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Puskesmas yang Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kondisi Kesehatan Lingkungan di Wilayah Kerjanya	100	
	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>		<b>Cakupan Penanganan penderita penyakit TBC (persen)</b>	<b>74</b>		
	Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Desa Melaksanakan Pemeriksaan Jentik Berkala dan Pengendalian Sarang Nyamuk	60%	
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Jumlah Pasien Filariasis di Rawat , Angka Prevalensi Kusta per 10.000 pddk	20	



Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Pemerataan Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)	28		
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				100	100
	<b>UPTD Puskesmas Pasir Belengkong</b>							
	Program Obat dan Perbekalan kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Cakupan Ketersediaan obat esensial generic di fasilitas kesehatan (pesen)	100		
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				1. Persentase Puskesmas Melaksanakan Pencatatan Pelaporan obat dengan LPLPO	80
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Persentase masyarakat yang terlayani nuskemas	80		
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				1. Rumah Tangga ber-PHBS ( persen)	67
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Cakupan Penanganan penderita penyakit TBC (persen)	74		
	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				1.Cakupan UCI ( persen )	76
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				1. Jumlah Kasus DBD dan malaria ditemukan	200
	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				1. Persentase Penangan kasus KLB	100
	Program Pemerataan Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)	28		
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Persentase kecukupan tenaga kesehatan di desa	100
	<b>UPTD Puskesmas Kuaro</b>							
	Program Obat dan Perbekalan kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Cakupan Ketersediaan obat esensial generic di fasilitas kesehatan (pesen)	100		
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Pengamprahan Obat	12 kali
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Persentase masyarakat yang terlayani nuskemas	80		
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Terlaksananya Pelayanan kesehatan	1 Tahun
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Terlaksananya Pembinaan satgas Desa Siaga	9 kali
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				terlaksananya rujukan pasien	400
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan promosi kesehatan (persen)	74		
	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Penyuluhan PHBS	3 kali
	Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Institusi	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Terlaksananya SMD	1 kali
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Persentase bayi balita mendapat kapsul vitamin A	76		
	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Terlaksananya sweeping vitamin A	1 kali
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Terlaksananya Surveillance gizi	3 kali
	Upaya Peningkatan Gizi Keluarga	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Pelayanan Posyandu	29 kali 12
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Rumah Tangga ber-PHBS (nersen)	70		
	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				STBM	3 kali
	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Terlaksananya Inspeksi TTU	3 kali
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Cakupan Penanganan penderita penyakit TBC (persen)	74		
	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Imunisasi balita di Posyandu	29 kali 12
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Terlaksananya Penjarangan TB	2 kali
	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Peningkatan surveillance	1 kali
	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Terlaksananya Pengukuran Potensi PTM	12 BULAN
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Jumlah Balita berat badan di bawah garis Merah (BGM)	0		

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Lomba Balita Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Lomba Balita tingkat kecamatan	1 kali	
	Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak (SDIDTKA)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			DDTK di Posyandu	29 posyandu 12 kali	
	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>			<b>Persalinan ditolong tenaga kesehatan (persen)</b>	<b>83</b>	
	Pendataan Dan Penjarangan Bayi dan Ibu Hamil	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Pendampingan Ibu hamil Resti	4 kali	
	<b>Program Pemerataan Tenaga Kesehatan</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>			<b>Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)</b>	<b>28</b>	
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Terlaksananya pembayaran tenaga PTT	1 tahun	
	<b>UPTD Puskesmas Long Ikis</b>							
	<b>Program Obat dan Perbekalan kesehatan</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>			<b>Cakupan Ketersediaan obat esensial generic di fasilitas kesehatan (pesen)</b>	<b>100</b>	
	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase Puskesmas dilaksanakan Penghitungan dan Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan	100	
	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>			<b>Persentase masyarakat yang terlayani Puskesmas</b>	<b>80</b>	
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Jumlah Puskesmas dengan tersedianya biaya operasional sebagai pemanfaatan dana kapitasi BPJS	17	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Jumlah Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Khusus	19	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase Ketersediaan Biaya Lembur Jaga Rawat Inap dan UGD 24 jam di Puskesmas	90	
	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>			<b>Cakupan rumah tangga yang mendapatkan promosi kesehatan (persen)</b>	<b>74</b>	
	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Cakupan Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	24	
	Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Institusi	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	60	
	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>			<b>Persentase bayi balita mendapat kapsul vitamin A</b>	<b>76</b>	
	Upaya Peningkatan Gizi Keluarga	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase D/S	72	
	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>			<b>Rumah Tangga ber-PHBS (persen)</b>	<b>70</b>	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Puskesmas yang melakukan monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan lingkungan di wilayah kerja	100	
	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>			<b>Cakupan Penanganan penderita penyakit TBC (persen)</b>	<b>74</b>	
	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	90	
	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penganggulangan Wabah	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Penanganan Kasus KLB	100	
	<b>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>			<b>Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu per 1000 penduduk</b>	<b>1,6</b>	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase Puskesmas yang Memiliki Sarana dan Prasarana di perbaiki dan di kalibrasi	30	
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>			<b>Jumlah Balita berat badan di bawah garis Merah (BGM)</b>	<b>0</b>	
	Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak (SDIDTKA)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Cakupan Kunjungan Bayi	85	
	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>			<b>Persalinan ditolong tenaga kesehatan (persen)</b>	<b>83</b>	
	Perawatan Berkala Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Jumlah Ketersediaan Biaya Operasional pada Rumah Tunggu kelahiran (RTK)	8	
	Pendataan Dan Penjarangan Bayi dan Ibu Hamil	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Data Sasaran bagi Program Kesehatan Keluarga	100	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Penanganan Komplikasi	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatkan derajat kesehatan			Jumlah Puskesmas/Puskesmas pembantu yang melaksanakan Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi ( P4K )	19	
	<b>Program Pemerataan Tenaga Kesehatan</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>	<b>Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)</b>	<b>28</b>			
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase Kecukupan Tenaga Kesehatan di Desa	100	
	<b>UPTD Puskesmas Long Kali</b>							
	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>	<b>Persentase masyarakat yang terlayani puskesmas</b>	<b>80</b>			
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			tersedianya biaya perjalanan dinas rujukan pasien	100	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Meningkatnya masyarakat yang terlayani puskesmas	100	
	<b>Program Pemerataan Tenaga Kesehatan</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>	<b>Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)</b>	<b>28</b>			
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Kecukupan Tenaga Kesehatan di Desa	100	
	<b>UPTD Puskesmas Batu Kajang</b>							
	<b>Program Obat dan Perbekalan kesehatan</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>	<b>Cakupan Ketersediaan obat esensial generic di fasilitas kesehatan (pesen)</b>	<b>100</b>			
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Ketersediaan obat esensial generic di fasilitas kesehatan (pesen)	100	
	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>	<b>Persentase masyarakat yang terlayani puskesmas</b>	<b>80</b>			
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			persentase SKPD yang melayani	90	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase masyarakat yang terlayani puskesmas	100	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase masyarakat yang terlayani puskesmas	90	
	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatkan derajat kesehatan</b>	<b>Cakupan rumah tangga yang mendapatkan promosi kesehatan (persen)</b>	<b>74</b>			
	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatkan derajat kesehatan			Cakupan rumah tangga yang mendapatkan promosi kesehatan (persen)	100	
	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatkan derajat kesehatan</b>	<b>Persentase bayi balita mendapat kapsul vitamin A</b>	<b>76</b>			
	Upaya Peningkatan Gizi Keluarga	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatkan derajat kesehatan			Transport kader dan pelaksanaan posyandu	100	
	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatkan derajat kesehatan</b>	<b>Rumah Tangga ber-PHBS (persen)</b>	<b>70</b>			
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatkan derajat kesehatan			Rumah Tangga ber-PHBS (persen)	90	
	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatkan derajat kesehatan</b>	<b>Cakupan Penanganan penderita penyakit TBC (persen)</b>	<b>74</b>			
	Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatkan derajat kesehatan			Angka penemuan penderita penyakit DBD (kasus)	100	
	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatkan derajat kesehatan			Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	100	
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatkan derajat kesehatan			Cakupan Penanganan penderita penyakit TBC (persen)	100	
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatkan derajat kesehatan</b>	<b>Jumlah Balita berat badan di bawah garis Merah (BGM)</b>	<b>0</b>			
	Lomba Balita Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatkan derajat kesehatan			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (persen)	100	
	<b>Program Pemerataan Tenaga Kesehatan</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>	<b>Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)</b>	<b>28</b>			
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			), Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)	100	
	<b>UPTD Puskesmas Muara Komam</b>							
	<b>Program Obat dan Perbekalan kesehatan</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>	<b>Cakupan Ketersediaan obat esensial generic di fasilitas kesehatan (pesen)</b>	<b>100</b>			
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatkan pelayanan kesehatan primer			Persentase Puskesmas Melaksanakan Pencatatan Pelaporan Obat Dengan LPLPO	100%	
	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>	<b>Persentase masyarakat yang terlayani puskesmas</b>	<b>80</b>			

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Jumlah Puskesmas dengan tersedianya biaya Operasional Sebagai Pemanfaatan Dana Kapitasi BPJS	100	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			1).Persentase masyarakat yang terlayani Puskesmas	-	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase Ketersediaan Biaya Lembur Jaga Rawat Inap & UGD 24 Jam Puskesmas	100%	
	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>		<b>Cakupan rumah tangga yang mendapatkan promosi kesehatan (persen)</b>			
	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			1).Cakupan rumah tangga yang mendapatkan promosi kesehatan (persen)	-	
	Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Institusi	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Terlaksananya pertemuan kader	-	
	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>		<b>Persentase bayi balita mendapat kapsul vitamin A</b>			
	Upaya Peningkatan Gizi Keluarga	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Kegiatan Pelaksanaan Posyandu	9 Posyandu	
	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>		<b>Rumah Tangga ber-PHBS (persen)</b>			
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Terselenggaranya Inspeksi Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan	-	
	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>		<b>Cakupan Penanganan penderita penyakit TBC (persen)</b>			
	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap	-	
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			1).Cakupan Penanganan penderita penyakit TBC (persen)	-	
	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penganggulangan Wabah	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			1).Angka penemuan penderita penyakit DBD (kasus)	-	
	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Terbentuknya imunisasi / kekebalan terhadap penyakit	-	
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>		<b>Jumlah Balita berat badan di bawah garis Merah (BGM)</b>			
	Penyuluhan Kesehatan Anak Balita	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Terselenggaranya Kegiatan Penyuluhan,Pemeriksaan Gigi dan Mulut	100%	
	Stimulasi,Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak ( SDIDTKA )	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Terselenggaranya kegiatan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang	-	
	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>		<b>Persalinan ditolong tenaga kesehatan (persen)</b>			
	Pendataan Dan Penjarangan Bayi dan Ibu Hamil	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			1).Persalinan ditolong tenaga kesehatan (persen)	100%	
	Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Penanganan Komplikasi	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			1).Pelayanan Ibu Nifas (persen)	-	
	<b>Program Pemerataan Tenaga Kesehatan</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>		<b>Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)</b>			
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase Kecukupan Tenaga Kesehatan di Desa	100%	
	<b>UPTD Puskesmas Kerang</b>							
	<b>Program Obat dan Perbekalan kesehatan</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>		<b>Cakupan Ketersediaan obat esensial generic di fasilitas kesehatan (pesen)</b>			
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase Puskesmas Melaksanakan Pencatatan Pelaporan Obat Dengan LPLPO	85	
	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>		<b>Persentase masyarakat yang terlayani nuskemas</b>			
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Jumlah Puskesmas Dengan Tersedia Biaya Operasional Sebagai Pemanfaatan Dana Kapitasi BPJS	19	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Jumlah Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Khusus	19	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase Ketersediaan Biaya Lembur Jaga Rawat Inap dan UGD 24 jam di Puskesmas	92	
	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>		<b>Persentase bayi balita mendapat kapsul vitamin A</b>			
	Upaya Peningkatan Gizi Keluarga	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase D/S	72	



Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Cakupan Penanganan penderita penyakit TBC (persen)	74		
	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	90
	Program Pemerataan Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)	28		
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Persentase Kecukupan Tenaga Kesehatan di Desa	100
	UPTD Puskesmas Tanjung Aru							
	Program Obat dan Perbekalan kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Cakupan Ketersediaan obat esensial generic di fasilitas kesehatan (pesen)	100		
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Puskesmas Melaksanakan Pencatatan Pelaporan Obat Dengan LPLPO	100
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Persentase masyarakat yang terlayani puskesmas	80		
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Terlayannya pelayanan terhadap masyarakat peserta JKN	100
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Khusus	100
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				masyarakat yang terlayani puskesmas	100
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Persentase bayi balita mendapat kapsul vitamin A	76		
	Upaya Peningkatan Gizi Keluarga	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Persentase D/S, Persentase BGM, Persentase 2 T terkontrol dan menurun	100
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Cakupan Penanganan penderita penyakit TBC (persen)	74		
	Penyempotan / Fogging Sarang Nyamuk	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Melaksanakan Pemeriksaan Jentik Berkala dan Pengendalian Sarang Nyamuk	100
	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	100
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Penanganan penderita penyakit TBC	100
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Jumlah Balita berat badan di bawah garis Merah (BGM)	0		
	Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak (SDIDTKA)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Pelayanan Kesehatan Balita	100
	Program Pemerataan Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)	28		
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Kecukupan Tenaga Kesehatan di Desa	100
	UPTD Puskesmas Muara Samu							
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Persentase masyarakat yang terlayani puskesmas	80		
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Jumlah Puskesmas dengan Tersedia Biaya Operasional Sebagai Pemanfaatan Dana kapitasi BPJS	100
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Terlaksananya Rujukan Pasien Ke RSUD	100%
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Persentase bayi balita mendapat kapsul vitamin A	76		
	Upaya Peningkatan Gizi Keluarga	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Persentase D/S	75%
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Cakupan Penanganan penderita penyakit TBC (persen)	74		
	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Terlaksananya Imunisasi Pada bayi, Balita dan Anak Sekolah	80%
	Program Pemerataan Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)	28		
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Persentase Kecukupan Tenaga Kesehatan di Puskesmas	100%
	UPTD Puskesmas Mendik							
	Program Obat dan Perbekalan kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Cakupan Ketersediaan obat esensial generic di fasilitas kesehatan (pesen)	100		
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Terpenuhinya kebutuhan obat/Vaksin Puskesmas dan Pusban	12 bln

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Persentase masyarakat yang terlayani puskesmas	80		
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Tersedianya dana BPJS yang cukup untuk prog.kesehatan	12 bulan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Tersedianya dana untuk Pusling ke desa	12 bulan
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Terpenuhinya biaya perjalanan dinas petugas merujuk pasien	12 bln
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan promosi kesehatan (persen)	74		
	Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Institusi	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Terbinanya kader secara intensif	19 posy
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Persentase bayi balita mendapat kapsul vitamin A	76		
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Tertindakannya Pelayanan Program Gizi di puskesmas	20 Posyandu
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Cakupan Penanganan penderita penyakit TBC (persen)	74		
	Peningkatan Imunisasi	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Tertindakannya kegiatan Imunisasi	12 bulan
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Persalinan ditolong tenaga kesehatan (persen)	83		
	Perawatan Berkala Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Tertindakannya Pelayanan Pemeriksaan Bumil di Posyandu	12 ds/Atd
	Program Pemerataan Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)	28		
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Terpenuhi gaji honor Puskesmas	12 bulan
	UPTD Puskesmas Krayan							
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Persentase masyarakat yang terlayani puskesmas	80		
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Tertindakannya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat secara optimal	12 bulan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Jumlah Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Khusus	100%
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Persentase Ketersediaan Biaya Lembur Jaga Rawat Inap dan UGD 24 jam di Puskesmas	100%
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan promosi kesehatan (persen)	74		
	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Cakupan Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	100%
	Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Institusi	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	100%
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Persentase bayi balita mendapat kapsul vitamin A	76		
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Persentase Cakupan Vitamin A Ibu Nifas	100%
	Upaya Peningkatan Gizi Keluarga	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Persentase D/S	80%
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Rumah Tangga ber-PHBS (persen)	70		
	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Persentase Desa ODF (open defacation free)	100%
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Cakupan Penanganan penderita penyakit TBC (persen)	74		
	Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Persentase Desa Melaksanakan Pemeriksaan Jentik Berkala dan Pengendalian Sarang Nyamuk	100%
	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	12 bulan
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus TB	100%
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Jumlah Balita berat badan di bawah garis Merah (BGM)	0		
	Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak ( SDIDTKA )	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Cakupan Kunjungan Balita	100%
	Program Pemerataan Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)	28		

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase Kecukupan Tenaga Kesehatan di Desa	12 bulan	
	<b>UPTD Puskesmas Kayungo</b>							
	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer	Persentase masyarakat yang terlayani nuskemas	80			
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Jumlah Puskesmas Dengan Tersedianya Biaya Operasional Sebagai Pemanfaatan Dana Kapitasi BPJS	1	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Jumlah Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Khusus	1	
	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan	Persentase bayi balita mendapat kapsul vitamin A	76			
	Upaya Peningkatan Gizi Keluarga	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase D/S / Persentase BGM / Persentase 2 T	1	
	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan	Cakupan Penanganan penderita penyakit TBC (persen)	74			
	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	80	
	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan	Persalinan ditolong tenaga kesehatan (persen)	83			
	Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Penanganan Komplikasi	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang melaksanakan Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K)	1	
	<b>Program Pemerataan Tenaga Kesehatan</b>	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer	Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)	28			
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase Kecukupan Tenaga Kesehatan di Desa	1	
	<b>UPTD Puskesmas Lolo</b>							
	<b>Program Obat dan Perbekalan kesehatan</b>	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer	Cakupan Ketersediaan obat esensial generic di fasilitas kesehatan (pesen)	100			
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase Puskesmas Melaksanakan Pencatatan Pelaporan Obat Dengan LPLPO	80	
	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer	Persentase masyarakat yang terlayani nuskemas	80			
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Jumlah Puskesmas Dengan Tersedia Biaya Operasional Sebagai Pemanfaatan Dana Kapitasi BPJS	19	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Jumlah Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Khusus	19	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase Ketersediaan Biaya Lembur Jaga Rawat Inap dan UGD 24 jam di Puskesmas	92	
	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan promosi kesehatan (persen)	74			
	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Ketersediaan Media Promosi dan Informasi Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	45	
	Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Institusi	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	60	
	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan	Persentase bayi balita mendapat kapsul vitamin A	76			
	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Balita Gizi Kurang ( kurus )	75	
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Rumah Tangga Konsumsi Garam Beriodium	98	
	Upaya Peningkatan Gizi Keluarga	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase D/S	72	
	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan	Rumah Tangga ber-PHBS (persen)	70			
	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Desa Tersosialisasi STBM (sanitasi total berbasis masyarakat)	35	
	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan	Cakupan Penanganan penderita penyakit TBC (persen)	74			
	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	90	
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Angka MF (Mikro Filaria) < 1	< 1	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Peningkatan Imunisasi	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	90	
	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Persentase Penanganan Kasus KLB	100	
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>		Jumlah Balita berat badan di bawah garis Merah (BGM)	0		
	Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak (SDIDITKA)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Cakupan Kunjungan Bayi	85	
	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>		Persalinan ditolong tenaga kesehatan (persen)	83		
	Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Penanganan Komplikasi	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang melaksanakan Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K)	19	
	<b>Program Pemerataan Tenaga Kesehatan</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>		Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)	28		
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase Kecukupan Tenaga Kesehatan di Desa	100	
	<b>UPTD Puskesmas Padang Pengrapat</b>							
	<b>Program Obat dan Perbekalan kesehatan</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>		Cakupan Ketersediaan obat esensial generic di fasilitas kesehatan (pesen)	100		
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Tertaksananya pengambilan vaksin ke Kabupaten	12 Bulan	
	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>		Persentase masyarakat yang terlayani nuskemas	80		
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Tertaksananya pelayanan jaminan kesehatan secara total	12 Bulan	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Terpenuhinya bahan bakar roda 4 (Empat) saranapenunjang kegiatan	12 Bulan	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Tertaksananya kegiatan Monev (Monitor dan Evaluasi) Ke Pusban dan Polindes	20 kali	
	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>		Persentase bayi balita mendapat kapsul vitamin A	76		
	Upaya Peningkatan Gizi Keluarga	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Tertaksananya Pelayanan Kegiatan Posyandu	12 Bulan	
	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>		Rumah Tangga ber-PHBS (persen)	70		
	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Tertaksananya Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	3 Desa	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Tertaksananya Pengawasan Sarana Air Bersih, Rumah Sehat dan Jamban Keluarga	3 Desa	
	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>		Cakupan Penanganan penderita penyakit TBC (persen)	74		
	Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Tertaksananya Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) Dan Abatesasi	3 kali	
	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Tertaksananya kegiatan imunisasi dan BIAS	3 desa 5 SD	
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>		Jumlah Balita berat badan di bawah garis Merah (BGM)	0		
	Lomba Balita Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Tertaksananya Kegiatan Lomba Balita	1 kali	
	Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak (SDIDITKA)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Tertaksananya Kegiatan DDTK Apras	2 kali	
	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan</b>		Persalinan ditolong tenaga kesehatan (persen)	83		
	Perawatan Berkala Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Tertaksananya kegiatan kunjungan DO K4	1 kali	
	<b>Program Pemerataan Tenaga Kesehatan</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>		Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)	28		
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Terbayarnya Honor / Upah Tenaga Honor	12 Bulan	
	<b>UPTD Puskesmas Suliliran Baru (Payo Klato 1 / SP 1)</b>							
	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>		Persentase masyarakat yang terlayani nuskemas	80		
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat secara maksimal	8 desa	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Luar Gedung	12 bulan	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			terselenggaranya kegiatan rujukan pasien	200 orang	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Pemerataan Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)	28		
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Terpenuhinya tenaga honor di puskesmas, pusban dan polindes	100
	UPTD Puskesmas Suatung Baru (Payo Klato 2 / SP 2)							
	Program Obat dan Perbekalan kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Cakupan Ketersediaan obat esensial generic di fasilitas kesehatan (pesen)	100		
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Puskesmas Melaksanakan Pencatatan Pelaporan Obat Dengan LPLPO	28 kl
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Persentase masyarakat yang terlayani nuskemas	80		
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Tercapainya standar pelayanan minimal kesehatan maskin	4000 Jiwa
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Khusus	459 jiwa
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				erlaksananya Rujukan untuk Pasien	72 rujukan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Persentase bayi balita mendapat kapsul vitamin A	76		
	Upaya Peningkatan Gizi Keluarga	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Persentase D/S	510 balita
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Cakupan Penanganan penderita penyakit TBC (persen)	74		
	Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Persentase Desa Melaksanakan Pemeriksaan Jentik Berkala dan Pengendalian Sarang Nyamuk	100
	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	100
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus TB	100
	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Persentase Penanganan Kasus KLB	100
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Jumlah Balita berat badan di bawah garis Merah (BGM)	0		
	Lomba Balita Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Persentase Pelaksanaan LBSI Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten	100
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Persalinan ditolong tenaga kesehatan (persen)	83		
	Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Penanganan Komplikasi	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan				Persentase Data Sasaran bagi Program Kesehatan Keluarga	100
	Program Pemerataan Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)	28		
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Persentase Kecukupan Tenaga Kesehatan di Desa	100
	UPTD Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan							
	Program Obat dan Perbekalan kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Cakupan Ketersediaan obat esensial generic di fasilitas kesehatan (pesen)	100		
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Persentase Ketersediaan Obat dan Bahan	80
	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Persentase Puskesmas dilaksanakan penghitungan dan Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan	90
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Tertaksananya pemusnahan obat	80
	Monitoring, Evaluasi dan Laporan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Persentase Puskesmas dilakukan monitoring program kefarmasian	80
	Program Pemerataan Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)	28		
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				Persentase Kecukupan Tenaga Kesehatan	100
	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah							
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer		Persentase masyarakat yang terlayani nuskemas	80		
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer				1. Terpenuhinya bahan bakar/ gas dan pelumas	12 bulan
	Program Program Pengawasan Obat dan Makanan	2. Prioritas Pendukung I	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan		Persentase pengawasan obat dan makanan yang memenuhi syarat	65		

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	2. Prioritas Pendukung I	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Terlaksananya pengawasan keamanan dan kesehatan makanan Industri kecil	100 sampel	
	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	2. Prioritas Pendukung I	2.5.1. Meningkatnya derajat kesehatan			Terlaksananya pengawasan air damiu dan air bersih masyarakat	60 sampel	
	<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>2.6.1. Berkembangnya Pelayanan Kesehatan yang berdaya saing</b>		<b>Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar Kompetensi</b>	<b>75</b>		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2. Prioritas Pendukung I	2.6.1. Berkembangnya Pelayanan Kesehatan yang berdaya saing			Terlaksananya Pemantauan hasil pemeriksaan laboratorium melalui Pemantapan Mutu Eksternal (PME) sebagai salah satu persyaratan akreditasi	6 Paket	
	<b>Program Pemerataan Tenaga Kesehatan</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>		<b>Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)</b>	<b>28</b>		
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			tersedianya tenaga untuk pelayanan pemeriksaan di laboratorium kesehatan daerah	100%	
	<b>UPTD Jaminan Kesehatan Daerah</b>							
	<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>2.6.1. Berkembangnya Pelayanan Kesehatan yang berdaya saing</b>		<b>Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar Kompetensi</b>	<b>75</b>		
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	2. Prioritas Pendukung I	2.6.1. Berkembangnya Pelayanan Kesehatan yang berdaya saing			Jumlah Penduduk di Kabupaten Paser Menjadi Peserta BPJS Kesehatan (jiwa)	48.745	
	<b>UPTD Puskesmas Sebakung Taka</b>							
	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>		<b>Persentase masyarakat yang terlayani puskesmas</b>	<b>80</b>		
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Jumlah Puskesmas dengan tersedia biaya operasional sebagai pemanfaatan dana kapitasi BPJS	100	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase Ketersediaan Biaya Lembur Jaga Rawat Inap dan UGD 24 jam di Puskesmas	100	
	<b>Program Pemerataan Tenaga Kesehatan</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>		<b>Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)</b>	<b>28</b>		
	Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Persentase Kecukupan Tenaga Kesehatan di Desa	100	
	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya</b>							
	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>2.6.1. Berkembangnya Pelayanan Kesehatan yang berdaya saing</b>		<b>Tipe Rumah Sakit</b>	<b>B</b>		
	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	2. Prioritas Pendukung I	2.6.1. Berkembangnya Pelayanan Kesehatan yang berdaya saing			Jumlah Pelayanan yang Terakreditasi	12 Pelayanan	
	<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakti/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>	<b>1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer</b>		<b>Persentase Kecukupan Jaringan Utilitas Kawasan Rumah Sakit</b>	<b>70</b>		
	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			jumlah bangunan yang terehabilitai	100%	
	Pengadaan Sistem Informasi Rumah Sakit (Billing Sistem)	1.3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	2.4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer			Tersedianya sistem komputerisasi Rumah sakit	100%	
	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (B)</b>							
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Publik (khusus Dinas PUTR)</b>	<b>3. Prioritas Pendukung II</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Jumlah sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik</b>	<b>115</b>		
	Peningkatan/Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga	3. Prioritas Pendukung II	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedia Bangunan Olah raga	1	
	Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	3. Prioritas Pendukung II	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Data Eksisting Kondisi Bangunan dan Lingkungan serta Rencana Program Pengendalian Bangunan dan Lingkungan	2 lokasi	
	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	3. Prioritas Pendukung II	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Data Eksisting Kondisi Bangunan dan Lingkungan serta Rencana Program Pengendalian Pemukiman	2 Lokasi	
	Penyusunan Database Bangunan Gedung	3. Prioritas Pendukung II	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Data Base Bangunan Gedung Kab paser	2 Lokasi	
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik	3. Prioritas Pendukung II	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik	7Paket	
	<b>Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan</b>	<b>1. Prioritas Utama</b>	<b>1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan</b>		<b>Panjang Jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten (Km)</b>	<b>162</b>		
	Pembangunan Jalan dan Jembatan - Multi Years	1. Prioritas Utama	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan			Ruas jalan	26 Paket	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan	1. Prioritas Utama	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan		Persentase jembatan kondisi baik	75		
	Pembangunan Jembatan	1. Prioritas Utama	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan				Panjang Jembatan yg di bangun	43
	Program Perencanaan Tata Ruang	2. Prioritas Pendukung I	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya		Cakupan kawasan yang sudah memiliki Perda RDTR	6		
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan	2. Prioritas Pendukung I	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya				Jumlah Dokumen Rencana RDTR	1
	Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang	2. Prioritas Pendukung I	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya				Jumlah Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Tanah Grogot	5 Buku
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan	1. Prioritas Utama	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan		Panjang Jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten (Km)	162		
	Pembangunan Jalan Tahun Tunggol	1. Prioritas Utama	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan				Panjang Jalan yang terbangun	20 KM
	Program Perencanaan Tata Ruang	2. Prioritas Pendukung I	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya		Cakupan kawasan yang sudah memiliki Perda RDTR	6		
	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	2. Prioritas Pendukung I	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya				Terkoordinasinya RTR	1 tahun
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan	1. Prioritas Utama	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan		Panjang Jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten (Km)	162		
	Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan	1. Prioritas Utama	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan				Ruas Jalan	37 Paket
	Program Perencanaan Tata Ruang	2. Prioritas Pendukung I	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya		Cakupan kawasan yang sudah memiliki Perda RDTR	6		
	Survey dan Pemetaan	2. Prioritas Pendukung I	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya				Jumlah Dokumen Ssistem informasi geografi struktur ruang kawasan perkotaan	1 dokumen
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2. Prioritas Pendukung I	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya		Cakupan penggunaan kawasan yang sesuai Perda RTRW dan RDTR	2		
	Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2. Prioritas Pendukung I	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya				Jumlah pakeet kegiatan	1
	Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Tata Ruang	2. Prioritas Pendukung I	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya				Jumlah Paket Kegiatan	1
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab./ Kota	2. Prioritas Pendukung I	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya				Jumlah paket Kegiatan	1
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2. Prioritas Pendukung I	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Paser	5 Buku
	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	1. Prioritas Utama	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan		Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi darurat yang ditangani	100		
	Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat	1. Prioritas Utama	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan				Panjang Jalan yang terpelihara dalam tanggap darurat	10 KM
	Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat	1. Prioritas Utama	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan				Panjang/Jumlah Jembatan yang terpelihara dalam tanggap darurat	20 KM
	Program Peningkatan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan	3. Prioritas Pendukung II	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan		Persentase data jalan dan jembatan yang telah termuat di dalam Sistem	100		
	Penyusunan data Base Jalan dan Jembatan	3. Prioritas Pendukung II	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan				Jumlah Dokumen Data Base Jalan dan Jembatan	10 buku
	UPTD Laboratorium Pengujian Bahan dan Materi							
	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	1. Prioritas Utama	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan		Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi darurat yang ditangani	100		
	Pengujian Laboratorium	1. Prioritas Utama	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan				Terlaksananya Pengujian Laboratorium	12 bulan
	UPTD Peralatan dan Pengelolaan Alat Berat							
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat -alat Berat	1. Prioritas Utama	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan				Terpeliharanya Alat Berat	9 Unit
	UPTD PU Wilayah I							
	Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat	1. Prioritas Utama	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan				Jalan yg Terpeliharaan	1 Tahun
	UPTD PU Wilayah II							
	Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat	1. Prioritas Utama	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan				Jalan dan Jembatan wilayah 2 yg ter pelihara	1 tahun

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	
	UPTD PU Wilayah III								
	Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat	1. Prioritas Utama	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan				Pemeliharaan Ruas jalan	1 Tahun	
	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (D)</b>								
	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	3. Prioritas Pendukung II	1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat		Persentase areal pemakaman ber kondisi baik	48			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	3. Prioritas Pendukung II	1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat				Persentase areal pemakaman ber kondisi baik	-	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	3. Prioritas Pendukung II	1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat				Persentase areal pemakaman ber kondisi baik	48	
	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman</b>	2. Prioritas Pendukung I	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan		Persentase jalan perdesaan dalam kondisi baik	70			
	Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi (PISEW)	2. Prioritas Pendukung I	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan				Pendampingan Biaya Operasional Program Nasional (Tahun Anggaran 2017)	-	
	Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	2. Prioritas Pendukung I	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan				Pendampingan Biaya Operasional Program Nasional (Tahun Anggaran 2017)	-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan	2. Prioritas Pendukung I	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan				Drainase dan Jalan Lingkungan yang dibangun (m)	-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan	2. Prioritas Pendukung I	1.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan Jembatan				-	-	
	<b>Dinas Sosial (A)</b>								
	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	3. Prioritas Pendukung II	1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat		Persentase areal pemakaman ber kondisi baik	48			
	Pengembangan Sarana Taman Makam Pahlawan	3. Prioritas Pendukung II	1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat				Persentase Sarana Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara (%)	100	
	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (A)</b>								
	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	2. Prioritas Pendukung I	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya		Cakupan kawasan yang sudah memiliki Perda RDTR	6			
	Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser	2. Prioritas Pendukung I	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya				Updating Dokumen RTRW Kabupaten Paser	1	
	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>								
	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (B)</b>								
	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</b>	1.4. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air bersih	1.3.1. Meningkatnya akses air bersih		Jumlah desa yang memiliki sarana penampungan air baku	7			
	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.4. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air bersih	1.3.1. Meningkatnya akses air bersih				Jumlah dokumen	1	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1.4. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air bersih	1.3.1. Meningkatnya akses air bersih				Jumlah dokumen	1	
	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (D)</b>								
	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	1.6. Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak (Rumah Layak Huni)	1.4.1. Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana		Jumlah rumah layak huni yang terbangun (unit)	3444			
	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	1.6. Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak (Rumah Layak Huni)	1.4.1. Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana				Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi	25	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan	1.6. Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak (Rumah Layak Huni)	1.4.1. Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana				Update Dokumen Data Pembangunan Perumahan	-	
	Sosialisasi Pembangunan Perumahan dan Lembaga/Badan Usaha	1.6. Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak (Rumah Layak Huni)	1.4.1. Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana				Jumlah Pengembang yang mengikuti Sosialisasi	-	
	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	1.6. Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak (Rumah Layak Huni)	1.4.1. Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana				Jumlah Rumah yang dibangun	3444	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	1.6. Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak (Rumah Layak Huni)	1.4.1. Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana				Jumlah rumah layak huni yang terbangun (unit)	-	
	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	2. Prioritas Pendukung I	1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (RSU)	74			
	Penyusunan Data Base Rumah	2. Prioritas Pendukung I	1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat				Jumlah Data Base Rumah (Dokumen)	-	



Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Perbaikan Lingkungan Perumahan	2. Prioritas Pendukung I	1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat				Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman yang dibangun (m)	-
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku (Non PDAM)	1.4. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air bersih	1.3.1. Meningkatnya akses air bersih		Cakupan desa yang telah memiliki sarana pengolahan air bersih (persentase)	50		
	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	1.4. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air bersih	1.3.1. Meningkatnya akses air bersih				Air Minum dan Sanitasi yang disediakan bagi Masyarakat (Desa)	-
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku (PDAM)	1.4. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air bersih	1.3.1. Meningkatnya akses air bersih		Persentase Desa yang terjangkau Jaringan Air Bersih PDAM	53		
	Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah	1.4. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air bersih	1.3.1. Meningkatnya akses air bersih					-
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik							
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (SDM & Sarpras)	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk (Orang)	890		
	Fasilitasi FKPMKT/FKDM	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah peserta Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat	25
	Operasional Komunitas Intelejen Daerah	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah dokumen yang dihasilkan	12 Dokumen
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	3. Prioritas Pendukung II	5.2.1. Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban masyarakat		Jumlah forum adat atau agama dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	12 forum		
	Perkuatan Wawasan Kebangsaan	3. Prioritas Pendukung II	5.2.1. Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban masyarakat				Jumlah kecamatan yang terdapat kegiatan sosialisasi wasbang	1 Kecamatan
	Perkuatan Ideologi Negara	3. Prioritas Pendukung II	5.2.1. Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban masyarakat				Jumlah peserta kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat tentang ideologi bangsa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	50 Peserta
	Pendidikan Politik Masyarakat (pileg & pilpres)	3. Prioritas Pendukung II	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik		Tingkat Partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pileg/ Pilpres/ Pilkada (persen)			
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan ( Monev Bantuan Parpol)	3. Prioritas Pendukung II	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik				Jumlah Dokumen Bantuan Keuangan Parpol yang diverifikasi	10
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu/ Pileg/ Pilpres/ Pilkada	3. Prioritas Pendukung II	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik				Prosentase Tingkat Partisipasi Pemilih	75%
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (konteks aduan masyarakat)	3. Prioritas Pendukung II	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik		Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi yang mendapatkan pembinaan pembangunan	4		
	Pembinaan Ormas	3. Prioritas Pendukung II	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik				Jumlah Dokumen Verifikasi dan Penghimpunan data Parpol, Ormas, LSM, dan Lembaga adat	102 Dokumen
	Satuan Polisi Pamong Praja (B)							
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Operasi/Patroli)	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk (Orang)	76		
	Penjagaan Aset Daerah	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				-	-
	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Terbentuknya Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	10
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				terselenggaranya kegiatan sosialisasi PERDA	30
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (SDM & Sarpras)	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk (Orang)	890		
	Peringatan HUT Satpol PP Se Kaltim	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Terlaksananya Kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Provinsi dan Kabupaten	-
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Operasi/Patroli)	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk (Orang)	76		
	Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Pelanggaran Perda	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				-	-
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (SDM & Sarpras)	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk (Orang)	890		
	Peningkatan sinergis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Terlaksananya peningkatan sinergis PPNS	10
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Operasi/Patroli)	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk (Orang)	76		

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Pengamanan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional / Daerah / Keagamaan dan Obyek Wisata	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			-	-	
	Penertiban PKL ( Pedagang Kaki Lima )	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			-	-	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Anggota Linmas	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	
	Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Satpol PP Kab. Paser dengan SatPol PP Kecamatan	-	
	Operasional Linmas dan Kesiapsiagaan Linmas	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			-	-	
	Penanganan Gangguan Keamanan	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			-	-	
	Penanggulangan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			-	-	
	Pengawasan dan Penegakan Perda	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			-	-	
	Pemusnahan Barang Bukti	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			-	--	
	Pengawasan Kunjungan Bupati / Wakil dan Pejabat Daerah	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			-	-	
	Pengamanan Pemilu ( Pilkadaes )	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Terlaksananya Pengamanan Pra dan Pasca Pemilihan Kepala Desa	-	
	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>Jumlah sarana/prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai standar (Unit)</b>	<b>1</b>		
	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah sektor WMK dan unit pemadam kebakaran	18	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Sektor WMK dan Unit Pemadam Kebakaran	-	
	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>							
	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	<b>3. Prioritas Pendukung II</b>	<b>5.2.3. Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam</b>		<b>Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP dan SOP)</b>	<b>70%</b>		
	Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	3. Prioritas Pendukung II	5.2.3. Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam			Jumlah monitoring daerah rawan bencana	-	
	Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	3. Prioritas Pendukung II	5.2.3. Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam			Jumlah anggota tim reaksi cepat	113	
	Pelayanan Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana	3. Prioritas Pendukung II	5.2.3. Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam			Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP dan SOP)	-	
	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	3. Prioritas Pendukung II	5.2.3. Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam			Jumlah dokumen monitoring pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	-	
	<b>Dinas Sosial (A)</b>							
	<b>Program Penanggulangan Korban Bencana Sosial</b>	<b>3. Prioritas Pendukung II</b>	<b>5.2.2. Meningkatnya akses bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana sosial</b>		<b>Persentase korban bencana sosial yang menerima bantuan sosial</b>	<b>100</b>		
	Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi Warga yang Mengalami Bencana Kekeringan	3. Prioritas Pendukung II	5.2.2. Meningkatnya akses bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana sosial			Jumlah korban bencana kekeringan yang mendapat bantuan air bersih (KK)	35	
	Penanganan Masalah -masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	3. Prioritas Pendukung II	5.2.2. Meningkatnya akses bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana sosial			Jumlah Korban Bencana Alam/Sosial yang Mendapatkan Bantuan Logistik (KK)	50	
	<b>Sosial</b>							
	<b>Dinas Sosial (A)</b>							
	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>	<b>3. Prioritas Pendukung II</b>	<b>5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat</b>		<b>Persentase KK miskin yang menerima bantuan sosial</b>	<b>88</b>		
	Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat			Jumlah KK Miskin yang Mendapatkan Pembinaan dan Pelatihan Berusaha (KK)	300	
	Pemetaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat			Persentase Warga KAT yang Mendapat Pembinaan (%)	100	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Rastra	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat			Jumlah penyaluran beras sejahtera yang diawasi ( Kg )	2.744.520	
	Pembinaan dan Pengelolaan Program Keluarga Harapan	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat			Persentase RSTM Peserta PKH yang Mendapat Bantuan (%)	100	
	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat			Jumlah Pengiriman Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Janda Miskin yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	10	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Pembinaan Anak Terlantar	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat		Persentase anak terlantar yang menerima pembinaan	100		
	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan , Anak Cacat dan Anak Nakal	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat				Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar yang Mendapat Jaminan Sosial (Orang)	10
	Pengiriman ke Panti Sosial dan Pendidikan Anak Terlantar, Yatim dan Yatim Piatu	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat				Jumlah Anak (terlantar, yatim, yatim piatu) yang dikirim dan Melanjutkan Pendidikan (Orang)	10
	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat		Persentase penyandang disabilitas yang telah menerima jaminan sosial	88		
	Rehabilitasi Penyandang Cacat Fisik Tetap	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat				Jumlah Penyandang Cacat Fisik Tetap yang Menerima Bantuan (Orang)	5
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat		Cakupan eks peyandang penyakit sosial yang menerima pembinaan	330 Orang		
	Pemulangan Penyandang Masalah Sosial ( PMKS ) ke daerah asalnya	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat				Jumlah PMKS (eks narapida, gepeng, tuna susila (PSK) dan pengemis) yang dipulangkan ke daerah asalnya (Orang)	10
	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penderita Sakit Jiwa	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat				Jumlah Penderita Sakit Jiwa yang Rehabilitasi (Orang)	29
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat		Cakupan organisasi kesejahteraan sosial yang mendapatkan pembinaan	100		
	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat				Jumlah KUBE yang menerima bantuan (kelompok)	2
	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat				Jumlah TKS, Karang Taruna, PSM, pengurus LK3, dan pengurus LKKS mendapat bantuan (Orang)	100
	Sosialisasi Integrasi dan Keserasian Sosial	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat				Jumlah Desa yang Mendapatkan Sosialisasi Integrasi dan Keserasian Sosial/Daerah Konflik (Desa)	1
	Pembinaan Teknis dan Pematapan Kesiagaan bagi Anggota Tagana	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat				Jumlah Tagana yang telah mendapatkan Pembinaan Teknis (Orang)	2
	Sosialisasi Perda tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan UGB	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat				Jumlah Peserta Sosialisasi Perda UGB (Orang)	100
	<b>UPTD Panti Wreda Bulau Sayang</b>							
	Program Pembinaan Panti Jompo	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat		Persentase warga panti jompo yang menerima pembinaan	100		
	Pemeliharaan dan Perawatan Lanjut Usia dalam Panti Jompo	3. Prioritas Pendukung II	5.2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat				jumlah lanjut usia yang dipelihara dan menerima jaminan sosial	10
	<b>Urusan Wajib</b>							
	<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>							
	<b>Tenaga Kerja</b>							
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (A)							
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2. Prioritas Pendukung I	3.3.5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	0,12777778		
	Peningkatan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	2. Prioritas Pendukung I	3.3.5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja				Jumlah Pencari Kerja yang yang terlatih	65
	Penempatan Pemagangan Tenaga Kerja	2. Prioritas Pendukung I	3.3.5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja				Jumlah Penempatan Pemagangan Tenaga kerja	65
	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan	3. Prioritas Pendukung II	3.3.5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja		Persentase perusahaan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	10		
	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	3. Prioritas Pendukung II	3.3.5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja				Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial sampai tingkat Perjanjian Bersama	35
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	3. Prioritas Pendukung II	3.3.5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja				Jumlah perusahaan yang telah mendapat sosialisasi	25
	Penyusunan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten ( UMK )	3. Prioritas Pendukung II	3.3.5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja				Rekomendasi Upah Minum Kabupaten (UMK)	3

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Penempatan Tenaga Kerja	2. Prioritas Pendukung I	3.3.5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	30		
	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	2. Prioritas Pendukung I	3.3.5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja				Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui sistem antar kerja (Orang)	600
	Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2. Prioritas Pendukung I	3.3.5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja				Jumlah TKA yang memperpanjang IMTA (Orang)	40
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Bimbang Jabatan Bagi Pencari Kerja	2. Prioritas Pendukung I	3.3.5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja				Jumlah pencari kerja yang mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan (Orang)	50
	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	2. Prioritas Pendukung I	3.3.5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja				Laporan penyusunan dan penyebarluasan IPK I (Buku)	12
	Peyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	2. Prioritas Pendukung I	3.3.5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja				Jumlah Informasi Lowongan Kerja (Pasar Kerja)	4
	UPTD Balai Latihan Kerja							
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2. Prioritas Pendukung I	3.3.5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	0,12777778		
	Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelaksanaan Pelatihan Kerja	2. Prioritas Pendukung I	3.3.5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja				Laporan hasil monitoring dan evaluasi	2
	Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	2. Prioritas Pendukung I	3.3.5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja				Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (orang)	32
	Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan	2. Prioritas Pendukung I	3.3.5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja				Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan (Orang)	32
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	3. Prioritas Pendukung II	5.1.2. Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan		Persentase lembaga pengarusutamaan gender yang mendapatkan pembinaan	100		
	Penyusunan Kebijakan PUG di Daerah	3. Prioritas Pendukung II	5.1.2. Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan				Tersedianya Dokumen Draft Naskah Akademik PUG di Daerah	1
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (kekerasan perempuan)	3. Prioritas Pendukung II	5.2.5. Meningkatnya perlindungan bagi perempuan		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	80		
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	3. Prioritas Pendukung II	5.2.5. Meningkatnya perlindungan bagi perempuan				1. Jumlah korban yang mendapat pelayanan dan penanganan terhadap kasus KDRT di Kabupaten Paser	30
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	3. Prioritas Pendukung II	5.1.2. Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan		Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor formal non-pertanian	54		
	Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	3. Prioritas Pendukung II	5.1.2. Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan				Tereksposnya Hasil Karya Perempuan Dalam Bidang Pembangunan	5
	Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan Dalam Pembentukan dan Pembinaan Desa Prima	3. Prioritas Pendukung II	5.1.2. Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan				1. Jumlah desa prima terbentuk dan mendapatkan pembinaan	7
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (kekerasan anak)	3. Prioritas Pendukung II	5.2.6. Meningkatnya pemenuhan hak anak		Persentase kasus kekerasan anak yang ditangani	80		
	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	3. Prioritas Pendukung II	5.2.6. Meningkatnya pemenuhan hak anak				Cakupan pelaksanaan HAN	1
	Pembinaan,Advokasi Dan Evaluasi Forum Anak	3. Prioritas Pendukung II	5.2.6. Meningkatnya pemenuhan hak anak				Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan & Movev Forum Anak	10
	Peningkatan Upaya Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	3. Prioritas Pendukung II	5.2.6. Meningkatnya pemenuhan hak anak				1. Jumlah Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum melalui Proses Diversi	30
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (layak anak)	2. Prioritas Pendukung I	5.2.6. Meningkatnya pemenuhan hak anak		Kabupaten Layak Anak (%)	80		
	Pengembangan Model Kabupaten Layak Anak	2. Prioritas Pendukung I	5.2.6. Meningkatnya pemenuhan hak anak				1. Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan menuju ramah dan layak anak	100
	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	2. Prioritas Pendukung I	5.2.6. Meningkatnya pemenuhan hak anak				Jumlah anggota lembaga / organisasi yang tergabung dalam GT KLA yang membidangi perempuan dan Anak yang mendapatkan pembinaan	50
	<b>Lingkungan Hidup</b>							

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPR)								
	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat</b>		<b>Persentase RTH yang berkondisi baik</b>	<b>21</b>			
	Penyusunan program pengembangan RTH	2. Prioritas Pendukung I	1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat				Penyusunan Program Pengembangan RTH	-	
	Penataan RTH	2. Prioritas Pendukung I	1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat				Tertatanya RTH yang berkondisi baik	26,59%	
	Pemeliharaan RTH	2. Prioritas Pendukung I	1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat				Persentase RTH yang berkondisi baik	-	
	Pengembangan Taman Rekreasi	2. Prioritas Pendukung I	1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat				Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan Taman Rekreasi/Persentase RTH yang berkondisi baik	1	
	<b>Dinas Lingkungan Hidup (A)</b>								
	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat</b>		<b>Cakupan ibukota kecamatan yang sudah memiliki fasilitas pengelolaan sampah</b>	<b>2 IKK</b>			
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	2. Prioritas Pendukung I	1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat				Jumlah IKK yang memiliki Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (Unit)	1	
	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	2. Prioritas Pendukung I	1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat				Persentase Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Persampahan yang Berkondisi Baik	35,86	
	Pengembangan Teknologi Pengolahan Pesampahan	2. Prioritas Pendukung I	1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat				Jumlah IKK Sampah yang Berdaya Guna (Unit)	1	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Pelaksanaan Reduce, Reuce, dan Recyle melalui Bank Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA	2. Prioritas Pendukung I	1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat				Jumlah Dokumen Renstra	0	
	Pembinaan Pelaksanaan 3R (Reduce, Reuce, Recycle)	2. Prioritas Pendukung I	1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat				Persentase Volume Sampah yang Terangkut dari TPS ke TPA	4,06	
	Pembinaan Pelaksanaan 3R (Reduce, Reuce, Recycle)	2. Prioritas Pendukung I	1.4.2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat				Jumlah Kawasan Binaan yang Melakukan Kegiatan 3R di Sumber	5	
	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup</b>		<b>Nilai Status Lingkungan Hidup Daerah (%)</b>	<b>70,5</b>			
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup				Jumlah Titik Pemantauan Sungai dan Laut	40	
	Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Lahan Akses Terbuka	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup				Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Lahan Akses Terbuka	35	
	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup				Jumlah Perusahaan yang Melakukan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	15	
	Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup				Jumlah Dokumen Data IKLH	1	
	Koordinasi Penyusunan ANDAL	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup				Jumlah Dokumen AMDAL bagi Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Dinilai	10	
	Inventarisasi Parameter penentuan Baku Mutu Sumber Pencemaran	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup				Terkendalnya sumberpencemaran pada badan air dan udara	15 titik	
	Koordinasi Penyusunan UKL-UPL dan SPPL	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup				Meningkatnya Standar Pelayanan di Bidang BLH	15	
	Evaluasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS )	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup				Tersusunnya Dokumen KLHS	1	
	Pengawasan Tindak lanjut Rekomendasi hasil evaluasi penerima ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup				Jumlah Tindak lanjut rekomendasi evaluasi penerima ijin lingkungan dan ijin perlindungan	1	
	Pengawasan terhadap penerima ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup				Nilai Status Lingkungan Hidup Daerah (%)	64,96	
	Penilaian Ketaatan Pengelolaan Lingkungan	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup				Jumlah Perusahaan yang dilakukan Penilaian Ketaatan Lingkungan	10	
	Pemantauan Pelaksanaan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup				Jumlah Pemantauan Pelaksanaan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL bagi Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	35	
	Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat (Pos Pengaduan)	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup				Persentase Tindak Lanjut dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	100	
	Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup				Jumlah Dokumen SPM sebagai Acuan Kinerja Pelayanan Publik	1	
	Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup				Jumlah Perusahaan yang Dimonitor dan Dievaluasi	6	
	Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup				Jumlah Titik Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air	15	
	Penilaian Sekolah Hijau/Adiwiyata	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup				Jumlah Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	32	
	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup</b>		<b>Persentase luasan kawasan lindung terhadap luasan kabupaten</b>	<b>21,5</b>			
	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup				Jumlah Titik Pantau Kondisi Pesisir	3	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup			Jumlah Nurseri Pembibitan Konservasi	2	
	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup			Jumlah Dokumen Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	1	
	Inventarisasi dan Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup			Persentase luasan kawasan lindung terhadap luasan kabupaten	17,36	
	Pemantauan, Pengawasan dan Koordinasi Perlindungan Sumber daya alam	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup			Persentase luasan kawasan lindung terhadap luasan kabupaten	1	
	Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) dan Website Lingkungan Hidup Daerah	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup			Jumlah Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) dan Website LH Kab. Paser	1	
	Pembangunan Taman KEHATI	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup			Jumlah Taman KEHATI yang Ditangani (Unit)	1	
	Kalpataru	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup			Jumlah Orang yang Dinilai dan Dibina sebagai Calon Penerima Penghargaan Kalpataru	2	
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup ( SLHD )	2. Prioritas Pendukung I	3.5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup			Peningkatan Kualitas Data Dasar SLHD	19	
	<b>Program Pengelolaan TAHURA</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi</b>		<b>Tingkat kelestarian TAHURA 66 (%)</b>			
	Identifikasi dan Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	2. Prioritas Pendukung I	3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi			Terpetaknya daerah rawan kebakaran hutan dan lahan	Dokumen	
	Identifikasi dan Inventarisasi Keaneekaragaman Hayati di TAHURA	2. Prioritas Pendukung I	3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi			Terinventarisirnya keanekaragaman hayati di Tahura	Dokumen	
	Pengadaan dan Penanaman Bibit Tanaman Asli Kalimantan dan Luar Kalimantan	2. Prioritas Pendukung I	3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi			Tersedianya Bibit dan Penanaman Pengkayaan Tahura Lati Petangis	75 Jenis	
	Pembuatan Pagar Pengaman pada Batas Kawasan yang Rawan	2. Prioritas Pendukung I	3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi			Tersedianya Anggaran Pembuatan Pagar Pengaman	Rp. 3.622.813.000,-	
	Pengamanan dan Perlindungan Taman Hutan Raya	2. Prioritas Pendukung I	3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi			Terjaganya kawasan Tahura Lati Petangis dari Gangguan Kawasan Hutan	3.445,37 Ha	
	Pengamanan dan Perlindungan Taman Hutan Raya	2. Prioritas Pendukung I	3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi			Tersedianya Anggaran kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Tahura	Rp. 567.335.289,-	
	Pembangunan Fasilitas Tahura Lati Petangis	2. Prioritas Pendukung I	3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi			Bertambahnya Fasilitas Pengelolaan Tahura (Bumi Perkemahan)	1 Kegiatan	
	Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kawasan TAHURA	2. Prioritas Pendukung I	3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi			Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	5 Dokumen	
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK-DR/DBH-DR)	2. Prioritas Pendukung I	3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi			Dana Untuk Tahun 2019, 2020 dan 2021	Rp. 71.113.066.906	
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK-DR/DBH-DR)	2. Prioritas Pendukung I	3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi			Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2018 (DBH-DR)	25.453.868.158	
	Penyusunan Dokumen Bloking Area TAHURA	2. Prioritas Pendukung I	3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi			Dokumen Bloking Area Tahura Lati Petangis	5 dokumen	
	Pemasangan, Pemeliharaan dan Penggantian Batas-batas Blok Tahura	2. Prioritas Pendukung I	3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi			Tersedianya Anggaran Kegiatan Pemasangan dan Pemeliharaan Patok Batas Kawasan dan Patok Batas Blok Pengelolaan	Rp. 151.694.015,-	
	Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Tata Kelola TAHURA	2. Prioritas Pendukung I	3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi			Dokumen Rencana Pengelolaan dan Tata Kelola Hutan Tahura	20 Dokumen	
	Pencegahan Perlindungan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	2. Prioritas Pendukung I	3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi			Berkurangnya lahan yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan	25 hektare	
	Penunjang Pelaksana Pengelolaan Tahura	2. Prioritas Pendukung I	3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi			Anggaran guna menunjang pengelolaan Tahura	12 bulan	
	Sosialisasi dan Pembinaan Masyarakat di Dalam dan di Luar Tahura Lati Petangis	2. Prioritas Pendukung I	3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi			Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran Masyarakat akan Fungsi Tahura	3 Desa	
	Sosialisasi dan Pembinaan Masyarakat di Dalam dan di Luar Tahura Lati Petangis	2. Prioritas Pendukung I	3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi			Tersedianya Anggaran Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Masyarakat di Dalam dan di Luar Kawasan Tahura	Rp. 250.000.000,-	
	Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sekitar	2. Prioritas Pendukung I	3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi			Tersedianya Anggaran Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa Sekitar	Rp. 337.354.000,-	
	Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Tahura dan KPA	2. Prioritas Pendukung I	3.5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi			Anggaran Rapat Koordinasi Teknis Tahura	Untuk 1 Kegiatan	
	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							
	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							
	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan (e-KTP)</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui</b>		<b>Cakupan penduduk yang sudah terdaftar dan mempunyai e-KTP</b>		<b>85,35</b>	
	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah Sosialisasi	1 kali	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Fasilitasi Kerjasama	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Kerjasama	
	Diseminasi dan Pemanfaatan Dokumen Kependudukan	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah pemanfaatan dokumen data kependudukan	10	
	Pelayanan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah akta perkawinan dan akta perceraian yang terbit	150	
	Pelayanan Akta Kelahiran	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah AKTA Kelahiran Yang Terbit	7000	
	Pelayanan Akta Kematian dan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah Akte Kematian dan akte pencatatan peristiwa penting lainnya yang terbit	200	
	Pendataan Dan Penertiban Dokumen Kependudukan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah Dokumen	1000	
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Updating data penduduk)	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah Sistem SIAK	1	
	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah Koneksi	2	
	Peningkatan Pelayanan E KTP dan KK	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah KK dan KTP Yang Diterbitkan	25000	
	Pengolahan, Penyusunan proyeksi dan laporan informasi kependudukan	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah Laporan	1	
	Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi Kependudukan WNI dan Orang Asing	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah Surat Mutasi	13000	
	Pemeliharaan dan pengembangan Database dan Peralatan SIAK	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah Peralatan / Komputer SIAK	14	
	Pembangunan Sarana Informasi Dan Jaringan Komunikasi Data SIAK	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Terhubungnya Jaringan Online Antara SKPD dan Kecamatan	2Tower	
	<b>Kantor Camat Tanah Grogot (A)</b>							
	Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah e-KTP, Jumlah Pengantar KK	8.678	
	<b>Kantor Camat Tanah Grogot (A)</b>							
	Sosialisasi kebijakan Kependudukan	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah Sosialisasi kependuduka	3 kali	
	<b>Kantor Camat Pasir Belengkong (A)</b>							
	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Rasio usulan e-KTP dan KK yang terlayani	100	
	<b>Kantor Camat Pasir Belengkong (A)</b>							
	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah Desa yang mendapatkan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	3	
	<b>Kantor Camat Kuaro (A)</b>							
	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah E-KTP / KK yang diusulkan	750	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	<b>Kantor Camat Long Ikis (A)</b>							
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah KTP	150	
	<b>Kantor Camat Long Kali (A)</b>							
	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah e-KTP dan KK yang diterbitkan	600	
	<b>Kantor Lurah Long Kali</b>							
	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah e-KTP dan KK yang diterbitkan	300	
	<b>Kantor Camat Batu Sopang (A)</b>							
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Rasio layanan KTP dan KK	100%	
	<b>Kantor Camat Muara Komam (A)</b>							
	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah Penduduk Yang Memiliki Identitas Kependudukan	150	
	<b>Kantor Camat Batu Engau (A)</b>							
	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			rasio pelayanan E-KTP dan KK yang diusulkan	20	
	<b>Kantor Camat Batu Engau (A)</b>							
	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Jumlah Sosialisasi Kependudukan	3	
	<b>Kantor Camat Muara Samu (A)</b>							
	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	2. Prioritas Pendukung I	5.3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui			Rasio KTP dan KK yang terlayani	100	
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (A)</b>							
	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	2. Prioritas Pendukung I	3.3.6. Meningkatnya kinerja Bumdes		Persentase Desa yang memiliki BUMDES aktif	40		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan	2. Prioritas Pendukung I	3.3.6. Meningkatnya kinerja Bumdes			umlah BUMDes yang difasilitasi	44 Bumdes	
	Penyusunan Peraturan Perundangan Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan	2. Prioritas Pendukung I	3.3.6. Meningkatnya kinerja Bumdes			Jumlah dokumen peraturan perundangan	1 dokumen	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah-Masalah Bidang Pemberdayaan Ekonomi	2. Prioritas Pendukung I	3.3.6. Meningkatnya kinerja Bumdes			Cakupan masalah terselesaikan (%)	30%	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Teknologi Pedesaan	2. Prioritas Pendukung I	3.3.6. Meningkatnya kinerja Bumdes			Jumlah peserta pelatihan (orang)	139 orang	
	Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Desa dan Pengembangan TTG	2. Prioritas Pendukung I	3.3.6. Meningkatnya kinerja Bumdes			Jumlah inovasi TTG yang dihasilkan	6	
	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	2. Prioritas Pendukung I	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik		Cakupan desa yang menjalankan Musrenbang sesuai ketentuan perundangan (%)	100		
	Fasilitasi Tenaga Pendamping Profesional	2. Prioritas Pendukung I	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik			Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2. Prioritas Pendukung I	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (dokumen)	1 dokumen	
	Pemberdayaan Posyandu	2. Prioritas Pendukung I	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik			Persentase Posyandu aktif	81%	
	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan	2. Prioritas Pendukung I	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik			Cakupan jumlah lembaga adat dan sosial budaya terlayani (Desa)	10	
	Perlombaan Desa dan Kelurahan	2. Prioritas Pendukung I	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik			Cakupan jumlah desa terlayani	10	
	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat	2. Prioritas Pendukung I	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik			Cakupan jumlah desa terlayani	5	
	Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2. Prioritas Pendukung I	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik			Persentase kader pemberdayaan masyarakat desa terlatih	60%	



Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa	2. Prioritas Pendukung I	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik			Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Desa yang dikembangkan (sistem)	1	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah-Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2. Prioritas Pendukung I	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik			Cakupan masalah terselesaikan (%)	30%	
	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</b>	<b>Persentase desa yang telah menyusun APBDes sesuai ketentuan</b>	<b>61,15</b>			
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	2. Prioritas Pendukung I	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah RAPBDes yang dievaluasi	139 desa	
	Penyusunan Perbup Tentang Keuangan dan Aset Desa	2. Prioritas Pendukung I	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah dokumen Perbup Keuangan dan Aset Desa	3 dokumen	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDes	2. Prioritas Pendukung I	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	1 dokumen	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah-masalah Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	2. Prioritas Pendukung I	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Persentase pemmasalahan yang terselesaikan	100%	
	<b>Program Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemdes</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</b>	<b>Persentase desa yang melaporkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan yang berlaku</b>	<b>75</b>			
	Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa	2. Prioritas Pendukung I	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah peserta rapat (Orang)	139 orang	
	Penyusunan Produk Hukum Pemerintahan Desa	2. Prioritas Pendukung I	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah peraturan perundangan	1	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	2. Prioritas Pendukung I	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Cakupan desa terlayani (%)	100%	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD	2. Prioritas Pendukung I	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Desa yang melaksanakan pilkades	20 desa	
	Fasilitasi Penataan Batas Desa	2. Prioritas Pendukung I	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Cakupan desa yang terlayani	3	
	Pembentukan/Penggabungan/Penghapusan Desa atau Kelurahan	2. Prioritas Pendukung I	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Cakupan jumlah desa terlayani	14 desa	
	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
	<b>UPTD Puskesmas Long Ikis</b>							
	<b>Pogram Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>2.5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga</b>	<b>Cakupan sekolah yang mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba dan PMS</b>	<b>10</b>			
	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Penyakit Menular Seksual	2. Prioritas Pendukung I	2.5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga			Persentase Puskesmas Melaksanakan Sosialisasi Penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS	100	
	<b>UPTD Puskesmas Muara Komam</b>							
	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Penyakit Menular Seksual	2. Prioritas Pendukung I	2.5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga			1).Cakupan sekolah yang mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba dan PMS	-	
	<b>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPKBA)</b>							
	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>2.5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga</b>	<b>Cakupan Peserta KB Aktif (%)</b>	<b>74,5</b>			
	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	2. Prioritas Pendukung I	2.5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga			Jumlah keluarga miskin di Kecamatan yang terlayani dalam program KB	10	
	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	2. Prioritas Pendukung I	2.5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga			1.jumlah cakupan pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan (kasus)	100	
	Promosi Pelayanan KHIBA	2. Prioritas Pendukung I	2.5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga			jumlah orang yang mengikuti penyuluhan KHIBA	200	
	Monev Pelayanan Keluarga Berencana	2. Prioritas Pendukung I	2.5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga			jumlah dokumen monev KB	1	
	Advokasi dan Pembinaan Kelompok Kampung KB	2. Prioritas Pendukung I	2.5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga			1. Jumlah Kampung KB yang mendapatkan advokasi dan pembinaan	10	
	Pengelolaan Data dan Informasi KB	2. Prioritas Pendukung I	2.5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga			Jumlah analisis data hasil kontrasepsi KB yang tersedia	1	
	Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang	2. Prioritas Pendukung I	2.5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga			jumlah dokumen bahan informasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	1	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	2. Prioritas Pendukung I	2.5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga		Persentase remaja yang ikut dalam program GenRe (Generasi Berencana)	33		
	Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan PIK KRR	2. Prioritas Pendukung I	2.5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga				jumlah kelompok PIK yang terbentuk dan mendapat pembinaan PIK KRR	17
	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posvandu-PADI	2. Prioritas Pendukung I	2.5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga		Persentase Posyandu Padu	72,5		
	Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan BKB	2. Prioritas Pendukung I	2.5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga				Jumlah BKB yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan	28
	Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKR	2. Prioritas Pendukung I	2.5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga				jumlah BKR yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan	4
	Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKL	2. Prioritas Pendukung I	2.5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga				jumlah BKL yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan	6
	Monev Keluarga Sejahtera	2. Prioritas Pendukung I	2.5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga				jumlah dokumen monev KS	1
	Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan UPPKS	2. Prioritas Pendukung I	2.5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga				Jumlah kelompok UPPKS yang mendapatkan pembinaan	18
	<b>Perhubungan</b>							
	<b>Dinas Perhubungan (B)</b>							
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2. Prioritas Pendukung I	1.1.2. Meningkatkan pelayanan transportasi publik		Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	75		
	Pemasangan dan Pemeliharaan Tiang dan Lampu Jalan	2. Prioritas Pendukung I	1.1.2. Meningkatkan pelayanan transportasi publik				Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	10 IKK
	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2. Prioritas Pendukung I	1.1.2. Meningkatkan pelayanan transportasi publik				terlaksananya koordinasi dalam pembangunan	100
	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	2. Prioritas Pendukung I	1.1.2. Meningkatkan pelayanan transportasi publik				Persentase ketertiban angkutan umum di jalan raya	70
	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2. Prioritas Pendukung I	1.1.2. Meningkatkan pelayanan transportasi publik				Koordinasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang dilakukan (Kali)	6
	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	2. Prioritas Pendukung I	1.1.2. Meningkatkan pelayanan transportasi publik				Jumlah kebijakan bidang perhubungan yang disosialisasikan	2
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Perhubungan Laut & Udara)	2. Prioritas Pendukung I	1.1.2. Meningkatkan pelayanan transportasi publik				Termonitoring dan terevaluasinya pelaksanaan kegiatan	100
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2. Prioritas Pendukung I	1.1.2. Meningkatkan pelayanan transportasi publik		Persentase sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum dalam kondisi baik	70		
	Pengadaan sistem informasi Manajemen angkutan umum	2. Prioritas Pendukung I	1.1.2. Meningkatkan pelayanan transportasi publik				Dokumen Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) Dalam Kabupaten Paser	25 Dokumen
	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan sungai danau dan penyeberangan	2. Prioritas Pendukung I	1.1.2. Meningkatkan pelayanan transportasi publik				Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang	1
	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat	2. Prioritas Pendukung I	1.1.2. Meningkatkan pelayanan transportasi publik				Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Darat yg dikembangkan	1 tahun
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	2. Prioritas Pendukung I	1.1.3. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Pengguna Jalan		Persentase ruas jalan kabupaten yang memiliki rambu lalu lintas	50		
	Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	2. Prioritas Pendukung I	1.1.3. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Pengguna Jalan				Rambu-rambu lalu lintas yang disediakan dan dipelihara	48 buah
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	3. Prioritas Pendukung II	1.1.4. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Jalan		Persentase kendaraan layak operasi	70		
	Pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor	3. Prioritas Pendukung II	1.1.4. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Jalan				Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara (unit)	1
	<b>UPTD Dermaga Senaken</b>							
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2. Prioritas Pendukung I	1.1.2. Meningkatkan pelayanan transportasi publik		Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	75		
	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (UPTD Dermaga Senaken)	2. Prioritas Pendukung I	1.1.2. Meningkatkan pelayanan transportasi publik				Persentase pelayanan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan (UPTD Dermaga Senaken)	50
	<b>UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor</b>							
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2. Prioritas Pendukung I	1.1.2. Meningkatkan pelayanan transportasi publik		Persentase sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum dalam kondisi baik	70		

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang (UPTD PKB)	2. Prioritas Pendukung I	1.1.2. Meningkatkan pelayanan transportasi publik			1. Jumlah sarana transportasi yang dilakukan pengujian kelaikan	1	
	<b>UPTD Terminal Kota Tana Paser</b>							
	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	2. Prioritas Pendukung I	1.1.2. Meningkatkan pelayanan transportasi publik		Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	75		
	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (UPTD Terminal Kota)	2. Prioritas Pendukung I	1.1.2. Meningkatkan pelayanan transportasi publik			Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	40	
	<b>UPTD Terminal Kuaro</b>							
	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (UPTD Terminal Kuaro)	2. Prioritas Pendukung I	1.1.2. Meningkatkan pelayanan transportasi publik			Persentase pelayanan terminal angkutan darat (UPTD Terminal Kuaro)	50	
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (A)</b>							
	<b>Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (internet)</b>	2. Prioritas Pendukung I	1.2.2. Meningkatnya jangkauan jaringan internet		Persentase desa yang bisa mengakses internet	54		
	Optimalisasi Pengelolaan Data Center	2. Prioritas Pendukung I	1.2.2. Meningkatnya jangkauan jaringan internet			Tersedianya Data Center	1	
	Optimalisasi Pengelolaan Data Center	2. Prioritas Pendukung I	1.2.2. Meningkatnya jangkauan jaringan internet			Tersedianya Data Center	1	
	Pengelolaan Media Center	2. Prioritas Pendukung I	1.2.2. Meningkatnya jangkauan jaringan internet			Tersedianya Media Center	6	
	Pengelolaan IT di SKPD terkait Pelayanan Publik	2. Prioritas Pendukung I	1.2.2. Meningkatnya jangkauan jaringan internet			Peningkatan SDM Terkait Pelayanan Publik	4	
	Penyediaan Data Center	2. Prioritas Pendukung I	1.2.2. Meningkatnya jangkauan jaringan internet			Tersedianya Data Center	1	
	Pengembangan Website DiskominfoPaserkab.go.id	2. Prioritas Pendukung I	1.2.2. Meningkatnya jangkauan jaringan internet			Tersedianya Website DiskominfoPaserkab.go.id	1 Website	
	Pendataan dan Inventarisasi Aplikasi di SKPD	2. Prioritas Pendukung I	1.2.2. Meningkatnya jangkauan jaringan internet			jumlah Aplikasi di setiap SKPD	40 Aplikasi	
	Penyediaan Aplikasi dan Website di SKPD	2. Prioritas Pendukung I	1.2.2. Meningkatnya jangkauan jaringan internet			Tersedianya Aplikasi dan website Baru	3	
	Pengembangan Website paserkab.go.id	2. Prioritas Pendukung I	1.2.2. Meningkatnya jangkauan jaringan internet			tersedianya Website Paserkab.go.id	1 Website	
	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (jaringan seluler)</b>	2. Prioritas Pendukung I	1.2.1. Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi		Jumlah Jaringan Komunikasi	84		
	Pembangunan Tower / Repeater (Menara Telekomunikasi Bersama)	2. Prioritas Pendukung I	1.2.1. Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi			Terlaksananya pembangunan menara seluler	-	
	Pengendalian, Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Jasa Pos dan Telekomunikasi	2. Prioritas Pendukung I	1.2.1. Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi			Jumlah Laporan, dokumen atau barang	5	
	Monitoring, Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi	2. Prioritas Pendukung I	1.2.1. Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi			Jumlah Laporan, dokumen atau barang	5	
	<b>Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (internet)</b>	2. Prioritas Pendukung I	1.2.2. Meningkatnya jangkauan jaringan internet		Persentase desa yang bisa mengakses internet	54		
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak dan Elektronik	2. Prioritas Pendukung I	1.2.2. Meningkatnya jangkauan jaringan internet			Persentase Cakupan Desa yang Bisa Mengakses Informasi Pembangunan Daerah	54	
	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Daerah	2. Prioritas Pendukung I	1.2.2. Meningkatnya jangkauan jaringan internet			Jumlah Peliputan Kegiatan Pembangunan Daerah	14	
	Penyelenggaraan Siaran Televisi dan Radio Siaran Pemerintah Kabupaten	2. Prioritas Pendukung I	1.2.2. Meningkatnya jangkauan jaringan internet			Jumlah Siaran Televisi yang memuat Informasi Pembangunan Daerah	100	
	Pengembangan Jaringan Internet	2. Prioritas Pendukung I	1.2.2. Meningkatnya jangkauan jaringan internet			Jumlah Desa yang Bisa Mengakses Internet	2	
	<b>Program Kerjasama Informasi dan Media Masa</b>	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik		Jumlah media cetak yang memuat informasi pembangunan daerah	4		
	Partisipasi Dalam Kegiatan Pekan Informasi Nasional (PIN)	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik			Frequensi Keikutsertaan Dalam PIN	1	
	Kerja Sama Produksi dan Penyiaran dengan Media Elektronik	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik			Jumlah Produksi yang Dikerjasamakan	3	
	<b>Program Pengembangan Kelembagaan Keterbukaan Informasi</b>	3. Prioritas Pendukung II	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik		Berfungsinya PPID	5 PPID		
	Pengelolaan Pelayanan Pengaduan	3. Prioritas Pendukung II	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik			Tersedianya Tempat Pelayanan Pengaduan ( SMS Gateway )	1	
	Pengelolaan Pelayanan Pengaduan	3. Prioritas Pendukung II	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik			Tersedianya Tempat Pelayanan Pengaduan ( SMS Gateway )	1	
	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	3. Prioritas Pendukung II	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik			Sengketa Informasi Publik	2	
	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	3. Prioritas Pendukung II	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik			Kelompok yang Dibentuk	3	
	Optimalisasi Peran PPID Kabupaten	3. Prioritas Pendukung II	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik			Jumlah SKPD yang Membentuk dan Menjalankan PPID pembantu	5	
	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik		Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah	22		

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyusunan Naskah Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola E-Government	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik			Jumlah Peraturan Bupati yang ditetapkan	1	
	Implementasi dan Pengembangan E-Government	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik			Peningkatan SDM Terkait Pelayanan E-Government	4	
	Penyusunan Naskah Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola E-Government	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik			Jumlah Peraturan Bupati Yang ditetapkan	1	
	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>							
	Penyediaan Sistem Informasi Manajemen PBB (SIM-PBB) dan BPHTB (SIM-BPHTB)	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik			Jumlah Blanko SPPT PBB P2	30 ribu	
	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>							
	Pengelolaan dan Pengembangan Website SKPD Kab. Paser	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik			Jumlah Data SKPD di Publikasikan	8	
	<b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (B)</b>							
	<b>Program Kerjasama Informasi dan Media Masa</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik</b>		<b>4</b>	<b>Jumlah media cetak yang memuat informasi pembangunan daerah</b>		
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik			Jumlah Arsip/Dokumen Sekretaris DPRD Yang Terdata (berkas)	2.484	
	Kerjasama Mass Media dan Elektronik	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik			Jumlah Media Cetak/Elektronik yg Memuat Iklan Pariwisata dan Informasi tentang Kegiatan Pimpinan & Anggota DPRD Kab.Paser /Tahun	5	
	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Lembaga DPRD	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik			Jumlah Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Paser yg Dipublikasikan /Tahun	260	
	<b>Bagian Pemerintahan dan Humas</b>							
	<b>Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (media massa)</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>1.2.1. Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi</b>		<b>2</b>	<b>Publikasi informasi daerah di media massa cetak dan Online (jumlah media massa cetak dan website)</b>		
	Pengelolaan TV LED/Videotron	2. Prioritas Pendukung I	1.2.1. Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi			Terpeliharanya LED TV	4	
	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>							
	<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (D)</b>							
	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>3.3.1. Meningkatnya kinerja UMKM</b>		<b>50</b>	<b>Cakupan UMKM yang mendapatkan pemberdayaan (%)</b>		
	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi	2. Prioritas Pendukung I	3.3.1. Meningkatnya kinerja UMKM			Jumlah Pengurus Koperasi yang terampil	30 kop	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan UKM	2. Prioritas Pendukung I	3.3.1. Meningkatnya kinerja UMKM			terinventarisirnya dokumen / data potensi ukm	10 buku	
	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>3.3.1. Meningkatnya kinerja UMKM</b>		<b>75</b>	<b>Cakupan produk UMKM yang mendapatkan permodalan</b>		
	Penyelenggaraan Promosi Produk UKM	2. Prioritas Pendukung I	3.3.1. Meningkatnya kinerja UMKM			terciptanya promosi produk UKM	20 produk	
	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>3.3.3. Meningkatnya Koperasi aktif</b>		<b>85</b>	<b>Persentase koperasi yang aktif</b>		
	Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	2. Prioritas Pendukung I	3.3.3. Meningkatnya Koperasi aktif			tersedianya laporan data base koperasi	40 koperasi	
	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Koperasi	2. Prioritas Pendukung I	3.3.3. Meningkatnya Koperasi aktif			terinventarisirnya dokumen / data potensi koperasi	15 buku	
	<b>Penanaman Modal</b>							
	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (D)</b>							
	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>3.4.1. Meningkatnya investasi</b>		<b>85</b>	<b>Tingkat kemudahan proses perijinan (%)</b>		
	Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	2. Prioritas Pendukung I	3.4.1. Meningkatnya investasi			Jumlah Pelaksanaan Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan promosi penanaman modal	7 Kali	
	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	2. Prioritas Pendukung I	3.4.1. Meningkatnya investasi			Jumlah investor (PMA dan PMDN)	50 Perusahaan	
	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal antara Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	2. Prioritas Pendukung I	3.4.1. Meningkatnya investasi			Meningkatkan kualitas kerjasama dibidang penanaman modal antara instansi pemerintah dan dunia usaha	85%	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Penanaman Modal	2. Prioritas Pendukung I	3.4.1. Meningkatnya investasi			Jumlah investor (PMA dan PMDN), Jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN), Rasio daya serap tenaga kerja (orang), Jumlah penanaman modal yang menyampaikan LKPM	80%	
	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>3.4.1. Meningkatnya investasi</b>		<b>35</b>	<b>Persentase peningkatan investasi PMA</b>		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan data dan pengaduan	2. Prioritas Pendukung I	3.4.1. Meningkatnya investasi			Tersedianya laporan bulanan	40 Buku	
	Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	2. Prioritas Pendukung I	3.4.1. Meningkatnya investasi			Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	30 Buku	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Yang Simple	2. Prioritas Pendukung I	3.4.1. Meningkatnya investasi			Persentase penggunaan sistem informasi pelayanan perizinan	75%	
	Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	2. Prioritas Pendukung I	3.4.1. Meningkatnya investasi			Jumlah Penyelenggaraan rapat dan koordinasi bidang penanaman modal / investasi	70%	
	Updating Data Investasi Kabupaten Paser	2. Prioritas Pendukung I	3.4.1. Meningkatnya investasi			Jumlah Dokumen Data Investasi Kabupaten Paser yang disusun	1 Dokumen	
	Teknis Penyelenggaraan Perizinan	2. Prioritas Pendukung I	3.4.1. Meningkatnya investasi			Terselenggaranya teknis perijinan berbasis IT	85%	
	Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Non Perizinan	2. Prioritas Pendukung I	3.4.1. Meningkatnya investasi			Persentase peningkatan investasi PMDN	35	
	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>3.4.1. Meningkatnya investasi</b>		<b>Persentase pertumbuhan kinerja investasi</b>	<b>40</b>		
	Updating Data dan Pengelolaan Website SKPD	2. Prioritas Pendukung I	3.4.1. Meningkatnya investasi			Persentase layanan informasi yang dapat diakses melalui internet	60%	
	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	2. Prioritas Pendukung I	3.4.1. Meningkatnya investasi			Persentase peserta yang mendapatkan informasi peraturan pembinaan peningkatan wawasan perundang - undangan	70%	
	Orientasi dan Pengembangan Sosialisasi Evaluasi dan Pelaporan	2. Prioritas Pendukung I	3.4.1. Meningkatnya investasi			Meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundangan khususnya bidang perizinan	80%	
	Pelatihan Operator Web	2. Prioritas Pendukung I	3.4.1. Meningkatnya investasi			Meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan informasi data	80%	
	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>							
	<b>Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (A)</b>							
	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>5.1.3. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan</b>		<b>Cakupan pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan (Orang)</b>	<b>135</b>		
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	2. Prioritas Pendukung I	5.1.3. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan			Jumlah Organisasi yang Terbina	10	
	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	2. Prioritas Pendukung I	5.1.3. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan			Jumlah Kelompok Pemuda yang dilatih Kewirausahaan	15	
	Paskibraka	2. Prioritas Pendukung I	5.1.3. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan			Jumlah Pemuda yang Terbentuk melalui Paskibraka	35	
	Jambore Pemuda	2. Prioritas Pendukung I	5.1.3. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan			Jumlah Pemuda yang Mengikuti Jambore	30	
	Monitoring dan Konsultasi Bidang Kepemudaan	2. Prioritas Pendukung I	5.1.3. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan			Laporan Monitoring dan Evaluasi	3	
	<b>Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>5.1.3. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan</b>		<b>Cakupan pemuda yang mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba (Orang)</b>	<b>90</b>		
	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda	2. Prioritas Pendukung I	5.1.3. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan			Persentase operasional kegiatan BNN yang tersedia	100	
	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>5.1.3. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan</b>		<b>Peringkat Pekan Olahraga Pelajar tingkat provinsi</b>	<b>5 dari 10</b>		
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (POPKAB, POR SD/MI KAB, Turnamen antar club/pelajar, POPPROV)	2. Prioritas Pendukung I	5.1.3. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan			Terlaksananya Kompetisi Olahraga	2	
	Kerjasama Peningkatan Olahraga Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga Lainnya	2. Prioritas Pendukung I	5.1.3. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan			Athlet yang berlatih yang siap tanding	17	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>5.1.3. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan</b>		<b>Jumlah sarana prasarana olahraga yang sesuai standar (Unit)</b>	<b>54</b>		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	2. Prioritas Pendukung I	5.1.3. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan			Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	2	
	<b>Statistik</b>							
	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (A)</b>							
	<b>Program Pengembangan Data/Informasi (Semua PD)</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>4.1.3. Meningkatnya akses terhadap informasi publik</b>		<b>Persentase SKPD yang mempunyai data SIPD secara lengkap</b>	<b>40</b>		
	Penyusunan Data Statistik Sektoral	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3. Meningkatnya akses terhadap informasi publik			Jumlah dokumen Data Statistik sektoral Dinas Pendidikan Kebudayaan	1	
	<b>Dinas Kesehatan (A)</b>							
	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3. Meningkatnya akses terhadap informasi publik			Persentase Tersusunnya Profil Kesehatan Daerah	100	
	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b>							
	Penyusunan Data Statistik Sektoral	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3. Meningkatnya akses terhadap informasi publik			Dokumen Data Statistik Sektoral	1	
	<b>Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</b>							
	Penyusunan Data Statistik Sektoral	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3. Meningkatnya akses terhadap informasi publik			Jumlah Laporan Kegiatan Data Statistik Sektoral	5 Dokumen	
	<b>Satuan Polisi Pamong Praja (B)</b>							

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyusunan Data Statistik Sektoral dan SIPD	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik				-	
	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>							
	Penyusunan Data Statistik Sektoral	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik			Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	
	<b>Dinas Sosial (A)</b>							
	Penyusunan Data Statistik Sektoral	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik			Jumlah Dokumen Data Statistik yang disusun (Dokumen)	10	
	<b>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (A)</b>							
	Penyusunan Data Statistik Sektoral	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik			Jumlah Data Sektoral Bidang PPPA dan KBKS ( Buku ) yang tersedia	10	
	<b>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (A)</b>							
	Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik			Tersedianya Website DPPKBPPPA	1	
	<b>Dinas Lingkungan Hidup (A)</b>							
	Penyusunan Profil SKPD	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik			Jumlah Dokumen Profil BLH	1	
	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (A)</b>							
	Penyusunan Data Statistik Sektoral	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik			Jumlah Dokumen	1 dokumen	
	<b>Dinas Perhubungan (B)</b>							
	Penyusunan data statistik sektoral Dinas Perhubungan	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik			Tersedianya Data Statistik Dinas Perhubungan	1	
	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (A)</b>							
	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	4. Rutin	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik		Sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (persen/ada)	100		
	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	4. Rutin	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik			Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah	50	
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Sektoral	4. Rutin	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik			Sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (persen/ada)	1	
	Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA)	4. Rutin	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik			Dokumen Pembangunan Daerah Dalam Angka	50	
	<b>Program Pengembangan Data/Informasi (Semua PD)</b>	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik		Persentase SKPD yang mempunyai data SIPD secara lengkap	40		
	Penyusunan Data Statistik Sektoral	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik			Jumlah Jenis / Data Statistik Sektoral	20	
	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (A)</b>							
	SPIP	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik			Tersedianya laporan SPIP	30 Buku	
	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (A)</b>							
	Penyusunan Data Sektoral SKPD	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik			Jumlah laporan capaian kinerja data sektoral SKPD	20 Buku	
	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (A)</b>							
	Penyusunan Data Sektoral SKPD	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik			Jumlah Dokumen Data Sektoral SKPD	1	
	<b>Dinas Perikanan (B)</b>							
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik			Penyajian data statistik perikanan tangkap yang akurat dan tepat waktu (dokumen)	1	
	<b>Dinas Perikanan (B)</b>							
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan Budidaya	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik			Data Statistik Budidaya Perikanan	1 Tahun	
	<b>Dinas Perikanan (B)</b>							
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik P2HP	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik			Data Statistik perkembangan Usaha Produk Perikanan	Kab. Paser	
	<b>Dinas Perikanan (B)</b>							
	Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten (Kelautan dan Perikanan)	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik			Penyajian data statistik sektoral yang akurat dan tepat waktu (dokumen)	1	
	<b>Dinas Pertanian (B)</b>							
	Penyusunan Data Statistik Sektoral SIPD	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatkan akses terhadap informasi publik			Terlaksananya Koordinasi Data Perencanaan Pertanian dan Perkebunan Dengan Baik (Kali)	5	
	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (A)</b>							

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Pengembangan Data/Informasi (Khusus Bappeda)	4. Rutin	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik		Persentase SKPD yang menyusun perencanaan secara tepat waktu menggunakan Simpepeda	100		
	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (Simpepeda)	4. Rutin	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik				1. Jumlah modul simpepeda yang disusun	3 modul
	Program Pengembangan Data/Informasi (Semua PD)	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik		Persentase SKPD yang mempunyai data SIPD secara lengkap	40		
	Pengelolaan Website Bappeda	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik				Jumlah website yang dikelola	1
	<b>UPT Data Perencanaan dan Geospasial</b>							
	Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Kab. Paser	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik				Jumlah data geospasial yang termuat di dalam website sistem informasi geospasial kabupaten paser (data)	30
	<b>UPT Data Perencanaan dan Geospasial</b>							
	Pengumpulan, Updateing, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik				Persentase data capaian memenuhi kebutuhan data perencanaan pembangunan daerah	90
	<b>UPT Data Perencanaan dan Geospasial</b>							
	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik				Persentase Peningkatan data perencanaan dan geospasial yang terkumpul	50
	<b>Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (B)</b>							
	Penyusunan Data Statistik Sektoral BKD Kabupaten Paser	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik				Jumlah dokumen data statistik sektoral yang tersusun	10 buku
	<b>Inspektorat Kabupaten (A)</b>							
	Penyusunan Data Statistik Sektoral Inspektorat Kab. Paser	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik				Tersedianya Data Statistik Sektoral Inspektorat	1 Laporan
	<b>Kantor Camat Muara Samu (A)</b>							
	Pengelolaan Web Site	2. Prioritas Pendukung I	4.1.3 Meningkatnya akses terhadap informasi publik				Jumlah biaya hosting dan domain web site	1
	<b>Persandian</b>							
	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (A)</b>							
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (persandian)	3. Prioritas Pendukung II	1.2.3. Meningkatnya pengamanan informasi dilindungi instansi pemerintah dan publik		Jumlah Kebijakan Teknis Persandian yang tersusun	1		
	Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah (JARKOMSANDA)	3. Prioritas Pendukung II	1.2.3. Meningkatnya pengamanan informasi dilindungi instansi pemerintah dan publik				Keamanan Informasi	100
	Peningkatan Kapasitas SDM Persandian	3. Prioritas Pendukung II	1.2.3. Meningkatnya pengamanan informasi dilindungi instansi pemerintah dan publik				Keamanan Informasi	100%
	<b>Kebudayaan</b>							
	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (A)</b>							
	Program Pengembangan Nilai Budaya	2. Prioritas Pendukung I	5.1.4. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan		Perda pengakuan dan revitalasi nilai budaya (Kecamatan)	10		
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	2. Prioritas Pendukung I	5.1.4. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan				Jumlah jenis adat daerah	10
	Pengelolaan dan Pelestarian Museum dan Cagar Budaya	2. Prioritas Pendukung I	5.1.4. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan				Jumlah Museum dan taman budaya daerah	28
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2. Prioritas Pendukung I	5.1.4. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan		Jumlah festival budaya yang diikuti (kali)	4		
	Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah	2. Prioritas Pendukung I	5.1.4. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan				Jumlah Kelompok Kesenian dan Budaya Daerah	1
	Pendataan Database Kesenian	2. Prioritas Pendukung I	5.1.4. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan				Jumlah Dokumen Kesenian	1
	Pengelolaan Museum dan Taman Budaya	2. Prioritas Pendukung I	5.1.4. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan				Jumlah Museum dan taman budaya daerah	10
	Sosialisasi dan Publikasi Kebudayaan	2. Prioritas Pendukung I	5.1.4. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan				Jumlah Kecamatan Sosialisasi dan Publikasi Kebudayaan	10

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	2. Prioritas Pendukung I	5.1.4. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan			Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan	2	
	<b>Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	2. Prioritas Pendukung I	5.1.4. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan		Jumlah kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan dan perusahaan swasta	3		
	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	2. Prioritas Pendukung I	5.1.4. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan			Jumlah karya cetak dan karya rekam	3	
	<b>Kearsipan</b>							
	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (A)</b>							
	<b>Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</b>	3. Prioritas Pendukung II	4.3.3. Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat		SKPD yang menerapkan arsip secara baku	10 SKPD		
	Monitoring dan Pembinaan Sistem Administrasi Kearsipan	3. Prioritas Pendukung II	4.3.3. Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat			Jumlah SKPD Yang Dibina dan Dimonitoring	10	
	<b>Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan</b>	3. Prioritas Pendukung II	4.3.3. Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat		Database Arsip Daerah	5.000 berkas		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	3. Prioritas Pendukung II	4.3.3. Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat			Jumlah Arsip Daerah Yang Terpelihara	5000	
	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>	3. Prioritas Pendukung II	4.3.3. Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat		Jumlah Layanan Informasi Arsip	2 Program (on line)		
	Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta	3. Prioritas Pendukung II	4.3.3. Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat			Jumlah Pengelola Arsip SKPD Yang Mengikuti Bimtek dan Sosialisasi Kearsipan	55	
	<b>Pertanahan</b>							
	<b>Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>	2. Prioritas Pendukung I	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pertanahan					
	Penyelesaian Konflik Pertanahan	2. Prioritas Pendukung I	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pertanahan			Jumlah Konflik Pertanahan yang diselesaikan	2	
	<b>Program Koordinasi dan Inventarisasi Pengadaan Tanah</b>	2. Prioritas Pendukung I	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pertanahan					
	Koordinasi dan Inventarisasi Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Bangunan/Tanam Tumbuh	2. Prioritas Pendukung I	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pertanahan			Persentase tanah yang dibebaskan oleh pemerintah daerah	40	
	<b>Urusan Pilihan</b>							
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>							
	<b>Dinas Perikanan (B)</b>							
	<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan</b>	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		Cakupan masyarakat perikanan yang diberdayakan (persen)	15		
	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Usaha Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Intensitas monitoring dan pembinaan Program Asuransi Nelayan (KUB)	10	
	Pembinaan Kelembagaan Usaha dan Kelompok P2HP	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Intensitas Monitoring, Pembinaan Kelembagaan Usaha dan Pelayanan usaha Produk Perikanan (tahun)	1	
	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	15.552		
	Pencegahan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			- Pembinaan Pokdakan (Kecamatan)	10	
	Pelatihan dan Bimbingan Usaha Budidaya Perikanan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Pelatihan Budidaya Rumput Laut di Tambak (Orang)	30	
	Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			- Paket Pengadaan Jaring/Paranet Untuk Rumput Laut (roll)	34	
	<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	11.305		
	Pelatihan, Bimbingan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Penangkapan Ikan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Nelayan Terampil mengoperasikan alat bantu penangkapan ikan (Orang)	25	



Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Pengembangan dan Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Operasional PPI Senaken (Paket)	1	
	Pengelolaan, Pengendalian dan Perlindungan Sumberdaya Ikan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Intensitas Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan SDI	Perairan Umum Kab.Paser	
	Pengembangan Perizinan Perikanan Tangkap	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Realisasi Izin Penangkapan Ikan/ Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) (Lembar)	300	
	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Intensitas Monitoring dan PEmbinaan (Tahun)	1	
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (kualitas produk)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		Persentase produk perikanan yang memiliki standar mutu	80		
	Pengawasan Mutu dan Pemasaran/Perdagangan Hasil - hasil Perikanan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah Produk Perikanan yang diuji (sampel)	70	
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (sentra produksi)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		Jumlah produk olahan hasil perikanan (ton)	2464		
	Pengembangan Aquabisnis	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Lomba Masak Serba Ikan dalam rangka GEMARIKAN (Peserta)	10	
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (kualitas produk)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		Persentase produk perikanan yang memiliki standar mutu	80		
	Promosi Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Memperkenalkan macam-macam produk olahan hasil perikanan yang merupakan unggulan daerah kab.paser (tahun)	1	
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (sentra produksi)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		Jumlah produk olahan hasil perikanan (ton)	2464		
	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengelolaan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Tersedianya bahan untuk operasional pabrik es (bulan)	4	
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		Luas kawasan budidaya perikanan (ha)	19.524,64		
	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			- Benih Ikan Air Laut (ekor)	2000	
	Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			- Luas Lahan Budidaya Air Tawar Sesuai Target Produksi (Ha)	20	
	Pengembangan Perizinan Perikanan Budidaya	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) (Dokumen)	25	
	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Usaha dan Kelompok Budidaya Perikanan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			- Intensitas Monitoring, Pembinaan & Pengembangan Kelembagaan Pokdakan (Pokdakan)	20	
	UPTD Balai Benih Udang Tanjung Aru							
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	15.552		
	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah Produksi Benih Unggul UPTD (juta)	1,5	
	<b>Pariwisata</b>							
	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (A)							
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3. Prioritas Pendukung II	3.2.1. Berkembangnya sektor pariwisata		Jumlah media pemasaran pariwisata pemerintah daerah	5		

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata	3. Prioritas Pendukung II	3.2.1. Berkembangnya sektor pariwisata			Jumlah obyek wisata dan produk UKM yang terpromosikan	2	
	Koordinasi Antar Sektor Pendukung Pariwisata	3. Prioritas Pendukung II	3.2.1. Berkembangnya sektor pariwisata			Jumlah Onyek Wisata yang memiliki nilai estetika tinggi	10	
	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	<b>3. Prioritas Pendukung II</b>	<b>3.2.1. Berkembangnya sektor pariwisata</b>		<b>Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan (destinasi)</b>	<b>12</b>		
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	3. Prioritas Pendukung II	3.2.1. Berkembangnya sektor pariwisata			Jumlah Obyek wisata yang dikelola	1	
	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	<b>3. Prioritas Pendukung II</b>	<b>3.2.1. Berkembangnya sektor pariwisata</b>		<b>Persentase lembaga/masyarakat mitra yang aktif berkerjasama</b>	<b>100</b>		
	Pengembangan dan Penguatan Informasi Data Base	3. Prioritas Pendukung II	3.2.1. Berkembangnya sektor pariwisata			Jumlah Dokumen Data Base informasi usaha wisata	10 dokumen	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	3. Prioritas Pendukung II	3.2.1. Berkembangnya sektor pariwisata			Terlaksananya pelatihan pengemasan Produk Pariwisata	1	
	Fasilitasi Seleksi Pemilihan Putri Pariwisata dan Duta Pariwisata	3. Prioritas Pendukung II	3.2.1. Berkembangnya sektor pariwisata			Terpilihnya Duta Wisata Kabupaten Paser	3	
	Pengkajian Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	3. Prioritas Pendukung II	3.2.1. Berkembangnya sektor pariwisata			Adanya Peraturan Bupati Paser Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	1	
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Wisata	3. Prioritas Pendukung II	3.2.1. Berkembangnya sektor pariwisata			Tersedianya Data Pelaksanaan Kegiatan	10 dokumen	
	<b>Pertanian</b>							
	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (B)</b>							
	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya (pengairan sawah)</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>		<b>Persentase kawasan pertanian yang memiliki jaringan irigasi sesuai standar</b>	<b>44</b>		
	Perencanaan Jaringan Irigasi	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi	10	
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah Embung yang terpelihara	11	
	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah petani yang diberdayakan	50	
	Penyusunan Database Pengairan dan Sumber Daya Air	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah dokumen data base pengairan	10	
	Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Panjang Jaringan Irigasi yang Terbangun	12	
	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Layanan Air Bersih/AirMinum	1Obyek	
	<b>Dinas Ketahanan Pangan (A)</b>							
	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>	<b>1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)</b>	<b>3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>		<b>Ketersediaan Pangan Utama Pertanian (persen)</b>	<b>85</b>		
	Penanganan daerah rawan pangan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Terlaksananya pendataan bulanan secara dini SKPG	10 Kec	
	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan (PPH)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Tersedianya buku Pola Pangan Harapan 2018 Penduduk kabupaten Paser	20 buku	
	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Terlaksananya Lomba Cipta Menu B2SA Kab.Paser	1 kali	
	Pengembangan cadangan pangan daerah	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Pendistribusian persediaan bahan pokok beras	15 Ton	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perberasan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Termonitornya pasokan dan distribusi beras	10 kec	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Pengembangan diversifikasi tanaman	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah peserta sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan	400 orang	
	Konsolidasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Tersedianya anggaran di luar APBD Kabupaten	1 Tahun	
	Pengembangan sistem informasi pasar	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Tersedianya data/informasi harga pasar dan pasokan pangan	10 buku	
	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Terlaksananya penyuluhan kepada anak sekolah SD/MI	15 lokasi	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Terlaksanananya monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	10 kali	
	Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Terlaksananya rapat Pokja DKP	2 kali	
	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah dokumen Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	5 dokumen	
	Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Olah	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Terlaksananya pengawasan reguler	15 lokasi	
	<b>Dinas Pertanian (B)</b>							
	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)</b>	<b>3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>		<b>Persentase peningkatan pendapatan rata-rata petani</b>	<b>22</b>		
	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			meningkatnya jumlah petani terampil	50	
	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Terlaksananya Penyuluhan dan Pelatihan Pelaku Agribisnis	50	
	Peningkatan kemampuan lembaga petani (Pendampingan PUAP APBN)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			terlaksananya Pendampingan PUAP APBN (Gapoktan)	89	
	Peningkatan kemampuan lembaga petani (Pembuatan RDKK)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Terselenggaranya Pelatihan Kemampuan Lembaga Petani (Penyusunan RDKK) (Orang)	30	
	Peningkatan kemampuan lembaga (Pendampingan dan Pengawasan Petani/PBS/PBN)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Terwujudnya lembaga usaha tani yang mandiri (perusahaan)	33	
	Pendampingan Petani dan pelaku Agribisnis (Pendampingan Program TP3K)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah Pembinaan Pembangunan Perkebunan (Kali)	25	
	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan (sentra produksi pertanian)</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>		<b>Persentase produk pertanian yang memiliki standarisasi mutu</b>	<b>40</b>		
	Promosi atas hasil Produksi Pertanian/perkebunan unggulan daerah	2. Prioritas Pendukung I	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Mengikuti Pameran baik sebagai peserta maupun peninjau	1	
	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	2. Prioritas Pendukung I	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Tercatatnya data informasi Harga Pasar (Bulan)	12	
	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan (sentra produksi perkebunan)</b>	<b>1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)</b>	<b>3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>		<b>Persentase Produk Perkebunan yang memiliki standarisasi mutu</b>	<b>35</b>		
	Pengolahan informasi permintaan pasar/atas hasil produksi pertanian/perkebunan Masyarakat (Penetapan harga TBS)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Informasi Harga Pasar Perkebunan (Bulan)	12	
	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>		<b>Persentase Kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi Pertanian Guna Meningkatkan Produksi</b>	<b>60</b>		

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah alat dan mesin pertanian bercocok tanam dan pasca panen yang diadakan (paket)	1	
	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (Khusus Perkebunan)</b>	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan (%)	45			
	Penyuluhan dan Penerapan Teknologi Perkebunan tepat guna (Perlindungan tanaman terpadu)	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah pembinaan, pertemuan, penyuluhan perlindungan tanaman perkebunan (Kali)	71	
	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Persentase Kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi Pertanian Guna Meningkatkan Produksi	60			
	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah magang, pelatihan dan konsultasi/konsolidasi, pembinaan teknologi pertanian (Kali)	75	
	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (kualitas produk pertanian)</b>	2. Prioritas Pendukung I	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Persentase kelompok petani yang menerapkan teknologi pertanian guna meningkatkan kualitas produk	55			
	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	2. Prioritas Pendukung I	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Pengolahan Hasil Pertanian	35	
	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Persentase Kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi Pertanian Guna Meningkatkan Produksi	60			
	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Perlindungan Tanaman Pertanian)	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			jumlah penyuluhan perlindungan tanaman pertanian (Kali)	75	
	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (kualitas produk perkebunan)</b>	2. Prioritas Pendukung I	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Tingkat penggunaan teknologi terapan perkebunan (%)	60			
	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	2. Prioritas Pendukung I	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Tersedianya Alat Pengolahan Pasca Panen Perkebunan ( paket)	2	
	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Khusus Perkebunan)</b>	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Luas Lahan yang Menghasilkan Produksi Perkebunan (ha)	Kelapa Sawit : 92.000, Karet : 6.400			
	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (pengawasan pupuk perkebunan)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi (Kali)	39	
	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Tanaman Pangan)</b>	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Luas Lahan yang Menghasilkan Produksi Pertanian (ha)	Padi : 9.800, Jagung : 360, Kedelai : 100, Bawang Merah : 20, Jeruk : 420			
	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Pelatihan penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura (Orang)	150	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah monitoring/evaluasi/konsultasi dan konsolidasi kegiatan (Kali)	180	
	Fasilitasi Sertifikasi Lahan Pertanian	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah lahan pertanian yang tersertifikasi (Persil)	100	
	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Khusus Perkebunan)</b>	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Luas Lahan yang Menghasilkan Produksi Perkebunan (ha)	Kelapa Sawit : 92.000, Karet : 6.400			
	Pengembangan Komoditi Perkebunan lainnya	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah bibit aren yang diadakan (pohon)	1000	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Perkebunan (Monitoring dan pengawasan perijinan Penangkaran)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				Jumlah Bimbingan dan Pembinaan Penangkar Perkebunan (Kali)	63
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Tanaman Pangan)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Luas Lahan yang Menghasilkan Produksi Pertanian (ha)	Padi : 9.800, Jagung : 360, Kedelai : 100, Bawang Merah : 20, Jeruk : 420			
	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (Pendampingan dana APBN untuk Hortikultura)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				Terlaksananya Pendampingan Pelaksanaan APBN (Kecamatan)	5
	Pengembangan Lahan Pertanian tanaman pangan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				Jumlah sarana pengairan dan sumber air yang dibangun (Pintu air dan embung) (unit)	20
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Khusus Perkebunan)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Luas Lahan yang Menghasilkan Produksi Perkebunan (ha)	Kelapa Sawit : 92.000, Karet : 6.400			
	Pengembangan Kebun Karet Rakyat	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				Luas lahan Pengembangan Kebun Karet Rakyat (Ha)	60
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Tanaman Pangan)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Luas Lahan yang Menghasilkan Produksi Pertanian (ha)	Padi : 9.800, Jagung : 360, Kedelai : 100, Bawang Merah : 20, Jeruk : 420			
	Pengembangan Air dan Jaringan Irigasi	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				Jumlah sarana pengairan dan sumber air yang dibangun (pintu air dan embung) (unit)	20
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Khusus Perkebunan)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Luas Lahan yang Menghasilkan Produksi Perkebunan (ha)	Kelapa Sawit : 92.000, Karet : 6.400			
	Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Rakyat	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				Luas lahan Pengembangan Kebun Sawit Rakyat (Ha)	115
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Tanaman Pangan)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Luas Lahan yang Menghasilkan Produksi Pertanian (ha)	Padi : 9.800, Jagung : 360, Kedelai : 100, Bawang Merah : 20, Jeruk : 420			
	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (Penyediaan pupuk dan pestisida, serta pengawasan)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				Jumlah Evaluasi, Monitoring dan Pembinaan pupuk dan pestisida (kali)	11
	Pengembangan Optimasi Lahan dan Jalan Usaha Tani	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				Terlaksananya pendampingan optimasi lahan (kali)	64
	Pengembangan Tanaman Jeruk	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				Terlatihnya Petani Jeruk	25
	Pengembangan Aneka Sayuran	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				Tersedianya Benih dan Sarana Produksi Sayuran (Paket)	1
	Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Produksi Padi jagung dan Kedelai	15
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan (Pertanian dalam arti luas)	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Cakupan pendampingan dan penyuluhan (%)	80			
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan Pertanian/Perkebunan	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				Jumlah penyuluh pertanian/perkebunan yang ditingkatkan Kapasitasnya	25

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah PPL Non PNS yang menerima fasilitas kerja dan honorarium (orang)	41	
	Penyuluhan dan pendampingan bagi petani	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah petani yang mendapatkan penyuluhan pendampingan dan KTNA (orang)	45	
	Penilaian angka kredit dan kinerja penyuluh	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah Penyuluh yang dievaluasi kinerjanya dan pengusulan angka kredit (DUPAK) penyuluh	63	
	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>		<b>Rasio populasi ternak yang sehat terhadap jumlah ternak (%)</b>		<b>72</b>	
	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Persentase pencegahan penyakit menular ternak/hewan	1	
	Surveillance dan Penyidikan Penyakit Hewan	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah Hasil Analisis laboratorium penyakit ternak (sample)	1213	
	Pengadaan dan Pendistribusian Obat, Vaksin dan Peralatan Kesehatan Ternak	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah Pengadaan obat dan peralatan ternak (paket)	1	
	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)</b>	<b>3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>		<b>Cakupan kelompok peternak yang diberdayakan (persen)</b>		<b>12</b>	
	Pembibitan dan Perawatan Ternak	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Persentase penerapan Good Breeding Practice (%)	60	
	Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pendampingan )	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah kelompok Pengembangan Usaha Sapi Potong berbasis Agribisnis (kelompok)	10	
	Pengembangan Integrasi ternak dengan Tanaman Pertanian/Perkebunan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah kelompok integrasi sapi dengan sawit yang mendapat pembina (kelompok)	10	
	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan (kualitas produk)</b>	<b>1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)</b>	<b>3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>		<b>Persentase Produk Peternakan yang memiliki standarisasi mutu</b>		<b>14</b>	
	Pengawasan Perdagangan Ternak dan Produk Bahan Asal Ternak	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah Pelaku Usaha yang menerapkan Good Manufacturing Practice (Cara Berproduksi yang baik) (unit)	1	
	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan (sentra produksi)</b>	<b>1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)</b>	<b>3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>		<b>Persentase produk peternakan yang memiliki standar mutu</b>		<b>14</b>	
	Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			jumlah kecamatan sebagai kawasan peternakan unggas (kecamatan)	2	
	<b>UPTD Balai Benih Tanaman Pertanian</b>							
	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Tanaman Pangan)</b>	<b>1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)</b>	<b>3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>		<b>Luas Lahan yang Menghasilkan Produksi Pertanian (ha)</b>	<b>Padi : 9.800, Jagung : 360, Kedelai : 100, Bawang Merah : 20, Jeruk : 420</b>		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penangkaran pertanian	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah Pembinaan/Monev Penangkar Benih Pertanian (Kali)	80	
	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Pertanian	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			jumlah bibit unggul tanaman pangan yang diadakan (Ton)	3	
	<b>UPTD Balai Benih Tanaman Perkebunan</b>							
	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Khusus Perkebunan)</b>	<b>1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)</b>	<b>3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>		<b>Luas Lahan yang Menghasilkan Produksi Perkebunan (ha)</b>	<b>Kelapa Sawit : 92.000, Karet : 6.400</b>		

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Jumlah pembibitan perkebunan Kelapa Sawit (Pokok)	12000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penangkaran Tanaman Perkebunan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Penangkaran Perkebunan (kali)	62	
	<b>UPTD Pembibitan dan Perawatan Ternak Petangis</b>							
	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)</b>	<b>3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>	<b>Cakupan kelompok peternak yang diberdayakan (persen)</b>	<b>12</b>			
	Pembibitan dan Perawatan Ternak UPTD	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			XXX	XXX	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak di UPTD	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			XXX	XXX	
	<b>UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kuaro</b>							
	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>	<b>Rasio populasi ternak yang sehat terhadap jumlah ternak (%)</b>	<b>72</b>			
	Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskesmas Kuaro)	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Persentase pelayanan kesehatan ternak di wilayah UPT Puskesmas Kuaro	25%	
	<b>UPTD Pusat Kesehatan Hewan Long Ikis</b>							
	Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskesmas Longikis)	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			persentase pelayanan kesehatan hewan di wilayah UPT puskesmas Long ikis	25%	
	<b>UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kerang</b>							
	Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskesmas Kerang)	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Persentasi Pelayanan Kesehatan Hewan di wilayah UPTD Puskesmas	75%	
	<b>UPTD Cek Point Hewan Muara Komam</b>							
	Optimasi Pusat Kesehatan Hewan ( UPTD Cek Point Muara Komam)	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			persentase pelayanan kesehatan hewan di wilayah UPTD Puskesmas	60	
	<b>UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tana Paser</b>							
	Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskesmas Tana Paser)	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Persentase pelayanan kesehatan ternak di wilayah UPT Puskesmas tana Paser	25%	
	<b>UPTD Pusat Kesehatan Hewan Pasir Belengkong</b>							
	Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskesmas Pasir Belengkong)	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1. Pesentase pelayanan kesehatan hewan di wilayah UPTD Puskesmas (%)	0,097222222	
	<b>UPTD Rumah Potong Hewan Jone</b>							
	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan (kualitas produk)</b>	<b>1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)</b>	<b>3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>	<b>Persentase Produk Peternakan yang memiliki standarisasi mutu</b>	<b>14</b>			
	Optimasi Pelayanan Rumah Potong Hewan	1.7. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah (Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas)	3.1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			xx	xx	
	<b>UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Basir Belengkong</b>							
	<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan (Pertanian dalam arti luas)</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>	<b>Cakupan pendampingan dan penyuluhan (%)</b>	<b>80</b>			
	Pengembangan sarana dan prasarana UPTLTD BP3K Tanah Grogot	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor	12 Bulan	
	<b>UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Basir Belengkong</b>							

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Pengembangan sarana dan prasarana UPTLTD BP3K Pasir Belengkong	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor	12 Bulan	
	<b>UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan Batu Engau</b>							
	Pengembangan sarana dan prasarana UPTLTD BP3K Batu Engau	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Persentase cakupan peran dan fungsi BP3K Kecamatan	100%	
	<b>UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan Batu Sopang</b>							
	Pengembangan sarana dan prasarana UPTLTD BP3K Batu Sopang	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BP3K	12 bulan	
	<b>UPTLTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan Long Kali</b>							
	Pengembangan sarana dan prasarana UPTLTD BP3K Long Kali	2. Prioritas Pendukung I	3.1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			Persentase cakupan peran dan fungsi BP3K Kecamatan	100%	
	<b>Perdagangan</b>							
	<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPMK)</b>							
	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>3.3.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional</b>	<b>Peningkatan jumlah pasar tradisional (Unit)</b>	<b>83</b>			
	Peringatan Hari Konsumen Nasional	2. Prioritas Pendukung I	3.3.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional			terlaksananya peringatan hari konsumen nasional	1 kali	
	Peningkatan Pengawasan SPBU dan APMS	2. Prioritas Pendukung I	3.3.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional			Terlaksananya pengawasan standar uttp	12 bulan	
	Standarisasi Alat Ukur Takar Timbang Panjang ( UTPP )	2. Prioritas Pendukung I	3.3.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional			Terlaksananya pengujian alat UTPP	12 bulan	
	Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	2. Prioritas Pendukung I	3.3.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional			terlaksananya peraturan daerah	10 kecamatan	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha	2. Prioritas Pendukung I	3.3.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional			Pengembangan usaha dengan terbitnya perizinan	45 unit usaha	
	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk	2. Prioritas Pendukung I	3.3.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional			termonitornya harga dan stock barang pokok strategis	12 bulan	
	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	2. Prioritas Pendukung I	3.3.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional			Pameran produk unggulan	1 kali	
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	2. Prioritas Pendukung I	3.3.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional			terlaksananya pengawasan peredaran barang pokok	12 bulan	
	Koordinasi Pengembangan Ekspor Non Migas	2. Prioritas Pendukung I	3.3.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional			terciptanya kesepakatan tentang ekspor non migas	13 kabupaten	
	Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan Pasar	2. Prioritas Pendukung I	3.3.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional			Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	12 bulan	
	<b>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>3.3.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional</b>	<b>Persentase pedagang yang menempati lokasi sesuai ijin</b>	<b>80</b>			
	Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	2. Prioritas Pendukung I	3.3.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional			Meningkatnya ketertiban pasar	5	
	<b>UPTD Pasar Penyembolum Senaken</b>							
	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>3.3.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional</b>	<b>Peningkatan jumlah pasar tradisional (Unit)</b>	<b>83</b>			
	Operasional dan Pengembangan Pasar (UPTD Pasar Penyembolum Senaken)	2. Prioritas Pendukung I	3.3.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional			Operasionalisasi UPTD Pasar Penyembolum Senaken (Bulan)	12	
	<b>UPTD Kandilo Plaza</b>							
	Operasional dan Pengembangan Pasar (UPTD Kandilo Plaza)	2. Prioritas Pendukung I	3.3.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional			Operasional dan Pengembangan Pasar (UPTD Kandilo PLaza)	12 bulan	
	<b>UPT Meterologi Legal</b>							
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemeteriologian Daerah	2. Prioritas Pendukung I	3.3.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional			terciptanya tertib ukur	5 kecamatan	
	<b>Perindustrian</b>							



Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	
	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2. Prioritas Pendukung I	3.3.4. Meningkatnya kinerja Industri Kecil Menengah		Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor IKM (%)	50			
	Pengembangan Kualitas dan standarisasi Mutu barang hasil IKM	2. Prioritas Pendukung I	3.3.4. Meningkatnya kinerja Industri Kecil Menengah				Pembinaan dan perlindungan usaha IKM		10 kecamatan
	Kebijakan keterkaitan Industri Hulu Hilir	2. Prioritas Pendukung I	3.3.4. Meningkatnya kinerja Industri Kecil Menengah				Tersedianya kajian RIPIK		1 dokumen
	Pameran dan Promosi Produk IKM	2. Prioritas Pendukung I	3.3.4. Meningkatnya kinerja Industri Kecil Menengah				terlaksananya promosi / pameran bagi hasil IKM		1 kali
	Pembinaan Industri Kecil dan menengah dalam memperkuat Jaringan IKM ( Monitoring dan Pembinaan Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	2. Prioritas Pendukung I	3.3.4. Meningkatnya kinerja Industri Kecil Menengah				Terlaksananya monitoring dan evaluasi Ilmei		10 kecamatan
	Pengembangan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Industri Agro dan Kimia	2. Prioritas Pendukung I	3.3.4. Meningkatnya kinerja Industri Kecil Menengah		Kontribusi industri kecil menengah terhadap PDRB (%)	60			
							terlaksananya monitoring industri agro dan kimia		10 kecamatan
	<b>Transmigrasi</b>								
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (A)								
	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3. Prioritas Pendukung II	5.3.2. Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi		Jumlah Kawasan Transmigrasi	6 Kawasan			
	Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	3. Prioritas Pendukung II	5.3.2. Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi				Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi		1
	Identifikasi Potensi Calon Lokasi	3. Prioritas Pendukung II	5.3.2. Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi				Jumlah Hak Pengelola Lahan (1. Kec. Long Ikis Ds. Kayungo I b, Ds. Jemparing, 2. Muara Komam, 3 Tanjung Harapan desa Riwang, 4. Batu Kajang, 5. Muara Samu )		1
	Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman	3. Prioritas Pendukung II	5.3.2. Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi				Jumlah Dokumen Rencana Teknis Satuan Pemukiman ( RTSP )		1
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Kawasan Transmigrasi	3. Prioritas Pendukung II	5.3.2. Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi				Jumlah Pencari Kerja yang terlatih		20
	Advokasi Permasalahan Kawasan Transmigrasi	3. Prioritas Pendukung II	5.3.2. Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi				Jumlah Penyelesaian Permasalahan Lahan		3
	<b>Urusan Penunjang</b>								
	<b>Penunjang Urusan (Rutin)</b>								
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (A)								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah jenis penyediaan jasa		12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Kendaraan dinas Operasional		8
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah penyedia jasa Administrasi Keuangan		12 Bulan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah penyedia jasa kebersihan		12 Bulan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah jenis ATK yang disediakan		12 Bulan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah barang dan dicetak dan digandakan		12
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah pengadaan kendaraan dinas Operasional		10
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah jenis pengadaan peralatan kantor		100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah jenis bacaan dan peraturan perundang-undangan		100%
	Penyediaan Makan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah tamu dan rapat yang dilaksanakan		12 Bulan
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah yang mengikut rapat dan koordinasi		12 Bulan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	100			
	Pemeliharaan Rutin / berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah kendaraan Jabatan		1
	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah kendaraan operasional		8
	Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor		100

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	
	<b>Belengkong</b>								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase ketersediaan fasilitas dasar penunjang kelancaran kegiatan perkantoran		100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK aktif		100%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase pelayanan keuangan bagi kegiatan perkantoran		100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase alat tulis kantor yang disediakan dengan kebutuhan		100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan		100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase ketersediaan bahan bacaan dan perundang-undangan yang dimanfaatkan		100%
	Penyediaan Makan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase makanan dan minuman yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan		100%
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase perjalanan dinas yang sesuai dengan tujuan perjalanan dinasnya berdasarkan laporan yang masuk		100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>	<b>100</b>			
	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)		1
	<b>UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Kuaro</b>								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah ketersediaan fasilitas dasar penunjang kelancaran kegiatan perkantoran		100
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah penyedia jasa Administrasi Keuangan		100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah						
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase alat tulis kantor yang disediakan dengan kebutuhan		100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan		100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor		100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase ketersediaan bahan bacaan dan perundang-undangan yang dimanfaatkan		100
	Penyediaan Makan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase makanan dan minuman yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan		100
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase perjalanan dinas yang sesuai dengan tujuan perjalanan dinasnya berdasarkan laporan yang masuk		100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>	<b>100</b>			
	Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase gedung dan peralatan kantor yang dipelihara		100
	<b>UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Long Ikis</b>								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah ketersediaan fasilitas dasar penunjang kelancaran kegiatan perkantoran		100%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah penyedia jasa Administrasi Keuangan		100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase alat tulis kantor yang disediakan dengan kebutuhan		100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan		100%



Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	100		
	Pemeliharaan Rutin / berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah mobil dinas/operasional yang dipelihara (unit)	1
	UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Sangkuriman							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah ketersediaan fasilitas dasar penunjang kelancaran kegiatan perkantoran	100
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah penyedia jasa Administrasi Keuangan	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah penyedia jasa kebersihan kantor	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase alat tulis kantor yang disediakan dengan kebutuhan	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase ketersediaan bahan bacaan dan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100
	Penyediaan Makan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase makanan dan minuman yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	100
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase perjalanan dinas yang sesuai dengan tujuan perjalanan dinas berdasarkan laporan yang masuk	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	100		
	Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100
	UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Tanah Grogot							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1).Persentase SKPD yang terlayani	100
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase pelayanan keuangan bagi kegiatan perkantoran	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase ruangan yang telah dilayani jasa kebersihan kantor	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase alat tulis kantor yang disediakan dengan kebutuhan	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase ketersediaan bahan bacaan dan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100
	Penyediaan Makan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase makanan dan minuman yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	100
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase perjalanan dinas yang sesuai dengan tujuan perjalanan dinas berdasarkan laporan yang masuk	100
	UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Batu Sopang							
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Pelayanan Keuangan bagi Kegiatan Perkantoran	100
	UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Batu Sopang							
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Alat Tulis Kantor yang disediakan dengan kebutuhan	100
	UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Batu Sopang							
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Terpenuhinya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan	100
	UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Batu Sopang							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	
	UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Batu Sopang								
	Penyediaan Makan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Makanan dan Minuman yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	100	
	UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Batu Sopang								
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase perjalanan dinas yang sesuai dengan tujuan perjalanan dinas berdasarkan laporan yang masuk	100	
	UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Batu Sopang								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	100			
	Pemeliharaan Rutin / berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah mobil dinas/operasional yang dipelihara (unit)	100	
	Dinas Kesehatan (A)								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Ketersediaan Materi	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Persentase tersedianya Jasa Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon	100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase tersedianya Biaya Perpanjangan Izin Kelayakan Jalan/STNK Kendaraan Dinas	100	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Persentase Ketersediaan Honorarium Pengelola Keuangan	100	
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Ketersediaan Bahan dan Alat Kebersihan Gedung Kantor	100	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Ketersediaan Alat dan Bahan Kelistrikan Penerangan Bangunan Kantor	100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga di Sarana Kesehatan	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Sumber Bacaan Surat Kabar Harian	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Ketersediaan BBM dan Logistik Lainnya Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase tersedianya makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan	100	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Persentase Kecukupan Biaya Perjalanan Untuk Konsultasi dan Supervisi	100	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	100			
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Ketersediaan Peralatan Kantor	15	
	Pengadaan Mebeleur	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Ketersediaan Meubelair Pada Sarana Kesehatan	50	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	100	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Peralatan Gedung Kantor Terpelihara	75	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Kendaraan Operasional Diperbaiki	100	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase Peningkatan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS	30			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Aparatur Yang Menggunakan Pakaian Dinas Sesuai Ketentuan	100	
	UPTD Puskesmas Tanah Grogot								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah					100	100

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				100	100
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				100	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				100	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				100	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				80	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				100	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>	<b>100</b>		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				100	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				100	100
	<b>UPTD Puskesmas Pasir Belengkong</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah					100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Persentase tersedianya materi	100
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Persentase tersedianya jasa kebutuhan listrik, air dan telepon	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Persentase SKPD yang terlayani	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Persentase ketersediaan alat tulis kantor	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Persentase SKPD yang terlayani	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Persentase SKPD yang terlayani	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Persentase tersedianya makanan dan minuman rapat / Kegiatan	80
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>	<b>100</b>	<b>1. Persentase kecakupan biaya perjalanan untuk konsultasi dan rapat koordinasi</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Persentase SKPD yang terlayani	100
	<b>UPTD Puskesmas Kuaro</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Tersedianya jasa Air, Listrik, telepon, internet	12 bulan
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Tersedianya belanja bahan/ alat kebersihan kantor	1 kali
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Belanja ATK	1 kali
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Belanja Percetakan	1 kali
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Tersedianya pengadaan alat-alat listrik	12 bulan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Terlaksananya pengadaan BBM genset	12 bulan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Belanja makanan dan minuman rapat	1 tahun
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Rakor Pimpus	24 kali
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>	<b>100</b>		
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Terlaksananya pengadaan Laptop	3 unit

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terlaksananya Service kendaraan	3 unit
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terlaksananya Pemeliharaan rutin gedung kantor	1 kali
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Pemeliharaan AC	4 kali
	Pengadaan Instalasi Listrik / AC / Air /Telepon	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terlaksananya pembelian AC	2 unit
	<b>UPTD Puskesmas Long Ikis</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase tersedianya materai	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase tersedianya Jasa Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon	100
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Ketersediaan Bahan dan Alat Kebersihan Gedung	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan penggandaan	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Ketersediaan Alat dan Bahan Kelistrikan Penerangan Bangunan Kantor	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Sumber Bacaan Surat Kabar Harian	25
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Ketersediaan BBM dan Logistik Lainnya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase kecukupan Biaya Perjalanan untuk Konsultasi dan Supervisi	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>	<b>100</b>		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase bangunan/Gedung Kantor Pelayanan yang terpelihara	90
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Dipelihara	100
	<b>UPTD Puskesmas Long Kali</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya Jasa Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon	100
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Ketersediaan Bahan dan Alat Kebersihan Gedung Kantor	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Ketersediaan Alat dan Bahan Kelistrikan Penerangan Bangunan Kanto	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Ketersediaan BBM dan Logistik Lainnya Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Kecukupan biaya Perjalanan Untuk Konsultasi dan Supervisi	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>	<b>100</b>		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Ketersediaan Peralatan Kantor	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	100
	<b>UPTD Puskesmas Batu Kajang</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Tersedianya materai	60
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase SKPD yang terlayani	90

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase SKPD yang terlayani	100	
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase SKPD yang terlayani	100	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase SKPD yang terlayani	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhi Komponen Penerangan listrik Bangunan Kantor	100	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase SKPD yang terlayani	90	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Kecukupan Biaya Perjalanan Untuk Konsultasi dan Supervisi	90	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>	<b>100</b>		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	90	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Peralatan Gedung Kantor Terpelihara	90	
	<b>UPTD Puskesmas Muara Komam</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase tersedianya jasa kebutuhan listrik, air dan telpon	100%	
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase ketersediaan bahan dan alat kebersihan Gedung kantor	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedia BBM Genset	12 Bulan	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase tersedianya makanan dan Minuman Rapat	-	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Kecukupan Biaya Perjalanan Konsultasi dan Supervisi	-	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>	<b>100</b>		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	100%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			1).Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	-	
	<b>UPTD Puskesmas Kerang</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase tersedianya Jasa Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon	100	
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan Bahan dan Alat Kebersihan Gedung Kantor	100	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan BBM dan Logistik Lainnya Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase tersedianya makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan	100	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase tersedianya makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan	100	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Kecukupan Biaya Perjalanan Untuk Konsultasi dan Supervisi	100	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>	<b>100</b>		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	100	
	<b>UPTD Puskesmas Tanjung Aru</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase SKPD yang terlayani	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya Jasa Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon	100	
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Ketersediaan Bahan dan Alat Kebersihan Gedung Kantor	100	



Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Ketersediaan BBM dan Logistik Lainnya Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya makanan dan minuman Rapat / Kegiatan	100	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Kecukupan Biaya Perjalanan Untuk Konsultasi dan Supervisi	100	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>100</b>			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Kondaraan Dinas/Operasional Terpelihara	100	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Bangunan/Gedung Kantor Pelayanan Yang Terpelihara	100	
	<b>UPTD Puskesmas Muara Samu</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>100</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentasi Tersedianya Matrial	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya Listrik dan Air yang memadai di Puskesmas dan Pusban/Polindes	100%	
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan Bahan dan Alat Kebersihan Gedung Kantor	100%	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya Alat tulis kantor	100%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan barang cetakan Dan Penggandaan	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM Genset Puskesmas Dan Colchaint	100%	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Pasien	100%	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentasi Kecukupan Biaya perjalanan untuk Konsultasi dan Supervisi	100%	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>100</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase kendaraan dinas /Operasional Terpelihara	100%	
	<b>UPTD Puskesmas Mendik</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>100</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya jasa surat menyurat yang memadai	12 bulan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya listrik yang memadai	12 bulan	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya Kebutuhan ATK	12 bulan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			terpenuhinya kebutuhan listrik peralatan Puskesmas	12 bulan	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			terpenuhinya konsumsi Rapat star dan program kegiatan	12 bulan	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			terpenuhinya rapat-rapat dan konsultasi petugas	12 bln	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>100</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			terawatnya kondisi kendaraan Puskesmas	12 bulan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			terawatnya kondisi bangunan Puskesmas	12 bulan	
	<b>UPTD Puskesmas Krayan</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>100</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Tersedianya matera	12 bulan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase tersedianya Jasa Kebutuhan Listrik,Air dan Telepon	12 bulan	
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan Bahan dan Alat Kebersihan Gedung Kantor	100%	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan Alat dan Bahan Kelistrikan Penerangan Bangunan Kantor	100%	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase tersedianya makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan	12 bulan	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Kecukupan Biaya Perjalanan Untuk Konsultasi dan Supervisi	100%	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>	<b>100</b>			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	100%	
	<b>UPTD Puskesmas Kayungo</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Tersedianya materai	1	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Tersedianya Jasa Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon	100	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan Alat tulis Kantor	1	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase tersedianya makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan	1	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Kecukupan Biaya Perjalanan Untuk Konsultasi dan Supervisi	1	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>	<b>100</b>			
	Pengadaan Mebeleur	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan Meubelair Pada Sarana Kesehatan	3	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	3	
	Pengadaan Instalasi Listrik / AC / Air / Telepon	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase tersedianya Sarana Kelistrikan, Air Bersih dan Telepon	1	
	<b>UPTD Puskesmas Lolo</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Tersedianya materai	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase tersedianya Jasa Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon	100	
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase ketersediaan bahan dan Alat Kebersihan Gedung Kantor	100	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan Alat tulis Kantor	100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan Alat dan Bahan Kelistrikan Penerangan Bangunan Kantor	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan BBM dan Logistik Lainnya Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase tersedianya makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan	100	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Kecukupan Biaya Perjalanan Untuk Konsultasi dan Supervisi	100	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>	<b>100</b>			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	100	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Dipelihara	100	
	<b>UPTD Puskesmas Padang Pengrapat</b>							

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya Materai untuk jasa surat menyurat yang lengkap	50 lembar
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya sumber daya air, telepon dan listrik	12 Bulan
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhiya peralatan dan bahan pembersih	12 Bulan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya Alat Tulis Kantor di Puskesmas, Pusban dan Polindes	12 Bulan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Puskesmas	12 Bulan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya Komponen penerangan listrik	6 item
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya bahan bacaan surat kabar	12 Bulan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhiya bahan bakar dan pelumas roda 4 (Empat)	12 Bulan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan rapat	1 kali
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Teraksanannya rapat koordinasi dan konsultasi, rapat-rapat, pertemuan ke Kab.	51 kali
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	100		
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Teraksanannya penyediaan Komputer dan Monitor	1 unit
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhiya kebutuhan jasa service, pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4 (Empat)	3 unit
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhiya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 paket
	<b>UPTD Puskesmas Suliliran Baru (Payo Klato 1 / SP 1)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				tersedianya sumber daya air dan listrik	12 bulan
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				terpenuhiya alat dan bahan kebersihan	26 item
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedia Alat Tulis Kantor	33 item
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				tersedianya kebutuhan Bahan Bakar (BBM Genset )	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhiya kebutuhan makanan dan minuman untuk Rapat Puskesmas	780 porsi
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				terseleenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	100		
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya Peralatan Presentasi	1 unit
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				terpenuhiya kebutuhan servis kendaraan	4 Mobil
	<b>UPTD Puskesmas Suatung Baru (Payo Klato 2 / SP 2)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Tersedianya materai	87 lbr
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				tersedianya Jasa Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon	100
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Ketersediaan Bahan dan Alat Kebersihan Gedung Kantor	469 bh
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Ketersediaan Alat Tulis Kantor	553 bh
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5834 lembar
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Ketersediaan Alat dan Bahan Kelistrikan Penerangan Bangunan Kantor	84 buah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Ketersediaan BBM dan Logistik Lainnya Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	600 ltr

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan	396	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Kecukupan Biaya Perjalanan Untuk Konsultasi dan Supervisi	100	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>		<b>100</b>	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	4 unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Dipelihara	13 unit	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>		<b>100</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase tersedianya materai	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase tersedianya jasa kebutuhan listrik, air dan telepon	100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase tersedianya biaya perpanjangan ijin kelayakan jalan/STNK kendaraan dinas	80	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan Alat Tulis Kantor	80	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan Alat dan Bahan Kelistrikan Penerangan Bangunan Kantor	80	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga	80	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Sumber Bacaan Surat Kabar Harian	80	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan BBM dan Logistik Lainnya pada fasilitas Pelayanan Kesehatan	80	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase tersedianya makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan	80	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Kecukupan Biaya Perjalanan untuk Konsultasi dan Supervisi	80	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>		<b>100</b>	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan Peralatan Kantor	80	
	Pengadaan Mebeleur	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Ketersediaan Mebeleur	60	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Kendaraan Dinas / Operasional Terpelihara	80	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase bangunan/Gedung Kantor Pelayanan Yang Terpelihara	80	
	<b>UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>		<b>100</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya dokumen/ administrasi jasa surat menyurat	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya jasa air, listrik dan telepon serta internet	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Peningkatan Usia pakai kendaraan	12 Bulan	
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya bahan dan sarana kebersihan labkesda	23 item	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya alat tulis kantor	35 item	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya bahan cetak, pengadaan dan fotokopi	3 Item	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya komponen instalasi listrik berupa bola lampu	40 buah	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya bahan bacaan berupa langganan koran	12 Bulan	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya makanan dan minuman rapat untuk rapat bulanan	12 Kali	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	100		
	Pengadaan Mebeleur	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhinya pengadaan meubeler kantor berupa kursi tamu/sofa dan kursi rapat	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpeliharanya kendaraan operasional labkesda	1 unit
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhinya pemeliharaan rutin AC UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	18 buah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpeliharanya peralatan penunjang pemeriksaan laboratorium lingkungan dan klinik	2 Paket
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase Pemantauan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS	30		
	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perengkapannya	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya pakaian kerja dan khusus pengambilan sampel di lapangan	18 buah
	UPTD Jaminan Kesehatan Daerah							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase tersedianya Jasa Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase ketersediaan Alat Tulis Kantor	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Kecukupan Biaya Perjalanan Untuk Konsultasi dan Supervisi	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	100		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Bangunan/Gedung Kantor Pelayanan Yang Terpelihara	90
	UPTD Puskesmas Sebakung Taka							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase tersedianya Jasa Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon	100
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase ketersediaan Bahan dan Alat Kebersihan Gedung Kantor	1
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase ketersediaan Alat Tulis Kantor	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase tersedianya Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Kecukupan Biaya Perjalanan Untuk Konsultasi dan Supervisi	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	100		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	100
	Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				terpenuhinya kebutuhan jasa telepon, listrik, air dan internet	12 bulan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				jumlah pajak kendaraan dinas / operasional / amulance yang terbayar	34 unit
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tertaksananya Dukungan Jasa Administrasi Guna Menunjang Pelayanan yang Baik	12 bulan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya Bahan Bacaan	12 bulan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				tersedianya kegiatan Rakor dalam/ luar daerah	12 bulan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	100		

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah kendaraan dinas operasional	2 unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang terpelihara untuk menunjang kegiatan	-	
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)</b>	<b>2. Prioritas Pendukung I</b>	<b>4.3.2. meningkatkan kualitas pelayanan publik</b>		<b>8</b>			
	Pelayanan BLUD RSUD Panglima Sebaya	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik			Tertaksananya Pelayanan yang Berkualitas	1 Tahun	
	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (B)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedia nya TLP, Air Listrik, internet	13 Buah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah kendaraan dinas yg terbayar perizinannya	13 Unit	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya honor Bulanan PNS/PTT	25 Orang	
	Penyedia Jasa Kebersihan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	63 BUAH	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kebutuhan ATK	3046 buah	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kebutuhan Bahan Cetak dan Penggandaan	1 Th	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	11	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Peralatan Perlengkapan Kantor	37 buah	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Bahan Bacaan	96 bulan	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah jamuan Makan Minum	750 ktk	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi yg dilaksanakan	40 OH	
	Penyedia Pelayanan dan Inventarisasi Barang / Aset	4. Rutin	4.3.1. meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terdata barang aset SKPD	6	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>	<b>100</b>		
	Pembangunan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Luas gedung kantor yang dibangun	1532	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yg Terpelihara	1 unit	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yg terpelihara	4 unit	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan Pendukung kantor yg terpelihara	10 unit	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Luas gedung kantor yang direhabilitasi (m2)	1.165	
	<b>Unit Pelaksana Operasional (UPO) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</b>							
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpeliharanya Komplek Perkantoran	12 bulan	
	<b>Unit Pelaksana Operasional (UPO) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</b>							
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Pemeliharaan Gedung komplek Perkantoran	12 bulan	
	<b>Unit Pelaksana Operasional (UPO) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (B)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah surat yang disediakan	1000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah biaya internet (bulan)	12	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan (unit)	13	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan Daerah (orang)	23	
	Penyediaan Jasa Kebersihan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan (m2)	1336:08:00	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah jenis ATK yang disediakan	24	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah cetakan yang disediakan (lembar)	95000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	4. Rutin	4.3.1. meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah ruangan yang mendapat peralatan dan perlengkapan	3	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksemplar)	36	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	1140	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah yang dilakukan (kali)	35	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>		<b>100</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah kendaraan operasional lapangan	2	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (unit)	13	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase Peningkatan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS</b>		<b>30</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Pakaian Dinas untuk ASN dan PTT (Stel)	136	
	<b>Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>		<b>100</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jasa Surat menyurat yang Tersedia	12 bulan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah jasa komunikasi, jaringan sumber daya air dan Listrik kesbangpol yang terbayarkan	12 bulan	
	Penyediaan Jasa Pemerintahaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional yang terbayarkan	5 Unit	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang terbayarkan	120	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan Kebersihan Yang Tersedia	10 Jenis	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	22	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Bahan Cetak dan Pengandaan yang tersedia	12	
	Penyediaan Bahan Bacaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundangan-perundangan yang tersedia	2	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	33	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Keikutsertaan pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>		<b>100</b>	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia	2 Jenis	
	Pengadaan Meubelair	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Meubelair Kantor Yang Tersedia	1 jenis	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Terpelihara	3 Unit	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	12 Bulan	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	1	
	Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Gedung/kantor yang direhabilitasi	1	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase Peningkatan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS</b>		<b>30</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Pakaian Dinas PNS dan PTT	1 Paket	
	<b>Satuan Polisi Pamong Praja (B)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>		<b>100</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			-	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			-	-	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			-	-	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			-	-	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			-	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			-	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			-	--	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			-	-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			-	-	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			-	-	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			-	-	
	Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			-	-	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>	<b>100</b>			
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			-	-	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			-	-	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			-	-	
	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Penyediaan jasa surat menyurat	450 Lembar	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya Telepon, Air dan Listrik	1 Tahun	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	20 Unit	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah nonbantuan pengelola keuangan yang terbayarkan	18 orang	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah honorarium petugas kebersihan kantor yang terbayarkan	1 Orang	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah paket cetakan yang disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah bangunan kantor yang disediakan komponen instalasi listrik	2 Bangunan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah kantor yang disediakan peralatan dan perlengkapannya	2 Bangunan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah bahan bacaan surat kabar/koran	1.825 Eksemplar	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah makan minum rapat rutin	500 Kotak	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah paket koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	1 Paket	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>	<b>100</b>			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 Gedung	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	20	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah paket peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 Paket	
	<b>Dinas Sosial (A)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah materai yang dibutuhkan (Lembar)	150	



Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya kebutuhan komunikasi telepon, internet, air dan listrik (Bulan)	12	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Unit)	4	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya Personil Penatausahaan Keuangan (Orang)	29	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	42	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Bulan)	12	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan (Jenis)	4	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah bahan bacaan yang disediakan (Eksemplar)	36	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (Kotak)	420	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase intensitas rapat koordinasi dan konsultasi (%)	100	
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah bahan dan sarana kebersihan gedung kantor (Jenis)	18	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>	<b>100</b>			
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit)	6	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah mobil jabatan yang dipelihara (Unit)	1	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)	3	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	7	
	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (A)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya Materai dan Perangko (Lembar)	450	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	12	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah pembayaran pajak kendaraan (Unit)	4	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah pembayaran nontransaksi keuangan dan gaji PTT (Bulan)	12	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	12	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	12	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Bulan)	12	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah bola lampu (Buah)	85	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah koran (Expl)	1848	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah kotak makanan dan kudapan	1368	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam daerah maupun diluar daerah (Bulan)	12	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>	<b>100</b>			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (Bulan)	12	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpeliharanya Perlengkapan Kantor (Bulan)	12	
	<b>UPTD Balai Latihan Kerja</b>							

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase SKPD yang terlayani	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	100		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				terpeliharanya Perengkapan Kantor (Bulan)	12
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (A)							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah benda pos ( material ) yang tersedia	210
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah pelayanan jasa telepon, listrik, air, internet dan tv kabel	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah kendaraan dinas kantor yang tersedia dan terawat	3
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah honor pengelola keuangan dan pegawai honorer ( orang )	20
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				1. Jumlah bahan kebersihan yang tersedia	11
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor ( item )	6
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Pengadaan alat tulis kantor	44
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah barang cetak dan penggandaan, foto copy dan penjilidan	11
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	10
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah koran dan pengadaan buku perundang-undangan	1080
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah makanan dan minuman yang tersedia ( kotak )	1200
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ( item kegiatan )	10
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	100		
	Pengadaan Mebeleur	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Mebeleur yang tersedia	35
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Mobil Jabatan ( Unit ) tersedia	3
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah kendaraan dinas ( mobil ) yang tersedia dan terawat	3
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				kantor ( unit ) yang terpelihara	13
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah peralatan gedung kantor ( unit ) yang terpelihara dan terawat	9
	Dinas Ketahanan Pangan (A)							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100		
	Penyediaan jasa surat menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				tersedianya materai dan benda post lainnya	100 buah
	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				terpenuhinya kebutuhan jasa telepon dan internet kantor	12 bulan
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas jabatan dan operasional	4 buah
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				tersedianya honor pengelola keuangan dan PTT	12 bulan
	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				terselenggaranya pemeliharaan Personal Computer dan instal komputer	6 unit

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan alat tulis kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	12 bulan	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya bahan bacaan surat kabar	6 Expl	
	Penyediaan makanan dan minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya makanan dan minuman rapat	240 kotak	
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Pengadaan peralatan gedung/kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya peralatan kantor ( Printer, UPS dan Lap Top )	15 unit	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			jabatan	1 unit	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			terpenunnya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	3 unit	
	<b>Dinas Lingkungan Hidup (A)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Aparatur Internal DLH Kabupaten Paser yang terlayani	45	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			yang mendapat Pemeliharaan dan Perijinan	15	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Aparatur Jasa Administrasi Keuangan	11	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Penggandaan yang Disediakan (Lembar)	44180	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Ruang yang Disediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Eksampier Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Per Hari	4	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Orang yang Mendapat Makanan dan Minuman	495	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Provinsi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Dilakukan ke Dalam Daerah	15	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Mendapat Perengkapan Gedung Kantor	0	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara (Unit)	7	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	100	
	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Meyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Alat Pos/materai	360	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jasa	100	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional (Unit)	4	
	penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Petugas ADM Keuangan	9	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	2	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Alat Tulis Kantor (Persentase)	100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Barang Cetak dan Penggandaan	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Komponen	100	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Bacaan (Koran)	100	
	Penyediaan makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase makanan dan Minuman	100	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			Konsultasi ke Luar Daerah	100	
	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Mobil Dinas	1	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Mobil Operasional	3	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Perlengkapan (AC)	3	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	40	
	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (A)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah ketersediaan jasa air, listrik, telepon dan internet	12 bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi Perpanjangan STNK	5 unit	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah terpenuhannya jasa administrasi keuangan	12 bulan	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah ketersediaan ATK	12 bulan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah ketersediaan koran	12 bulan	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			minuman rapat rutin	100%	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase ketersediaan dana rapat koordinasi dan konsultasi	100%	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>		
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	5 unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah periode pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	
	<b>Dinas Perhubungan (B)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>		
	Penyediaan jasa surat menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya materai kantor	175	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12	
	Kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	17	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya jasa administrasi keuangan	12	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (%)	100	
	Penyediaan alat tulis kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			presentase ketersediaan ATK	65	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya barang cetakan dan penggandaan	157	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor	100	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya peralatan kebersihan kantor (%)	100	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya bacaan dan peraturan perundang-undangan (bln)	12	
	Penyediaan makanan dan minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya makanan dan minuman	1800	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dinas perhubungan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Teraksaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (%)	100	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja</b>	<b>100</b>			
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan	1	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	5	
	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (A)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Surat yang Disediakan	40	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Komponen Instalasi Listrik dan Telpon / Internet	9	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			yang Mendapat Pemeliharaan dan Perlengkapan (Unit)	3	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah PNS dan P11 yang Penerima Jasa Administrasi Keuangan	25	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Ruangan yang Mendapat Pelayanan Kebersihan Kantor	10	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	25	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Cetak (Eksemplar)	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	
	Penyediaan Perundang-undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Perundang-Undangan	3	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Nasi Kotak / Snack	480	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang Dilakukan	24	
	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Daerah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah yang Dilakukan	10	
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kegiatan yang Dimonitoring	35	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional (Unit)	2	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara (Jenis)	3	
	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (B)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terselenggaranya surat menyurat kantor	630 Buah	
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			terpenuhinya jasa pemeliharaan kendaraan Dinas / operasional	12 Bulan	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan	12 Orang	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 Bulan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			perlengkapan kantor	12 Bulan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	
	Penyediaan Makan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya penyediaan makan dan minuman	400 kotak	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	12 Bulan	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas dan jabatan	12 Bulan	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	
	<b>Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (A)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya materai dan prangko	50 Lembar	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Teraksanannya Dukungan fasilitas guna aktifitas pelayanan yang baik	12	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terayatnya Pajak Kendaraan dinas/operasional	4	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan	12	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya Sarana Kebutuhan alat tulis kantor	12	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya Sarana Kebutuhan barang cetak dan fotocopy	12	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	3	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Makanan dan minuman rapat	12	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya biaya perjalanan dinas pegawai	12	
	Monitoring dan Evaluasi Usulan Hibah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Usaha yang diverifikasi	20	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah kegiatan yang di monitoring, evaluasi dan pelaporan	12	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpeliharanya Mobil Jabatan yang ada	4	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terawatnya Mobil Operasional Kantor	1	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	3	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran</b>	<b>30</b>			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Pakaian Dinas Aparatur dan kelengkapannya	55	
	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (A)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Materai	75	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah item jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	4	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Yang Memiliki Perizinan	5	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase SKPD yang terlayani	15	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Item Alat Tulis Kantor	46	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Cetak dan Penggandaan	25200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan Kantor	20	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Dekorasi /Spanduk Kantor	20	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	4	
	Undangan	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			Tribun Kaltim	1440	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Makan Minum Rapat	504	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Pelaksanaan Koordinasi / Konsultasi	30	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Mobil Jabatan Yang Dipelihara	1	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah mobil Operasional Yang Dipelihara	4	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Unit Perlengkapan Yang Dipelihara	20	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Unit Peralatan Kantor yang Dipelihara	15	
	<b>Dinas Perikanan (B)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase jumlah surat yang didistribusikan (%)	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya kebutuhan komunikasi telpon kantor (bulan)	12	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional (unit)	5 Unit	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya pembayaran jasa administrasi keuangan (bulan)	12 bulan	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (bulan)	12 bulan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan fotocopy (bulan)	12	
	Undangan	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			peraturan perundang-undangan (bulan)	12 bulan	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat pegawai (kotak)	1340	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas pegawai (bulan)	12	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			peralatan dan perlengkapan gedung kantor (%)	75	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan (unit)	1	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			kendaraan dinas operasional kantor (unit)	4	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			terpenuhinya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor (gedung)	1	
	<b>Dinas Pertanian (B)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan jasa surat menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya Matrai kantor (Lembar)	250	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik ( Bulan)	12	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya jasa perizinan kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	12	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	12	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Kebersihan Ruangan Kantor (%)	100	
	Penyediaan alat tulis kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (bulan)	12	
	Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya kebutuhan bahan cetak dan fotocopy (bulan)	12	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya Penerangan Bangunan ( Lampu/buah )	20	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (%)	100	
	Perundang-undangan	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			Perundang-undangan (Eksemplar)	72	
	Penyediaan makanan dan minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya kebutuhan makanan dan Minuman Rapat (Kotak)	1280	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan dinas Pegawai (Kali)	172	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			kantor dan Terbayarnya Pajak Bumi dan Bangunan Kantor (Unit)	4	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			terpenuhinya pemeliharaan Mobil Jabatan Kepala (Unit)	2	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Kendaraan Dinas Operasional Kantor (Unit)	12	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpenuhinya pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor (Unit)	8	
	<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (A)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, Telepon dan Internet	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya kebutuhan jasa telepon dan internet	12 bulan	
	Penyediaan Jasa dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya dana pengurusan surat izin kendaraan	12 bulan	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya kebutuhan dana administrasi keuangan	12 bulan	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya ATK	12 bulan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya barang cetakan	12 bulan	
	Penyediaan Komponen Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya kebutuhan kompponen listrik	12 bulan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya bahan bacaan dan perundangan	96	
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya makan minum rapat	12 bulan	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya dana kebutuhan rapat koordinasi	12 bulan	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>aparatur pemerintah daerah</b>	<b>tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya kendaraan operasional roda dua	12 bulan	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya kebutuhan peralatan kantor	12 bulan	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya perlengkapan kantor	12 bulan	
	Pengadaan Meubeler	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya akebutuhan meubeler	12 bulan	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya pemeliharaan kendaraan jabatan	12 bulan	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya belanja pemeliharaan kendaraan operasional	12 bulan	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			tersedianya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan	
	<b>Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI</b>							



Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100		
	Penyediaan jasa surat menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	0,111111111
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,111111111
	Penyediaan Jasa dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhinya Pemeliharaan Pelayanan dan Perbaikan Kendaraan	0,111111111
	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	0,111111111
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terlaksananya Administrasi Perkantoran	0,111111111
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	0,111111111
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Perlengkapan Kantor	0,111111111
	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				tercapainya tujuan untuk menambun Pengetahuan dan Informasi yang	0,111111111
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Semua Kegiatan	0,111111111
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				terciptanya koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan SKPD	0,111111111
	Rapat Kerja Daerah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				terlaksananya Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI	0,111111111
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana	100		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				kendaraan dinas / oprasional secara rutin / berkala	0,111111111
	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				peralatan dan perlengkapan kantor secara rutin / berkala	0,111111111
	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (A)</b>							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhinya kebutuhan komunikasi telfon, air dan listrik kantor (bulan)	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional (unit)	11
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				terpenuhinya pembayaran jasa administrasi keuangan (bulan)	12
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor (bulan)	12
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (bulan)	12
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan fotocopi (bulan)	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah kebutuhan komponen listrik yang tersedia (bulan)	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				kantor yang tersedia	7
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				terpenuhinya bahan bacaan dan buku Peraturan Perundang - undangan	12
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah makanan dan minuman rapat (kotak)	1400
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan dinas pegawai (bulan)	12
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana	100		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah mobil Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan (unit)	1
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				terpenuhinya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor (kegiatan)	1
	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (A)</b>							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100		

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan jasa surat menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Materai (benda pos)	60 Lembar	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6 Unit	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Honorarium PNS dan Non PNS	9 Petugas dan 3 PTT	
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan Gedung Kantor	10 jenis	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Alat Tulis Kantor	35 jenis	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Barang Cetak dan Penggandaan	5 item	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			jumlah peralatan rumah tangga	1 jenis	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			jumlah Bahan Bacaan	500 eksemplar	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	dan 80 kotak snack	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 kali Rapat koordinasi	
	Penataan Arsip SKPD	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			Arsip SKPD yang tertata	100 dokumen	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Pembangunan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Bangunan Gedung Arsip BPKAD	1 unit	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Gedung/Kantor yang terpelihara	1 gedung	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kendaraan Jabatan yang terpelihara	1 unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	5 unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Perlengkapan Kantor yang terpelihara	20 unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	6 unit	
	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan jasa surat menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Dokumen Kerja Kantor, Meterai (Lembar)	60	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, air, listrik dan internet (Persentase)	100	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	4	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah dokumen penatausahaan Keuangan Bendapa (Dok SPM/SPP)	350	
	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jenis Bahan dan Sarana Kebersihan	7	
	Penyediaan alat tulis kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah kebutuhan alat tulis kantor (Jenis ATK)	25	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah barang cetakan dan penggandaan (Jenis Cetak )	10	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			(Surat Kabar)	5.040	
	Penyediaan makanan dan minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Makan dan Minum (kotak)	740	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Rapat Rapat Koordinasi	18	
	Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Dokumen / Arsip Bendapa ( Jenis Arsip )	10	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Mobil Jabatan di Bendapa	1	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional di Dispenda roda 4	4	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Perlengkapan Kantor Bendapa yang Terpelihara	20	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	
	<b>Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (B)</b>								
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100			
	Penyediaan jasa surat menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jasa surat menyurat	12 bulan	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya jasa perzinan kendaraan dinas/operasional	3 unit	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan yang terbayarkan	108 ob	
	Penyediaan alat tulis kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	12 bulan	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai	16 unit	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	
	Penyediaan makanan dan minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya makanan dan minuman rapat	450 kotak	
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	
	Rapat-rapat koordinasi Bidang Kepegawaian	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah penyerenggaraan rapat koordinasi kepegawaian	12 bulan	
	Penataan Arsip SKPD	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersusunnya arsip SKPD dengan baik	12 bulan	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana	100			
	Pengadaan Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Mobil jabatan yang diadakan	1	
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya papan nama badan	1 unit	
	Pengadaan mebeleur	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya meubelair	1 unit	
	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpeliharanya mobil jabatan	4 kali	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				dinas/operasional	20 kali	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	
	Fasilitasi Pengelolaan Assessment Center BKD Kabupaten Paser	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terkelolanya Assessment center BKPP	12 bulan	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)</b>	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS	30			
	Pengadaan Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah pegawai yang memiliki pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50	
	penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Aparatur yang memiliki pakaian dinas	42	
	Penyediaan pakaian dinas PTT	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah PTT yang memiliki pakaian dinas	12	
	<b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (B)</b>								
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Fasilitas Listrik, Air, telepon, Internet dan TV Kabel di Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas Jabatan /Tahun	7	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jacatan dan Operasional yg Diperpanjang /Tahun	100	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan dan Gaji PTT Set.DPRD /Tahun	100	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Honorarium Tim dan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD /Tahun	100	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Pembayaran Tim dan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja di Sekretariat DPRD /Tahun	100	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Alat Tulis Kantor yg Tersedia di Sekretariat DPRD /Tahun	100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Pembayaran Belanja Dokumentasi Serta Cetak dan Penggandaan Sekretariat DPRD /Tahun	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Cinderamata serta Perlengkapan Kantor di Sekretariat DPRD /Tahun	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Surat Kabar / Majalah yg Tersedia di Sekretariat DPRD /Tahun	3 SKH & 1 Majalah	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Sekretariat DPRD /Tahun	100	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat DPRD /Tahun	100	
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tanggungan yang mendapatkan Jaminan Kesehatan / Medical Check	100	
	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (Rutin SKPD)	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah	terpenuhi sarana prasarana	100			
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Perawatan dan Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	100	
	Pengadaan Instalasi Listrik / AC / Air / Telepon	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jaringan pada Kantor Sekretariat DPRD /Tahun	100	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan Set.DPRD /Tahun	100	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Bangunan yang terpelihara /Tahun	4	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Kendaraan Dinas / Operasional Sekretariat DPRD /Tahun	100	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS	30			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Pakaian Sipil Hanan dan Pakaian Sipil Resmi	90	
	Bagian Umum							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah	Persentase SKPD yang terlayani	100			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumberdaya air & listrik	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	25 unit	
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	4. Rutin	4.3.1. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			terpenuhinya biaya jasa jaminan barang milik daerah	5 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Kendaraan Operasional yang dirawat dan dibuatkan BPKB nya	100%	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			rumah jabatan dan gedung lainnya mendapat jasa pelayanan cleaning service	100%	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Peralatan Kerja Dalam Kondisi Baik	100%	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase pemenuhan alat tulis kantor	100%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase pemenuhan komponen alat instalasi listrik	100%	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase pemenuhan kebutuhan barang perlengkapan kantor	100%
	Penyediaan Minuman dan Makanan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase pemenuhan makanan dan minuman	100%
	Operasional Perwakilan Paser di Jakarta	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Pemenuhan Kebutuhan operasional Perwakilan paser di Jakarta	100%
	Operasional Perwakilan Paser di Samarinda	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				operasional perwakilan paser di samarinda	100%
	Operasional Perwakilan Paser di Samarinda (Juanda)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Operasional Perwakilan paser di Samarinda (Juanda)	100%
	Operasional Asrama Mahasiswa/Mahasiswi Paser	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				operasional asrama mahasiswa paser	100%
	Operasional Perwakilan Paser di Balikpapan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional Perwakilan Paser di	100%
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>		
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional Pemerintah Kabupaten Paser	100%
	Pengadaan Meubelair	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase pemenuhan meubelair Kantor Bupati/Sekretariat Daerah	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase Kendaraan Operasional yang dapat ditingkatkan usia pakainya	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Persentase jenis perlengkapan gedung kantor yang terawat	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya Dana Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	100%
	<b>Inspektorat Kabupaten (A)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>		
	Penyediaan jasa surat menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	215 Surat
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhinya kebutuhan komunikasi telfon, air dan listrik kantor	12 bulan
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhinya jasa transportasi	12 bulan
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhinya kebutuhan jasa keuangan	12 bulan
	Penyediaan alat tulis kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya sarana kebutuhan barang cetak dan fotocopy	12 bulan
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhinya akan kebutuhan komponen listrik	50 buah
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhinya kebutuhan barang perlengkapan kantor	3 buah
	Penyediaan peralatan rumah tangga	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhinya kebutuhan barang perlengkapan kantor	80 buah
	Penyediaan undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Peraturan perundang - undangan	48 Exp
	Penyediaan makanan dan minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat pegawai	200 kotak
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan dinas pegawai	12 bulan
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>		
	Pengadaan meubelair	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpenuhinya meubelair kantor Inspektorat	3 Paket
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Teraksananya ketarancaran pekerjaan di Inspektorat	1 Kegiatan
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Lancarnya Kegiatan Operasional Pemeriksa Inspektorat	12 bulan
	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Teraksananya ketarancaran pekerjaan di Inspektorat	23 buah
	<b>Kantor Camat Tanah Grogot (A)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Jaringan yang dibayarkan	14
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Kendaraan Operasional yg dibayarkan	2

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Tenaga PNS dan Honor PTT yang dibayarkan	41	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah ATK	80	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Komponen Listrik yang dibeli	60	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan	2 Jenis	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Ketersediaan bahan bacaan surat kabar/majalah	2	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kebutuhan Makan/Minum Rapat/Kegiatan	500	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah rapat/rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah/keluar daerah	50	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kebutuhan Peralatan Kebersihan	20	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah cetak dan penggandaan	25000 lembar	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Pengadaan Meubeler Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Meubeler yang dibutuhkan (paket kegiatan)	5	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Frekuensi Pemeliharaan Peralatan Kantor	20	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	16 kali	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Asrama Pelajar	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Asrama Pelajar	2	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Gedung	2	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kendaraan Dinas	2	
	<b>Kantor Lurah Tanah Grogot</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik (bulan)	12	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			perizinan kendaraan dinas/operasional (unit)	2	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Honorarium PNS dan PTT yang dibayarkan	PNS dan 8 tenaga PTT	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah ketersediaan ATK	60	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			listrik/penerangan bangunan kantor (jenis)	60	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	7	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Ketersediaan bahan bacaan surat kabar/majalah (jenis)	2	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Rapat/Kegiatan	500	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah rapat/rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah/keluar daerah	50	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kebutuhan Peralatan Kebersihan (item)	20	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah cetak dan penggandaan	51 buku dan 25000 lembar	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Frekuensi Pemeliharaan Peralatan Kantor (kali)	20	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran</b>	<b>30</b>			
	Pengadaan Pakaian Dinas (PDH)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah pakaian seragam pegawai (PDH)	84	
	<b>Kantor Camat Pasir Belengkong (A)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Benda Pos (Materai)	125	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jaringan Internet	1	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Surat Pajak Kendaraan Bermotor	3	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Aparatur Pembantu Kegiatan Keuangan	19	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah jenis Alat Tulis Kantor (ATK)	25	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jenis Barang Cetak	4	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jenis alat listrik/ elektronik	7	
	Penyedia Pelaratan Rumah Tangga	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	15	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			Jumlah eksemplar Koran	365	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Porsi Makan Minum Rapat	583	
	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah volume Perjalanan Dinas Dalam daerah	40	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	3	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor	3	
	Pengadaan Mebeleur	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah jenis Mebeleur	1	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Rumah Jabatan yang Terpelihara	1	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Gedung Kantor	1	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	3	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	12	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	5	
	<b>Kantor Camat Kuaru (A)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Materai	450	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jaringan	9	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan penzinan kendaraan dinas operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Legimitas STNK Kendaraan Dinas yang Terpenuhi	6	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			Administrasi Keuangan	11	
	Penyediaan Alat tulis kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jenis ATK	13	
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	50000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Surat Kabar	100	
	Penyediaan makanan dan minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Porsi Makanan dan Minuman	2200	
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah	180	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	3	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Gedung Kantor	1	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kendaraan Dinas	1	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Prasarana Kantor yang terpelihara	8	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)</b>	4. Rutin	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran</b>	<b>30</b>			
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Pakaian Seragam Pegawai ( PDH )	75	
	<b>Kantor Lurah Kuaro</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	4. Rutin	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Materai	200	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jaringan	1	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan penzinahan kendaraan dinas operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Legasas STNK Kendaraan Dinas yang terpenuhi	1	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah PNS Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	6	
	Penyediaan Alat tulis kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jenis ATK	25	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	20000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Bola Lampu	10	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Surat kabar	360	
	Penyediaan makanan dan minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Porsi Makanan dan Minuman	500	
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah	78	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	4. Rutin	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan	1	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah kendaraan Dnhas	1	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Kantor	12	
	<b>Kantor Camat Long Ikis (A)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	4. Rutin	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jaringan Komunikasi, Air, dan Listrik yang Dibayarkan	18	
	Dinas/Operasional	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kendaraan	6	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Tenaga PTT yang dibayarkan	12	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia	35	
	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Barang Cetak	60	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Instalasi Listrik yang Tersedia (pemasangan kilometer listrik)	1	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Surat Kabar dan Bahan Bacaan Lain yang Tersedia	24	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah (kotak) Makan Minum	720	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Perjalanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	153	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	4. Rutin	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			



Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Asrama Pelajar	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Asrama Pelajar yang Terpelihara	1	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Mobil Jabatan	2	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kendaraan Dinas	3	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	14	
<b>Kantor Lurah Long Ikis</b>								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jaringan Komunikasi, Air, dan Listrik yang Dibayarkan	18	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kendaraan	1	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah tenaga PNS dan P11 yang Dibayarkan	14	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia	35	
	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Barang Cetakan	60	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	340	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Buku Peraturan Perundang - Undangan	8	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah (Kotak) Makan Minum	2400	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		tercukupi sarana prasarana	100	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	10	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kendaraan Dinas	1	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	16	
<b>Kantor Camat Long Kali (A)</b>								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jaringan sumber daya air, listrik dan internet	19	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			jumlah kendaraan	2	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah tenaga PNS dan P11 yang dibayarkan	11	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor	40	
	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah barang Cetakan	10	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Persentase SKPD yang terlayani	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			jumlah Bahan Bacaan	1460	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Makan dan minum kantor	50	
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			jumlah rapat konsultasi dan koordinasi	436	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana	100		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Asrama Pelajar	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terpeliharanya 2 unit Asrama Pelajar	2
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Mobil Jabatan Yang Terpelihara	3
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	100
	<b>Kantor Lurah Long Kali</b>							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100		
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				jumlah surat yang dibuat	180
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Jaringan sumber daya air, listrik dan internet	6
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perjinaan Kendaraan Dinas / Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				jumlah kendaraan	1
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah tenaga PNS dan P11 yang dibayarkan	12
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor	31
	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah barang Cetakan	4
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				jumlah komponen listrik	1
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	2
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				jumlah Bahan Bacaan	730
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Makan dan minum kantor	2660
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				jumlah rapat konsultasi dan koordinasi	200
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana	100		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Peralatan gedung kantor	1
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Gedung kantor yang Terpelihara	1
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	1
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	2
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	1
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran	30		
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perengkapannya	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Pakaian Seragam Pegawai (PDH)	15
	<b>Kantor Camat Batu Sopang (A)</b>							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase SKPD yang terlayani	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Mobil Dinas/operasional yang terpenuhi legalitas STNK dan KIR	3
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	6 Orang
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor	6 Orang
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tersedianya ATK Menurut Jenis	12 Bulan
	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Barang Cetak	10 Lembar
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Alat Listrik Berdasarkan Jenis	4 Jenis

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Pengadaan berdasarkan jenis	2 Jenis	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya Makan dan Minum Rapat	12 Bulan	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terbayarnya Honorarium PTT	12 Bulan	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>aparatur pemerintah daerah</b>	<b>tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Pengecatan Gedung Kantor	1 Paket	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung/Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			kegiatan Pemeliharaan Prasarana Kantor (Pengecatan)	1 Paket	
	Rehab Sedang / Berat / Tambah Ruang Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Rehab Aula Kantor	1 Kegiatan	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Asrama Pelajar	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Honorarium Penjaga Asrama	12 Bulan	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Mobil dinas operasional	4 Unit	
	<b>Kantor Camat Muara Komam (A)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Surat - Surat Dinas yang telah Di Proses Lebih Lanjut	125	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Sambungan Yang Dibayarkan	5	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Tenaga PNS Dan Tenaga PTT Yang Di Bayarkan	12	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah ATK Berbagai Jenis	140	
	Pengadaan Barang Cetak Dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Barang Cetak Berbagai Jenis	135	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Alat -Alat / Komponen Listrik Berbagai Jenis	40	
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Rapat - Rapat Dan Konsultasi	200	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			Jenis	24	
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah makanan Dan minuman Yang Dibayarkan	120	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	6	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan Kantor Yang Dimiliki	2	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Mobil Dan Kendaraan Dinas Operasional	2	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan Kantor	2	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran</b>	<b>30</b>			
	Pengadaan Pakaian Dinas Dan Perengkapannya	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Pakaian Dinas Dan Perengkapannya	50	
	<b>Kantor Lurah Muara Komam</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Surat - Surat Dinas yang telah Di Proses Lebih Lanjut	125	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Sambungan Yang Dibayarkan	5	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kendaraan Dinas	1	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Tenaga PNS Dan Tenaga PTT Yang Di Bayarkan	12	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah ATK Berbagai Jenis	140	
	Pengadaan Barang Cetak Dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Barang Cetak Berbagai Jenis	135	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan Kantor Berbagai Jenis	2	
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Rapat - Rapat Dan Konsultasi	200	
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Makanan Dan Minuman Yang Dibayarkan	120	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Gedung Kantor	1	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Mobil Dan Kendaraan Dinas Operasional	1	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Perlengkapan Kantor	2	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan Kantor	5	
	<b>Kantor Camat Batu Engau (A)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah surat menyurat yang dibuat	260	
	Penyediaan Jasa Komunikasi SDA & Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jaringan Komunikasi, SDA, & Listrik	2	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah kendaraan operasional	10	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah tenaga administrasi keuangan	10	
	Penyediaan ATK	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah ATK	25	
	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah penggandaan dan jumlah cetak dokumen	3100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah penggantian komponen instalasi listrik bangunan kantor	50	
	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	28	
	Penyediaan Makanan & Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah porsi makan minum	200	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah perjalanan dinas	45	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Pengadaan perlengkapan Gedung kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah perlengkapan gedung kantor	1	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	2	
	Pengadaan Meubeler Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah pengadaan meubeler Gedung Kantor	2	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			Jumlah pemeliharaan Rumah Jabatan	1	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah mobil jabatan	1	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	10	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	10	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeler	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			jumlah Pemeliharaan Meubeler	20	
	Pengadaan Instalasi Listrik/AC/Air/Telpon	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah pengadaan instalasi Listrik/AC/Air/Telpon	2	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran</b>	<b>30</b>			
	Pengadaan Pakaian Dinas	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Pengadaan Seragam Pegawai (PDH)	39	
	<b>Kantor Camat Tanjung Harapan (A)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			jumlah surat menyurat	280	
		4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			jumlah jaringan listrik	1	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			jumlah kendaraan Dinas	3	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			jumlah Tenaga Non PNS/PTT	5	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			jumlah jenis atk	8	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			jumlah penjiilidan	30	
	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya Bahan Bacaan PerPu	1180	
	Penyediaan Makanan & Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Makan dan Minum Kantor	700	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	150	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana</b>	<b>100</b>			
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			jumlah Kendaraan Dinas/operasional	3	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			Kantor	6	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Tingkat Pelanggaran</b>	<b>30</b>			
	Pengadaan Pakaian Dinas	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			jumlah pakaian dinas pegawai kecamatan (PDH)	31	
	<b>Kantor Camat Muara Samu (A)</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>	<b>100</b>			
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Bulan Tagihan listrik Desa	12	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			untuk kendaraan roda dua dan roda	4	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan	13	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jenis kebutuhan alat tulis kantor	27	
	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jenis kebutuhan barang cetak dan penggandaan	3	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jenis Komponen listrik	4	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan Rumah Tangga	2	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			Jumlah Jenis Surat Kabar	1	
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah kebutuhan jaman makanan dan minuman	900	
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah jenis kebutuhan perjalanan dinas rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja</b>	<b>100</b>			

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Sepeda Motor	2	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah set pengadaan perlengkapan gedung kantor	2	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			kantor	3	
	Pengadaan Meubelair Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah set Pengadaan Meubelair Gedung Kantor	20	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah dan spesifikasi Rumah Jabatan yang terpelihara	1	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah dan spesifikasi Rumah Dinas yang terpelihara	3	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah dan spesifikasi gedung kantor yang terpelihara	1	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah dan spesifikasi Mobil Jabatan yang terpelihara	1	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas Operasional	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			operasional yang terpelihara	5	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah dan spesifikasi peralatan gedung kantor yang terpelihara	2	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Tingkat Pelanggaran</b>	<b>30</b>			
	Pengadaan Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Pakaian Seragam Pegawai (PDH) untuk aparatur Kecamatan	37	
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			Kebersihan dan Damkar	4	
	<b>Perencanaan</b>							
	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (A)</b>							
	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran</b>	<b>Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan</b>	<b>95</b>			
	Evaluasi Renja SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			kerja Dinas Pendidikan dan	1	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran</b>	<b>Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu</b>	<b>100</b>			
	Review dan Revisi RENSTRA SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Jumlah dokumen review dan revisi Rencana Startegis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	
	Penyusunan RENSTRA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Jumlah dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Jumlah dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	
	<b>Dinas Kesehatan (A)</b>							
	<b>Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>kinerja dan keuangan daerah</b>	<b>menyusun LPPD tepat</b>	<b>100</b>			
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Persentase Tersedianya Dokumen Laporan Penilaian Akuntabilitas dan Kinerja SKPD (LAKIP)	100	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Persentase Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan SKPD	100	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran</b>	<b>Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu</b>	<b>100</b>			
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Persentase Tersedianya Dokumen Renja SKPD	100	
	Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya							

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		menyusun LPPD tepat waktu	100		
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah					
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah dokumen keuangan RSUD Panglima Sebaya	2 dokumen ( APBD dan BLUD)
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100		
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan				Tersusunnya Renja SKPD	1 Dokumen
	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (B)</b>							
	Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah		menyusun LPPD tepat	100		
	Survei Harga Satuan	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Terlaksananya survey harga satuan	10 buku
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah				Buku	10 buku
	Evaluasi RENJA SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu	100%
	Penyusunan Data Sektoral	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Tersusunnya Dokumen data sektoral	10
	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (B)</b>							
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah Laporan Penyusunan RENJA	1
	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (B)</b>							
	Evaluasi RENJA SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah Laporan Evaluasi RENJA	1
	<b>Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</b>							
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan		menyusun dan menetapkan	100		
	Penyusunan Renja SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan				tersusunnya Dokumen Renja SKPD	5 Dokumen
	Evaluasi Renja SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Dokumen Renja yang terevaluasi	5 Dokumen
	<b>Satuan Polisi Pamong Praja (B)</b>							
	Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah		menyusun LPPD tepat	100		
	Penyusunan Laporan Evaluasi Renja	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				tersedianya dokumen rencana kerja	-
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100		
	Review dan Revisi RENSTRA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah Dokumen Review dan Revisi RENSTRA SKPD	5

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Tersedianya Dokumen RENJA	-	
	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>							
	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)</b>	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran	Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan	95			
	Evaluasi RENJA	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Jumlah dokumen evaluasi RENJA yang tersusun	4 Dokumen	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)</b>	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan	menyusun dan menetapkan	100			
	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Jumlah dokumen RENJA yang tersusun	1 Dokumen	
	<b>Dinas Sosial (A)</b>							
	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)</b>	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu	100			
	Evaluasi RENJA Perangkat Daerah	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah			dievaluasi (Dokumen)	5	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)</b>	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran	Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100			
	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan			(Dokumen)	10	
	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (A)</b>							
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Jumlah Laporan RENJA SKPD (Buku)	1	
	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (A)</b>							
	Evaluasi RENJA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Jumlah Laporan Evaluasi RENJA SKPD (Buku)	1	
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (A)</b>							
	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)</b>	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu	100			
	SPIP	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Dokumen Laporan PIP yang tersusun	10	
	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)</b>	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran	Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan	95			
	Evaluasi Renja	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Jumlah Renja PD ( petriwulan ) yang terevaluasi	4	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)</b>	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran	Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100			
	Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran ( Proposal DAK, Bankeu Prov, RKA,RKA Perubahan,DPA,DPPA ,LK , LK Perubahan) yang tersedia	8	
	Penyusunan Renja	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan			tersusun	10	





Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu	100		
	Penyusunan Renstra SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Dokumen Renstra SKPD	1
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah				Dokumen Renja SKPD	1
	Review dan Revisi Renstra SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah Dokumen Review dan Revisi RENSTRA SKPD	5 buku
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan	95		
	Evaluasi Renja SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Dokumen Renja SKPD yang di evaluasi	1
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (A)							
	Evaluasi RENJA SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan				Dievaluasi	1
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (A)							
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100		
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah Dokumen Renja	10
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (B)							
	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu	100		
	Evaluasi Renja SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan perencanaan program	15 Buku
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100		
	Penyusunan Renja SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan				penyusunan RENJA SKPD	20 Buku
	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (A)							
	Penyusunan Renja SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah Dokumen Renja	5
	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (A)							
	Evaluasi Renja SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah Dokumen Renja	3
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (A)							

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan	95		
	Evaluasi RENJA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD	1
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100		
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah Dokumen RENJA	1
	Dinas Perikanan (B)							
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan	95		
	Evaluasi RENJA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah dokumen yang dievaluasi (dokumen)	1
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah dokumen movev dan pelaporan yang disusun (dokumen)	2
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100		
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah dokumen yang dihasilkan (dokumen)	1
	Pengumpulan, Penyusunan dan Penyajian Data Usulan Kegiatan Perencanaan Kelautan dan Perikanan	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (dokumen)	1
	Konsolidasi Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat (Milyar Rp)	3
	Dinas Pertanian (B)							
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi	95		
	Evaluasi RENJA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah dokumen hasil evaluasi Renja SKPD (Buku)	10
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan	100		
	Penyusunan Renja SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah Renja SKPD (Buku)	10
	Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan, Sekeloa Kecil dan Menengah (A)							
	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu	100		
	Penyusunan RENJA	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				tersedanya rencana kerja SKPD	12

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Evaluasi RENJA	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			terlaksananya evaluasi rencana kerja skpd	12 bulan	
	<b>Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI</b>							
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)</b>	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan	100		
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Tersusunnya rencana kerja sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan	0,1111111111	
	Evaluasi RENJA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan			Tersusunnya dokumen Evaluasi RENJA SKPD	0,1111111111	
	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (A)</b>							
	<b>Program Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	4. Rutin	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya		Cakupan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang sudah memiliki payung	1		
	Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	4. Rutin	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya			-	-	
	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Khusus Bappeda)</b>	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan		Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi	95		
	Pengendalian dan Evaluasi RENJA Perangkat Daerah dan RKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Jumlah Buku Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD dan RKPD	5	
	Penyusunan Rencana dan Penyelenggaraan Anggaran (TEPRA)	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan			Realisasi Anggaran	5	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Jumlah buku monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	5	
	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)</b>	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan		Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan	95		
	Pengendalian dan Evaluasi RENJA Bappeda	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi Renja Bappeda	1 Dokumen	
	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah (Khusus Bappeda)</b>	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan		perencana yang memiliki	60		
	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan			Jumlah aparat perencana yang mengikuti Bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur	25 Orang	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Khusus Bappeda)</b>	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan		Peringkat Pangripta	3		
	Penyusunan Rancangan RKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			1.Jumlah rapat Penyusunan RKPD	10	
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan			A		
	Penetapan RKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			s	d	
	Penyusunan Rancangan KUA, PPAS, APBD dan APBD - P	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Jumlah Dokumen Rancangan KUA, PPAS, APBD dan APBD - P yang ditetapkan tepat waktu	4 Dokumen	
	Penyusunan RENJA Bappeda	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Jumlah dokumen renja yang tersusun	1 Dokumen	
	Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Terlaksananya sinkronisasi program pembangunan daerah Kabupaten Paser	12 Bulan	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Fasilitasi dan Sinkronisasi Bidang Pembiayaan Pembangunan	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dan Sinkronisasi Bidang Pembiayaan Pembangunan	1	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	4. Rutin	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya	Capaian pembangunan bidang ekonomi	87			
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	4. Rutin	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya			Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (%)	80	
	Hidup	4. Rutin	dokumen perencanaan lainnya			Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup	1 Tahun	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Dunia Usaha	4. Rutin	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Dunia Usaha (Dokumen)	1	
	Industri Kabupaten/RIPIKA	4. Rutin	dokumen perencanaan lainnya			Pembangunan Industri Kecil dan	1 Dokumen	
	<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>	4. Rutin	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya	Capaian pembangunan bidang sosial budaya	100			
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesra	4. Rutin	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesra (Dokumen)	1	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	4. Rutin	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya			Laporan/Dokumen Koordinasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1	
	Kabupaten Paser	4. Rutin	dokumen perencanaan lainnya			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi CSR	90%	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	4. Rutin	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya			Jumlah Dokumen Laporan	1	
	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	4. Rutin	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya	Capaian pembangunan bidang prasarana wilayah dan SDA	81			
	Penyusunan Database Pengembangan Infrastruktur Kabupaten Paser	4. Rutin	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya			Jumlah Dokumen Database Pengembangan Infrastruktur Kabupaten Paser	3	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	4. Rutin	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya			Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	80%	
	Kabupaten Paser	4. Rutin	dokumen perencanaan lainnya			Investasi Jangka Menengah (RPIJM)	1	
	Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Paser	4. Rutin	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya			Dokumen Memorandum Pembangunan Sanitasi Permukiman	1	
	Penyusunan Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Paser	4. Rutin	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya			Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kab. Paser	1	
	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (A)</b>							
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)</b>	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran	Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100			
	Penyusunan Renja SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan			Dokumen RENJA SKPD	1 dokumen	
	Evaluasi Renja SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan			Dokumen Evaluasi Renja SKPDdokumen	1	
	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>							

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu	100		
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah Data / Dokumen Renja PD	10
	Evaluasi RENJA SKPD	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah				PD	10
	<b>Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (B)</b>							
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100		
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah dokumen LKjIP yang tersusun	10 buku
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan BKD kabupaten Paser	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah buku/laporan perencanaan yang tersusun	17
	Review dan Revisi Renstra	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				tersusun	0
	Penyusunan Renstra SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah dokumen Renstra yang tersusun	0
	Penyusunan Renja SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah dokumen rencana kerja SKPD yang tersusun	10 buku
	Evaluasi Renja SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Evaluasi Renja yang tersusun	4 triwulan
	<b>Bagian Umum</b>							
	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		melaksanakan	95		
	Evaluasi RENJA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah Dokumen Review dan Revisi Renstra SKPD	10 Buku
	<b>Inspektorat Kabupaten (A)</b>							
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100		
	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Tersedianya rencana kerja	1 Laporan
	Evaluasi RENJA	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan				Tersedianya bahan Evaluasi Renja	1 Laporan
	<b>Kantor Camat Tanah Grogot (A)</b>							
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan	95		
	Evaluasi Renja SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah dokumen Evaluasi Renja Kantor Kecamatan Tanah Grogot	5
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100		

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyusunan Renja SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan			Tanah Grogot	5	
	Kantor Camat Pasir Belengkong (A)							
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan	95		
	Evaluasi Renja SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Jumlah Dokumen Evaluasi Renja	4	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100		
	Penyusunan Renja	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan			Jumlah Dokumen Renja	10	
	Kantor Camat Kuaro (A)							
	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu	100		
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Dokumen RENJA	10	
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan	95		
	Evaluasi Renja SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan			SKPD	10	
	Kantor Lurah Kuaro							
	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu	100		
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Dokumen Renja	10	
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan	95		
	Evaluasi Renja SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan			SKPD	10	
	Kantor Camat Long Ikis (A)							
	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu	100		
	Evaluasi Renja SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Dokumen Evaluasi Renja	4	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100		
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan				Jumlah Dokumen Renja	10
	Kantor Lurah Long Ikis							
	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu	100		
	Evaluasi Renja SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah Dokumen Evaluasi RENJA	4
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100		
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan				Jumlah Dokumen Renja	10
	Kantor Camat Long Kali (A)							
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan	95		
	Evaluasi Renja SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah Dokumen Evaluasi RENJA	10
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100		
	Penyusunan Renja SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan				Jumlah Dokumen renja	5
	Kantor Lurah Long Kali							
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan	95		
	Evaluasi Renja SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Jumlah Dokumen Evaluasi RENJA	8
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100		
	Penyusunan Renja SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan				Jumlah Dokumen renja	10
	Kantor Camat Batu Sopang (A)							
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan		Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi	95		



Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Evaluasi Renja SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Jumlah Dokumen Evaluasi RENJA	10 Buku	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran	Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100			
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan			Dokumen Renja	10 Buku	
	Kantor Camat Muara Komam (A)							
	Pembangunan (Semua PD)	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan	melaksanakan	95			
	Evaluasi RENJA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan			Jumlah Dokumen Evaluasi RENJA SKPD	5	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan	Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan	100			
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan			Jumlah Dokumen RENJA SKPD yang Telah Sesuai Dengan Dokumen RENSTRA SKPD	5	
	Kantor Lurah Muara Komam							
	Pembangunan (Semua PD)	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan	melaksanakan	95			
	Evaluasi RENJA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan			Jumlah Dokumen Evaluasi RENJA SKPD	5	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan	Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan	100			
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan			Jumlah Dokumen RENJA SKPD yang Telah Sesuai Dengan Dokumen RENSTRA SKPD	5	
	Kantor Camat Batu Engau (A)							
	Pembangunan (Semua PD)	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan	melaksanakan	95			
	Evaluasi Renja SKPD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan			jumlah dokumen Evaluasi RENJA	10	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan	Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan	100			
	Penyusunan Renja SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Jumlah Dokumen RENJA	10	
	Kantor Camat Tanjung Harapan (A)							
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan	Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi	95			
	Evaluasi Renja SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan			jumlah dokumen evaluasi Renja	10	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan	Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan	100			
	Penyusunan RENJA SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			jumlah Dukomen RENJA SKPD	10	
	Kantor Camat Muara Samu (A)							
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran	Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan	95			
	Evaluasi Rencana Kinerja SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan			disusun	8	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan	Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan	100			
	Penyusunan Renja SKPD	4. Rutin	antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran			Jumlah Dokumen Rencana Kinerja SKPD yang disusun	10	
	<b>Keuangan</b>							
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (A)							

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah		menyusun LKj tepat waktu	100		
	Penyusunan LAKIP	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah Dokumen LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
	Penyusunan Perencanaan Anggaran	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah dokumen RKA dan DPA Murni serta RKA dan DPA perubahan	4
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Tingkat maturitas SPIP (Level)	2		
	SPIP	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah Data Pengendalian Intern Pemerintah	1
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (B)							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	100		
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Tersusnya Dokumen LAKIP	12 buku
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Tingkat maturitas SPIP (Level)	2		
	Pelaksanaan SPIP	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah				Jumlah Kegiatan yang dinilai resikonya	12 bulan
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (B)							
	Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah		menyusun LKj tepat waktu	100		
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah		(Level)	2		
	Pelaksanaan SPIP	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Dokumen Pelaksanaan SPIP	1
	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	100		
	Pemerintahan ( LAKIP )	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah				Akuntabilitas Kinerja Instansi	5 Dokumen
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Akhir Tahun	5 Dokumen
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah		(Level)	2		
	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				SPIP	5 Dokumen
	Satuan Polisi Pamong Praja (B)							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	100		
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Tersedianya Dokumen LAKIP	-
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah		(Level)	2		
	Penyusunan Dokumen SPIP	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Tersedianya Dokumen SPIP	-
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	100		
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)/Laporan Kinerja	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah dokumen LKj yang tersusun	8 Dokumen
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah		(Level)	2		
	SPIP	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah Pelaporan SPIP	1 Laporan
	Dinas Sosial (A)							

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	100		
	(LKJIP)/Laporan Kinerja	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah				Kinerja yang disusun (Dokumen)	10
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Tingkat maturitas SPIP (Level)	2		
	Pelaksanaan SPIP di SKPD	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah				(Kegiatan)	2
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (A)							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	100		
	Kinerja SKPD	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah				Jumlah Laporan Lakip (buku)	1
	Penyusunan Data Statistik Ketenagakerjaan	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah Buku Data Statistik Ketenagakerjaan (Buku)	1
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (A)							
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				1. Jumlah profil DPPKBPPPA ( buku yang tersusun	10
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (A)							
	Penyusunan LKJIP	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah LKJip ( buku ) yang tersusun	10
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (A)							
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah				yang tersusun	11
	Dinas Ketahanan Pangan (A)							
	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah				Jumlah laporan capaian kinerja LKJIP	10 Buku
	Dinas Lingkungan Hidup (A)							
	Pemerintah (LAKIP)	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah				Akuntabilitas Kinerja Instansi	1
	Dinas Lingkungan Hidup (A)							
	Penyusunan LKJIP	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah				Jumlah Dokumen	5
	Dinas Lingkungan Hidup (A)							
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah		(Level)	2		
	Pelaksanaan SPIP	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah Kegiatan yang Dinilai Resikonya	5
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah		menyusun LKj tepat waktu	100		
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah buku LAKIP	1
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Tingkat maturitas SPIP (Level)	2		
	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah Laporan	1
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (A)							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah		menyusun LKj tepat waktu	100		
	Sinkronisasi dan Evaluasi Program Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah program yang sinkron dan dievaluasi	4
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah dokumen laporan kinerja	1 dokumen
	Dinas Perhubungan (B)							

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dishub	1	
	<b>Dinas Perhubungan (B)</b>							
	<b>Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)</b>	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah	(Level)	2			
	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Dokumen SPIP	1	
	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (A)</b>							
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)</b>	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	100			
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Dokumen LAKIP	10	
	<b>Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)</b>	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Tingkat maturitas SPIP (Level)	2			
	Pelaksanaan SPIP di SKPD	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah			Resikonya	12	
	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (B)</b>							
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)</b>	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	100			
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Peningkatan dukungan / dalam pengumpulan data RENSTRA SKPD di bidang perencanaan program	10 Buku	
	<b>Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (A)</b>							
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) / Laporan Kinerja	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Tersusunnya Dokumen LAKIP / Laporan Kinerja	10 Buku	
	<b>Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (A)</b>							
	Penyusunan Data Statistik Sektoral	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Tersedianya buku data statistik sektoral/SIPD Porapar	2	
	<b>Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (A)</b>							
	Sistem Informasi Data Base Pariwisata Pemuda dan Olahraga	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			tersedianya data base kepemudaan , olahraga dan pariwisata	1	
	<b>Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (A)</b>							
	Pengumpulan, Penyusunan dan Penyajian Data Usulan kegiatan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Tersedianya prasarana Pengumpulan dan Pengolahan data usulan kegiatan Porapar	10	
	<b>Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (A)</b>							
	<b>Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)</b>	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Tingkat maturitas SPIP (Level)	2			
	Pelaksanaan SPIP	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah			kegiatan yang dinilai resikonya	5	
	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (A)</b>							
	<b>Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)</b>	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah	menyusun LKj tepat waktu	100			
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP )	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Dokumen LAKIP	1	
	<b>Pemerintah (Semua PD)</b>	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah	(Level)	2			
	Penyusunan Dokumen SPIP	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Dokumen SPIP	1	
	<b>Dinas Perikanan (B)</b>							
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)</b>	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	100			
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah			akhir tahun yang disusun (dokumen)	1	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Persentase laporan capaian kinerja secara akuntabel dan tepat waktu (%)	100	
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Tingkat maturitas SPIP (Level)	2		
	Pelaksanaan SPIP SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah kegiatan yang dinilai resikonya (dokumen)	5	
	<b>Dinas Pertanian (B)</b>							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	100		
	Pengembangan Statistik pertanian, perkebunan dan peternakan	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Data Statistik Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Buku)	20	
	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah dokumen LKjIP yang disusun (Buku)	10	
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Tingkat maturitas SPIP (Level)	2		
	Pelaksanaan SPIP SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah kegiatan yang dinilai resikonya (Paket)	1	
	<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (A)</b>							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	100		
	Penyusunan LKjIP	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			tersedianya laporan AKIP skpd	12 bulan	
	Penyusunan Statistik	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			tersedianya data sektoral skpd	12 bulan	
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Tingkat maturitas SPIP (Level)	2		
	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			tersedianya dana pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah	12	
	<b>Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI</b>							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	100		
	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi ( LAKIP )	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Tersusunnya dokumen LAKIP dan termonitornya dan terevaluasinya capaian kinerja SKPD secara akuntabel dan tepat waktu	0,11111111	
	Penyusunan data statistik sektoral	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Tercapainya Kebutuhan Data Yang Akurat	0,11111111	
	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (A)</b>							
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran yang akuntabel	10	
	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (A)</b>							
	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Buku Laporan LKJIP Bappeda Kab. Paser yang tersusun	10 Buku	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (A)</b>							
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahunan (LKPJ Tahunan)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Laporan LKPJ Tahunan yang tersusun	1	
	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (A)</b>							
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Laporan Realisasi Semesteran APBD Kab. Paser TA. 2018	15 Buku	
	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (A)</b>							
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	10 buku	
	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (A)</b>							
	Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Laporan Kegiatan SKPD	1 dokumen	
	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (A)</b>							
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD)</b>	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		menyusun Laporan Keuangan sesuai standar	100		
	Penyusunan Standar Satuan Harga	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Buku Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Daerah	50 buku	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Buku APBD Kabupaten Paser TA. 2019	50 buku	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran APBD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Buku Penjabaran APBD Kab. Paser TA. 2019	50 buku	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Buku Perda APBD-P Kabupaten Paser TA. 2018	50 buku	
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Penjabaran P-APBD tahun Anggaran 2018	50 buku	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017 Beserta Lampiran -	1 dokumen	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017	1 dokumen	
	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis	30 orang	
	Penyusunan Dokumen Pedoman/Petunjuk Anggaran SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Dokumen RKA, LK, DPA SKPD dan DPA SKPKD (murni dan perubahan)	4 dokumen	
	Pembinaan dan Monitoring Pengelola Keuangan Daerah	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	
	Pengelolaan dan Pemeliharaan Aplikasi SIMDA Keuangan Kabupaten Paser	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah SKPD yang menjalankan Aplikasi SIMDA Keuangan dengan baik	40 SKPD	
	Pengendalian dan Monitoring KASDA	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Data Kas Daerah	12 Bulan	
	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan, Belanja dan Akuntansi Aset Daerah	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Pelaksanaan Rekonsiliasi Reansar Belanja SKPD	12 Bulan	
	Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin Sistem Informasi Gaji PNS	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Gaji PNSD beserta laporan-laporan pendukung	12 Bulan	
	Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Perpajakan	12 bulan	
	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Bantuan	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Proses Pencairan dana Bantuan	100%	
	Pembinaan Bendaharawan	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Pembinaan Bendaharawan	50 SKPD	
	Pembinaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan BLUD dan Pola BLUD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Laporan Penggunaan Dana BLUD dan Penggunaan Dana Langsung Selaian BLUD	1 dokumen	
	Penataan Arsip Pembendaharaan dan Pengelolaan Laporan	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Arsip SKPKD yang tertata	12 Bulan	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran		Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan	100		
	Fasilitas Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				Surat Hasil Evaluasi Provinsi tentang PERDA P-APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen
	APBD dan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran				tentang Perda P-APBD dan Peraturan	1 dokumen
	Program Manajemen Aset Daerah	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		jumlah aset daerah yang dikelola secara baik (persen)	10		
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Keputusan Jual beli, standansasi sewa dan SK Penetapan & pemanfaatan rumah dinas	4 Dokumen
	Penghapusan Barang Daerah Milik Pemkab Paser	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Penghapusan Barang Milik Daerah	1 dokumen
	Pemuktahiran Data Inventarisasi dan Operasional Milik Daerah (BMD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Buku Induk inventarisasi Barang Pemerintah Daerah	10 buku
	Penjualan Barang Milik Daerah	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				terinstal di SKPD	30 SKPD
	Pemeliharaan dan Pengamanan Aset	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				dokumen SK Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	1 dokumen
	Sensus Barang Milik Daerah	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				yang diamankan	7 titik lokasi
	Sensus Barang Milik Daerah	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah objek aset dan barang milik daerah yang terinventarisasi/tersensus	2000 objek
	Badan Pendapatan Daerah							
	Program Peningkatan Pengembagan Sistem Steper Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		menyusun LKj tepat waktu	100		
	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah/Tersedianya data Lakip SKPD	10
	Penyusunan Data Statistik Sektoral	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah/Tersedianya data statistik sektoral SKPD	10
	Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Penyusunan laporan kegiatan SKPD	84
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Pendapatan)	4. Rutin	4.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah		Persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan	7		
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.	4. Rutin	4.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah				Jumlah sumber-sumber pendapatan	22
	Verifikasi Data Obyek Pajak Daerah	4. Rutin	4.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah				Validasi data Obyek Pajak	200
	Penyampaian SPPT PBB dan SKPD	4. Rutin	4.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah				Jumlah SPPT PBB yang terdistribusi	70 ribu
	Pendataan Wajib Pajak	4. Rutin	4.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah				Laporan Pemutakhiran Data Wajib Pajak PBB-P2	1 Dokumen
	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan Pajak dan Penyelesaian Tunggakan (Keberatan) Pajak Daerah.	4. Rutin	4.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah				Jumlah WP tertagih	77 ribu
	Verifikasi Data Piutang Obyek Pajak Daerah	4. Rutin	4.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah				Validasi data piutang pajak daerah	10 ribu
	Peningkatan kinerja dalam penyusunan terbit administrasi pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah	4. Rutin	4.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah				Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah	12 dokumen
	Penyuluhan dan Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah	4. Rutin	4.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah				Jumlah Peserta	100 Peserta
	Perimbangan dan Bagi Hasil	4. Rutin	4.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah				Khusus, Dana Bagi Hasil	1 Dokumen
	Operasi Tim Yustisi dan Penertiban pajak daerah	4. Rutin	4.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah				1. Terbentuknya Tim Operasi Yustisi dalam rangka Penertiban Pajak Daerah	1
	Pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah	4. Rutin	4.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah				Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	1 Dokumen
	Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah bidang penagihan pajak dan penyelesaian tunggakan (operasi sisir) pajak daerah	4. Rutin	4.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah				Jumlah WP yang ditertibkan	7000 WP
	Optimalisasi dan Sinkronisasi penerimaan dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH, DAU & DAK)	4. Rutin	4.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah				Laporan Sinkronisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK.	4 Dokumen

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Pajak (PBB & PPh Pasal 21, Pasal 25/29)	4. Rutin	keuangan daerah			Sinkronisasi Penerimaan Dana	1 Dokumen	
	Penyelenggaraan pencatatan laporan dana lain-lain pendapatan daerah	4. Rutin	4.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah			Tersusunnya Laporan Dana Lain-lain Pendapatan Daerah	1 dokumen	
	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>	4. Rutin	<b>4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan</b>	<b>Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan</b>	<b>100</b>			
	Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan tentang Pendapatan Daerah	4. Rutin	4.2.1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan			Jumlah Perda tentang pendapatan daerah	1	
	<b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (B)</b>							
	<b>Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)</b>	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah	menyusun LKj tepat waktu	100			
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Dokumen LAKIP Set.DPRD yg telah disusun /Tahun	10	
	<b>Bagian Pemerintahan dan Humas</b>							
	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Pencapaian nilai LPPD dengan predikat Sangat Tinggi (ST)	3	
	<b>Bagian Organisasi dan Kerjasama</b>							
	Penyusunan LKJIP	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah			dan Sekretariat daerah Kabupaten	2	
	<b>Bagian Organisasi dan Kerjasama</b>							
	<b>Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)</b>	4. Rutin	<b>4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</b>	<b>Tingkat maturitas SPIP (Level)</b>	<b>2</b>			
	Fasilitasi Pelaksanaan SPIP	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Laporan Maturisasi SPIP	4 Laporan	
	<b>Inspektorat Kabupaten (A)</b>							
	<b>Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)</b>	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah	menyusun LKj tepat waktu	100			
	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Tersedianya Laporan Kinerja	1 Laporan	
	<b>Pemerintah (Semua PD)</b>	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah	(Level)	2			
	Penerapan SPIP	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Perangkat daerah yang menerapkan SPIP	3 Perangkat Daerah	
	Evaluasi Penerapan SPIP	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Perangkat Daerah yang di evaluasi menerapkan SPIP	3 Perangkat Daerah	
	Pelaksanaan SPIP di Perangkat Daerah	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah kegiatan yang dinilai resikonya	5 Dokumen	
	<b>Kantor Camat Tanah Grogot (A)</b>							
	<b>Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)</b>	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah	menyusun LKj tepat waktu	100			
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	10	
	Masyarakat dan Pendes	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah			Pemerintahan Desa yang tersusun	Kecamatan,	
	<b>Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)</b>	4. Rutin	<b>4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</b>	<b>Tingkat maturitas SPIP (Level)</b>	<b>2</b>			
	Pelaksanaan SPIP SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah dokumen SPIP	5	
	<b>Kantor Camat Pasir Belengkong (A)</b>							
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)</b>	4. Rutin	<b>4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu</b>	<b>100</b>			
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah			Nilai LKJIP	C+	
	<b>Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)</b>	4. Rutin	<b>4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</b>	<b>Tingkat maturitas SPIP (Level)</b>	<b>2</b>			
	Pelaksanaan SPIP di SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Kegiatan yang dinilai resikonya	5	
	<b>Kantor Camat Kuaro (A)</b>							
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)</b>	4. Rutin	<b>4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu</b>	<b>100</b>			



Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( LAKIP )	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	10	
	Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah	(Level)	2			
	Pelaksanaan SPIIP di SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Kegiatan yang dinilai Resikonya	5	
	Kantor Lurah Kuaro							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	100			
	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( LAKIP )	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	10	
	Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah	(Level)	2			
	Pelaksanaan SPIIP di SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Kegiatan Yang dinilai Resikonya	100	
	Kantor Camat Long Ikis (A)							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	100			
	Penyusunan LAKIP	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Dokumen LAKIP	10	
	Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah	(Level)	2			
	Pelaksanaan SPIIP di SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Kegiatan yang Dinilai Resikonya	5	
	Kantor Lurah Long Ikis							
	Pelaksanaan SPIIP di SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Kegiatan yang Dinilai Resikonya	5	
	Kantor Camat Long Kali (A)							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah	menyusun LKj tepat waktu	100			
	Penyusunan LAKIP	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Dokumen Laporan kinerja	10	
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Tingkat maturitas SPIIP (Level)	2			
	Pelaksanaan SPIIP di SKPD	4. Rutin	4.1.1. meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Kegiatan yang dinilai Resikonya	5	
	Kantor Lurah Long Kali							
	Pelaksanaan SPIIP di SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Kegiatan yang dinilai Resikonya	5	
	Kantor Camat Batu Sopang (A)							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	100			
	Penyusunan SAKIP	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Dokumen laporan kinerja	10 Buku	
	Kantor Camat Muara Komam (A)							
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Dokumen LAKIP	8	
	Kantor Camat Muara Komam (A)							
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah	(Level)	2			
	Pelaksanaan SPIIP di SKPD	4. Rutin	4.1.1. meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Kegiatan yang Dinilai Resikonya	5	
	Kantor Lurah Muara Komam							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	100			
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Dokumen LAKIP	8	
	Kantor Camat Batu Engau (A)							
	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP )	4. Rutin	kinerja dan keuangan daerah			Jumlah Laporan Kinerja	10	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Kantor Camat Batu Engau (A)							
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Tingkat maturitas SPIP (Level)	2		
	Pelaksanaan SPIP	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah kegiatan yang dinilai resikonya	5
	Kantor Camat Tanjung Harapan (A)							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	100		
	Pemerintah (LAKIP)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				jumlah dokumen laporan kinerja	10
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Tingkat maturitas SPIP (Level)	2		
	Pelaksanaan SPIP di SKPD	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				jumlah dokumen SPIP	10
	Kantor Camat Muara Samu (A)							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	100		
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Tingkat maturitas SPIP (Level)	2		
	Pelaksanaan SPIP	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah				Jumlah Kegiatan yang dinilai resikonya	5
	<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>							
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (A)							
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Semua PD)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Cakupan pejabat fungsional yang telah mengikuti diklat	100		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah bimtek yang dilaksanakan	2
	Dinas Kesehatan (A)							
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Tenaga Kesehatan yang Meningkatkan Kapasitas dan Standar Kompetensinya	100%
	Dinas Kesehatan (A)							
	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Berpenampilan Terbaik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Berprestasi di Tingkat Propinsi	3
	UPTD Puskesmas Kuaro							
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Pelatihan dalam kantor	1 kali
	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah							
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terselenggaranya bimbingan Teknis petugas Labkesda	12 Kali
	Satuan Polisi Pamong Praja (B)							
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				-	-
	Satuan Polisi Pamong Praja (B)							
	Pembinaan Mental, Fisik dan Disiplin Anggota Satpol PP dan Linmas	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terciptanya Aparat Yang Sehat Jasmani dan Rohani	-
	Dinas Lingkungan Hidup (A)							
		4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				terwujudnya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	5

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	
	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	<b>Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI</b>								
	<b>Program Fasilitas dan Dukungan Kelembagaan KORPRI</b>	<b>3. Prioritas Pendukung II</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Jumlah anggota KORPRI yang mendapat fasilitas</b>	<b>1140</b>			
	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	3. Prioritas Pendukung II	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				terpenuninya kesenatan bagi anggota KORPRI dan masyarakat umum	0,111111111	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	3. Prioritas Pendukung II	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				KORPRI dan terlaksananya HUT KORPRI	0,111111111	
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	3. Prioritas Pendukung II	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Pegawai BUMD, BUMN yang berprestasi sekabupaten Paser	0,111111111	
	Penyelenggaraan MTQ KORPRI	3. Prioritas Pendukung II	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terlpinnya Unit / Cabang KORPRI Kabupaten Paser	0,111111111	
	<b>Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (B)</b>								
	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Jumlah Calon Praja IPDN yang lulus seleksi penerimaan IPDN</b>	<b>3</b>			
	Pembinaan dan penerimaan Praja IPDN	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Praja IPDN sesuai kebutuhan	3	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Khusus BKD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		<b>Persentase penetapan pejabat struktural</b>	<b>100</b>			
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah aparatur yang mengikuti diklat prajabatan	28 orang	
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS daerah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PIM, II, III, IV	110 orang	
	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNS Daerah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai bidang tugas masing-	30 orang	
	Sosialisasi peraturan perundang undangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	100	
	Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki purna tugas	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah				pembekalan (orang)	20	
	Pembinaan jabatan dan kepegawaian oleh Tim Baperjakat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terselenggaraya Rapat Baperjakat	4 kali	
	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah calon Pejabat Pimpinan Tinggi	0	
	Lelang Jabatan ASN	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terisnya Jabatan ASN	150 orang	
	Assesment PNS	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah PNS yang mengikuti Assesment	43 orang	
	<b>Program Penerimaan dan Pengembangan Aparatur (Khusus BKD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>aparatur pemerintah daerah</b>		<b>ASN berbasis komputer</b>	<b>153</b>			
	Seleksi penerimaan Calon PNS	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Terangkatnya CPNS menjadi PNS	0	
	Pelaksanaan administrasi pindah tugas/mutasi pegawai dan status ASN (pindah tugas antar kab/kota/provinsi dan	3. Prioritas Pendukung II	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				terotinya Rekomendasi dan SK dari BKPP Paser, BKD Provinsi dan BKN	35 orang	
	<b>Program Penerimaan dan Pengembangan Aparatur (Khusus BKD)</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>aparatur pemerintah daerah</b>		<b>ASN berbasis komputer</b>	<b>153</b>			
	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah PNS tugas belajar sesuai kebutuhan (orang)	19 orang	
	Pemberian penghargaan bagi PNS yang memenuhi masa kerja yang telah ditentukan	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah				penghargaan bagi PNS dilindungi	100 orang	
	Pembinaan PNS	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah PNS yang dibina	35	
	Proses penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah				Pelanggaran Disiplin	4 kasus	
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik BKD Kabupaten Paser	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Standar Pelayanan Publik BKD yang tersusun	0	
	Penetapan sistem satu atap kenaikan pangkat	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah				pangkat PNS dilindungi pemerintah	900 orang	
	Penataan administrasi dan Evaluasi Kenaikan Pangkat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Berkas usul pangkat yang memenuhi persyaratan	900 PNS	
	Penyelesaian SK Pensiun/Nota usul persetujuan BKN	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah				keputusan pensiun	120 orang	
	Penyelesaian Penerbitan SK jabatan fungsional	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah				fungsional	50 orang	
	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah dokumen tentang data kepegawaian yang tersedia	2 dokumen	
	Pengangkatan tenaga honorer database tahun 2010 menjadi CPNS	4. Rutin	4.3.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Honorer Database yang diangkat menjadi CPN	0	
	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Otomatis PNS	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah				Berkala Secara Otomatis	1 unit	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Website BKD	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			Informasi kepegawaian yang up to date	1 website	
	Peninjauan dan atau Perbaikan Masa Kerja PNS	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Perhitungan masa kerja telah disesuaikan	100%	
	Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan SAPK	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya data yang up to date dan berbasis IT	1 dokumen	
	Pengembangan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian Elektronik	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya Aplikasi/Program Pelayanan Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi	2	
	Pengelolaan tatanaskah/Roll O Pack PNS	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Tersedianya data fisik tatanaskah kepegawaian dan file elektronik (image dokumen)	4930 tatanaskah kepegawaian	
	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terkumpulnya data dan informasi harta dan kekayaan pejabat penyelenggara negara	198 orang	
	Pendataan Ulang PNS Berbasis Elektronik (e PUPNS)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah PNS yang melaksanakan pendataan ulang/verifikasi data	0	
	Rekonsiliasi Data Kepegawaian Database Gaji	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Data jumlah PNS aktif	1 dokumen	
	Rekonsiliasi Data Kepegawaian	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Laporan rekon data kepegawaian	2 dokumen	
	Rekonsiliasi Data Kepegawaian Database Gaji	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Data kepegawaian yang sesuai dengan SIM Gaji	1	
	Rekonsiliasi Data Kepegawaian	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Data Kepegawaian yang Sinkron	2	
	<b>Inspektorat Kabupaten (A)</b>							
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Semua PD)</b>	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah	Jumlah pejabat fungsional yang telah mengikuti diklat fungsional	100			
	Bimbingan teknis dan Ujian sertifikasi Auditor dan P2UPD serta bimbingan teknis dan pelatihan perencanaan program dan pelaporan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah tenaga Auditor dan P2UPD yang bersertifikat dan tenaga prns yang memenuhi kompetensi sesuai standar	10 orang	
	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Terselenggaranya pelatihan di kantor sendiri	12 Kegiatan	
	Penilaian Angka Kredit	4. Rutin	aparatur pemerintah daerah			yang dihitung angka kredit	30 orang	
	<b>Kantor Camat Tanah Grogot (A)</b>							
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah aparatur terdidik dan terlatih	5	
	<b>Kantor Camat Pasir Belengkong (A)</b>							
	Bimtek Pengelola Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK Pengelola Keuangan	1	
	<b>Kantor Camat Muara Komam (A)</b>							
	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	2	
	<b>Kantor Camat Muara Komam (A)</b>							
	Bimtek PPAT	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Pejabat Yang Mengikuti Bimtek PPAT	1	
	<b>Kantor Camat Batu Engau (A)</b>							
	Bimtek Pengelola Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah PNS yang mengikuti bimtek Keuangan	2	
	<b>Kantor Camat Muara Samu (A)</b>							
	Bimtek Pengelola Keuangan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis/diklat	3	
	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>							
	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (A)</b>							
	Program Penelitian dan Pengembangan (Litbang)	2. Prioritas Pendukung I	dokumen perencanaan lainnya	pengembangan yang	100			
	Penyusunan Rencana Kerja Kelitbang	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya			Jumlah Dokumen Kerja Kelitbang	1	
	<b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>							

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	
	<b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (B)</b>								
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	4. Rutin	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik		Sistem penjangkaran aspirasi masyarakat efektif (jumlah)	90			
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4. Rutin	publik				Eksekutif /Tahun		100
	Heating/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	4. Rutin	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik				Jumlah Heating/Dialog dan Koordinasi dg Pejabat Pemerintah & Tokoh		100
	Rapat-Rapat Paripurna	4. Rutin	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik				Jumlah Rapat-Rapat Paripurna /Tahun		100
	Kegiatan Reses	4. Rutin	publik				Melaksanakan Reses /Tahun		90
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	4. Rutin	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik				Jumlah Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah /Tahun		100
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	4. Rutin	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik				Jumlah Bimbingan teknis yg diikuti oleh Pimpinan & Anggota DPRD /Tahun		100
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah	4. Rutin	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik				Jumlah Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah /Tahun		100
	Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	4. Rutin	publik				Menjadi Raperda Inisiatif /Tahun		100
	Fasilitas Tenaga Ahli	4. Rutin	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik				Jumlah Tenaga Ahli yg Mendampingi Kinerja Anggota DPRD /Tahun		100
	<b>Bagian Umum</b>								
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	4. Rutin	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik		Sistem informasi pelayanan pengaduan masyarakat	3			
	Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah	4. Rutin	publik				Pemerintah Kabupaten yang dilayani		100%
	Penunjang Kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	4. Rutin	4.4.1. Meningkatnya partisipasi publik				Persentase Kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang Diakomodir		100%
	<b>Sekretariat Daerah</b>								
	<b>Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat I</b>								
	<b>Program Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan</b>	2. Prioritas Pendukung I	elayanan publik						
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kearsipan dan Perpustakaan	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah kearsipan dan perpustakaan yang aktif		
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemuda, Olahraga, dan	2. Prioritas Pendukung I	elayanan publik				monitoring (%)		
	Fasilitasi Peningkatan Mutu SDM Kabupaten Paser	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa baik kategori khusus, umum maupun tidak mampu		
	Fasilitasi Beasiswa Kaltim Cemerlang	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah pelajar dan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Kaltim Cemerlang		
	Pengadaan Dai Pembangunan	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Dai Pembangunan yang tersedia		
	Pembinaan Baca Tulis Al Quran	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah guru ngaji TK/TPA di Kabupaten Paser yang mendapatkan uang transpor (Orang)		
	<b>Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat II</b>								
	<b>Program Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan</b>	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan yang dirumuskan	17			
	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah SKPD yang dimonitoring		3
	<b>Program Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat</b>	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik						
	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bina Kesra II)	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik						
	Fasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Paser	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Persentase pemenuhan fasilitasi hibah dan bansos		
	<b>Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat III</b>								
	<b>Program Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat</b>	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik						

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bina Kesra III)	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bina Kesra III)	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bina Kesra III)	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
	<b>Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat IV</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat</b>	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bina Kesra IV)	2. Prioritas Pendukung I	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
	<b>Bagian Bina Ekonomi I</b>							
	<b>Program Koordinasi Bidang Perekonomian</b>	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan & Kesra yang dilaksanakan	16			
	Koordinasi Bidang Ekonomi (Bina Ekonomi I)	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Koordinasi Bidang Bina Ekonomi I	100%	
	Koordinasi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Koordinasi Bidang Ekonomi I	100%	
	<b>Bagian Bina Ekonomi II</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Bidang Perekonomian</b>	4. Rutin	pelayanan publik	Administrasi Bidang	20			
	Serah Terima Kegiatan Pembangunan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Tersedianya Berita Acara Serah Terima Kegiatan dari Kepala daerah Kepala SKPD	20 Buku	
	Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Paser	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase jemaah haji yang diberangkatkan dan dilayani dengan baik	100	
	<b>Bagian Bina Ekonomi III</b>							
	<b>Program Koordinasi Bidang Perekonomian</b>	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah koordinasi Bidang Perekonomian,	16			
	Koordinasi Bidang Ekonomi (Bina Ekonomi III)	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti	3	
	Koordinasi Pengembalian Kredit Penguatan Modal Usaha (KPMU)	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Debitur yang tertagih	3 Bulan	
	<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</b>							
	Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Perencanaan proyek fisik pemerintahan yang diawasi dibawah koordinasi Bagian Pembangunan	100	
	<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</b>							
	<b>Program Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik</b>	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa secara	100			
	Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun	100	
	Operasional Sekretariat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Paser	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Persentase kegiatan operasional pengguna (user) terhadap LPSE	100	
	Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	4. Rutin	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			Persentase paket kegiatan yang dilelang secara elektronik	100	
	<b>Bagian Pemerintahan dan Humas</b>							
	<b>Program Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan</b>	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan yang dirumuskan	17			
	Penyusunan Produk Hukum tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah produk hukum tentang pedoman evaluasi Camat dan Lurah	1	
	Pengelolaan data dan analisa informasi	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Terlaksananya rumusan kebijakan pemerintah	optimal	
	Penyusunan naskah pidato dan sambutan Kepala Daerah	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Tersusunnya konsep pidato Kepala Daerah	1	
	Pelaksanaan Penerbitan Keterangan Pers (Pers Rilis)	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Terlaksananya keterangan pers (Pers Rilis) Kepala Daerah	1	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Fasilitasi Hak Jawab Bupati dan Pemerintah Daerah	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Terfasilitasinya hak jawab pemerintah daerah	1
	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Terpublikasinya kegiatan kepala daerah	1
	<b>Program Koordinasi Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Jumlah Koordinasi Bidang Administrasi Umum yang</b>	<b>12</b>			
	Pembakuan Nama Rupa Bumi Kabupaten Paser	4. Rutin	pelayanan publik				pembakuan nama rupa-rupa bumi	10
	<b>Program Pelayanan Administrasi Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan (kegiatan)</b>	<b>9</b>			
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar nasional	10
	Asistensi PATEN	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Optimalnya Petan Kecamatan Dalam Pelayanan Publik	100
	Penilaian Camat dan Kecamatan Berprestasi	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Camat dan Kecamatan yang dinilai	10
	Penilaian Lurah dan Kelurahan Berprestasi	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Lurah dan Kelurahan yang dinilai	5
	<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>dokumen perencanaan lainnya</b>	<b>antar daerah dan antar</b>	<b>10</b>			
	Pemekaran Kecamatan	4. Rutin	dokumen perencanaan lainnya				Paser	4
	Pemekaran Kabupaten	4. Rutin	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya				Persentase proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)	10
	Koordinasi Penetapan Batas Antar Daerah	4. Rutin	4.2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya				Persentase penetapan batas antar daerah	20
	<b>Bagian Hukum</b>							
	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan (Perda, Perbup, Intruksi, SK Bupati)</b>	<b>642</b>			
	Fasilitasi Penyelesaian Perkara	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Persentase kasus hukum Pemerintahan Kab. Paser yang ditangani	100
	Penyusunan Produk Hukum Daerah	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Raperda yang disampaikan ke DPRD	10
	Pengembangan Produk Hukum Daerah	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Peraturan Bupati yang ditetapkan	10
	Penyebaran Produk Hukum Daerah	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Persentase Produk Hukum yang disampaikan ke SKPD	100
	<b>Bagian Organisasi dan Kerjasama</b>							
	<b>Program Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan yang dirumuskan</b>	<b>17</b>			
	Review dan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pendatanganan Pakta Integritas	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Dokumen Pakta Integritas	1 dokumen
	Evaluasi dan Penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Draft Produk Hukum Perubahan Organisasi Perangkat Daerah	3 Perda
	Penyusunan Analisis Beban Kerja	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				jumlah analisis beban kerja	708 jabatan
	Penyusunan Analisis Jabatan Fungsional Umum	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				jumlah analisis jabatan fungsional umum	600 jabatan
	<b>Program Koordinasi Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Jumlah koordinasi bidang pemerintahan yang</b>	<b>8</b>			
	Koordinasi Kerjasama Antar Daerah	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah dokumen kesepakatan kerjasama (MoU)	3
	<b>Program Koordinasi Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Jumlah Koordinasi Bidang Administrasi Umum yang</b>	<b>12</b>			
	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	4. Rutin	pelayanan publik				Reformasi Birokrasi	1
	Rapat Kerja Bidang Ketatalaksanaan se-Kalimantan Timur	4. Rutin	pelayanan publik				dihadiri dan konsultasi dengan pihak	100%

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Koordinasi Bidang Perekonomian	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan & Kesra yang dilaksanakan	16		
	Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Ekonomi	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah dokumen kesepakatan kerjasama ekonomi (MoU)	3
	Program Pengembangan Standarisasi Pelayanan Publik (Ortal)	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase SKPD yang telah merumuskan dan	100		
	Fasilitasi Survei Kepuasan Masyarakat	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Dokumen survey kepuasan masyarakat	1 Dokumen
	Sosialisasi Pencanangan Tahun 2017 sebagai Tahun Pelayanan Publik Inovatif	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Tersedianya Proposal Inovasi Pelayanan Publik	1
	<b>Bagian Umum</b>							
	Program Pelayanan Administrasi Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah Pelayanan Administrasi Bidang Administrasi Umum yang	29		
	Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Persentase pemenuhan kegiatan dinas Bupati/Wakil Bupati	100%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Persentase pemenuhan jasa administrasi keuangan	100%
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Sekretariat Daerah	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				koordinasi dan konsultasi seluruh pejabat/pegawai di lingkungan	100%
	Ventikasi dan Administrasi Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Sekretariat Daerah yang diventikasi sesuai ketentuan pengelolaan	1500
	<b>Inspektorat</b>							
	<b>Inspektorat Kabupaten (A)</b>							
	Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2. Prioritas Pendukung I	4.3.3. Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat		Jumlah kasus korupsi yang telah diputus secara hukum	3		
	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN	2. Prioritas Pendukung I	4.3.3. Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat				Jumlah laporan kegiatan RAD-PPK, APH dan LHKASN	3 dokumen
	Penerapan Zona Integritas menuju WBK / WBM	2. Prioritas Pendukung I	4.3.3. Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat				Jumlah Perangkat daerah ditetapkan WBK/WBM	3 Perangkat Daerah
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah		Persentase kasus pengaduan/temuan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	65		
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Perangkat daerah yang diaudit berdasarkan PKPT	32 Laporan
	Penanganan Pengaduan Masyarakat	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani	12 Laporan
	Reviu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang di reviu berdasarkan PKPT	18 Perangkat Daerah
	Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Laporan Keuangan Pemda yang sesuai SAP	1 Dokumen
	Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				telah di evaluasi berdasarkan PKPT dengan hasil kategori	28 Perangkat Daerah
	Reviu SAKIP Pemerintah Daerah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Tenaksananya reviu SAKIP Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser	1 Dokumen
	Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Daerah	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Pembangunan dan Anggaran Daerah yang telah di reviu	3 Dokumen
	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu / Khusus	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu/Khusus	8 Laporan
	Monitoring secara berkala	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah Laporan Hasil Monitoring	12 Laporan
	Pemeriksaan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Daerah dan Pemerintahan Desa	12 Kegiatan
	Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti	65%
	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah				Jumlah data tindaklanjuti yang sudah dimutakhirkan	100%



Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Evaluasi Berkala Hasil Pemeriksaan	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah Ikhtisar Laporan APIP	6 Laporan	
	Pendataan dan Penyebaran Blanko LP2P	4. Rutin	4.3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			Jumlah PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu	80%	
<b>Kecamatan</b>								
<b>Kantor Camat Tanah Grogot (A)</b>								
	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	71			
	Koordinasi dan fasilitasi Paskibraka Kecamatan dan Kabupaten	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah peserta Paskibraka yang dilatih	17	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah qori dan qorih yang di TC	40	
	Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah safari Ramadhan/Syawal	2	
	Koordinasi Pembakuan Nama Rupa-Rupa Bumi	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah objek yang diinventarisir	10	
	Koordinasi dan Fasilitasi FKPMK1/FRDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah pembinaan FKPMK1/FRDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	16	
	Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah partisipasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	2	
	Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	43			
	Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase usulan yang diakomodir dalam anggaran daerah	65	
	Pelaksanaan 10 Program PKK	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Pembinaan PKK yang aktif	16	
	Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Posyandu	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Desa yang mengikuti lomba posyandu	15	
	Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan	19			
	Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah tenaga satpol PP	10	
	Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah kegiatan Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang terkoordinasikan dengan baik	20			
	Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah monitoring dan pengawasan dalam rangka penegakan Perda	25	
	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan	28			
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah RTS penerima Rastra	1727	
	Koordinasi dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah tingkatan Sekolah yang mengikuti Lomba UKS	4	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase desa yang menyusun dan melaporkan	75			
	Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Desa peserta lomba	15	
	Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah lomba TTG	15	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah dokumen data Aset Desa di wilayah Kecamatan Tanah Grogot	15	
	Koordinasi dan Monev ADD	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Monitoring dan evaluasi ADD	15	
	Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah verifikasi keuangan Desa yang dilaksanakan	15	
	Pembinaan dan Penguatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Desa peserta pelatihan/pembinaan Siskeudes	15	
	<b>Kantor Lurah Tanah Grogot</b>							
	<b>Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>43</b>			
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan/LPM	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Rt, Rw yang dibayar	85	
	Pemberdayaan Posyandu	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah posyandu yang aktif	28	
	Pelaksanaan 10 Program PKK	4. Rutin	pelayanan publik			Jumlah Pembinaan PKK yang aktif	16	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Rt/RW	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Rt/RW yang difasilitasi	85	
	Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kelurahan/Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			terselesaikannya masalah-masalah pembangunan di wilayah Kelurahan	5	
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Persentase desa yang menyusun dan melaporkan</b>	<b>75</b>			
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah profil Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang tersusun	Kecamatan, 15 Profil Desa dan 1 Profil	
	<b>Kantor Camat Pasir Belengkong (A)</b>							
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Jumlah kegiatan Penyelenggaraan</b>	<b>71</b>			
	Koordinasi dan Fasilitasi FKDM/FKMT	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Desa	3	
	Koordinasi Diseminasi Informasi Masyarakat	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah kegiatan rapat koordinasi tingkat kecamatan	4	
	Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Pelaksanaan Upacara	1	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Obyek tapal batas desa	10	
	Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Peserta TC MTQ	40	
	Koordinasi Pembakuan Rupa-rupa Bumi	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Desa	3	
	Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Kegiatan Safari	1	
	<b>Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>43</b>			
	Pelaksanaan 10 Program PKK	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Pelaksanaan Pembinaan 10 Program PKK	1	
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	1	
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terkoordinasikan dengan baik</b>	<b>19</b>			
	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah tenaga SatPol PP	10	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah kegiatan Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang terkoordinasikan dengan baik	20		
	Pengawasan dan Penegakan Perda	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Persentase Pelanggaran Perda yang terselesaikan	100
	Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Prasarana	32		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Sarana Persampahan	3
	Pengelolaan Pasar Perdesaan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Pasar Desa yang dikelola dengan baik	1
	Pemeliharaan RTH	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah obyek Taman / Median Jalan	1
	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan	28		
	Koordinasi dan Fasilitas Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)	2025
	Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Rasio usulan surat rekomendasi/perijinan yang terlayani	100
	Program Koordinasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	4. Rutin	pelayanan publik		menyusun dan melaporkan	75		
	Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah desa yang mengikuti lomba	15
	Koordinasi dan Monev ADD	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Desa	15
	Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah lomba Teknologi Tepat Guna (TTG)	1
	Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Desa	15
	Koordinasi dan Fasilitas Penyusunan Profile Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Dokumen Profile Kecamatan	1
	<b>Kantor Camat Kuaru (A)</b>							
	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	71		
	Koordinasi dan Fasilitas MTQ Tingkat Kabupaten	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten	1
	Koordinasi dan Fasilitas FKDM / FKPMKT	4. Rutin	pelayanan publik				Tingkat Desa	13
	Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Desa yang Terlaksana Kegiatan Desiminasi di tingkat kecamatan	4
	Koordinasi dan Fasilitas Paskibraka	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah kegiatan Upacara HUT Kemerdekaan RI	1
	Koordinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah kegiatan Inventarisir Obyek-Obyek Rupa Bumi di Kecamatan	5
	Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Desa yang mengikuti Saraf Ramadhan/ Syawal	13
	Koordinasi dan Fasilitas Penetapan Tapal Batas	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Fasilitas Penyesuaian Tapal Batas	4
	Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	43		
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan Tingkat Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Desa yang terlaksana Kegiatan Musrenbang	13
	Pelaksanaan 10 Program PKK	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah kegiatan pembinaan 10 program PKK	13
	Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan	19		

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Tenaga SATPOL. PP	10	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Mobil Damkar yang Memadai	1	
	<b>Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>20</b>	<b>Jumlah kegiatan Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang terkoordinasikan dengan baik</b>		
	Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Pengawasan dalam Rangka Penegakan Perda	5	
	<b>Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>32</b>	<b>Jumlah kegiatan Pemeliharaan Prasarana</b>		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Tempat Pengolahan Persampahan	5	
	Pemeliharaan RTH	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Taman dan Median Jalan yang Terpelihara	2	
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>28</b>	<b>Jumlah kegiatan Penyelenggaraan</b>		
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Beras Sejahtera	1219	
	Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu ( PATEN )	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Jenis Layanan yang dilayani	12	
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>75</b>	<b>Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa</b>		
	Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Desa yang dibina dan dinilai	13	
	Koordinasi dan Monev ADD	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Desa yang di monitoring dan evaluasi	13	
	Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Desa yang terverifikasi	13	
	Koordinasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Teknologi Tepat Guna ( TTG )	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Lomba Yang di Ikuti	1	
	<b>Kantor Lurah Kuaro</b>							
	<b>Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>43</b>	<b>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>		
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Insentif / Honor / Operasional RT dan LPM	100	
	Pemberdayaan Posyandu	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Desa yang terlaksana Lomba posyandu Tingkat kecamatan	100	
	Pelaksanaan 10 Program PKK	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Kegiatan Pembinaan 10 program PKK	100	
	<b>Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>pelayanan publik</b>		<b>32</b>	<b>Pemeliharaan Prasarana</b>		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Tempat Pengolahan persampahan	1	
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>75</b>	<b>Persentase desa yang menyusun dan melaporkan</b>		
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Dokumen Profil Kelurahan	1	
	<b>Kantor Camat Long Ikis (A)</b>							
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>71</b>	<b>Jumlah kegiatan Penyelenggaraan</b>		
	Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Patok Tapal Batas Desa	10	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Koordinasi dan Fasilitasi FKDM/FKPMKT	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Pembinaan FKDM/FKPMKT di tingkat Desa	5	
	Koordinasi Pembakuan Rupa-rupa Bumi	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Obyek Rupa rupa Bumi di Kecamatan	10	
	Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Kegiatan HUT Kemerdekaan RI	1	
	Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Peserta MTQ	40	
	Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	4. Rutin	pelayanan publik			Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan	5	
	<b>Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkoordinasikan dengan baik</b>		<b>43</b>	
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan	1	
	Koordinasi dan Fasilitasi Posyantek Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Pembinaan Posyantek	5	
	Pelaksanaan 10 Program PKK	4. Rutin	4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Pembinaan 10 Program PKK	26	
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>Jumlah kegiatan Penyelenggaraan</b>		<b>19</b>	
	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	4. Rutin	4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Tenaga Satpol PP Kecamatan	10	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	4. Rutin	4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Mobil PMK yang Dipelihara	2	
	<b>Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>Jumlah kegiatan Penerapan dan Penegakan Perda dan</b>		<b>20</b>	
	Pengawasan dan Penegakan Perda	4. Rutin	4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Obyek monitoring dan Pengawasan	2	
	<b>Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>Jumlah kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan</b>		<b>32</b>	
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan	60	
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>Jumlah kegiatan Penyelenggaraan</b>		<b>28</b>	
	Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	4. Rutin	4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Pelayanan IMB	42	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)	4. Rutin	4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah RTS	2397	
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>Persentase desa yang menyusun dan melaporkan</b>		<b>75</b>	
	Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Lomba Desa Tingkat Kecamatan	5	
	Koordinasi dan Movev ADD	4. Rutin	4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Kegiatan Movev ADD	25	
	Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Lomba TTG	1	
	Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Desa	25	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Koordinasi dan Fasilitasi Pemilihan Kades dan BPD Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Kegiatan Pemilihan Kades dan BPD Desa	5	
	<b>Kantor Lurah Long Ikis</b>							
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik</b>	<b>71</b>			
	Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Patok Tapal Batas Desa	10	
	<b>Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>43</b>			
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat /LPM	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah RT, RW, dan LPM	6	
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Kegiatan Musrenbang	1	
	Pelaksanaan 10 Program PKK	4. Rutin	pelayanan publik			Jumlah Pembinaan 10 Program PKK	26	
	<b>Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terkoordinasikan dengan</b>	<b>32</b>			
	Pemeliharaan Play ground	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Play Ground yang Dipelihara	1	
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa</b>	<b>75</b>			
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profile Kecamatan & Kelurahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Profile Kelurahan	10	
	<b>Kantor Camat Long Kali (A)</b>							
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik</b>	<b>71</b>			
	Koordinasi dan Fasilitasi FKDM/FKPMKT	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Pembinaan FKDM / FKPMKT di tingkat Desa/kelurahan	6	
	Koordinasi Pembakuan Rupa - Rupa Bumi	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah desa yang terinventaris nama dan rupa bumi tempat dan lokasinya.	3	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas Desa / Kelurahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah tasmisasi Penetapan tapal batas desa/kelurahan	2	
	Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka	4. Rutin	pelayanan publik			Jumlah Peserta Paskibraka Kecamatan	35	
	Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Peserta MTQ	55	
	Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Lokasi saran Ramadhan / Syawal	6	
	<b>Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkoordinasikan dengan baik</b>	<b>43</b>			
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat / LPM	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah LPM/RT/RW yang terbina	5	
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang	23	
	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Diseminasi informasi bagi Masyarakat Desa	23	
	Pemberdayaan Posyandu	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Posyandu yang terbina	5	
	Koordinasi dan Fasilitasi Posyantek Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah alat teknologi yang terbina	3	
	Pelaksanaan program 10 PKK	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Pembinaan 10 Program PKK	10	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terkoordinasikan dengan baik	19		
	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah tenaga satpol PP dan Linmas	10
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	1
	Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah kegiatan Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang terkoordinasikan dengan baik	20		
	Pengawasan dan Penegakan Perda	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Obyek Monitoring dan Pengawasan	4
	Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	32		
	Pemeliharaan RTH	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah RTH yang Terpelihara	10
	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan	28		
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah RTS beras sejahtera	2783
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	75		
	Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Desa yang mengikuti lomba tingkat kecamatan	4
	Koordinasi dan Monev ADD	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Persentase Monitoring Pelaksanaan Add	12
	Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Desa Peserta Lomba TTG	4
	Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan ADD	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				terverifikasi	22
	Kantor Lurah Long Kali							
	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan	71		
	Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas Desa / Kelurahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah fasilitasi Penetapan tapal batas desa/kelurahan	1
	Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	43		
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat / LPM	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah LPM/RT/RW yang terbina	13
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang	1
	Pemberdayaan Posyandu	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Posyandu yang terbina	1
	Pelaksanaan program 10 PKK	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Pembinaan 10 Program PKK	1
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase desa yang menyusun dan melaporkan	75		
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profile Kecamatan dan Kelurahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Dokumen Profile Kelurahan dan Kecamatan	10
	Kantor Camat Batu Sopang (A)							
	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan	71		
	Koordinasi Desiminasi Informasi Masyarakat	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Desa yang Terlaksana Kegiatan Desiminasi di tingkat kecamatan	9 Desa

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Paskibraka	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Teraksananya kegiatan upacara HUT kemerdekaan RI	1 Kegiatan	
	Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Katilah yang mengikuti TC dan Pengiriman Peserta MTQ	40 Orang	
	Koordinas Pembakuan Rupa-rupa Bumi	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			inventarisir obyek-obyek rupa-rupa bumi di Desa	9 Desa	
	Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Desa yang dikunjungi: safari Ramadhan / Syawal Kecamatan	9 Desa	
	Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkoordinasikan dengan baik	43			
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Desa yang terlaksana Kegiatan Musrenbang	9	
	Pelaksanaan 10 Program PKK	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			kegiatan pembinaan 10 program PKK	1 Kegiatan	
	Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan	19			
	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah tenaga PTT satpol PP	10 Orang	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah mobil damkar yang terpelihara	2 Unit	
	Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terkoordinasikan dengan	32			
	Pengelolaan Persampahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Operasional Tempat Pengelolaan Persampahan	12 Bulan	
	Pemeliharaan RTH	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Terpeliharanya RTH	12 Bulan	
	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan	28			
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah RTS yang Terdistribusi Beras sejahtera	552	
	Koordinasi dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			tingkat Kecamatan	1	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	75			
	Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Desa yang dibina dan dinilai	9 Desa	
	Koordinasi dan Monev ADD	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Terawasinya Pengelolaan Anggaran Dana Desa	9 Desa	
	Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Lomba yang Diikuti	1 Kegiatan	
	Kantor Camat Muara Komam (A)							
	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan	71			
	Koordinasi Dan Fasilitasi Pameran Pembangunan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			umlah Peserta Yang Mengikuti Pameran Pembangunan	5	
	Koordinasi Desiminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	4	
	Koordinasi Dan Fasilitasi LPTQ Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Qori Dan Qorih Yang Mengikuti TC	35	
	Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	12	
	Koordinasi Dan Fasilitasi FKDM / FKPMKT	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	1	
	Koordinasi Dan Fasilitasi Paskibraka	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Anggota Paskibraka	25	



Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	<b>Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</b>	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	43		
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	4. Rutin	pelayanan publik				Musrenbang	13
	Pemberdayaan Posyandu	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan	2
	Koordinasi Dan Fasilitasi Posyantek Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Desa Yang Memiliki Posyantek	3
	Pelaksanaan 10 Program PKK	4. Rutin	4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah PKK Desa Yang Aktif	13
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		<b>Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terkoordinasikan dengan baik</b>	19		
	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Tenaga Linmas Dan Satpol	11
	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Kendaraan Damkar	2
	<b>Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>	4. Rutin	4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik		<b>Jumlah kegiatan Penerapan dan Penegakan Perda dan</b>	<b>20</b>		
	Penyuluhan Dan Pencegahan Peredaran / Penggunaan MIRAS Dan Narkoba	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Penyuluhan Yang Dilaksanakan	2
	<b>Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	4. Rutin	4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik		<b>Jumlah kegiatan Pemeliharaan Prasarana</b>	<b>32</b>		
	Pemeliharaan RTH	4. Rutin	4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah RTH	1
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya</b>	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya yang terkoordinasikan dengan</b>	<b>28</b>		
	Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )	4. Rutin	4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik				umlah Pelayanan Yang Terrealisasikan	12
	Koordinasi Dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah ( UKS )	4. Rutin	4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan	5
	Koordinasi Dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera ( RASTRA )	4. Rutin	4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah RTS Yang Menerima Rastra	928
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		<b>Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa</b>	<b>75</b>		
	Koordinasi Dan Penyelenggaraan Lomba Desa	4. Rutin	4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Lomba Desa Yang Dilaksanakan	3
	Koordinasi Dan Penyelenggaraan TTG	4. Rutin	4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Lomba TTG	2
	Koordinasi Dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa Yang Dilaksanakan	12
	Koordinasi Dan Monev ADD	4. Rutin	4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Monev ADD	12
	<b>Kantor Lurah Muara Komam</b>							
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik</b>	<b>71</b>		
	Koordinasi Desiminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	4. Rutin	4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	1
	Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	1
	<b>Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</b>	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		<b>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkoordinasikan dengan baik</b>	<b>43</b>		
	Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat / LPM	4. Rutin	4.3.2. meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Honor RT, Rw Yang Dibayarkan	18

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Desa Yang Melaksanakan Musrenbang	12	
	Pemberdayaan Posyandu	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan	3	
	Pelaksanaan 10 Program PKK	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah PKK Desa Yang Aktif	13	
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Jumlah kegiatan Penyelenggaraan</b>	<b>28</b>			
	Koordinasi Dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera ( RASTRA )	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah RTS Yang Menerima Rastra	928	
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Persentase desa yang menyusun dan melaporkan</b>	<b>75</b>			
	Koordinasi Dan Penyelenggaraan Lomba Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Lomba Desa Yang Dilaksanakan	1	
	Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan Dan Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Profil Kecamatan Dan Kelurahan	10	
	<b>Kantor Camat Batu Engau (A)</b>							
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik</b>	<b>71</b>			
	FKDM/FKPMKT	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Pembinaan FKDM ditingkat Desa	3	
	Koordinasi Desiminasi Informasi Masyarakat	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Rapat-rapat Koordinasi di Tingkat Kecamatan	2	
	Paskibraka	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Upacara HUT Kemerdekaan RI	1	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Penyelesaian Tapal Batas Desa	1	
	Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			jumlah Kontingen MTQ kecamatan	40	
	Koordinasi Pembakuan Rupa-rupa Bumi	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Inventarisir Objek-objek rupa-rupa bumi diKecamatan (perdesa)	13	
	Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah kegiatan Satrah Ramadhan / Syawal	13	
	<b>Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkoordinasikan dengan baik</b>	<b>43</b>			
	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah peikasanaan musrenbang tingkat desa dan kecamatan	13	
	Koordinasi dan fasilitasi posyantek kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah pembinaan posyantek di masing-masing desa	13	
	Pelaksanaan 10 program PKK	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah pembinaan 10 program pkk	13	
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Jumlah kegiatan Penyelenggaraan</b>	<b>19</b>			
	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Tenaga SATPOL PP	10	
	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengamanan Dan Penyelenggaraan Kebakaran	4. Rutin	pelayanan publik			Jumlah mobil damkar yang memadai	1	
	<b>Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>dan Penegakan Perda dan Perkada yang terkoordinasikan dengan baik</b>	<b>20</b>			
	Pengawasan dan Penegakan Perda	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Monitoring dan Pengawasan dalam rangka penegakan perda	3	
	<b>Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Jumlah kegiatan Pemeliharaan Prasarana</b>	<b>32</b>			
	Pengelolaan Persampahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah penyediaan Sarana dan Prasarana Persampah	2	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Pengelolaan Pasar Pedesaan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Pasar Desa yang dikelola dengan baik	3	
	Pemeliharaan RTH	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Taman dan Median Jalan	1	
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>28</b>	<b>Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat</b>		
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah RTS penerima Beras Sejahtera	1169	
	Koordinasi dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah yang mengikuti lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan	10	
	Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Terpadu Kecamatan (Perzinan & Non Perzinan)	2	
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Persentase desa yang menyusun dan melaporkan</b>	<b>75</b>			
	Koordinasi dan penyelenggaraan lomba desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah desa yang mengikuti Lomba Desa di Tingkat Kecamatan	13	
	Koordinasi dan Monitoring evaluasi ADD	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah pelaksanaan Monitoring ADD	13	
	Koordinasi Dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah desa yang terverifikasi Pengelolaan Keuangan Desa	13	
	Koordinasi dan fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan/Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Tesedianya Profil Kecamatan	10	
	Koordinasi Dan Penyelenggaraan TTG	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah desa yang mengikuti Lomba TTG	13	
	<b>Kantor Camat Tanjung Harapan (A)</b>							
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik</b>	<b>71</b>			
	Koordinasi dan Fasilitasi FKDM / FKPMKT	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah desa dalam pembinaan FKDM/FKPMKT	7	
	Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI	1	
	Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah peserta yang mengikuti TC peserta MTQ	40	
	Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah desa yang mengikuti Saran Ramadhan	7	
	<b>Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>43</b>			
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Musenbang Desa dan Kecamatan	8	
	Pelaksanaan 10 Program PKK	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah desa dalam pembinaan 10 program PKK	7	
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Jumlah kegiatan Penyelenggaraan</b>	<b>19</b>			
	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Tenaga Satpol PP	10	
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Jumlah kegiatan Penyelenggaraan</b>	<b>28</b>			
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah RTS yang mendapatkan beras Sejahtera (rastra)	1313	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	75		
	Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat kecamatan	7
	Koordinasi dan Monev AD	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah desa yang dilakukan monev ADD	7
	Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah desa yang mengikuti lomba TTG	7
	Kantor Camat Muara Samu (A)							
	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Penyusunan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	71		
	Koordinasi dan Fasilitasi FKPMKT/FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah kegiatan Pembinaan FKDM di Tingkat Desa	3
	Koordinasi Dan Fasilitasi Paskibraka	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Kegiatan Upacara HUT Kemerdekaan RI yang terlaksana	1
	Koordinasi Dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Obyek tapal batas desa yang terfasilitasi	2
	Koordinasi Dan Fasilitasi LPTQ Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Jumlah Peserta TC LPTQ	20

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target
	Koordinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Desa yang terinventaris penamaan rupa-rupa buminya	9	
	Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Desa yang dikunjungi dalam kegiatan Safari Ramadan dan Safari Syawal	7	
	<b>Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>43</b>	<b>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkoordinasikan dengan baik</b>		
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Dokumen Usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Sosialisasi Pembangunan yang diusulkan	1	
	Pelaksanaan 10 Program PKK	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Kegiatan Program PKK yang terlaksana	1	
	Koordinasi dan Fasilitas Posyantek Kecamatan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Desa yang dibina	43	
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>19</b>	<b>Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terkoordinasikan dengan baik</b>		
	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah tenaga pengendali keamanan kecamatan yang tersedia	5	
	<b>Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>20</b>	<b>Jumlah kegiatan Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang terkoordinasikan dengan baik</b>		
	Pengawasan dan Penegakan Perda	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah kegiatan monitoring dan pengawasan dalam rangka penegakan Perda	3	
	<b>Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>32</b>	<b>Jumlah kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terkoordinasikan dengan baik</b>		
	Pengelolaan Persampahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Play Ground / Taman Bermain Anak yang terpelihara	1	
	Pengelolaan Pasar Perdesaan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Pasar Perdesaan yang dikelola dengan baik	1	
	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>28</b>	<b>Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya yang terkoordinasikan dengan baik</b>		
	Koordinasi Dan Fasilitas Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah RTS yang menerima Beras Sejahtera	450	
	Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Rasio pelayanan perizinan yang terlayani	100	
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	<b>4. Rutin</b>	<b>4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>		<b>75</b>	<b>Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa</b>		
	Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Kegiatan Lomba Desa tingkat Kecamatan yang terlaksana	1	
	Koordinasi dan Movev ADD	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah desa yang ADDnya terevaluasi sesuai ketentuan	9	
	Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	75	
	Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Desa yang terverifikasi pengelolaan keuangan desanya	9	
	Koordinasi dan Fasilitas Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	4. Rutin	4.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah buku/dokumen Profil Kecamatan	1	